



KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2021 - 2026



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH





SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa RPJMD Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1980);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
20. Bersifat Indikatif adalah data dan informasi baik yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, merupakan indikasi yang hendak dicapai .
21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD dan RKPD.
- (3) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - BAB I. PENDAHULUAN.
 - BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
 - BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.
 - BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB IX. PENUTUP.

- (4) Rincian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan dimaksud pada ayat (1) dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebijakan perencanaan RPJMD;
 - pelaksanaan RPJMD; dan
 - hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan

- rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar (seperti terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional).

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5**

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan terhadap indikator, sasaran dan program dalam RPJMD tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat Penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 10 Desember 2021
BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 10 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
TTD
FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 9



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
• SEKRETARIAT DAERAH
MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 12/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 - 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran mulai Tahun 2022-2026. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian dan evaluasi” merupakan pengendalian dan evaluasi khusus pada proses dalam rangka menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 66

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Grafik.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I - 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I - 8
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I - 10
1.4.1. Maksud.....	I - 10
1.4.2. Tujuan.....	I - 11
1.5. Sistematika Penulisan.....	I - 12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II - 1
2.1. Aspek Geografi.....	II - 1
2.1.1. Karakter Lokasi dan Wilayah.....	II - 1
2.1.1.1. Luas Wilayah.....	II - 1
2.1.1.2. Batas Wilayah Administrasi.....	II - 2
2.1.1.3. Letak Dan Kondisi Geografis.....	II - 3
2.1.1.4. Topografi.....	II - 3
2.1.1.5. Geologi.....	II - 4
2.1.1.6. Hidrologi.....	II - 4
2.1.1.7. Klimatologi.....	II - 4
2.1.1.8. Penggunaan Lahan.....	II - 6
2.1.2. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah.....	II - 8
2.1.3. Demografi.....	II - 14
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 16
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II - 16
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB.....	II - 16
2.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II - 20
2.2.1.3. PDRB Per Kapita.....	II - 25
2.2.1.4. Ketimpangan Pendapatan.....	II - 27
2.2.2. Kesejahteraan Sosial.....	II - 28
2.2.2.1. Pendidikan.....	II - 28
2.2.2.1.1. Angka Melek Huruf (AMH).....	II - 28
2.2.2.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).....	II - 29
2.2.2.1.3. Angka Harapan Lama sekolah (HLS).....	II - 30
2.2.2.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM).....	II - 30
2.2.2.1.5. Angka Partisipasi Kasar (APK).....	II - 31
2.2.2.1.6. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT).....	II - 31
2.2.2.1.7. Ketersediaan Sekolah, Guru dan Murid.....	II - 32
2.2.2.2. Kesehatan.....	II - 33
2.2.2.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB).....	II - 33
2.2.2.2.2. Angka Kematian Ibu (AKI).....	II - 34
2.2.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup.....	II - 34
2.2.2.2.4. Balita Gizi Buruk.....	II - 35
2.2.2.3. Kemiskinan.....	II - 36



2.2.2.4.	Kesempatan Kerja.....	II – 37
2.2.2.5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II – 38
2.2.3.	Seni Budaya dan Olahraga.....	II – 39
2.3.	Aspek Pelayanan Umum.....	II – 41
2.3.1.	Layanan Urusan Wajib.....	II – 41
	2.3.1.1. Pendidikan.....	II – 41
	2.3.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah.....	II – 41
	2.3.1.1.2. Angka Putus Sekolah.....	II – 42
	2.3.1.2. Kesehatan.....	II – 43
	2.3.1.3. Pekerjaan Umum.....	II – 44
	2.3.1.4. Perumahan Dan Permukiman.....	II – 49
	2.3.1.5. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II – 49
	2.3.1.6. Sosial.....	II – 50
	2.3.1.7. Tenaga Kerja.....	II – 53
	2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II – 55
	2.3.1.9. Pangan.....	II – 59
	2.3.1.10. Pertanahan.....	II – 60
	2.3.1.11. Lingkungan Hidup.....	II – 61
	2.3.1.12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II – 61
	2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	II – 62
	2.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II – 63
	2.3.1.15. Perhubungan.....	II – 65
	2.3.1.16. Komunikasi Dan Informasi.....	II – 66
	2.3.1.17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).....	II – 67
	2.3.1.18. Penanaman Modal.....	II – 72
	2.3.1.19. Pemuda Dan Olahraga.....	II – 73
	2.3.1.20. Statistik.....	II – 75
	2.3.1.21. Persandian.....	II – 75
	2.3.1.22. Kebudayaan.....	II – 75
	2.3.1.23. Perpustakaan.....	II – 86
	2.3.1.24. Kearsipan.....	II – 87
2.3.2.	Layanan Urusan Pilihan.....	II – 87
	2.3.2.1. Kelautan Dan Perikanan.....	II – 87
	2.3.2.2. Pertanian. Perkebunan dan Peternakan.....	II – 90
	2.3.2.3. Kehutanan.....	II – 92
	2.3.2.4. Pariwisata.....	II – 92
	2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral.....	II – 95
	2.3.2.6. Perdagangan.....	II – 96
	2.3.2.7. Perindustrian.....	II – 100
	2.3.2.8. Transmigrasi.....	II – 104
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah.....	II – 105
2.4.1.	Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II – 105
2.4.2.	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II – 106
	2.4.2.1. Aksesibilitas Daerah.....	II – 106
	2.4.2.2. Fasilitas Bank dan Non Bank.....	II – 107
	2.4.2.3. Ketersediaan Air Bersih.....	II – 110
	2.4.2.4. Fasilitas Listrik.....	II – 111
	2.4.2.5. Ketersediaan Restoran.....	II – 111
	2.4.2.6. Ketersediaan Penginapan.....	II – 112
2.4.3.	Iklim Berinvestasi.....	II – 113
	2.4.3.1. Keamanan dan Ketertiban.....	II – 113
	2.4.3.2. Kemudahan Perizinan.....	II – 115



	2.4.4. Sumber Daya Manusia.....	II – 116
BAB III	GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH.....	III – 1
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III – 2
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III – 2
3.1.2.	Neraca Daerah.....	III – 6
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.....	III – 13
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III – 15
3.2.1.1.	Pendapatan Daerah.....	III – 15
3.2.1.2.	Belanja Daerah.....	III – 17
3.2.2.	Analisis Pembiayaan Daerah.....	III – 18
3.3.	Kerangka Pendanaan.....	III – 23
3.3.1.	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama.....	III – 23
3.3.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	III – 25
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV – 1
4.1.	Telaah Kebijakan Internasional (SDG's).....	IV – 1
4.2.	Telaah Kebijakan Nasional (RPJMN)	IV – 3
4.3.	Telaah Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Kalimantan Barat)	IV – 5
4.4.	Telaah Kebijakan Kabupaten Sambas	IV – 7
4.4.1	Telaah RPJPD Kabupaten Sambas	IV – 9
4.4.2	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035	IV – 12
4.4.3	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sambas 2021-2026	IV – 14
4.4.4	Telaah Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal	IV – 17
4.5.	Telaah Dampak Pandemi Cvid-19 Terhadap Ekonomi dan Sosial	IV – 20
4.6.	Permasalahan Pembangunan	IV – 22
4.7.	Isu-Isu Straegis	IV – 54
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V – 1
5.1.	Visi.....	V – 1
5.2.	Misi.....	V – 3
5.3.	Tujuan dan Sasaran.....	V – 6
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN.....	VI – 1
6.1.	Strategi Pembangunan Daerah	VI – 1
6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI – 2
6.3.	Program Pembangunan Daerah	VI – 3
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII – 1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VIII – 1
8.1.	Indikator Kinerja Utama Daerah.....	VIII – 1
8.2.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	VIII – 1
BAB IX	PENUTUP.....	IX – 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2021.....	II – 2
Tabel 2.2.	Tingkat Kemiringan Tanah Kabupaten Sambas.....	II – 4
Tabel 2.3.	Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2020.....	II – 5
Tabel 2.4.	Kecepatan Angin, Temperatur Udara dan Kelembaban Udara Tahun 2020.....	II – 6
Tabel 2.5.	Kawasan Lindung Nasional di Kabupaten Sambas.....	II – 7
Tabel 2.6.	Peruntukan Lahan di Kabupaten Sambas	II – 8
Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk, Sex Ratio, Kepadatan Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan Tahun 2010 – 2020.....	II – 15
Tabel 2.8.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sambas Menurut Sektor ADHK 2010 (%) Tahun 2016-2020	II – 18
Tabel 2.9.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat (%) Tahun 2016-2020.....	II – 20
Tabel 2.10.	PDRB Kabupaten Sambas ADHK 2010 Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	II – 21
Tabel 2.11.	PDRB Kabupaten Sambas ADHB Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	II – 22
Tabel 2.12.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sambas ADHB Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha (%).	II – 23
Tabel 2.13.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020 (Juta Rp).....	II – 24
Tabel 2.14.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020 (Persen)	II – 24
Tabel 2.15.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020 (Juta Rp)	II – 25
Tabel 2.16.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2020	II – 26
Tabel 2.17.	Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2020.....	II – 30
Tabel 2.18.	Harapan Lama Sekolah Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2020.....	II – 30
Tabel 2.19.	Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2020	II – 33



Tabel 2.20.	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020	II – 34
Tabel 2.21.	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020	II – 34
Tabel 2.22.	Usia Harapan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2020	II – 35
Tabel 2.23.	Kasus Gizi Buruk Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2020	II – 35
Tabel 2.24.	Statistik Kemiskinan Kabupaten Sambas, 2016-2020	II – 37
Tabel 2.25.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan di Kabupaten Sambas Tahun 2015-2020	II – 38
Tabel 2.26.	Perkembangan IPM Kabupaten Sambas dan Indikatornya Tahun 2016 – 2020	II – 39
Tabel 2.27.	Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Sambas Tahun 2017-2020	II – 40
Tabel 2.28.	Prasarana Olahraga di Kabupaten Sambas	II – 40
Tabel 2.29.	Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Sambas	II – 41
Tabel 2.30.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2020	II – 42
Tabel 2.31.	Angka Putus Sekolah	II – 42
Tabel 2.32.	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020.....	II – 43
Tabel 2.33.	Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020	II – 44
Tabel 2.34.	Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Jenis Permukaan (Kilometer)	II – 44
Tabel 2.35.	Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Kondisi Jalan, 2016-2020 (Kilometer)	II – 45
Tabel 2.36.	Panjang Jalan Dalam Status Pengawasan Jalan Desa di Kabupaten Sambas Berdasarkan Jenis Permukaan, 2016-2020 (Kilometer)	II – 46
Tabel 2.37.	Panjang Jalan Dalam Status Pengawasan Jalan Desa di Kabupaten Sambas Menurut Kondisi Jalan, Tahun 2016-2020 (Kilometer)	II – 47
Tabel 2.38.	Jumlah Jembatan (Unit) Berdasarkan Kondisi dan Administrasi	II – 48
Tabel 2.39.	Kondisi Infrastruktur Pengairan Tahun 2020	II – 48
Tabel 2.40.	Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi Tahun 2016 – 2020	II – 49
Tabel 2.41.	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum Tahun 2016-2020	II – 50
Tabel 2.42.	Jumlah Kejadian Kebakaran Tahun 2016-2020	II – 50
Tabel 2.43.	Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sambas Tahun 2018-2020.....	II – 51



Tabel 2.44.	Penerimaan dan Penyaluran Zakat Fitrah, Mal dan Infaq di Kabupaten Sambas Tahun 2017 - 2020.....	II – 52
Tabel 2.45.	Jumlah Rumah Ibadah per Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2020.....	II – 52
Tabel 2.46.	Jumlah Pemeluk Agama per Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2020	II – 52
Tabel 2.47.	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan TPT dan TPAK Kabupaten Sambas Tahun 2015 – 2020.....	II – 54
Tabel 2.48.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kab. Sambas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 - 2020.....	II – 56
Tabel 2.49.	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sambas Tahun 2017- 2020.....	II – 57
Tabel 2.50.	Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016 - 2020.....	II – 57
Tabel 2.51.	Data Pola Pangan Harapan di Kabupaten Sambas dari Tahun 2016- 2020.....	II – 58
Tabel 2.52.	Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein di Kabupaten Sambas.....	II – 58
Tabel 2.53.	Konsumsi Penduduk Terhadap Bahan Pangan di Kabupaten Sambas	II – 59
Tabel 2.54.	Pertanahan di Kabupaten Sambas Tahun 2016- 2020.....	II – 60
Tabel 2.55.	Produksi Sampah di Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2020.....	II – 61
Tabel 2.56.	Kepemilikan KTP, Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga di Kabupaten Sambas Tahun 2017 – 2020	II – 62
Tabel 2.57.	Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020	II – 63
Tabel 2.58.	Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2020....	II – 65
Tabel 2.59.	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2020.....	II – 66
Tabel 2.60.	Perkembangan Koperasi Dirinci Menurut Indikator Pokok di Kabupaten Sambas, Tahun 2020..	II – 67
Tabel 2.61.	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi per Kecamatan di Kabupaten Sambas, Tahun 2020..	II – 69
Tabel 2.62.	Persebaran Koperasi Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Kegiatan Usaha di Kabupaten Sambas, Tahun 2020.....	II – 70
Tabel 2.63.	Jumlah UMKM Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Sambas, Tahun 2020.....	II - 70
Tabel 2.64.	Perkembangan Bidang Usaha UMKM di Kabupaten Sambas Tahun 2017 – 2020.....	II – 71
Tabel 2.65.	Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sambas, Tahun 2016 - 2020.....	II – 72



Tabel 2.66.	Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan	II – 74
Tabel 2.67.	Jumlah Prasarana Olahraga di Kabupaten Sambas.....	II – 74
Tabel 2.68.	Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten di Kabupaten Sambas Tahun 2015 – 2020.....	II – 75
Tabel 2.69.	Jumlah Prasarana Kebudayaan di Kabupaten Sambas Tahun 2017 - 2020.....	II – 76
Tabel 2.70.	Potensi Budaya per Kecamatan di Kabupaten Sambas	II – 78
Tabel 2.71.	Jumlah Perpustakaan, pengunjung Perpustakaan, Anggota Perpustakaan, dan Koleksi Buku di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020.....	II – 86
Tabel 2.72.	Produksi (Ton) Perikanan di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020.....	II – 88
Tabel 2.73.	Nilai Produksi Perikanan Laut Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2020.....	II – 89
Tabel 2.74.	Produksi Perikanan Perairan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2020.....	II – 89
Tabel 2.75.	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2020.....	II - 90
Tabel 2.76.	Produksi (Ton) Tanaman Pangan di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2019.....	II – 90
Tabel 2.77.	Produksi(Ton) Tanaman Perkebunan Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2020.....	II – 90
Tabel 2.78.	Perkembangan Populasi (Ekor) ternak Unggas di Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2020.....	II – 91
Tabel 2.79.	Populasi (Ekor) Ternak Besar dan Kecil Berdasarkan Jenis Ternak di Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2020.....	II – 91
Tabel 2.80.	Luas Kawasan Hutan (Ha) di Kabupaten Sambas Tahun 2018.....	II – 92
Tabel 2.81.	Daftar Objek Wisata di Kabupaten Sambas	II – 92
Tabel 2.82.	Listrik di Kabupaten Sambas	II – 96
Tabel 2.83.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020.....	II – 97
Tabel 2.84.	Perkembangan Prasarana Perdagangan (Unit) di Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2020.....	II – 98
Tabel 2.85.	Banyaknya Pengeluaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Sambas Tahun 2019 dan 2020.....	II – 99
Tabel 2.86.	Perkembangan Bongkar Muat (Ton) Melalui Pelabuhan di Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2020.....	II – 99
Tabel 2.87.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB di Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2020.....	II – 100
Tabel 2.88.	Jumlah Usaha Industri kecil Formal Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2020.....	II – 102



Tabel 2.89.	Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sambas, Tahun 2017 – 2020.	II – 102
Tabel 2.90.	Jenis Industri Sedang di Kabupaten Sambas Tahun 2020.....	II – 103
Tabel 2.91.	Jenis Indsutri Besar di Kabupaten Sambas Tahun 2020.....	II - 103
Tabel 2.92.	Angkutan Darat Tahun 2017 – 2020.....	II – 106
Tabel 2.93.	Angkutan Udara di Kabupaten Sambas	II – 107
Tabel 2.94.	Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga di Kabupaten Sambas Tahun 2017- 2020...	II – 108
Tabel 2.95.	Perkembangan Penyaluran Kredit Perbankan di Kabupaten Sambas Tahun 2017-2020.....	II – 108
Tabel 2.96.	Penyaluran KUR Wilayah Kalimantan Barat.....	II – 109
Tabel 2.97.	Jumlah Air Minum Yang Terjual dan Nilai Penjualan di Kabupaten Sambas	II – 110
Tabel 2.98.	Kondisi Kelistrikan di Kabupaten Sambas Tahun 2018-2020.....	II – 111
Tabel 2.99.	Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Sambas Tahun 2018-2020.....	II – 111
Tabel 2.100.	Jumlah Penginapan dan Jumlah Kamar di Kabupaten Sambas Pada Tahun 2018-2020.....	II – 112
Tabel 2.101.	Persentase Hunian Kamar, Tempat Tidur, Tamu per Kamar, Tamu Asing, dan Tamu Domestik per Bulan Pada Tahun 2020 di Kabupeten Sambas.....	II – 113
Tabel 2.102.	Jenis Kejahatan atau Pelanggaran di Kabupaten Sambas Pada Tahun 2020.....	II – 114
Tabel 2.103.	Jumlah dan Lama Perizinan di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020.....	II – 116
Tabel 2.104.	Struktur Penduduk dan Depency Ratio Kabupaten Sambas Tahun 2010 dan 2020.....	II – 117
Tabel 2.105.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sambas	II – 118
Tabel 3.1.	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2016 – 2020.....	III – 4
Tabel 3.2.	Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas, Tahun 2016 – 2020.....	III – 6
Tabel 3.3.	Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2016 – 2020.....	III – 8
Tabel 3.4.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2016 - 2020.....	III – 16
Tabel 3.5.	Analisis Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Sambas, Tahun 2016 – 2020.....	III – 17
Tabel 3.6.	Analisis Proporsi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Sambas, Tahun 2016 – 2020.....	III – 18
Tabel 3.7.	Analisis Proporsi Belanja Modal Kabupaten Sambas, Tahun 2016 – 2020.....	III – 18



Tabel 3.8.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2016 - 2020.....	III – 20
Tabel 3.9.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2016 - 2020.....	III – 22
Tabel 3.10.	Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Sambas, Tahun 2016 – 2020.....	III – 24
Tabel 3.11.	Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2021 - 2026.....	III – 26
Tabel 3.12.	Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2021 - 2026.....	III – 29
Tabel 3.13.	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Sambas, Tahun 2021 - 2026.....	III – 30
Tabel 3.14.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2021 - 2026.....	III – 32
Tabel 4.1.	Perbandingan Capaian Target SDGs Indnesia dan ASEAN.....	IV – 3
Tabel 5.1.	Keselarasan antara Misi RPJMN dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Sambas	V – 4
Tabel 6.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026...	VI – 1
Tabel 6.2.	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026.....	VI – 2
Tabel 6.3.	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026.....	VI - 7
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Belanja Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Sambas ..	VII – 2
Tabel 8.1.	Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021 – 2026.....	VIII – 1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	VIII – 2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I – 10
Gambar 2.1.	Peta Kabupaten Sambas.....	II – 1



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%) Tahun 2016-2020.....	II – 18
Grafik 2.2.	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 - 2020.....	II – 27
Grafik 2.3.	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten Sambas Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2016 – 2020.....	II – 45
Grafik 2.4.	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten Sambas Berdasarkan Kondisi Jalan Tahun 2016 – 2020.....	II – 46
Grafik 2.5.	Prosentase Panjang Jalan Desa di Kabupaten Sambas Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2016 – 2020.....	II – 47
Grafik 2.6.	Prosentase Panjang Jalan Desa di Kabupaten Sambas Berdasarkan Kondisi Jalan Tahun 2016 – 2020.....	II - 48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (1) dan ayat (3), maka pemerintah Kabupaten Sambas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang merupakan pelaksanaan periode lima tahunan keempat dari RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 dengan visi jangka panjang “**Sambas terunggul di Kalimantan Barat Tahun 2025**”.

Merujuk kepada peraturan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2020 dan telah dilantik pada tanggal 14 Juni 2021 oleh Gubernur Kalimantan Barat di Balai Petith Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Dengan demikian RPJMD ini merupakan dokumen formal yang menunjukkan bagaimana pemerintah Kabupaten Sambas merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan pasangan H. Satono, S.Sos.I., M.H dan Fahrur Rofi, S.I.P., M.H.Sc kepada publik sebelum pemilihan bupati.

Melalui RPJMD ini, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas akan lebih terarah

dan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026. Untuk itu, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di daerah seperti RTRW dan RPJPD, juga dengan dokumen perencanaan pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMN tahun 2020-2024. Penyusunan semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berbagai program itu diupayakan bisa saling mendukung dan terhindar dari tumpang tindih. Pada akhirnya, berbagai program pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat mempercepat **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju, dan Berkelanjutan.**

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 ini didasarkan pada perangkat hukum (dokumen-dokumen) yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
27. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

- Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61 - 293 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat;
 39. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 1-32/2021);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan aspek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

(1) RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sambas

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD Keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Sambas masa bakti tahun 2021-2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025.

(2) RPJMD dan RTRW Kabupaten Sambas

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sambas sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sambas.

(3) RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

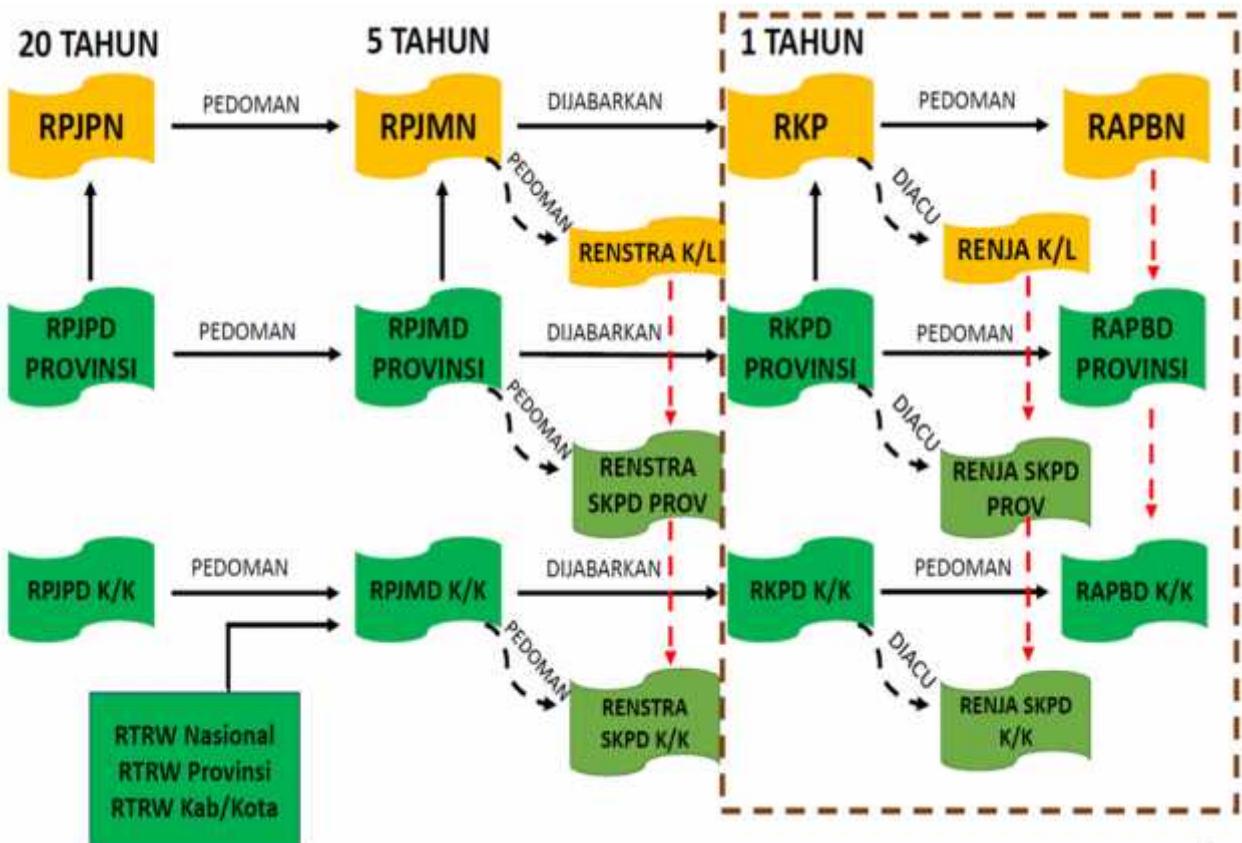
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sambas.

(4) RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sambas yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. RKPD merupakan pokok bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sambas yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Sambas dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sambas.

RPJMD Kabupaten Sambas juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Sambas dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus

merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sambas secara berjenjang.

1.4.2.Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- (1) Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Sambas ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
- (2) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Sambas, APBD Kalimantan Barat, APBN, dan sumber dana lainnya;
- (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dengan Pemerintah Provinsi, dan dengan Pemerintah Pusat;
- (4) Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- (5) Menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- (6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab: Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya; Sistematika Penulisan Dokumen; dan Maksud dan Tujuan.
- II. Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini terdiri dari sub bab Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Pelayanan Umum; dan Aspek Daya Saing Daerah.
- III. Gambaran Keuangan Daerah. Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan dalam tahap perumusan ke dalam sub bab Kinerja Keuangan Masa Lalu; Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu; dan Kerangka Pendanaan.
- IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah. Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan dinamika kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Kabupaten Sambas.
- V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisikan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang didasarkan pada visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan jangka waktunya.
- VI. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah. Pada bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih serta program pembangunan daerah untuk mencapai arah kebijakan tersebut.

- VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah. Dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintahan dengan PD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab PD dan kerangka pendanaannya.
- VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam bab ini disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
- IX. Penutup. Pada bab ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sambas agar proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga visi RPJMD dapat terwujud. Juga dinyatakan bahwa untuk menjabarkan RPJMD Tahun 2021-2026, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas setiap tahunnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi

2.1.1. Karakter Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sambas adalah 6.395,70 km² atau sekitar 4,26% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai Kabupaten Sambas adalah 198,76 km dengan panjang perbatasan negara ± 97 km, dan perairan laut seluas 1.467,84 km². Karakteristik sebagian besar lahan perairan adalah pantai berpasir membentang dari Semelagi Besar (Kec. Selakau) hingga Tanjung Datok (Kec. Paloh). Menurut hasil pengukuran dari Lapan pada tahun 2003, panjang pantai di masing-masing kecamatan adalah Kecamatan Selakau (13,51 km), Kecamatan Pemangkat (20,49 km), Kecamatan Jawai (42,53 km), Kecamatan Teluk Keramat (19,67 km), Kecamatan Paloh (102,56 km). Gambar 2.1 menunjukkan peta Kabupaten Sambas berdasarkan pada Perda Kab. Sambas No. 17 tahun 2015 tentang RTRW Kab. Sambas Tahun 2015 – 2035.

Gambar 2.1.
Peta Kabupaten Sambas



Jika dibagi ke dalam luas masing-masing kecamatan, kecamatan terluas adalah Kecamatan Sajingan Besar dengan luas 1.391,20 km² atau 21,75 persen, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Salatiga dengan luas sebesar 82,75

km² atau 1,29 persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah per Kecamatan
di Kabupaten Sambas

Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
	km²	%	
Selakau	129,51	2,02	11
Selakau Timur	162,99	2,55	4
Pemangkat	111,00	1,74	8
Semparuk	90,15	1,41	5
Salatiga	82,75	1,29	5
Tebas	395,64	6,19	23
Tekarang	83,16	1,30	7
Sambas	246,66	3,86	18
Subah	644,55	10,08	11
Sebawi	161,45	2,52	7
Sajad	94,94	1,48	4
Jawai	193,99	3,03	13
Jawai Selatan	93,51	1,46	9
Teluk Keramat	554,43	8,67	25
Galing	333,00	5,21	10
Tangaran	186,67	2,92	8
Sejangkung	291,26	4,55	12
Sajingan Besar	1391,20	21,75	5
Paloh	1148,84	17,96	8
Kab. Sambas	6395,70	100,0	193

Sumber: BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2021

2.1.1.2. Batas Wilayah Administrasi

Secara administratif, Kabupaten Sambas khususnya sebelah utara dan timur berbatasan dengan salah satu negara tetangga, yaitu Serawak, Malaysia Timur. Pada bulan Maret 2017, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Berikut batas-batas wilayah Kabupaten Sambas, yaitu:

- Utara : Serawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna
- Selatan : Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang
- Barat : Laut Natuna
- Timur : Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Bengkayang

2.1.1.3. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Sambas terletak diantara $0^{\circ}57'29,8''$ dan $2^{\circ}04'53,1''$ Lintang Utara serta $108^{\circ}54'17,0''$ dan $109^{\circ}45'7,56''$ Bujur Timur. Kabupaten Sambas mempunyai ketinggian diantara 0 – 1.500 mdpl. Di samping aspek ketinggian, aspek kemiringan lereng juga menjadi pertimbangan dalam analisis. Kemiringan lereng suatu wilayah sendiri di satu sisi dapat menjadi faktor penghambat dalam pengembangan dan pembangunan wilayah tersebut, namun di sisi lain juga dapat menjadi faktor yang mendukung. Keberadaan topografi sebagai penunjang atau penghambat tersebut dapat terlihat dari klasifikasi kemiringan lereng yang dijadikan acuan dalam pembangunan suatu wilayah.

Sedangkan kondisi kemiringan lereng Kabupaten Sambas sebagian besar yaitu datar dengan kemiringan <8 dan 8-15 persen. Adapun luasan dari kelas lereng tersebut adalah sebesar <8% 551.122,37 Ha atau 92,62 persen dan 8-15 % 22.062,41 Ha atau 3,71 persen dari total wilayah Kabupaten Sambas. Dengan kondisi tanah yang datar, wilayah ini sangat cocok dikelola menjadi kawasan pertanian. Permukiman yang rentan terhadap bencana yang dipengaruhi oleh kondisi kemiringan lereng berada di lokasi dengan kelerengan 25 - 40 persen, ke depan masyarakat harus diberikan pemahaman terkait dengan bencana topografi yang suatu waktu dapat terjadi.

Dilihat dari tekstur tanahnya maka sebagian besar daerah Kabupaten Sambas terdiri dari tanah alluvial yang meliputi areal sebesar 230,630 ribu hektar atau sekitar 36,06 persen dari luas daerah yang 0,64 juta hektar. Selanjutnya tanah Podsolik Merah Kuning sekitar 157,32 ribu hektar atau 24,60 persen yang terhampar hampir di seluruh kecamatan.

2.1.1.4. Topografi

Berdasarkan topografinya sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas relatif datar dengan kelerengan 0-15% seluas 468.196 ha atau 67,59%, wilayah dengan kelerengan 15-40% seluas 160.396 ha atau 25,08% dan wilayah kelas lereng > 40% seluas 67,59 ha atau 7,3%. Ketinggian wilayah kecamatan cukup beragam mulai dari yang terendah dengan ketinggian 0-7 mdpl ada di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Jawai, Paloh dan Teluk Keramat, ketinggian 8-25 mdpl berada di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat dan Teluk Keramat dan ketinggian 26-100 mdpl ada di

Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat, Teluk Keramat dan Paloh. Tabel 2.2 menunjukkan tingkat kemiringan tanah di Kabupaten Sambas.

Tabel 2. 2

Tingkat Kemiringan Tanah Kabupaten Sambas

No.	Kemiringan Tanah (%)	Luas (ha)	Persentase (%)
1	0 – 15	468.196	67,59
2	15 – 40	160.396	25,08
3	> 40	67,590	7,33

Sumber: Profil Kabupaten Sambas, Tahun 2020

2.1.1.5. Geologi

Dilihat dari tekstur tanahnya, maka sebagian besar daerah Kabupaten Sambas terdiri dari tanah aluvial yang meliputi areal sebesar 230,63 ribu hektar atau sekitar 36,06 persen dari luas daerah yang 0,64 juta hektar dan selanjutnya tanah podsolid merah kuning sekitar 157,32 ribu hektar atau 24,60 persen yang terhampar hampir di seluruh kecamatan.

2.1.1.6. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Sambas terdapat 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas hamparan mencapai 516.200 ha atau 80,71% dari luas wilayah kabupaten yang terdiri dari DAS Paloh (64,375 ha), DAS Sambas (245.700 ha) yang meliputi Sungai Sambas, Sambas Kecil, Sungai Kumba Sajingan Besar serta DAS Sebangkau (193,125 ha) yang meliputi Sungai Sebangkau dan Selakau.

2.1.1.7. Klimatologi

Berdasarkan data di Stasiun Meteorologi Paloh, pada tahun 2020, total curah hujan di Kabupaten Sambas mencapai 3417 mm dengan curah hujan terbesar terjadi pada bulan Juli yaitu 573 mm dengan jumlah hari hujan 23 hari. Sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan Maret yaitu 91 mm, dengan jumlah hari hujan 6 hari. Intensitas curah hujan ini termasuk tinggi dan tidak ditemukan bulan kering sepanjang tahun. Pada tahun 2020 ini data curah hujan terjadi penyimpangan yaitu pada bulan Juli seharusnya curah hujan lebih rendah dibandingkan bulan September, Oktober, Nopember dan Desember. Dibandingkan jumlah curah hujan tahun-tahun sebelumnya, curah hujan tahun

ini lebih tinggi. Data jumlah curah hujan dan hari hujan pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3

Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2020

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	387	17	38
Februari	144	14	48
Maret	91	10	52
April	243	16	59
Mei	249	15	57
Juni	174	16	48
Juli	573	23	49
Agustus	233	14	62
September	369	26	40
Oktober	243	16	55
November	402	23	37
Desember	309	23	39

Sumber: BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2021

Dari data Stasiun Meteorologi Paloh diketahui bahwa pada tahun 2020 rata-rata lama penyinaran matahari sebesar 49% dengan penyinaran tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu 62%, sedangkan lama penyinaran matahari terendah terjadi pada bulan Nopember yaitu 37%. Sedikitnya penyinaran matahari ini berkaitan dengan tingginya curah hujan dan banyaknya hari hujan sepanjang tahun. Data penyinaran matahari pada tahun 2020 dapat dilihat juga pada Tabel 2.5.

Pada tahun 2020, rata-rata kecepatan angin di Kabupaten Sambas yaitu 8 knot/jam dengan kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 19 knot/jam. Kecepatan angin rata-rata bulanan terendah terjadi pada bulan Mei dan Juli yaitu 5 knot/jam, sedangkan rata-rata kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Pebruari, Oktober dan Desember sebesar 10 knot/jam. Rata-rata kecepatan angin per bulan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Rata-rata temperatur udara tahun 2020 di Kabupaten Sambas setiap bulan berkisar antara 26,3°C sampai dengan 28,0°C. Temperatur udara terrendah pada bulan Februari dan temperatur udara tertinggi pada bulan Mei. Rata-rata temperatur per bulan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Rata-rata Kelembaban udara nisbi pada tahun 2020 sebesar 88%. Bulan Januari dan Nopember merupakan bulan yang mempunyai Kelembaban udara nisbi tebesar yaitu 90% sedangkan bulan dengan Kelembaban udara nisbi

terkecil terjadi pada bulan Mei dengan lembab nisbi sebesar 86%. Rata-rata kelembaban udara per bulan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Rata-rata tekanan udara sepanjang tahun 2020 di Kabupaten Sambas berkisar antara 1.008,9 miliar hingga 1.011,2 miliar dengan rerata setahun sebesar 1009,8 miliar. Tekanan udara terendah terjadi pada bulan September - Oktober dan tertinggi terjadi pada bulan Februari. Data rata-rata tekanan udara bulanan tahun 2020 tersaji pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4
Kecepatan Angin, Temperatur Udara dan Kelembaban Udara Tahun 2020

Bulan	Rata-Rata Kecepatan Angin (knot/jam)	Temperatur udara (°C)			Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (mb)
		Maksimum	Minimum	Rata-Rata		
Januari	6	32,8	22,8	26,5	90	1 010,4
Februari	10	32,8	21,4	26,3	88	1 011,2
Maret	9	34,4	21,0	27,0	87	1 010,4
April	7	34,0	21,2	27,0	87	1 010,6
Mei	5	34,0	23,0	28,0	86	1 009,4
Juni	7	33,2	22,6	27,0	88	1 009,5
Juli	5	32,8	21,9	27,4	88	1 009,0
Agustus	8	34,6	22,0	27,3	86	1 009,3
September	7	34,4	22,4	26,5	89	1 008,9
Oktober	10	34,4	22,9	27,2	87	1 008,9
November	8	32,8	22,2	26,5	90	1 009,8
Desember	10	32,8	22,1	26,6	89	1 009,1

Sumber: BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2021

2.1.1.8. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 rencana pola ruang wilayah terbagi kedalam 2 kelompok yakni rencana kawasan lindung dan kawasan budaya.

a) Rencana Kawasan Lindung

Kabupaten Sambas mencadangkan rencana pola ruang untuk kawasan lindung yang terdiri atas:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
2. Kawasan perlindungan setempat;
3. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
4. Kawasan cagar budaya dan
5. Kawasan rawan bencana alam.

Secara keseluruhan kawasan lindung nasional di Kabupaten Sambas ada 6 dengan total luasan sebesar 30.469,84 Ha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Kawasan Lindung Nasional di Kabupaten Sambas

No.	Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1.	Suaka Alam Laut Sambas	-
2.	Taman Wisata Alam Sungai Liku	753,79
3.	Taman Wisata Alam Tanjung Belimbang	1.023,31
4.	Taman Wisata Alam Asuansang	4.845,01
5.	Taman Wisata Alam Dungan	1.676,11
6.	Taman Wisata Alam Gunung Melintang	22.171,62
Total		30.469,84

Sumber : Perda Kab. Sambas No. 17 tahun 2015 tentang RTRW
Kab. Sambas Tahun 2015 – 2035

b) Kawasan Budidaya

Selain rencana kawasan lindung juga dicadangkan pola ruang untuk kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi keperluan sebagai berikut :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau kecil;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman;
- i. Kawasan peruntukan lainnya.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya meliputi:

- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan

Secara keseluruhan dari luas lahan yang ada di Kabupaten Sambas diperuntukkan bagi 7 jenis kegiatan yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 6
Peruntukan Lahan di Kabupaten Sambas

No	Jenis	Luas (Ha)	%
1	Pertanian & Holtikultura	75.759,41	11,79
2	Perkebunan	269.657,55	41,98
3	Kawasan Perkotaan	82.417,48	12,83
4	Pulau	2.876,00	0,45
5	Kawasan Strategis	20.053,41	3,12
6	Hutan (TWA,HL,HPT,HP,HPK)	167.893,61	26,14
7	lain-lain	23.660,00	3,68
Luas Total Kabupaten		642.317,46	100,00

Sumber : Perda Kab. Sambas No. 17 tahun 2015 tentang RTRW
Kab. Sambas Tahun 2015 – 2035

2.1.2.Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Wilayah yang dicadangkan pola ruang untuk kawasan budidaya sebagai berikut :

a. Kawasan peruntukan hutan produksi;

Kawasan hutan produksi berada di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, terdiri atas:

1. hutan produksi terbatas terdapat di hutan produksi terbatas Sungai Sajingan Kecamatan Sajingan Besar;
2. hutan produksi, terdapat di :
 - ❖ Sungai Bemban Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar;
 - ❖ Sungai Sajingan di Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Sejangkung;
 - ❖ Sungai Bantan di Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Paloh, Kecamatan Galing, Kecamatan Sejangkung;
 - ❖ Sungai Sebubus di Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan Jawai, dan Kecamatan Tangaran;
 - ❖ Sungai Selakau – Sebangkau di Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Tebas, dan Kecamatan Semparuk; dan
 - ❖ Sungai Behe di Kecamatan Tebas dan Subah.
3. hutan produksi yang dapat di konversi terdapat di Sungai Kumba Kecamatan Sejangkung.

b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;

Kawasan hutan rakyat sebagaimana adalah hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat. Kawasan hutan rakyat tersebar di seluruh wilayah Kecamatan.

c. Kawasan peruntukan pertanian;

Kawasan peruntukan pertanian meliputi :

❖ Tanaman Pangan;

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dikembangkan di seluruh kecamatan pada lahan yang ditetapkan sebagai pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering.

❖ Hortikultura;

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dikembangkan di seluruh kecamatan pada lahan yang ditetapkan sebagai pertanian lahan kering.

❖ Perkebunan;

Kawasan peruntukan perkebunan dikembangkan di seluruh Kecamatan pada lahan yang ditetapkan sebagai pertanian lahan kering

❖ Peternakan.

Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan di seluruh kecamatan

d. Kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau kecil;

Kawasan peruntukan perikanan meliputi:

❖ Kawasan peruntukan perikanan tangkap;

Kawasan peruntukan perikanan tangkap dilakukan di perairan umum dan laut.

❖ Kawasan peruntukan budidaya ikan air payau;

Kawasan peruntukan budidaya perikanan air payau dikembangkan di Kecamatan Selakau, Kecamatan Salatiga, Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Jawai, Kecamatan Tangaran, dan Kecamatan Paloh.

❖ Kawasan peruntukan budidaya ikan air tawar;

Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar dikembangkan di Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Salatiga, Kecamatan Jawai, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Tekarang, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Tebas, Kecamatan Sebawi, Kecamatan Subah, Kecamatan Sambas, Kecamatan Sajad, Kecamatan Sejangkung, Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan

Paloh, Kecamatan Tangaran, Kecamatan Galing, dan Kecamatan Sajingan Besar.

❖ Pelabuhan perikanan.

Pelabuhan perikanan dikembangkan di Kecamatan Selakau, Kecamatan Salatiga, Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Jawai, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Tangaran dan Kecamatan Paloh.

e. Kawasan peruntukan pertambangan;

Kawasan Peruntukan pertambangan terdiri atas:

- ❖ Wilayah Pencadangan Negara batubara yang terdapat di Kecamatan Paloh, Kecamatan Sajingan Besar, dan Kecamatan Galing;
- ❖ Wilayah Pencadangan Negara mineral logam yang terdapat di Kecamatan Paloh;
- ❖ Wilayah Usaha Pertambangan batubara yang terdapat di Kecamatan Paloh, Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Galing;
- ❖ Wilayah Usaha Pertambangan mineral logam yang terdapat di Kecamatan Paloh, Galing, Tangaran, Teluk Keramat, Sejangkung, Jawai, Jawai Selatan, Sambas, Subah, Sebawi, Tebas, Semparuk, Pemangkat, Salatiga, Selakau, dan Selakau Timur;
- ❖ Wilayah Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang terdapat di Kecamatan Sebawi, Salatiga, Selakau, Selakau Timur, Tebas, Sambas, Subah, Jawai, Jawai Selatan, Sejangkung, Galing, Tangaran, Teluk Keramat, Paloh dan Sajingan Besar;
- ❖ Wilayah Usaha Pertambangan Radioaktif yang terdapat di Kecamatan Sajingan Besar, Sejangkung, Galing, Teluk Keramat, Sebawi, Tebas, Tekarang, Jawai, Jawai Selatan, Semparuk, Pemangkat, Salatiga, dan Selakau;
- ❖ Wilayah Pertambangan Rakyat mineral logam emas yang terdapat di Kecamatan Subah, Kecamatan Sebawi, Kecamatan Tebas dan Kecamatan Selakau Timur.

f. Kawasan peruntukan industri;

Kawasan peruntukan industri meliputi:

1. Kawasan peruntukan industri besar;

Kawasan peruntukan industri besar terdiri atas:

- ❖ Kawasan Industri Semparuk yang merupakan kawasan untuk kegiatan industri pengolahan makanan/minuman, Kelapa Sawit, industri kimia, industri pengolahan karet, industri pengolahan kayu dan furniture, industri bahan bangunan, dan industri lain-lain;
- ❖ Kawasan Industri Tanjung Api yang merupakan kawasan untuk kegiatan industri pengolahan gas alam cair;
- ❖ Kawasan Industri Aruk yang merupakan kawasan untuk kegiatan industri pengolahan berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan.

2. Kawasan peruntukan industri rumah tangga.

Pengembangan kawasan industri rumah tangga meliputi sentra industri kerajinan, pengolahan pangan, sandang dan lain-lain yang tersebar di kawasan pedesaan dan perkotaan di wilayah daerah.

g. Kawasan peruntukan pariwisata;

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- ❖ Kawasan peruntukan objek dan daya tarik wisata budaya;
Kawasan peruntukan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan kawasan peruntukan pariwisata yang didalamnya terdapat kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya
- ❖ Kawasan peruntukan objek dan daya tarik wisata alam.

Kawasan peruntukan objek dan daya tarik wisata alam terdiri atas:

a) Kawasan wisatabahari/maritim yang terdiri dari:

1. Pantai Polaria di Kecamatan Selakau;
2. Pantai Saadi/Terigas di Kecamatan Selakau;
3. Pantai Tanjung Batu di Kecamatan Pemangkat;
4. Pantai Sinam di Kecamatan Pemangkat;
5. Pantai Kahona di Kecamatan Jawai;
6. Pantai Natuna Indah di Kecamatan Jawai;
7. Pantai Datok Buntar di Kecamatan Jawai;
8. Pantai Puteri Serayi di Kecamatan Jawai Selatan;
9. Pantai Muare Jalan Indah di Kecamatan Tangaran;
10. Pantai Dataran Merdeka di Kecamatan Tangaran;
11. Pantai Tanjung Terabitan di Kecamatan Tangaran;

12. Pantai Tanjung Lestari di Kecamatan Paloh;
 13. Pantai Harapan di Kecamatan Paloh;
 14. Pantai Pulau Selimpai di Kecamatan Paloh;
 15. Pantai Kampak Indah di Kecamatan Paloh;
 16. Pantai Kalangbau di Kecamatan Jawai Selatan;
 17. Pantai Tanjung Bendera di Kecamatan Paloh;
 18. Pantai Tanjung Kemuning di Kecamatan Paloh;
 19. Pantai Banyuan di Kecamatan Paloh;
 20. Pantai Camar Bulan di Kecamatan Paloh;
 21. Dermaga Asam Jawe di Kecamatan Paloh;
 22. Pantai Telok Atong Bahari di Kecamatan Paloh;
 23. Pantai Batu Pipih di Kecamatan Paloh;
 24. Pantai Kalimantan di Kecamatan Paloh.
- b) Kawasan wisata budaya meliputi Istana Alwatzikobillah di Kecamatan Sambas, Makam Bujang Nadi Dare Nandung di Kecamatan Sebawi, Makam Bantilan di Kecamatan Sajad, Makam Ratu Sepudak di Kecamatan Galing, Rumah Batu di Kecamatan Subah;
- c) Kawasan Wisata Agro meliputi Perkebunan Sawo di Kecamatan Tekarang, Argro Wisata Matang Nangka di Kecamatan Tebas, Agro Wisata Kota Jeruk di Kecamatan Tebas, Agro Wisata Buah Naga di Perkotaan Sambas, Kecamatan Jawai dan Kecamatan Jawai Selatan serta Perkebunan Salak di Kecamatan Teluk Keramat;
- d) Kawasan wisata alam terdiri dari:
1. Air terjun Gunung Selindung di Kecamatan Salatiga;
 2. Taman rekreasi Batu Mak Jage di Kecamatan Tebas;
 3. Goa Kelelawar;
 4. Danau Sebedang di Kecamatan Sebawi;
 5. Air terjun Riam Merasap di Kecamatan Sajingan Besar;
 6. Air terjun Riam Cagat di Kecamatan Sajingan Besar;
 7. Hutan Hujan Tropis Tanjung Dato di Temajuk di Kecamatan Paloh;
 8. Air terjun Teluk Nibung;
 9. Air terjun Gunung Panggi; dan
 10. Bukit Piantus di Kecamatan Sejangkung.

- e) Kawasan wisata religi meliputi Masjid Jami' di Kecamatan Sambas, Toa Pekong Ular Putih di Kecamatan Pemangkat, Toa Pekong Dewi Kwan Im di Kecamatan Pemangkat, dan Goa Alam Santok di Kecamatan Sajingan Besar;
 - f) Kawasan wisata ritual meliputi taman rekreasi Batu Bejamban di Kecamatan Paloh;
 - g) Kawasan wisata buatan meliputi Waterfront City Sambas di Kecamatan Sambas dan Kebun Raya Sambas di Kecamatan Subah.
- h. Kawasan peruntukan permukiman;
- Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h meliputi:
- 1. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan;

Kawasan permukiman perkotaan meliputi ibukota kabupaten, ibukota kecamatan, kawasan permukiman yang merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional, dan wilayah hinterland perkotaan yang berkembang.
 - 2. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan berada di luar kawasan perkotaan yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan/atau perikanan.
- i. Kawasan peruntukan lainnya.
- Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya meliputi:
- a) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dikembangkan untuk mendorong pengembangan kawasan perdagangan/jasa, khususnya investasi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sesuai potensi wilayah dan pemerataan di setiap pusat pengembangan dan daerah di belakangnya (*hinterland*), menyediakan kawasan perdagangan/jasa sesuai dengan peruntukannya, dan mendorong pengembangan sektor ekonomi yang mempunyai *multiplier effect* dan daya serap tenaga kerja yang tinggi.
 - b) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada di wilayah kabupaten meliputi:

- 1) Kompi A, Yonif 645 / Beruang di Kecamatan Sambas;
- 2) Kompi B, Yonif 645 / Beruang di Kecamatan Pemangkat;
- 3) Kompi Senapan 645 di Kecamatan Paloh;
- 4) Koramil yang terletak di semua kecamatan;
- 5) Rencana Pangkalan Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Temajuk Kecamatan Paloh;
- 6) Rencana Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Temajuk Kecamatan Paloh;
- 7) Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Tipe A / Paloh di Kecamatan Paloh;
- 8) Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Tipe C / Tanjung Datu di Kecamatan Paloh;
- 9) Rencana Dantanal di Sambas;
- 10) Rencana Koramil di Galing;
- 11) Pos Pengamanan Perbatasan (Pospamtas) yang berada di Paloh, Sei Beruang, Sekura, dan Aruk;
- 12) Fasilitas Radar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Pemangkat;
- 13) Fasilitas Brigadir Infanteri Angkatan Darat di Kecamatan Galing.

2.1.3.Demografi

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2020 bertambah 133.785 jiwa dari 496.120 jiwa (2010) menjadi 629.905 jiwa (2020). Jumlah terbanyak kedua di Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak (658.685 jiwa). Kepadatan penduduk sekitar 98 jiwa per kilometer persegi. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 2,42% per tahun periode 2010-2020, meningkat signifikan (1,52%) dibanding LPP periode 2000-2010 sebesar 0,90%. Penduduk Kabupaten Sambas tersebar di 19 kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Tebas (80.270 jiwa atau 12,74%). Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Selakau Timur (12.520 jiwa atau 1,99%).

Dari aspek kepadatan penduduk, Kabupaten Sambas tergolong pada daerah berpenduduk jarang (98 jiwa/km²). Persebaran penduduk di Kabupaten Sambas belum merata antar kecamatan. Kepadatan penduduk

tertinggi berada di Kecamatan Pemangkat (480 jiwa/km 2), sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Sajingan Besar (10 jiwa/km 2).

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki (322.373 jiwa) lebih banyak dari penduduk perempuan (303.532 jiwa). Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan yang disebut dengan Sex Ratio (SR) melebihi angka 100 , tepatnya 105 . (lihat Tabel 2.8). Sex Ratio tertinggi terdapat di Kecamatan Sajingan Besar (113) dan SR terendah (99) di Kecamatan Sajad.

Tabel 2. 7

Jumlah Penduduk, Sex Ratio, Kepadatan Penduduk Kabupaten Sambas
Menurut Kecamatan Tahun 2010 – 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2010)	Jumlah Penduduk (2020)	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk Per Km 2	LPP per tahun 2010-2020 (%)
1.	Selakau	30.072	37.810	105	292	2,32
2.	Selakau Timur	10.200	12.520	105	77	2,07
3.	Pemangkat	44.589	53.250	103	480	1,79
4.	Semparuk	23.765	30.180	104	335	2,42
5.	Salatiga	14.671	18.320	104	221	2,24
6.	Tebas	63.613	80.270	105	203	2,35
7.	Tekarang	13.293	17.240	104	211	2,81
8.	Sambas	44.979	57.300	103	232	2,45
9.	Subah	17.527	23.760	109	37	3,09
10.	Sebawi	15.598	20.250	105	125	2,64
11.	Sajad	9.936	13.640	99	144	3,22
12.	Jawai	35.042	47.310	105	244	3,05
13.	Jawai Selatan	17.660	22.170	108	237	2,30
14.	Teluk Keramat	58.675	74.180	105	134	2,37
15.	Galing	19.663	24.860	104	75	2,38
16.	Tangaran	20.789	25.840	105	138	2,20
17.	Sejangkung	22.318	27.540	106	95	2,12
18.	Sajingan Besar	9.848	13.290	113	10	3,04
19.	Paloh	23.892	29.900	107	26	2,27
Kabupaten Sambas		496.120	629.910	105	98	2,42

Sumber: Hasil SP 2010 dan SP 2020 dalam Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2011 - 2021

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per tahun Kabupaten Sambas meningkat dan tergolong tinggi (lebih dari 2%). LPP tertinggi terjadi di Kecamatan Sajad ($3,22\%$) disertai dengan jumlah penduduk relative sedikit dan kepadatan penduduk tinggi (144 jiwa/km 2). LPP terendah terjadi di Kecamatan Pemangkat ($1,79\%$) dengan kepadatan penduduk tertinggi (480 jiwa/km 2). Kondisi ini

mengindikasikan untuk masa mendatang persoalan kuantitas dan persebaran penduduk yang belum merata masih terus mengemuka.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur dari pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, laju inflasi, dan Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Kemampuan ekonomi daerah atau kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang akan masuk dan telah berada pada suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah di antaranya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020), struktur lapangan usaha Kab. Sambas masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi sektor tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, kontribusinya sebesar 32,52%, kemudian meningkat menjadi 32,63% pada tahun 2018, dan terakhir pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi sebesar 33,62%.

Selain pertanian, kehutanan dan perikanan, kontribusi terbesar pada tahun 2020 dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil/motor sebesar 17,02%, kemudian diikuti sektor industri pengolahan sebesar 11,64%, sektor konstruksi sebesar 8,09%; dan sektor administrasi pemerintahan sebesar 6,65%. Kontribusi sektor lain umumnya masih berada di bawah 5%.

Pertumbuhan ekonomi Kab. Sambas pada tahun 2020 mengalami kontraksi (minus 2,02%). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ternyata juga mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 4,76%, sedangkan tahun 2018 sebesar 4,93%. Secara sektoral, pertumbuhan tertinggi tahun 2020 terjadi pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 19,57%, diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,12%, sektor pengadaan air sebesar 4,98%,

sektor administrasi pemerintahan sebesar 1,62%, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,04%.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penyediaan infrastruktur dasar, disertai dengan menumbuhkembangkan potensi sektor ekonomi unggulan dan daya saing daerah. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang memiliki daya ungkit (*leverage*) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

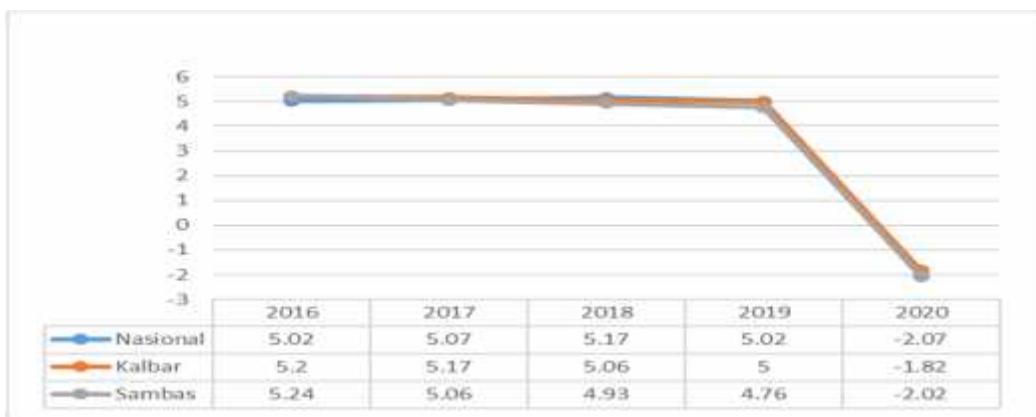
Kabupaten Sambas memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanian. Komoditi utama dari sub sektor perkebunan berupa kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan kopi, sedangkan komoditi utama dari sektor kehutanan berupa kayu bulat dan kayu belian. Sektor pertanian yang diusahakan berupa padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kondisi geografis Kabupaten Sambas yang memiliki kepulauan dan pesisir merupakan potensi bagi perikanan tangkap. Sumberdaya air yang ada juga merupakan potensi bagi pengembangan perikanan tangkap umum serta perikanan budidaya (keramba dan budidaya kolam). Potensi sektor peternakan (sapi, kambing, babi, dan unggas berupa itik dan ayam), dan sektor pertambangan (zirkon, emas, tembaga, batu pecah dan lain-lain). Selain potensi sumber daya alam daerah, Kabupaten Sambas juga memiliki potensi di sektor pariwisata, baik wisata budaya, wisata alam, dan wisata bahari.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari penyajian angka PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Khusus dalam melakukan analisis perekonomian daerah seringkali menggunakan PDRB atas dasar harga konstan karena telah menghilangkan pengaruh inflasi sehingga dianggap lebih valid. Hipotesis kerja yang digunakan adalah jika angka PDRB meningkat maka pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat begitu pula sebaliknya.

Akibat pandemi Covid-19 perekonomian Kabupaten Sambas pada tahun 2020 tumbuh negatif (terkontraksi) sebesar -2,02 persen, jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2019 (4,76 persen). Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2020 hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional (-2,07 persen), namun lebih dalam (negatifnya lebih besar)

dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat (-1,82 persen). Dalam lima tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas memang terus mengalami penurunan, sebagaimana tampak pada Grafik 2.1 berikut ini.

Grafik 2. 1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%) Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Sambas, Tahun 2021 (data diolah)

Ada tiga sektor besar yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas terkontraksi agak dalam, yaitu sektor Konstruksi, sektor industri pengolahan, dan sektor Perdagangan yang share-nya masing-masing relatif besar, yaitu 8,28 persen, 11,64 persen, dan 17,02 persen pada tahun 2019, namun tumbuh negatif pada tahun 2020 masing-masing sebesar -6,03 persen, -3,03 persen dan -6,97 persen. Sementara dilihat dari besaran pertumbuhannya, ternyata pertumbuhan terendah dialami oleh sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum (-19,18 persen) dan sektor jasa lainnya (-16,55 persen). Sebaliknya pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,57 persen). Untunglah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang selama ini menjadi andalan Kabupaten Sambas dengan share sekitar 33 persen masih tumbuh positif meskipun kecil, yaitu sebesar 1,04 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2. 8
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sambas
Menurut Sektor ADHK 2010 (%) Tahun 2016-2020

	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,57	5,50	5,89	5,59	1,04
B.	Pertambangan dan Penggalian	-0,50	2,85	3,92	3,86	-2,96

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
C. Industri Pengolahan	4,89	4,12	3,39	4,89	-3,03
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12,66	3,52	3,02	5,11	-7,65
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,39	6,26	5,22	7,10	4,98
F. Konstruksi	5,19	5,00	3,90	1,24	-6,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,45	4,07	3,99	5,37	-6,97
H. Transportasi dan Pergudangan	4,60	4,47	4,51	5,85	-10,94
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,79	5,17	6,19	5,75	-19,18
J. Informasi dan Komunikasi	10,25	14,54	7,26	6,48	8,12
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	13,71	7,48	7,42	-3,91	-0,30
L. Real Estat	2,75	2,08	3,68	2,31	0,88
M, N. Jasa Perusahaan	3,08	0,98	4,16	5,02	-6,24
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,16	3,94	5,33	5,96	1,62
P. Jasa Pendidikan	5,98	1,76	2,94	3,74	-5,37
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,83	3,13	6,54	6,81	19,57
R,S,T,U. Jasa lainnya	4,31	4,03	5,32	7,70	-16,55
Produk Domestik Regional Bruto	5,24	5,06	4,93	4,76	-2,02

Sumber: BPS Kabupaten Sambas, Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Sambas pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, jasa pendidikan, jasa perusahaan, jasa keuangan dan asuransi, transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Upaya pemulihan sektor-sektor ekonomi yang terdampak negatif tersebut harus menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sambas lima tahun ke depan (2021-2026). Sebaliknya pandemi Covid-19 sepertinya hanya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor informasi dan komunikasi yang masing-masing tumbuh 19,57 persen dan 8,12 persen. Sementara sektor-sektor lainnya meskipun tumbuh positif tapi pertumbuhannya cenderung lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan di tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas berada satu kelompok dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sintang menjadi daerah yang pertumbuhan ekonominya tahun 2020 terkontraksi sekitar 2 persen. Secara rinci pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut.

Tabel 2. 9
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Kalimantan Barat (%) Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Sambas	5,24	5,06	5,03	4,89	-2,02
Kabupaten Bengkayang	5,15	5,62	5,37	5,23	-1,99
Kabupaten Landak	5,28	5,17	5,09	5,01	-0,67
Kabupaten Mempawah	5,99	5,87	5,82	5,81	0,19
Kabupaten Sanggau	5,34	4,48	4,45	4,30	0,70
Kabupaten Ketapang	7,97	7,21	7,99	6,72	-0,50
Kabupaten Sintang	5,28	5,33	5,47	5,09	-2,19
Kabupaten Kapuas Hulu	5,28	5,39	5,23	4,03	-2,43
Kabupaten Sekadau	5,93	5,82	5,87	5,49	-0,98
Kabupaten Melawi	4,75	4,70	5,38	4,97	-1,10
Kabupaten Kayong Utara	5,98	5,37	5,01	5,04	-0,74
Kabupaten Kubu Raya	6,37	6,54	5,62	5,82	-2,43
Kota Pontianak	5,08	4,96	4,91	4,81	-3,97
Kota Singkawang	5,17	5,38	4,70	4,53	-2,43
Kalimantan Barat	5,20	5,17	5,07	5,00	-1,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pandemi Covid 19 sangat berdampak terhadap perekonomian daerah, dimana 12 dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Kontraksi pertumbuhan ekonomi paling dalam terjadi di Kota Pontianak, yaitu mencapai -3,97 persen. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi terbaik dan masih positif ada di Kabupaten Sanggau (0,70 persen) dan Kabupaten Mempawah (0,19 persen). Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas pada tahun 2020 yang mencapai -2,02 persen menempatkan Kabupaten Sambas ke dalam lima daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Kalimantan Barat pada tahun 2020.

2.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB dilakukan dengan 2 pendekatan yakni atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha.

a. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB ADHK merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi daerah setiap tahunnya. Artinya semakin tinggi PDRB ADHK maka laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin membaik dan stabil. Tahun 2020 nilai PDRB Kabupaten Sambas ADHK sebesar Rp. 13.367.321,04 juta mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebesar Rp. 13.643.137,73 juta. Secara rinci perkembangan PDRB ADHK 2010 di Kabupaten Sambas sebagai berikut :

Tabel 2. 10
PDRB Kabupaten Sambas ADHK 2010 Tahun 2016-2020
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.016.682,64	4.237.462,00	4.487.176,53	4.738.127,41	4.787.439,74
B. Pertambangan dan Penggalian	121.088,19	124.540,65	129.423,72	134.413,52	130.436,42
C. Industri Pengolahan	1.500.015,68	1.561.834,03	1.614.738,57	1.693.742,87	1.642.432,46
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.956,24	6.165,62	6.352,13	6.676,95	6.166,14
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.221,39	7.673,52	8.074,07	8.647,45	9.078,02
F. Konstruksi	891.954,89	936.584,31	973.099,36	985.150,92	925.758,55
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.101.985,89	2.187.499,36	2.274.808,83	2.396.995,65	2.229.928,04
H. Transportasi dan Pergudangan	298.034,47	311.351,20	325.386,93	344.412,26	306.738,97
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	242.766,60	255.319,80	271.116,81	286.712,36	231.709,76
J. Informasi dan Komunikasi	579.732,92	664.007,8	712.217,17	758.356,27	819.920,92
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	338.440,43	363.768,56	390.756,48	375.475,54	374.350,29
L. Real Estat	398.750,19	407.052,57	422.046,89	431.810,94	435.616,97
M, N. Jasa Perusahaan	46.910,11	47.368,69	49.340,54	51.817,96	48.586,13
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	471.658,64	490.253,35	516.377,04	547.144,33	556.000,15
P. Jasa Pendidikan	546.017,26	555.607,04	571.959,82	593.371,72	561.523,01
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	140.123,24	144.508,37	153.961,14	164.441,44	196.627,51
R,S,T,U Jasa lainnya	106.635,36	110.932,05	116.839,15	125.840,16	105.007,96
Produk Domestik Regional Bruto	11.813.974,13	12.411.928,95	13.023.675,16	13.643.137,73	13.367.321,04

Sumber: BPS Kabupaten Sambas, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.10, struktur lapangan usaha masyarakat Kabupaten Sambas masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sekitar 33 persen. Sementara lapangan usaha yang dominan berikutnya, yaitu perdagangan dan industri pengolahan perkembangan PDRB-nya cenderung stagnan dengan kontribusi yang cenderung menurun.

b. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Berbeda dengan nilai PDRB ADHK 2010, ternyata nilai PDRB Kabupaten Sambas ADHB tahun 2020 (angka sangat sementara) masih mengalami kenaikan sedikit dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 20.531.983,00 juta pada tahun 2019 menjadi Rp 20.674.704,12 juta pada tahun 2020. Secara rinci perkembangan nilai PDRB Kabupaten Sambas ADHB adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 11
PDRB Kabupaten Sambas ADHB Tahun 2016-2020
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.211.316,38	5.701.195,25	6.194.367,81	6.680.680,11
B.	Pertambangan dan Penggalian	199.828,09	220.260,88	235.016,00	250.792,00
C.	Industri Pengolahan	1.998.950,41	2.210.246,81	2.291.406,00	2.423.534,00
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	6.924,78	7.651,78	8.389,00	9.309,00
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.507,85	9.271,18	10.179,00	10.910,00
F.	Konstruksi	1.303.035,75	1.447.596,27	1.583.496,00	1.700.579,00
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.788.072,16	3.020.137,40	3.288.104,00	3.617.123,00
H.	Transportasi dan Pergudangan	399.756,10	429.510,93	472.215,00	514.769,00
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	338.584,83	362.421,23	404.642,00	444.964,00
J.	Informasi dan Komunikasi	589.693,42	695.610,04	778.232,00	861.720,00
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	422.397,23	465.741,91	521.514,00	514.902,00
L.	Real Estat	545.448,09	577.013,47	633.781,00	680.392,00
M, N.	Jasa Perusahaan	63.002,48	65.457,78	70.811,00	77.254,00
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	983.700,01	1.071.601,91	1.176.140,00	1.304.640,00
P.	Jasa Pendidikan	814.095,53	847.871,10	905.374,00	985.915,00
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	207.568,34	218.117,56	238.574,00	261.316,00
R,S,T, U.	Jasa Lainnya	145.554,93	157.193,32	172.349,00	193.184,00
Produk Domestik Regional Bruto		16.026.436,37	17.506.898,83	18.984.588,00	20.531.983,00
					20.674.704,12

Sumber: BPS Kabupaten Sambas Tahun 2021

Bila kita perhatikan lebih jauh nilai PDRB dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat. Selain itu sumbangan cukup besar juga diberikan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai sekitar 17,02 persen, kemudian diikuti oleh lapangan usaha Industri

Pengolahan dengan nilai sekitar 11,64 persen. Secara rinci distribusi persentase PDRB Kabupaten Sambas ADHB menurut lapangan usaha tersaji berikut ini:

Tabel 2. 12
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sambas ADHB Tahun 2016-2020
Menurut Lapangan Usaha (%)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,52	32,57	32,63	32,54	33,62
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,25	1,26	1,24	1,22	1,22
C.	Industri Pengolahan	12,47	12,63	12,07	11,80	11,64
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
F.	Konstruksi	8,13	8,27	8,34	8,28	8,09
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,40	17,25	17,32	17,62	17,02
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,49	2,45	2,49	2,51	2,26
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,11	2,07	2,13	2,17	1,81
J.	Informasi dan Komunikasi	3,68	3,97	4,10	4,20	4,55
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,64	2,66	2,75	2,51	2,50
L.	Real Estat	3,40	3,30	3,34	3,31	3,33
M, N.	Jasa Perusahaan	0,39	0,37	0,37	0,38	0,35
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,14	6,12	6,20	6,35	6,65
P.	Jasa Pendidikan	5,08	4,84	4,77	4,80	4,52
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,30	1,25	1,26	1,27	1,58
R,S,T,U.	Jasa lainnya	0,91	0,90	0,91	0,94	0,77
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sambas, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.12, distribusi persentase PDRB ADHB masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi yang cenderung terus meningkat dari 32,52 persen pada tahun 2016 menjadi 33,62 persen pada tahun 2020. Sementara lapangan usaha yang lain perkembangannya kurang signifikan bahkan cenderung stagnan. Dua sektor besar lainnya dalam perekonomian Kabupaten Sambas, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Industri Pengolahan kontribusinya cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam lima tahun terakhir ini perekonomian Kabupaten Sambas masih sangat tergantung dengan sektor primer dengan nilai tambah rendah.

c. PDRB Sisi Pengeluaran

Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2)

lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Tabel 2. 13
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020 (Juta Rp)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Konsumsi Rumah Tangga	8.836,32	9.635,96	10.427,44	11.120,21	11.254,97
2.	Konsumsi LNPRT	151,72	167,57	192,73	213,75	225,78
3.	Konsumsi Pemerintah	1.634,84	1.680,18	1.793,21	1.895,72	1.993,59
4.	PMTB	4.723,67	5.033,15	5.197,99	5.257,33	5.186,62
5.	Perubahan Inventori	285,55	190,34	193,24	223,00	428,87
6.	Ekspor	4.232,66	4.643,30	5.232,91	5.835,16	5.695,70
7.	Impor	3.838,34	3.843,60	4.052,93	4.013,19	4.110,83
Total PDRB		16.026,44	17.506,90	18.984,59	20.531,98	20.674,70

Sumber: BPS Kabupaten Sambas, Tahun 2021

Nilai PDRB Kabupaten Sambas ADHB menurut pengeluaran untuk tahun 2020 angka sangat sementara (Rp 20.674,70 Miliar) sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2019 (Rp 20.531,98 Miliar). Disamping itu, jika dilihat berdasarkan data selama periode tahun 2016-2020, maka tampak peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 nilai PDRB hanya sebesar Rp 16.026,44 Miliar dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 20.674,70 Miliar. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Sedangkan distribusi PDRB menurut pengeluaran ADHB tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 14
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020 (Persen)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Konsumsi Rumah Tangga	55,14	55,04	54,93	54,16	54,44
2.	Konsumsi LNPRT	0,95	0,96	1,02	1,04	1,09
3.	Konsumsi Pemerintah	10,20	9,60	9,45	9,23	9,64
4.	PMTB	29,47	28,75	27,38	25,61	25,09
5.	Perubahan Inventori	1,78	1,09	1,02	1,09	2,07
6.	Ekspor	26,41	26,52	27,56	28,42	27,55

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
7.	Impor	23,95	21,95	21,35	19,55	19,88
	Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sambas, Tahun 2021

Nilai PDRB Kabupaten Sambas selama lima tahun terakhir didominasi oleh konsumsi rumah tangga yaitu sekitar 54 persen dengan kecenderungan konstan. Sementara kontribusi konsumsi pemerintah cenderung menurun dari 10,20 persen tahun 2016 menjadi hanya 9,64 persen pada tahun 2020. Kontribusi investasi juga cenderung menurun dari 29,47 persen tahun 2016 menjadi hanya 25,09 persen pada tahun 2020. Kecenderungan penurunan kontribusi investasi ini harus jadi perhatian dalam merancang pembangunan ekonomi Kabupaten Sambas lima tahun ke depan.

Sementara itu, nilai PDRB Kabupaten Sambas ADHK tahun 2010 menurut pengeluaran selama periode tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 nilai PDRB hanya sebesar Rp 11.813,97 Miliar dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 13.367,32 Miliar.

Tabel 2. 15
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020 (Juta Rp)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Konsumsi Rumah Tangga	6.259,28	6.504,04	6.782,56	7.093,73	7.081,50
2.	Konsumsi LNPRT	119,69	127,02	141,59	152,75	157,07
3.	Konsumsi Pemerintah	1.177,85	1.190,15	1.224,64	1.281,89	1.291,04
4.	PMTB	3.372,46	3.411,63	3.442,16	3.447,66	3.368,40
5.	Perubahan Inventori	165,05	104,40	103,89	110,47	270,89
6.	Ekspor	4.117,02	4.353,80	4.672,03	4.887,74	4.666,34
7.	Impor	3.397,37	3.279,11	3.343,20	3.331,11	3.467,93
	Total PDRB	11.813,97	12.411,93	13.023,68	13.643,14	13.367,32

Sumber: BPS Kabupaten Sambas, Tahun 2021

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

Tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan PDRB per kapita. Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian daerah yang menyebabkan menurunnya PDRB Kabupaten Sambas, hal ini tentu saja akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk Sambas. Terjadi penurunan kesejahteraan penduduk Sambas pada tahun 2020 yang diukur dengan menggunakan data PDRB per

kapita. Secara keseluruhan perkembangan PDRB per kapita ADHB dan ADHK tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2. 16

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Perkapita (Juta Rp)					
- ADHB	30.45	33.05	35.64	38.33	32.82
- ADHK 2010	22.44	23.43	24.45	25.47	21.22

Sumber: BPS Kab. Sambas, Tahun 2021

PDRB perkapita Kabupaten Sambas ADHB menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan tabel 2.10, PDRB perkapita Kabupaten Sambas pada tahun 2016 ADHB sebesar Rp 30,45 juta dan terus meningkat menjadi Rp 32.82 juta pada tahun 2020. Namun jika diperhatikan pergerakan PDRB per kapita per tahun, sebenarnya ada penurunan yang cukup tajam dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu menurun dari Rp 38.33 juta menjadi Rp 32,82 juta. Hal yang sama terjadi pada PDRB perkapita ADHK 2010, dimana pada tahun 2016 sebesar Rp 22.44 juta tetapi pada tahun 2020 malah menurun menjadi Rp 21.22 juta. Penurunan PDRB perkapita pada tahun 2020 sebagaimana diuraikan sebelumnya, disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas terkontraksi sebesar -2.02 persen. Namun khusus untuk Kabupaten Sambas, penurunan PDRB per kapita tahun 2020 tersebut menjadi semakin besar karena tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2020 berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, yaitu mencapai 17.58 persen. Sementara pertumbuhan penduduk tahunan pada tahun 2016-2019 yang dihitung berdasarkan proyeksi terhadap jumlah penduduk hasil sensus penduduk tahun 2010 besarnya rata-rata hanya sekitar 1.5 persen. Perbedaan dasar perhitungan jumlah penduduk tersebut menyebabkan sepertinya terjadi lonjakan jumlah penduduk Kabupaten Sambas di tahun 2020. Akibatnya pendapatan perkapita tahun 2020 baik ADHB maupun ADHK 2010 mengalami penurunan yang cukup tajam. Oleh karena itu, patut dipertimbangkan untuk memperbaiki proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sambas tahun 2011 hingga tahun 2019 berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 agar angka pertumbuhan penduduk menjadi lebih halus (*smooth*).

2.2.1.4. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1, artinya jika Indeks Gini bernilai 0 maka terjadi pemerataan pendapatan secara sempurna demikian pula sebaliknya jika Indeks Gini bernilai 1 maka terjadi ketimpangan pendapatan yang sempurna di masyarakat. Dengan demikian semakin Indeks Gini mendekati nilai 0 maka kondisi pemerataan pendapatan semakin baik.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, hingga tahun 2020 nilai Indeks Gini Kabupaten Sambas tercatat sebesar 0,274, mengalami perbaikan dari tahun 2019 sebesar 0,309. Berdasarkan capaian itu, maka ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Sambas tergolong cukup baik. Secara rinci perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sambas dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 2.2.

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015 – 2020



Sumber: BPS Kab. Sambas dan BPS Prov. Kalbar, Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas secara umum Indeks Gini Kabupaten Sambas pada tahun 2015-2020 lebih baik dari Indeks Gini Provinsi Kalimantan Barat. Meskipun demikian Indeks Gini Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat sama-sama berada dalam kategori ketimpangan rendah.

Selanjunya, jika kita mengacu pada Indeks Gini Kalimantan Barat yang dipublikasi BPS pada bulan September 2020, maka dapat diketahui bahwa

Indeks Gini di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,329, sementara Indeks Gini di daerah perdesaan pada September 2020 tercatat hanya sebesar 0,273. Dengan demikian jika kita asumsikan sebagian besar penduduk Kabupaten Sambas bercirikan perdesaan, maka wajarlah Indeks Gini-nya pada tahun 2020 sekitar 0,273, tepatnya 0,274 yang menurun jauh dari kondisi tahun 2019 (0,309). Angka Indeks Gini tersebut lagi-lagi menempatkan Kabupaten Sambas pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

Informasi lain yang diperoleh dari publikasi BPS terkait dengan ketimpangan pendapatan adalah tentang distribusi pengeluaran. Dimana pada September 2020, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,92 persen. Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,27 persen, sedangkan perdesaan mencatat angka yang lebih tinggi, yaitu sebesar 23,68 persen. Artinya, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan di Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Sambas masih berada dalam kategori ketimpangan rendah.

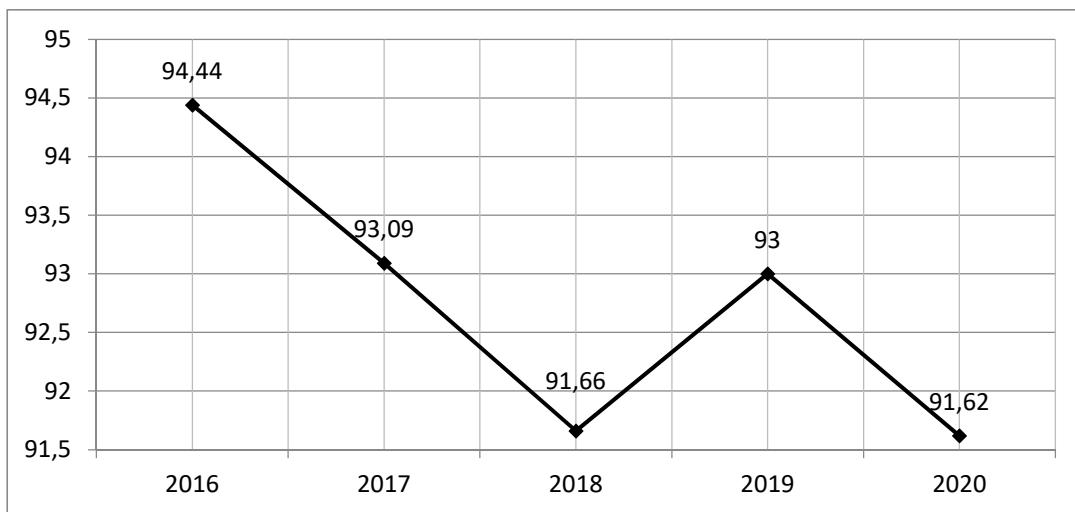
2.2.2.Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

2.2.2.1.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Hingga 2020, Kabupaten Sambas belum terbebas dari masalah buta huruf, meskipun proporsinya cenderung menurun. Ini terlihat dari peningkatan AMH penduduk berusia 10 tahun ke atas. Pada tahun 2016, AMH (dapat membaca dan menulis) penduduk usia 10 tahun keatas sebesar 94,44% dan pada tahun 2020 AMH menurun menjadi 91,62%.

Grafik 2. 2
Angka Melek Huruf Kabupaten Sambas
Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Sambas

AMH laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. AMH laki-laki sebesar 97,00% (2016) dan 95,35% (2020), sedangkan AMH perempuan sebesar 88,48% (2016) dan 87,82% (2020). AMH erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi AMH dan sebaliknya. Hasil SUSENAS 2020 menunjukkan AMH terendah (87,78%) berada pada kelompok penduduk pengeluaran 40% terbawah, sedangkan AMH tertinggi (96,27%) berada pada kelompok pengeluaran 20% teratas.

Penduduk yang buta huruf lebih banyak ditemukan pada kelompok umur 50 tahun ke atas, yakni sekitar 20%. Sementara itu, penduduk pada kelompok umur 15 – 24 tahun sudah terbebas dari buta huruf (AMH = 100%).

2.2.2.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Seiring dengan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun ke tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan selama periode 2016-2020 meskipun relative kecil. Pada tahun 2016 – 2020, RLS bertambah 0,12 poin per tahun dan pertambahan ini tergolong besar dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Kalbar. RLS meningkat dari 6,42 tahun (2016) menjadi 6,71 tahun (2020). Peningkatan RLS sebesar 0,58 poin selama lima tahun atau 0,12 poin per tahun. Peningkatan ini lebih tinggi dari RLS Kalimantan Barat yang bertambah 0,08 poin per tahun, lihat Tabel 2.17.

Meskipun meningkat, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sambas baru setara tamat SD (kelas 7) dan berada di rangking 13 dari 14 Kabupaten Kota.

Tabel 2. 17
Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas
Tahun 2016– 2020

Daerah	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	6,98	7,05	7,12	7,31	7,37
Kabupaten Sambas	6,42	6,67	6,68	6,70	6,71

Sumber: BPS Kalbar, go.id, Tahun 2021.

2.2.2.1.3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah mengandung makna lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 (tujuh) tahun ke atas di masa mendatang. Angka HLS tertinggi yang direkomendasi UNDP adalah 18 tahun (setara dengan sarjana). Realisasi capaian RLS di Kabupaten Sambas hingga tahun 2020 baru mencapai 12,61 tahun, masih jauh dari angka maksimum. Ini berarti penduduk usia sekolah di Kabupaten Sambas diharapkan menamatkan pendidikan sampai SMA (12 tahun). Meskipun lambat, Angka HLS menunjukkan peningkatan setiap tahunnya selama periode 2016-2020, lihat tabel 2.18.

Tabel 2. 18
Harapan Lama Sekolah Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas
Tahun 2016– 2020

Daerah	Harapan Lama Sekolah (tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	12,37	12,50	12,55	12,58	12,60
Kabupaten Sambas	11,92	12,38	12,52	12,60	12,61

Sumber: BPS Kalbar, go.id, Tahun 2021.

2.2.2.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sambas cenderung menurun pada periode 2016-2020. APM SD/MI meningkat dari 97,95% (2016) menjadi 98,80% (2020). APM SMP/MTs meurun dari 63,68% menjadi 62,81% pada periode yang sama. Demikian juga APM SMA/SMK/MA menurun signifikan (5,13%) dari 55,39% (2016) menjadi 50,26% (2020). APM SMA/SMK/MA sebesar 50,26% mengandung arti bahwa tiap 100 penduduk usia 16-18 tahun, hanya 50 orang yang mengenyam pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2020, selebihnya diduga tidak melanjut, atau bekerja atau menganggur.

Berdasarkan jenis kelamin, APM laki-laki lebih rendah dibanding perempuan pada semua jenjang pendidikan SD. Pada jenjang pendidikan SD, APM laki-laki 97,39% dan perempuan 97,67%, dan pada jenjang pendidikan SMP, APM laki-laki 62,42% dan perempuan 63,29%. Dan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, APM laki-laki (41,13%) lebih rendah dari perempuan (60,12%).

Penurunan capaian APM pada semua jenjang pendidikan, penting menjadi perhatian pemerintah daerah karena capaian tersebut mengindikasikan program WAJAR 9 dan 12 tahun belum berjalan efektif dan sekaligus berpengaruh pada perlambatan kenaikan RLS.

2.2.2.1.5. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Sama seperti APM yang cenderung menurun, Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sambas pada semua jenjang pendidikan juga mengalami penurunan. APK SD/MI tergolong baik, capaiannya sudah melebihi 100 persen. Capaiannya meningkat dari 98,89% (2016) menjadi 115,08% (2020). APK SMP/MTs menurun dari 94,36% (2016) menjadi 82,08% (2020). APK SMA/SMK/MA juga meningkat tajam dari 73,69% tahun 2016 menjadi 98,96% tahun 2020.

Seperti halnya APM, hingga tahun 2020 APK laki-laki ternyata lebih rendah dari APK perempuan pada semua jenjang pendidikan. APK laki-laki pada semua jenjang pendidikan (masing-masing 110,10% ; 81,53% dan 82,30%) lebih rendah dari APK perempuan (masing-masing 120,67%; 82,61% dan 116,96%).

2.2.2.1.6. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)

Pendidikan yang ditamatkan ditandai dengan kepemilikan ijazah penduduk usia 15 tahun ke atas. Hingga tahun 2020, persentase penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Sambas yang Tidak punya ijazah SD sebesar 31,18%, meningkat dibanding tahun 2016 (24,80%). Penduduk yang tidak punya ijazah SD ini kebanyakan perempuan (37,97%) dan sebagian besar (36,96%) berasal dari kelompok pengeluaran 40% terbawah (penduduk miskin).

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SD/sederajat semakin berkurang dari 34,78% (2016) menjadi 28,63% (2020). Sedangkan yang memiliki ijazah SMP/sederajat dan SMA/sederajat pada periode yang sama

semakin meningkat dari 16,35% menjadi 18,12% pada SMP sederajat dan dari 18,09% menjadi 22,06% pada SMA/sederajat.

Penurunan penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak punya ijazah SD dan penurunan kepemilikan ijazah SD/Sederajat di satu sisi dan peningkatan kepemilikan ijazah SMP dan SMA sederajat di sisi lain, memberi makna adanya peningkatan pembangunan SDM dari aspek pendidikan.

2.2.2.1.7. Ketersediaan Sekolah, Guru dan Murid

Salah satu upaya untuk mewujudkan daerah “bebas buta huruf” adalah memperkenalkan anak sejak usia dini terhadap pendidikan (sekolah), yang dikenal dengan sebutan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sekolah bagi anak usia dini disebut Taman Kanak-kanak (TK). Selama periode 2016-2020, jumlah TK bertambah 1 (satu) unit menjadi 64 unit. Ke-64 unit ini, terdiri dari 21 unit milik negeri dan 43 unit milik swasta dan tersebar di 16 kecamatan (3 kecamatan belum ada TK). Sebagian besar, TK berada di Kecamatan Pemangkat dan Sambas, masing-masing 11 unit. Jumlah Guru TK sebanyak 246 orang, terdiri dari Guru negeri 84 orang dan Guru Swasta 162 orang. Jumlah murid sebanyak 2.590 orang, terdiri dari 782 orang di TK Negeri dan 1.808 orang di TK Swasta. Tampaknya, keterlibatan pihak swasta untuk mencerdaskan bangsa sejak dulu di Kabupaten Sambas patut di apresiasi.

Pada periode yang sama, jumlah sekolah SD/MI berkurang dalam jumlah yang besar, yakni 55 unit menjadi 403 unit tahun 2020 dengan rincian 384 unit Negeri dan 19 unit Swasta. Seiring pengurangan gedung sekolah, Guru yang mengajar di tingkat SD/MI juga berkurang 582 orang (11,4%) dari 4.916 orang (2016) menjadi 4.334 orang (2020). Ke-4.334 orang guru ini, terdiri dari 3.596 orang Guru Negeri dan 738 orang Guru Swasta. Demikian juga hanya dengan murid, jumlahnya berkurang sebanyak 1.483 orang dari 79.152 orang (2016) menjadi 77.669 orang (2020). Murid ini sebagian besar (69.901 orang atau 90,00%) terserap di SD Negeri, selebihnya (10,00%) terserap di SD Swasta.

Demikian juga halnya pada jenjang Pendidikan SMP/MTs, jumlah sekolah SMP/MTs bertambah dari 139 unit (2016) menjadi 158 unit (2020), terdiri dari 108 unit negeri dan 50 unit swasta. Jumlah Guru yang mengajar juga bertambah sebanyak 24 orang menjadi 2.132 orang tahun 2020 dengan rincian 1.596 orang Guru Negri dan 536 orang Guru Swasta. Pertambahan gedung sekolah, ternyata diikuti dengan penambahan murid. Jumlah murid yang

terserap selama periode 2016-2020 bertambah 2.595 orang (8,77%) dari 29.595 orang (2016) menjadi 32.190 orang (2020). Murid ini sebagian besar (79,98%) terserap di negeri dan selebihnya (20,02%) terserap di swasta.

Tabel 2. 19
Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Sambas
Tahun 2016 - 2020

Sarana - Prasarana Pendidikan	SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK/MA	
	2016	2020	2016	2020	2016	2020
Sekolah (unit)	458	403	139	158	63	71
Guru (orang)	4.916	4.334	1.974	2.132	1.145	1.369
Murid (orang)	79.152	77.669	29.595	32.190	17.798	22.747
Rasio Murid-Guru	16	18	15	15	16	17
Rasio Murid-Sekolah	172	193	212	204	282	320

Sumber: Kabupaten Sambas Dalam Angka 2017 dan 2021.

Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA juga terjadi penambahan gedung sekolah sebanyak 8 unit dari 63 unit (2016) menjadi 71 unit (2020), terdiri dari 48 unit Negeri dan 23 unit Swasta. Perlu menjadi perhatian, hingga saat ini ada dua kecamatan yang tidak memiliki sekolah jenjang SMA/SMK/MA, yaitu Kecamatan Selakau Timur dan Kecamatan Tangaran. Seiring dengan pertambahan gedung sekolah SMA/SMK/MA, jumlah guru yang mengajar juga bertambah dari 1.145 orang (2016) menjadi 1.369 orang (2020), dengan rincian 1.069 orang mengajar di Negeri dan 300 orang di Swasta. Seiring dengan pertambahan gedung sekolah, jumlah murid yang terserap juga bertambah sangat signifikan. Murid yang terserap bertambah sebanyak 4.939 orang (27,75%), dari 17.798 siswa (2016) menjadi 22.737 siswa (2020) dengan rincian 18.732.

2.2.2.2. Kesehatan

2.2.2.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Pada tahun 2016 jumlah kasus kematian bayi adalah 113 kasus, turun menjadi 92 kasus di tahun 2017 (AKB 9 per 1000 kelahiran hidup) dan turun lagi di tahun 2018 menjadi 8,5 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan laporan Audit Maternal Perinatal Dinkes Kab.Sambas, AKB Kabupaten Sambas masuk pada kategori rendah (AKB < 10). Tinggi rendahnya kasus kematian bayi di Kabupaten Sambas disebabkan tiga faktor, yaitu terlambat mengetahui faktor resiko dan mengambil keputusan, terlambat merujuk ke fasilitas, dan terlambat penanganan kegawatdaruratan (disebut faktor 3T).

Tabel 2. 20
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sambas
Tahun 2016-2020

KOMPONEN	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi (AKB)	Orang	10	8	9	8	8
a. Jumlah Bayi yang dilahirkan	Orang	11.259	11.061	10.893	11.517	10.783
b. Jumlah Kematian Bayi	Orang	113	82	92	80	72

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas

2.2.2.2.2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Tinggi rendahnya Angka Kematian Ibu (AKI) dipengaruhi oleh prilaku rumah tangga (ibu) dalam merawat kehamilan. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sambas cenderung menurun seiring dengan meningkatnya pembangunan kesehatan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Pada tahun 2010, AKI di Kabupaten Sambas tergolong tinggi, yakni 172 per 100.000 kelahiran hidup. Delapan tahun kemudian, AKI berkurang signifikan menjadi 56 per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2. 21
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sambas
Tahun 2016-2020

KOMPONEN	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu	Orang	107	64	56	86	75
a. Jumlah Ibu Hamil	Orang	13.482	13.270	13.044	10,699	12.596
b. Jumlah Kematian Ibu Akibat Melahirkan	Orang	12	7	6	6	8
c. Jumlah Kelahiran Hidup	Orang	11.177	10.976	10.799	10.473	10.711

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas

2.2.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan. Semakin tinggi UHH di suatu negara/daerah pertanda semakin baik pembangunan kesehatan masyarakatnya. Dalam lima tahun terakhir, UHH di Kabupaten Sambas meningkat setiap tahunnya namun masih lebih rendah dari UHH Kalimantan Barat, (rangking 13 dari 14 Kabupaten/Kota). UHH Kabupaten Sambas tahun 2020 adalah 68,93 tahun, lebih rendah dari UHH Kalimantan Barat (70,69 tahun), lihat tabel 2.22.

Tabel 2. 22
Usia Harapan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2020

Daerah	Usia Harapan Hidup (tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	69,9	69,92	70,18	70,56	70,69
Kabupaten Sambas	68,05	68,17	68,50	68,83	68,93

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat, 2021

Capaian ini mengungkapkan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Sambas pada tahun 2020, diperkirakan akan bertahan hidup hingga usia antara 68 - 69 tahun. Peningkatan UHH dari tahun ke tahun pertanda pembangunan kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk merawat kesehatan (termasuk merawat kehamilan) semakin meningkat. Rumah Tangga dengan sumber bersih, akses air minum layak, yang memiliki fasilitas Buang Air Besar dan derajad kesehatan juga meningkat.

2.2.2.2.4. Balita Gizi Buruk

Perkembangan Balita gizi buruk di Kabupaten Sambas menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 2. 23
Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Sambas Tahun 2015 – 2020

No	Kecamatan	SATUAN	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sambas	Orang	0	0	1	2	2	7
2	Teluk Keramat	Orang	4	0	0	1	2	4
3	Jawai	Orang	0	0	0	0	0	0
4	Tebas	Orang	1	1	0	0	8	3
5	Pemangkat	Orang	0	0	0	0	1	1
6	Sejangkung	Orang	0	0	0	0	0	0
7	Selakau	Orang	0	0	0	0	0	0
8	Paloh	Orang	0	0	0	0	0	0
9	Sajingan Besar	Orang	0	0	0	0	0	2
10	Subah	Orang	0	0	0	1	1	2
11	Galing	Orang	2	2	4	1	2	1
12	Tekarang	Orang	2	0	0	0	0	0
13	Semparuk	Orang	2	0	0	1	2	0
14	Sajad	Orang	1	0	1	0	0	1
15	Sebawi	Orang	0	0	0	1	1	3
16	Jawai Selatan	Orang	2	0	0	0	0	0
17	Tangaran	Orang	1	0	3	0	0	0
18	Salatiga	Orang	0	0	0	0	0	0

No	Kecamatan	SATUAN	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
19	Selakau Timur	Orang	2	0	0	1	2	2
JUMLAH			17	3	9	8	22	26

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Bayi yang lahir dengan kondisi BBLR dan Gizi Buruk dan Kurang dalam proses pertumbuhan fisik dan otak, dapat berakibat pada stunting (perawakan lebih pendek dari anak normal usia 0 – 59 bulan (balita). Perkembangan jumlah stunting balita menunjukkan penurunan dari 22,34% (2018) menjadi 18,21% (2020).

2.2.2.3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Garis Kemiskinan (GK) penduduk Kabupaten Sambas per Maret 2020 sebesar Rp 438.062/kapita/bulan. Garis kemiskinan ini meningkat Rp.92.996 dibanding tahun 2016 atau rata-rata bertambah Rp.23.249 per tahun. Garis kemiskinan merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan nonmakanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka tersebut maka masuk kategori penduduk miskin.

Data pada Tabel 2.23 mengungkapkan dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sambas cenderung berkurang. Tahun 2016, jumlah penduduk miskin sebanyak 44.880 jiwa (8,54%) kemudian berkurang menjadi 41.410 jiwa (7,70%) tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk miskin dalam lima tahun terakhir pertanda keberhasilan pembangunan ekonomi dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Bersamaan dengan penurunan jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indek Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung turun. IKK (P1) menurun dari 1,29 (2016) menjadi 0,83 (2020) dan IKK (P2) turun dari 0,30 (2016) menjadi 0,16 (2020). Makna dari penurunan ini menggambarkan kehidupan penduduk miskin di Kabupaten Sambas belum masuk pada kategori baik.

Penting untuk dikemukakan, bahwa ditengah jumlah penduduk miskin yang semakin menurun, terdapat fakir miskin yang jumlahnya semakin

bertambah dari tahun ke tahun. Menurut data yang dipublikasikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, jumlah fakir miskin bertambah banyak dari 110.396 jiwa tahun 2016 menjadi 173.153 jiwa tahun 2020, lihat Tabel 2.21.

Tabel 2. 24
Statistik Kemiskinan Kabupaten Sambas, 2016-2020

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	345.066	369.202	407.346	427.240	438.062
Jumlah Penduduk Miskin (000)	44.880	45.420	45.480	43.840	41.410
Perentase Penduduk Miskin	8,54	8,59	8,55	8,19	7,70
Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan	91,46	91,41	91,45	91,81	92,30
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,29	1,05	1,02	1,28	0,83
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,30	0,24	0,21	0,27	0,16
Fakir Miskin (Jiwa)	110.396	158.921	169.710	170.386	173.153

Sumber: BPS Kabupaten Sambas, Tahun 2021

2.2.2.4. Kesempatan Kerja

Kebutuhan akan tenaga kerja disebut sebagai kesempatan kerja. Definisi dari kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja dan tenaga kerja juga meningkat, namun tidak dibarengi dengan kesempatan kerja yang sama. Oleh karena itu, dari sekian banyak angkatan kerja ada penduduk yang tidak bekerja atau disebut sebagai pengangguran. dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lapangan kerja yang tersedia dalam suatu negara, semakin besar pula kesempatan kerja bagi tenaga kerja, sehingga semakin kecil tingkat pengangguran, dan berlaku sebaliknya.

Penduduk usia kerja yang bekerja pada tahun 2015 sebanyak 252.439 jiwa. Lima tahun berikutnya, penduduk usia kerja yang bekerja bertambah menjadi 282.246 jiwa (2020) atau bertambah rata-rata 2,36 % per tahun.

Hingga tahun 2020, terdapat 394.647 jiwa penduduk usia kerja (tenaga kerja) terdiri dari 48,55% laki-laki dan 51,45% perempuan. Tenaga kerja perempuan lebih banyak dibanding tenaga kerja laki-laki. Penduduk usia kerja ini terbagi atas Angkatan Kerja (AK) sebanyak 293.125 jiwa dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebanyak 101.522 jiwa. Dari total AK, sebagian besar (96,29%) sudah bekerja dan selebihnya (3,71%) merupakan pengangguran.

Seiring dengan struktur ekonomi Kabupaten Sambas yang berbasis pertanian, sebagian besar angkatan kerja yang bekerja terserap di sektor pertanian, yakni sekitar 60,43 persen. Angkatan kerja yang bekerja di sektor manufaktur dan jasa ,masing-masing 13,00 dan 26,58 persen.

Keadaan pasar kerja di Kabupaten Sambas menunjukkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja terus bertambah setiap tahunnya, rata-rata pertambahannya 1,88% per tahun selama periode 2015-2020, namun pertambahan permintaan tenaga kerja lebih rendah dari 1,88%. Tingkat pengangguran cenderung berkurang dari 4,85% (2015) menjadi 3,71% (2020).

Tabel 2. 25
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan
di Kabupaten Sambas Tahun 2015-2020

Jenis Kegiatan	2015	2017	2018	2019	2020
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas	360.744	368.571	372.318	376.151	394.647
Angkatan Kerja	265.304	258.052	265.433	268.913	293.125
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,54	70,01	71,29	71,49	74,27
Bekerja	252.439	247.108	256.560	259.273	282.246
Pengangguran Terbuka	12.865	10.944	8.873	9.640	18.879
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,85	4,24	3,34	3,58	3,71
Bukan Angkatan Kerja	95.440	110.519	106.885	107.238	101.522
Sekolah	26.812	27.581	24.796	23.000	20.421
Mengurus Rumah Tangga	51.414	68.920	69.416	68.868	63.162
Lainnya	17.214	14.018	12.673	15.370	17.939

Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka

2.2.2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu Negara/daerah. Di Kabupaten Sambas, Pembangunan Manusia yang diukur berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi selama periode 2016-2020 bergerak sangat lambat. Hingga tahun 2020, IPM Sambas sebesar 67,03, lebih rendah dari rata-rata IPM propinsi (67,66) dan berada pada rangking 6 dari 14 Kabupaten/Kota, lihat Tabel 2.24. Laju Pertumbuhannya tergolong lambat, yakni 0,90% per tahun.

Penyebab utama lambatnya pertambahan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sambas adalah dimensi pendidikan dan dimensi kesehatan.

Pada dimensi pendidikan, capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 6,71 tahun masih belum menggembirakan, masih lebih rendah dari RLS propinsi (7,37 tahun) dan berada di ranking 13 dari 14 kabupaten/kota. Demikian juga halnya indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), capaian HLS sebesar 12,61 tahun, sedikit lebih tinggi dari HLS Propinsi (12,60 tahun), berada di ranking 4 dari 14 Kabupaten.

Dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator harapan hidup, pertambahannya belum menggembirakan. Pertambahannya relatif lambat, rata-rata 0,29% periode 2015-2020. Angka Harapan Hidup sebesar 68,93 tahun 2020, masih lebih rendah dari kabupaten/kota lainnya (ranging 13 dari 14 Kabupaten/Kota).

Dimensi ekonomi, perkembangannya belum menggembirakan dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia. Pengeluaran per kapita/tahun tahun 2020 turun sebesar 0,67% dibanding tahun 2019 menjadi Rp. 9,858 juta. Penurunan ini merupakan angka tertinggi di antara 14 kabupaten/kota dan berada di ranking 3 dari 14 Kabupaten/Kota.

Mencermati ke empat indikator IPM, dapat dinyatakan bahwa perlambatan peningkatan IPM tahun 2020 disebabkan menurunnya kinerja perekonomian sebagai akibat pandemic covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di tahun 2020 diikuti dengan penurunan pengeluaran/kapita/tahun dari Rp. 9.924 juta tahun 2019 menjadi 9.858 juta tahun 2020, lihat Tabel 2.24.

Tabel 2. 26
Perkembangan IPM Kabupaten Sambas dan Indikatornya
Tahun 2016 – 2020

Indikator IPM	Tahun					Ranking
	2016	2017	2018	2019	2020	
Angka Harapan Hidup (tahun)	68,05	68,17	68,50	68,83	68,93	13
Rata2 Lama Sekolah (tahun)	6,42	6,67	6,68	6,70	6,71	13
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,92	12,38	12,52	12,60	12,61	4
Pengeluaran/kapita/thn (Rp.000)	9.311	9.403	9.774	9.924	9.858	3
IPM Kabupaten Sambas	64,94	65,92	66,61	67,02	67,03	6
IPM Propinsi Kalimantan Barat	65,88	66,26	66,98	67,65	67,66	

Sumber: BPS Kalimantan Barat, Tahun 2021.

2.2.3.Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sambas tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar

tertentu, namun juga untuk memanfaatkan kekayaan khasanah seni dan budaya dalam bidang ekonomi khususnya pendukung pariwisata daerah. Kekayaan budaya merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dapat menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Gelombang ekonomi keempat (*fourth wave economic*) yang kini tengah memasuki peradaban dunia di mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun manufaktur, tetapi lebih ditopang dari karya kreativitas, keahlian, dan bakat individu yang berakar dari karya budaya. Dalam rangka pengembangan nilai budaya, Pemerintah Kabupaten Sambas mendorong berdirinya berbagai macam sanggar seni budaya di masyarakat. Selain itu, Kabupaten Sambas juga memiliki satu milik pemerintah daerah dan satu museum milik swasta yang belum registrasi. Secara rinci kondisi seni budaya di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 27
Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Sambas
Tahun 2017-2020

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sanggar Kesenian	organisasi	23	21	22	22
Jumlah Gedung Kesenian	unit	0	0	0	
Jumlah Museum	unit	1	2	2	2

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas

Sebagian besar prasarana olah raga di Kabupaten Sambas, dalam kondisi yang kurang baik. Jumlah lapangan sepak bola terbanyak di Kabupaten Sambas, namun klub olahraga terbanyak pada tahun 2020 adalah bola voli yaitu 175, futsal 49 klub dan 47 klub sepakbola. Secara rinci jumlah serta kondisi prasarana dan klub olahraga di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 28
Prasarana Olahraga di Kabupaten Sambas

URAIAN	2018	2019	2020	SATUAN
1. Jumlah Lapangan Bola Voli	122	174	176	Unit
a. Baik		4	5	Unit
b. Kurang Baik	122	170	171	Unit
2. Jumlah Lapangan Bola Basket	3	4	6	Unit
a. Baik		1	2	Unit
b. Kurang Baik	3	3	4	Unit
3. Jumlah Lapangan Tenis	3	3	4	Unit
a. Baik	2	2	2	Unit

URAIAN	2018	2019	2020	SATUAN
b. Kurang Baik	1	1	2	Unit
4. Jumlah Lapangan Sepak Bola	194	196	197	Unit
a. Baik	4	6	7	Unit
b. Kurang Baik	190	190	190	Unit
5. Jumlah Kolam Renang	3	3	4	Unit
a. Baik	3	1	1	Unit
b. Kurang Baik		2	3	Unit
6. Jumlah Sasana Tinju/Beladiri	16	2	2	Unit
a. Baik	16	-	-	Unit
b. Kurang Baik		2	2	Unit
7. Jumlah Rumah Billiard	3	6	6	Unit
a. Baik		1	1	Unit
b. Kurang Baik	3	5	5	Unit

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sambas

Tabel 2. 29
Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Sambas

Klub Olahraga	2018	2019	2020
1. Bola Voli	27	174	175
2. Bola Basket	3	5	5
3. Sepakbola	47	60	62
4. Futsal	49	57	59
5. Sepak Takraw	4	6	6
6. Tenis	8	8	8
7. Tenis Meja	5	10	10
8. Bulu Tangkis	31	35	39
9. Billiard	3	4	5
10. Renang	3	3	3
11. Tinju/Beladiri	21	2	2
12. Panahan	1	3	3

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sambas

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

2.3.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar di Kabupaten Sambas tergolong tinggi (90 - 99 persen). APS Pendidikan dasar selama periode 2016-2020 menunjukkan *trend* meningkat, namun dalam tiga tahun terakhir (2018-

2020) menunjukkan penurunan. Hingga tahun 2020 APS SD sudah hampir 100 persen, tepatnya 98,25%, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Demikian juga halnya dengan APS SMP telah melebihi 90 persen. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Tabel 2. 30
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/Paket A	%	97,37	91,37	93,23	85,84	91,90
2.	SMP/Paket B	%	88,66	89,66	58,24	69,58	73,03

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) juga meningkat dari 66,09% (2016) menjadi 73,34% (2020). Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (murid) pada jenjang SMA/SMK/MA, justru meningkat dari 282 (2016) menjadi 320 (2020). Rasio guru/murid pendidikan menengah meningkat dari 16 pada tahun 2016 menjadi 17 di tahun 2020.

2.3.1.1.2. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menggambarkan keadaan penduduk kelompok umur sekolah yang tidak bersekolah lagi atau yang tidak menemantkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Faktor utama penyebab putus sekolah adalah keadaan ekonomi rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Adanya program WAJAR 9 tahun dan Program Keluarga Harapan (PKH), angka putus sekolah cenderung menurun. Hingga 2020, Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Sambas sudah mendekati tuntas, yakni SD/MI = 0,01% dan SMP/MTs = 0,04%.

Tabel 2. 31
Angka Putus Sekolah

URAIAN	2017	2018	2019	2020
1. SD/Sederajat	0,21	0,01	0,01	0,01
2. SMP/Sederajat	0,91	0,07	0,04	0,04

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas

2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan terus berlangsung di Kabupaten Sambas. Hal ini tampak pada penambahan fasilitas dan tenaga kesehatan. Fasilitas kesehatan hingga tahun 2020 meliputi Rumah Sakit Umum 4 unit. Jumlah Posyandu masih tetap sebanyak 576 unit. Posyandu ini diperuntukkan melayani perkembangan dan pertumbuhan penduduk usia di bawah lima tahun (balita).

Tabel 2. 32
Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sambas
Tahun 2016-2020

KOMPONEN	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1. Rumah Sakit Umum Daerah						
a. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe A	Unit	0	0	0	0	0
b. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B	Unit	0	0	0	0	0
c. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C	Unit	2	2	2	2	2
d. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D	Unit	0	0	0	1	1
e. Rumah Sakit Umum Daerah Tipe E	Unit	0	0	0	0	0
2. Jumlah Rumah Sakit Swasta	Unit	1	1	1	1	1
3. Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Unit	17	17	17	17	17
4. Jumlah Pos Kesehatan Desa	Unit	193	134	196	194	194
5. Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Unit	11	11	11	11	11
6. Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	92	92	92	89	89
7. Jumlah Posyandu	Unit	558	551	542	571	576
8. Jumlah Posyandu Pratama	Unit	6	36	17	41	37
9. Jumlah Posyandu Madya	Unit	339	332	304	289	299
10. Jumlah Posyandu Purnama	Unit	180	159	179	189	216
11. Jumlah Posyandu Mandiri	Unit	33	33	42	52	24

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas

Jumlah tenaga kesehatan yang berperan langsung dalam pembangunan kesehatan masyarakat dalam 5 tahun terakhir terus bertambah. Tenaga Kesehatan Paramedis (Bidan, Perawat, Farmasi dan Ahli Gizi) bertambah dari 778 orang (2016) menjadi 1.203 orang (2020). Tenaga Dokter (Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis) pada tahun 2016 berjumlah 84 orang jumlahnya, pada tahun 2019 menjadi 97 namun pada tahun 2020 menjadi 84 orang.

Tabel 2. 33
Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Sambas
Tahun 2016-2020

KOMPONEN	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1. Tenaga Medis						
a. Jumlah Dokter Umum	orang	65	67	59	63	60
b. Jumlah Dokter Spesialis	orang	14	17	20	22	12
c. Jumlah Dokter Gigi	orang	5	7	7	12	12
2. Tenaga Kebidanan/Keperawatan						
a. Jumlah Bidan	orang	400	399	443	394	513
b. Jumlah Perawat	orang	421	493	499	566	696
c. Jumlah Apoteker	orang	10	15	16	42	39
3. Tenaga Kesehatan Masyarakat	orang	39	23	30	42	40
4. Tenaga Kesehatan Lingkungan	orang	52	48	50	55	68
6. Tenaga Gizi	orang	51	48	51	58	78

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

- **Jalan**

Aspek Pelayanan Umum pada Layanan Urusan Wajib untuk bidang Pekerjaan Umum dinilai dari beberapa indikator seperti proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dengan kondisi baik serta proporsi panjang jaringan jalan desa dalam kondisi baik.

Tabel 2. 34
Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Jenis Permukaan (Kilometer)

No.	Jenis Permukaan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aspal	322,273	331,120	343,946	353,038	392,699
2	Kerikil	155,768	175,946	169,026	164,605	156,424
3	Tanah	624,165	595,140	589,234	584,563	553,083
Jumlah		1.102,206	1.102,206	1.102,206	1.102,206	1.102,206

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sambas (Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2021)

Dalam prosentase data panjang jalan berdasarkan jenis permukaan Jalan Kabupaten dalam kurun waktu lima tahun ini dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2. 3
Prosentase Panjang Jalan Kabupaten Sambas
Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2016 - 2020



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sambas (Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

Indikator yang menunjukkan perbaikan adalah bertambahnya prosentase panjang jalan dalam wewenang kabupaten dengan permukaan aspal jika kita baca data tersebut di atas, diketahui bahwa selama kurun waktu 2016-2020 terdapat pertambahan panjang 70,43 kilometer atau 21,85%.

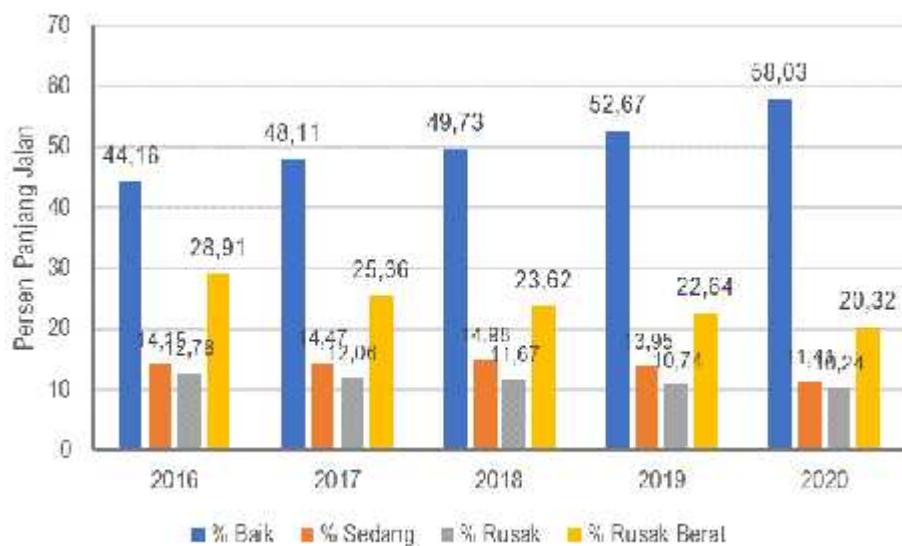
Tabel 2. 35
Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Kondisi Jalan, 2016-2020 (Kilometer)

No	Kondisi Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	486,707	530,308	548,108	580,581	639,587
2	Sedang	155,966	159,456	159,456	153,75	125,725
3	Rusak	140,9	132,950	132,950	118,376	112,892
4	Rusak Berat	318,633	279,492	279,492	249,514	224,002
Jumlah		1.102,206	1.102,206	1.102,206	1.102,206	1.102,206

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sambas (Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2021)

Pada tahun 2020 proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai angka 58,03 Meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 52,67%. Untuk proporsi panjang jaringan jalan desa dalam kondisi baik tahun 2020 adalah sebesar 15,78% yang meningkat sebesar 1,26% jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 14,52%.

Grafik 2. 4
 Prosentase Panjang Jalan Kabupaten Sambas
 Berdasarkan Kondisi Jalan Tahun 2016 - 2020



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sambas dalam BPS Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2021 yang diolah

Berdasarkan grafik 2.4 di atas, jalan dalam wewenang kabupaten dengan kondisi baik terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016 hingga 2020.

Sedangkan kondisi jalan menurut status pengawasan sebagai Jalan Desa yang terdapat di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

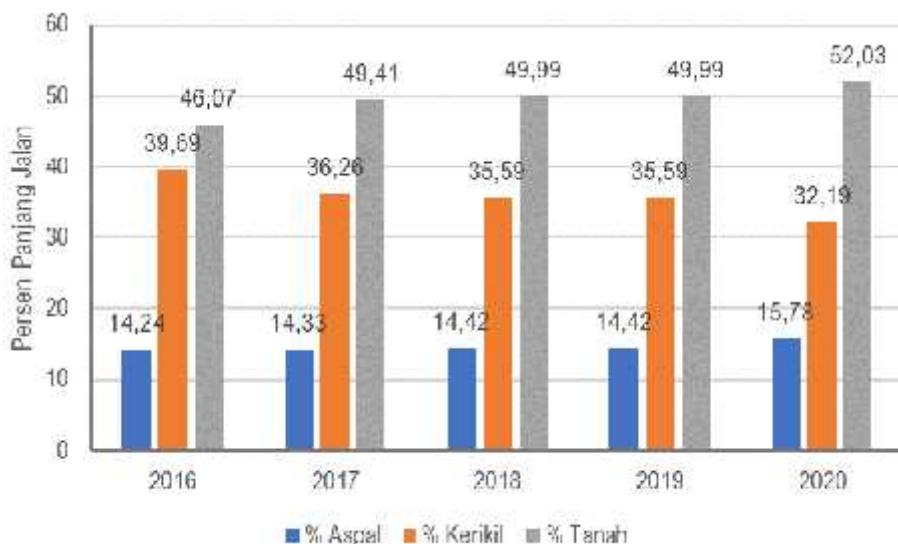
Tabel 2. 36
 Panjang Jalan Dalam Status Pengawasan Jalan Desa di Kabupaten Sambas
 Berdasarkan Jenis Permukaan, 2016-2020 (Kilometer)

No.	Kondisi Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aspal	102,843	103,507	104,171	104,171	113,991
2	Kerikil	286,685	261,885	257,085	257,085	232,535
3	Tanah	332,799	356,935	361,071	361,070	375,800
Jumlah		722,327	722,327	722,327	722,327	722,327

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sambas dalam BPS Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2021

Data di atas dalam bentuk persentase dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2. 5
Prosentase Panjang Jalan Desa di Kabupaten Sambas
Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2016 - 2020



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sambas dalam BPS Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2021

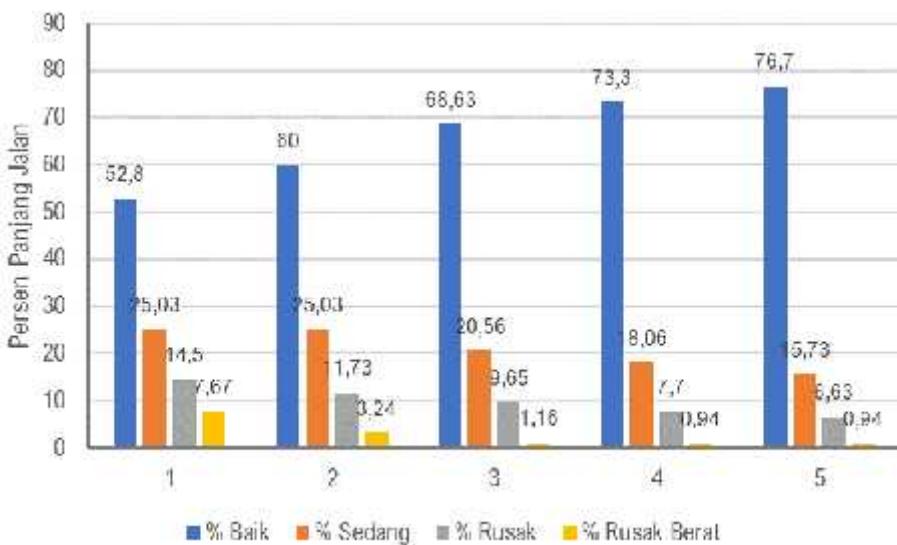
Tabel 2. 37
Panjang Jalan Dalam Status Pengawasan Jalan Desa di Kabupaten Sambas
Menurut Kondisi Jalan, Tahun 2016-2020 (Kilometer)

No.	Kondisi Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	381,433	433,462	495,780	529,447	553,997
2	Sedang	180,765	180,765	148,493	130,464	113,645
3	Rusak	104,717	84,717	67,700	55,629	47,899
4	Rusak Berat	55,412	23,383	8,354	6,786	6,785
Jumlah		722.327	722.327	720.327	722.327	722.327

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sambas dalam BPS Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2021

Data di atas dalam bentuk persentase dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2. 6
Prosentase Panjang Jalan Desa di Kabupaten Sambas berdasarkan Kondisi Jalan



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sambas dalam BPS Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2021

- Jembatan**

Jumlah dan kondisi jembatan pada tahun 2016-2020 berdasarkan kondisi dapat dilihat pada Tabel 2.31 di bawah ini.

Tabel 2. 38
Jumlah Jembatan (Unit) Berdasarkan Kondisi dan Administrasi

Tahun	Jembatan Kabupaten					Jembatan Desa				
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
2016	875	62	18	146	1.101	135	7	8	10	160
2017	897	62	18	124	1.101	156	7	8	10	181
2018	919	62	18	102	1.101	181	7	8	10	206
2019	953	62	18	68	1.101	191	7	8	10	216
2020	980	62	18	41	1.101	217	7	8	10	242

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas

- Pengairan**

Tabel 2. 39
Kondisi Infrastruktur Pengairan Tahun 2020

No.	Item Pekerjaan	Volume	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Saluran Primer	560.712 m	424.391	91.836	44.485

No.	Item Pekerjaan	Volume	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
2	Saluran Sekunder	1.336.022 m	940.962	234.085	160.975
3	Saluran Sub Sekunder	1.106.530 m	898.326	110.972	97.232
4	Tanggul	602.465 m	327.701	109.729	165.035
5	Bangunan Air	461 buah	379	5	77

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas

2.3.1.4. Perumahan dan Permukiman

Program untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni terus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Sambas dimana terjadi penurunan rumah tidak layak huni selama lima tahun terakhir dari 41.164 unit pada tahun 2016 menjadi 38.167 unit pada tahun 2020.

Tabel 2. 40
Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi Tahun 2016 - 2020

No.	Komponen	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Layak Huni	Unit	150.864	151.324	152.561	153.088	153.861
2	Rumah Tidak Layak Huni	Unit	41.164	40.704	39.467	38.940	38.167
3	% Rumah Layak Huni	%	78,56	78,80	79,45	79,72	80,12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas

2.3.1.5. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Unsur yang menunjukkan kondisi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sambas dapat ditunjukkan melalui beberapa hal, yaitu kasus ketertiban, ketentraman, dan keindahan, sarana dan aparat keamanan dan ketertiban umum, kejadian kebakaran, dan kondisi kebencanaan. Pertama, jumlah kasus ketertiban, ketentraman, keindahan di Kabupaten Sambas selama tahun 2016 hingga 2018 terus mengalami penuruan.

Sarana keamanan dan ketertiban umum yang tersedia di Kabupaten Sambas adalah pos siskamling sebanyak 349 unit, kendaraan operasional roda 2 (dua) sebanyak 10 unit, kendaraan operasional roda 4 (empat) sebanyak 5 unit. Sedangkan jumlah aparat keamanan dan ketertiban pada tahun 2018 sebanyak 3.453 orang, menurun sebanyak 154 orang dibandingkan tahun 2017. Aparat keamanan dan ketertiban terdiri dari aparat pamong praja, aparat linmas, petugas patroli satpol PP dan petugas perlindungan masyarakat.

Tabel 2. 41
Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum
Tahun 2016-2020

URAIAN	TAHUN					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1. Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum	74	3.607	3.453	3.320	4.587	Orang
a. Jumlah Aparat Pamong Praja	44	51	42	55	55	Orang
b. Jumlah Aparat Linmas	0	50	41	54	54	Orang
c. Jumlah Petugas Patroli Satpol PP	30	34	33	153	1.366	Orang
d. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	0	3.337	3.337	3.058	3112	Orang
2. Jumlah Sarana Keamanan dan Ketertiban Umum	0	349	349	393	393	Unit
a. Jumlah Pos Keamanan	0	0	0	0	0	Unit
b. Jumlah Pos Kamling	0	349	349	393	393	Unit
3. Jumlah Kendaraan Operasional	14	15	15	19	19	Unit
a. Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2	10	10	10	14	14	Unit
b. Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4	4	5	5	5	5	Unit

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas

Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Sambas pada tahun 2020 sebanyak 54 kejadian, menurun sebesar 17 kasus dibandingkan tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2019 ada 71 kasus kebakaran, meningkat sebanyak 36 kasus jika dibandingkan tahun 2018.

Tabel 2. 42
Jumlah Kejadian Kebakaran Tahun 2016-2020

No.	Komponen	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mobil Pemadam Kebakaran	Unit	5	5	5	7	7
2.	Pos Pemadam Kebakaran	Unit	13	13	13	13	13
3.	Jumlah Kejadian Kebakaran						
	- Kebakaran Permukiman	Kasus	-	-	-	14	12
	- Kebakaran Hutan dan Lahan	Kasus	-	11	35	57	42

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas

2.3.1.6. Sosial

Kondisi sosial di Kabupaten Sambas dapat diidentifikasi dari beberapa indikator, yaitu jumlah penduduk dan rumah tangga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), penerimaan dan penyaluran zakat, dan sebaran agama dan tempat ibadah masyarakat. Tiga kecamatan dengan jumlah

penduduk dan rumah tangga miskin terbanyak berturut-turut adalah Kecamatan Selakau, Tebas, dan Pemangkat. Permasalahan PMKS di Kabupaten Sambas sampai tahun 2019 masih didominasi oleh kategori fakir miskin (170.386 orang) dan lansia terlantar (14.489 orang). Kondisi keagamaan di Kabupaten Sambas didominasi oleh masyarakat muslim dengan total 560.288 jiwa dan telah memiliki 731 masjid dan 425 musholla. Pemeluk agama Katolik banyak menempati Kecamatan Sajingan Besar, sementara penganut agama Kristen dan Hindu lebih banyak mendiami Kecamatan Subah. Masyarakat beragama Budha lebih banyak menempati Kecamatan Pemangkat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2. 43
Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sambas
Tahun 2018-2020

Kecamatan	2018		2019		2020	
	Penduduk Miskin (Orang)	Rumah Tangga Miskin (Rumah Tangga)	Penduduk Miskin (Orang)	Rumah Tangga Miskin (Rumah Tangga)	Penduduk Miskin (Orang)	Rumah Tangga Miskin (Rumah Tangga)
Selakau	21.683	5.200	21.855	5.205	22.139	5.313
Selakau Timur	5.233	1.476	5.154	1.457	5.127	1.454
Pemangkat	14.915	3.470	941	3.379	14.795	3.377
Semparuk	5.207	1.491	5.485	1.476	5.416	1.481
Salatiga	8.277	2.158	8.414	2.149	8.412	2.175
Tebas	21.183	5.751	21.156	5.691	20.895	5.637
Tekarang	5.889	1.483	6.209	1.474	6.153	1.476
Sambas	13.587	3.445	13.689	3.389	13.580	3.394
Subah	6.619	1.835	6.481	1.777	6.515	1.794
Sebawi	4.674	1.178	4.740	1.197	4.461	1.183
Sajad	4.755	1.030	4.743	1.005	4.717	1.005
Jawai	12.059	3.066	11.712	2.975	11.749	3.037
Jawai Selatan	7.357	1.783	7.184	1.718	7.154	1.716
Teluk Keramat	11.081	3.087	11.192	3.057	11.212	3.086
Galing	4.427	1.262	4.582	1.250	4.504	1.249
Tangaran	4.873	1.361	4.953	1.360	4.846	1.343
Sejangkung	8.042	2.244	8.164	2.223	8.024	2.202
Sajingan Besar	3.048	693	3.048	683	3.025	683
Paloh	6.801	1.903	6.684	1.892	6.641	1.885
Kab. Sambas	169.710	43.916	156.386	43.357	169.365	43.490

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kemensos

Tabel 2. 44
 Penerimaan dan Penyaluran Zakat Fitrah, Mal, dan Infaq
 di Kabupaten Sambas 2017-2020

Keterangan	Satuan	2017	2018	2019	2020
Penerimaan dan Penyaluran Zakat Fitrah					
Jiwa	Orang	625	735	124.955	123.879
Uang	Rupiah	1.087.560.000	1.091.065.000	2.752.283.000	2.564.762.500
Beras	Kg	1.087.560	1.091.065	371.641.700	531.282.500
Penerimaan dan Penyaluran Zakat Mal (Harta)					
Uang	Rupiah	355.604.448	723.831.372	933.748.030	661.019.563
Lain-lain (Infaq)	Rupiah	147.677.417	529.924.331	194.496.975	344.660.200

Sumber: Buku Profil Kabupaten Sambas Tahun 2020

Tabel 2. 45
 Jumlah Rumah Ibadah per Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2020

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Kapel Katolik	Pura	Vihara	Klenteng
1	Selakau	46	3	4	1	0	0	11	3
2	Selakau Timur	17	1	1	0	0	0	0	1
3	Pemangkat	58	23	4	1	2	0	84	0
4	Semparuk	36	14	1	0	0	0	3	0
5	Salatiga	21	7	0	0	0	0	15	0
6	Tebas	83	39	21	10	1	0	0	9
7	Tekarang	18	19	0	0	0	0	7	0
8	Sambas	81	34	5	1	4	0	3	1
9	Subah	15	10	33	33	0	2	1	0
10	Sebawi	18	29	2	0	0	0	1	0
11	Sajad	11	26	0	0	0	0	0	0
12	Jawai	60	52	2	0	0	0	7	2
13	Jawai Selatan	21	2	1	0	1	0	0	16
14	Teluk Keramat	81	68	2	1	1	0	0	4
15	Galing	47	30	0	1	1	0	0	0
16	Tangaran	37	26	0	0	0	0	0	0
17	Sejangkung	35	26	2	1	0	0	0	0
18	Sajingan Besar	4	0	14	25	1	0	0	0
19	Paloh	42	16	3	1	0	0	4	0
Kab. Sambas		731	425	95	75	11	2	136	36

Sumber: BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka, Tahun 2021

Tabel 2. 46
 Jumlah Pemeluk Agama per Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2020

No	Kecamatan	Agama					
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Selakau	32.978	198	133	1	4.456	274
2	Selakau Timur	12.698	101	17	1	3	-

No	Kecamatan	Agama					
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
3	Pemangkat	39.639	764	982	8	11.101	1.835
4	Semparuk	28.327	84	81	5	1.924	346
5	Salatiga	16.994	113	28	1	1.945	65
6	Tebas	68.267	2.342	2.395	8	8.393	133
7	Tekarang	17.457	25	5	-	393	19
8	Sambas	50.372	746	1.456	6	4.450	116
9	Subah	15.647	3.934	3.869	141	89	1
10	Sebawi	17.595	154	62	14	4.732	87
11	Sajad	13.850	2	4	-	16	-
12	Jawai	46.304	194	40	1	1.515	13
13	Jawai Selatan	26.203	3	6	-	10	-
14	Teluk Keramat	73.166	297	328	5	1.235	49
15	Galing	25.174	11	54	2	6	-
16	Tangaran	18.836	102	47	-	1.575	76
17	Sejangkung	27.160	64	71	-	178	3
18	Sajingan Besar	1.458	2.106	8.347	-	17	-
19	Paloh	28.163	405	261	1	1.480	2
Kab. Sambas		560.288	11.645	18.186	194	43.518	3.019

Sumber: BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2021

2.3.1.7. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi daerah terutama dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor ketenagakerjaan pada kelompok penduduk yang tergolong miskin, kelompok penduduk miskin diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraannya.

a. Angkatan Kerja (labour force)

Angkatan Kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Selama periode 2015-2020, pertambahan AK sangat rendah, rata-rata 2,1% per tahun dari 265.304 jiwa (2015). Tahun 2020, jumlah AK sebanyak 293.125 jiwa terdiri dari laki-laki 56,15% dan perempuan 43,85%. Dari sejumlah AK ini, sebagian besar (96,29%) sudah bekerja. Laki-laki yang bekerja (55,90%) lebih banyak dari perempuan yang bekerja (44,10%).

Kualitas AK yang bekerja tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan latar belakang pendidikannya yang sebagian besar (77,19%) Tamatan SMP dan SD ke

bawah. AK yang berpendidikan Tamat SMA dan Perguruan Tinggi masing-masing 17,81% dan 5,00%.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode 2015-2020 cenderung menurun hingga tahun 2019, kemudian meningkat lagi tahun 2020 di tengah pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan bahkan mengalami kontraksi akibat pandemic covid-19. TPT menurun dari 4,85%, tahun 2015 menjadi 3,71% tahun 2020, lihat Tabel 2.41. Peningkatan TPT tahun 2019-2020 disebabkan pandemic covid-19 dan kebijakannya yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi dan penurunan daya beli akibat kehilangan dan penurunan penghasilan.

Berdasarkan jenis kelamin, pada periode 2015-2020, TPT laki-laki menurun dari 6,66% (2015) menjadi 4,14% (2020), sementara TPT perempuan justru semakin meningkat dari 2,56% menjadi 3,16% pada periode yang sama. Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 10.879 angkatan kerja yang menganggur tahun 2020, sebagian besar (51,84%) berpendidikan SMP ke bawah. Sedangkan yang berpendidikan Tamat SMA dan Perguruan Tinggi masing-masing 36,55% dan 11,61.

Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 73,54% (2015) menjadi 74,27% (2020). Tampak perbedaan yang jauh antara TPAK laki-laki dengan perempuan. TPAK laki-laki meningkat dari 84,49% (2015) menjadi 85,91% (2020). Sementara itu, TPAK perempuan yang mengalami peningkatan sedikit dari 63,22% (2015) menjadi 63,30% (2020). Kondisi ini mengindikasikan penopang utama dalam ekonomi rumah tangga adalah kaum laki-laki. Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi masih terbatas dan perlu dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tabel 2. 47
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan TPT dan TPAK
Kabupaten Sambas Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2017	2018	2019	2020
TPT (%)	4,85	4,24	3,34	3,58	3,71
TPAK (%)	73,54	70,01	71,29	71,49	74,28

Sumber: Sakernas, Agustus 2020

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Adapun yang dibahas dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu 1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah. 2) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta. 3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 4) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai berikut:

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan Tingkat Pendidikan. Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah dalam dua tahun terakhir semakin meningkat dan lebih tinggi dari laki-laki. Ini terbukti dari bertambahnya jumlah perempuan yang berstatus sebagai PNS. Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah tahun 2019 sebesar 49,57%, lebih rendah sedikit dari partisipasi laki-laki 50,43% dari 6,265 PNS. Tahun berikutnya, partisipasi perempuan meningkat sedikit menjadi 50,58%, lebih tinggi dari partisipasi laki-laki 49,42% dari 6.237 PNS.

Kualitas SDM Perempuan yang berpartisipasi di lembaga Pemerintah tergolong tinggi. Tahun 2020, dari 3.155 perempuan PNS, sebagian besar (89,00%) tergolong berpendidikan tinggi (Diploma-1 hingga Magister dan Doktor), yang berpendidikan SMA/Sederajat 10,71% dan selebihnya (0,28%) berpendidikan SMP ke bawah. Berbeda dalam bidang politik, keterwakilan perempuan masih tergolong sangat rendah, hanya 6 orang dari 45 kursi parlemen (DPRD), atau 13,33 persen.

Tabel 2. 48
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kab. Sambas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018-2020

Golongan Ruang/ Tingkat Pendidikan	Tahun					
	2018		2019		2020	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
SD	26	4	21	4	17	4
SLTP	53	6	43	5	40	5
SLTA	902	490	784	417	676	338
D1	33	62	26	42	19	36
D2	518	515	425	432	347	348
D3	233	493	238	544	288	585
D4	71	34	86	39	81	47
S1	1.265	1.408	1.369	1.562	1.432	1.718
S2	166	50	178	66	177	74
S3	0	0	1	0	5	0
Jumlah	3.267	3.062	3.171	3.111	2.988	2.970

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah Kab. Sambas

b. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.

Partisipasi perempuan dalam lembaga swasta dapat ditelusuri dari status pekerjaannya. Pada tahun 2020 dari 124.466 perempuan yang bekerja, 30,08% bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri. Perempuan yang punya usaha dibantu buruh tetap dan tidak tetap relatif sedikit (18,37%). Meskipun TPAK perempuan semakin meningkat dari 63,22% (2015) menjadi 63,30% (2020) namun capaiannya masih jauh lebih rendah dibanding TPAK laki-laki, yakni 84,49% (2015) dan 85,91% (2020).

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dapat dicermati dari ukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selama periode 2017-2020, IDG di Kabupaten Sambas menunjukkan *trend* negatif. IDG menurun dari 64,46% (2016) menjadi 63,26% (2020) dan berada di ranking 9 dari 14 Kabupaten/Kota, lebih rendah dari capaian IDG Kalimantan Barat, lihat Tabel 2.39. Semakin dekat angka IDG ke 100, pertanda semakin kecil ketidakadilan pembangunan terhadap perempuan, dan sebaliknya.

Tabel 2. 49

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sambas Tahun 2017 - 2020

Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	68,57	68,67	68,07	68,07
Kabupaten Sambas	64,46	64,47	61,36	63,26

Sumber: BPS.Kalbar.go.id

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dari tahun ke tahun ada kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terjadi. Bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksplorasi ekonomi dan kekerasan lainnya (perlakuan kejam, *Abuse* atau perlakuan salah, ketidakadilan atau keberpihakan antara anak satu dan lainnya, ancaman kekerasan dan pemaksaan). Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah kemiskinan, pendidikan, sosial budaya, kemajuan teknologi informasi, pola asuh, perilaku kasar dan lingkungan.

Jumlah Kasus Kekerasan dengan korban Anak dan Perempuan di Kabupaten Sambas cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 – 2020, jumlah kasus kekerasan berkurang dari 153 kasus tahun 2016 menjadi 67 kasus tahun 2020. Kasus kekerasan lebih banyak dialami oleh anak adalah sebesar 93% dari 43 kasus kekerasan seksual.

Tabel 2. 50
Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016 - 2020

Jenis Data		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Kasus kekerasan terhadap perempuan							
- KDRT	Kasus	25	20	27	6	4	
- Tracfiking	Kasus	-	2	3	2	1	
- Pelecehan seksual	Kasus	7	7	5	2	3	
- Hukum	Kasus	26	9	3	1	2	
2. Jumlah Organisasi Perempuan	Buah	33	35	19	35	35	
3. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Orang	6	6	6	6	6	

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.1.9. Pangan

a. Pola Pangan Harapan

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan atau *Desirable Dietary Pattern* adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Pola Pangan Harapan merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Tabel 2. 51

Data Pola Pangan Harapan di Kabupaten Sambas dari Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pola Pangan Harapan	72,80	75,30	76,66	82,06	79,7

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Tahun 2021

Pola pangan harapan di Kabupaten Sambas meningkat pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2016 dari 72,80 menjadi 79,7.

b. Konsumsi Energi

Konsumsi energi dan protein yang ada di Kabupaten Sambas dari tahun 2016 sampai 2019 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 rata-rata konsumsi energi sebanyak 1.946,3 kal/kap/hari, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebanyak 2.140,44 kal/kap/hari. Konsumsi protein yang ada di Kabupaten Sambas dari tahun 2016 sampai 2019 juga cenderung meningkat. Pada tahun 2016 rata-rata konsumsi energi sebanyak 54,5 gram/kap/hari sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 60,61 gram/kap/hari. Data konsumsi energi dan protein Kabupaten Sambas pada tahun 2016 – 2019 tersaji pada Tabel 2.41.

Tabel 2. 52

Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein di Kabupaten Sambas

Uraian	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	

Uraian	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
1. Energi	1.946,3	1.868,94	2.123,74	2.140,44	1.907,9	Kal/Kap/Hari
2. Protein	54,5	53,80	59,04	60,61	55,60	Gram/Kap/Hari

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas

Tabel 2. 53

Konsumsi Penduduk Terhadap Bahan Pangan di Kabupaten Sambas

Kelompok/Jenis Pangan	2016	2017	2018	2019	2020	Keterangan
1. Padi-Padian						
Beras	91,19	82,76	100,84	98,88	96,36	Kg/Tahun
Jagung	0,16	0,08	0,24	0,49	0,37	Kg/Tahun
Terigu	10,68	12,45	15,99	15,15	15,48	Kg/Tahun
Subtotal Padi-padian	102,03	95,29	117,06	114,52	112,21	Kg/Tahun
2. Umbi-umbian						
Singkong	3,95	5,99	7,49	3,89	5,41	Kg/Tahun
Ubi Jalar	0,73	1,50	1,47	1,36	1,50	Kg/Tahun
Kentang	0,57	0,54	0,70	0,54	0,66	Kg/Tahun
Sagu	0,23	0,23	0,18	0,16	0,28	Kg/Tahun
Umbi Lainnya	0,46	0,73	0,93	0,54	0,80	Kg/Tahun
Subtotal Umbi-umbian	5,94	8,99	10,77	6,49	8,64	Kg/Tahun
3. Pangan Hewani						
Daging Ruminansia	1,18	0,95	3,73	2,56	2,36	Kg/Tahun
Daging Unggas	5,71	7,78	6,54	7,44	5,53	Kg/Tahun
Telur	7,85	7,92	7,45	7,29	7,92	Kg/Tahun
Susu	2,69	1,47	2,44	2,41	2,06	Liter/Tahun
Ikan	31,62	31,28	28,76	30,34	31,71	Kg/Tahun
Subtotal Pangan Hewani	49,05	49,40	48,92	50,04	49,57	Kg/Tahun
4. Minyak dan Lemak						
Minyak Kelapa	1,10	2,12	1,40	1,04	0,65	Liter/Tahun
Minyak Lainnya	8,30	6,71	7,35	8,37	8,23	Liter/Tahun
Margarin	0,00	0,00	0,08	0,21	0,05	Liter/Tahun
Subtotal Minyak dan Lemak	9,39	8,83	8,83	9,62	8,93	Liter/Tahun
5. Buah/Biji Berminyak						
Kelapa	2,27	1,69	1,38	0,84	1,08	Kg/Tahun
Kemiri	0,07	0,05	0,05	0,05	0,06	Kg/Tahun
Subtotal Buah/Biji Berminyak	2,34	1,74	1,43	0,90	1,14	Kg/Tahun
6. Kacang-kacangan						
Kacang Kedelai	5,63	6,04	3,98	4,26	3,93	Kg/Tahun
Kacang Tanah	0,20	0,13	0,24	0,20	0,14	Kg/Tahun
Kacang Hijau	0,00	0,00	0,07	0,08	0,10	Kg/Tahun
Kacang lain	0,00	0,00	0,03	0,03	0,12	Kg/Tahun
Subtotal Kacang-	5,83	6,17	4,31	4,56	4,28	Kg/Tahun

Kelompok/Jenis Pangan	2016	2017	2018	2019	2020	Keterangan
kacangan						
7. Gula						
Gula Pasir	14,53	12,98	11,60	11,94	11,54	Kg/Tahun
Gula Merah	0,23	0,32	0,26	0,26	0,18	Kg/Tahun
Subtotal Gula	14,76	13,30	11,85	12,20	11,72	Kg/Tahun
8. Sayur dan Buah						
Sayur	29,42	25,63	36,41	38,29	36,40	Kg/Tahun
Buah	24,25	37,33	21,29	36,81	35,40	Kg/Tahun
Subtotal Sayur dan Buah	53,67	62,96	57,70	75,10	71,80	Kg/Tahun
9. Lain-lain						
Minuman	20,64	17,46	37,47	35,34	35,46	Liter/Tahun
Bumbu	4,17	3,04	4,37	4,17	4,81	Kg/Tahun
Subtotal Lain-lain	24,82	20,50	41,85	39,51	40,28	Kg/Tahun

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Tahun 2021

2.3.1.10. Pertanahan

- Persentase luas lahan bersertifikat

Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat yang sangat mendasar. Kondisi Pertanahan bersertifikat di Kabupaten Sambas dari tahun 2016 sampai 2020 tersaji pada Tabel 2.46.

Tabel 2. 54
Pertanahan di Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2020

Pertanahan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Jumlah Tanah yang Bersertifikat (Per Bidang)					
1. Hak Milik	3.002	11.111	19.566	8.303	8.396
2. Hak Guna Bangunan	17	14	76	63	37
3. Hak Guna Usaha	1	8	24	12	26
4. Hak Pakai	10	39	123	68	55
5. Hak Milik Wakaf	2	5	45	27	13
Jumlah	3.032	11.177	19.834	8.473	8.527
B. Luas Tanah yang Bersertifikat (Per Meter Persegi)					
1. Hak Milik	7.525.310	32.601.318	123.252.887	33.854.909	46.368.313
2. Hak Guna Banguna	462.162	373.261	25.345	513.817	36.101
3. Hak Guna Usaha	811.000	13.504.628	210.310.840	55.571.930	24.458.223
4. Hak Pakai	89.946	439.221	759.309	2.443.480	197.661
5. Hak Milik Wakaf	4.551	8.239	90.074	48.062	14.045
Jumlah	8.892.969	46.926.667	334.438.455	92.432.198	71.074.343

Sumber: BPN Kabupaten Sambas

2.3.1.11. Lingkungan Hidup

- Penanganan Sampah

Penanganan sampah digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Tabel 2. 55

Produksi Sampah di Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Produksi Sampah					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sampah yang ada (M^3) per hari	428,96	436,3	446,44	530,08	608,28	614,85
2	Sampah yang dapat diangkut pertahun (M^3)	35.770	48.545	59.130	62.050	64.240	70.080
3	Rata-rata sampah yang terangkut per hari (M^3)	98	133	162	170	176	192

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

2.3.1.12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelengaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada aspek pelayanan umum berkaitan dengan hak warga negara untuk memperoleh penegasan status administrasi kependudukannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa setiap penduduk berhak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yang sama dalam hal pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sejalan dengan itu maka kegiatan pendaftaran penduduk menjadi kewajiban pemerintah, artinya pemerintah termasuk pemerintah daerah wajib melakukan pendaftaran seluruh penduduk yang ada diwilayahnya untuk diberikan dokumen kependudukan sebagai penegasan status kependudukan masyarakat. Regulasi tersebut mengamanatkan pemerintah untuk bersifat aktif. Hal ini sejalan dengan paradigma baru yang memandang bahwa data penduduk yang valid merupakan kepentingan pemerintah. Data penduduk yang valid tentunya bernilai sangat strategis dalam mendukung berbagai agenda pembangunan, ekonomi, sosial hingga penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian umur, jenis kelamin, agama, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan

kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2. 56
Kepemilikan KTP, Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga
di Kabupaten Sambas Tahun 2017-2020

NO.	URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Wajib KTP	orang	443.953	446.294	445.859	450.224
2	Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP	orang	379.419	430.452	445.859	451.964
3	Jumlah Penduduk > 17 tahun Yang ber KTP	orang	379.419	430.452	445.859	451.964
4	Jumlah Penduduk yang telah menikah	orang	286.856	285.196	289.852	288.033
5	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin	orang	633.182	635.379	636.848	639.285
	a. Laki – laki	orang	323.027	325.898	326.821	327.416
	b. Perempuan	orang	310.155	309.481	310.027	311.869
6	Jumlah Pasangan Nikah Non Muslim yang berakta Nikah	akta	2.589	2.910	2.328	5.247
7	Jumlah keseluruhan pasangan Nikah	pasang	1.294	1.455	2.328	2.629
8	Jumlah Penduduk yang telah memiliki KK	orang	171.099	173.784	178.807	186.728
9	Jumlah Penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran	orang	244.121	-	200.665	320.243
10	Jumlah Keluarga	KK	171.099	173.784	178.807	186.728
11	Jumlah Anak Usia 0 - 18 yang memiliki Akta Kelahiran	anak	176.069	191.803	212.641	206.071

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sambas

Ket :- Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester 2 Tahun 2017, 2018, 2019,2020

2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada aspek pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini ditujukan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa di segala bidang berbasis pada kekuatan dan kearifan masyarakat desa. Khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan desa. Sampai tahun 2017 penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada aspek

pelayana publik telah berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, dan regulasi.

Jumlah Tim Penggerak PKK aktif yang dijadikan indikator adalah Jumlah Tim PKK Desa, sesuai jumlah desa yang ada Kabupaten Sambas maka jumlah Tim Penggerak PKK Desa aktif sebanyak 193 Kelompok. Sementara itu di tingkat Kabupaten dan Kecamatan masing-masing terdapat satu Tim Penggerak PKK, di samping itu di masing-masing desa juga terdapat kelompok PKK yang berada di bawah TP PKK Desa, yaitu: Kelompok PKK Dusun, Kelompok PKK RW/RT dan Desa Wisma serta BUMDesa.

Tabel 2. 57
Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Sambas
Tahun 2016-2020

Keterangan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa	Desa	193	193	193	193	193
Jumlah RW	RW	1.116	1.116	1.116	1.102	1.102
Jumlah RT	RT	2.813	2.813	2.813	2.838	2.838
Jumlah Desa Tertinggal	Desa	-	-	99	45	1
Jumlah Desa Berkembang	Desa	-	-	71	108	81
Jumlah Desa Mandiri	Desa	-	-	-	8	38
Jumlah Karang Taruna	Unit	121	121	121	121	121
Jumlah PKK	Unit	193	193	193	193	193
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Desa	Lembaga	193	193	193	193	193
Jumlah Kantor Milik Desa	Unit	183	193	193	193	193

Sumber: Buku Profil Kabupaten Sambas, Tahun 2020

2.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sambas bertambah setiap tahunnya. Pertambahan ini lebih dikarenakan jumlah kelahiran melebihi jumlah kematian dan migrasi masuk lebih banyak dari migrasi keluar. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sambas berdasarkan hasil Sensus Penduduk semakin meningkat. LPP periode 2000 – 2010 sebesar 0,92% per tahun dan periode 2010-2020 meningkat menjadi 2,42% per tahun. Peningkatan ini tergolong tinggi (melebihi 1 persen).

Peningkatan LPP di Kabupaten Sambas erat kaitannya dengan peningkatan tingkat kelahiran sebagai akibat peningkatan proporsi perempuan umur ≤ 16 tahun

semakin meningkat. Tahun 2017 proporsi penduduk umur ≤ 16 tahun sebesar 9,98% dan pada tahun 2020 meningkat 4,48% menjadi 13,20 persen.

Pengendalian Penduduk melalui Program KB di Kabupaten Sambas dalam rangka pengendalian kependudukan berlangsung dengan baik dan sudah menyebar di seluruh kecamatan. Pada tahun 2020, dari 113.208 Pasangan Usia Subur (PUS), sebagian besar berada di Kecamatan Tebas (13.737 PUS atau 12,13%) dan Kecamatan Teluk Keramat (12.522 PUS atau 11,06%). Peserta KB Aktif 80.311 pasangan atau 71,40%. Tahun 2020 ditargetkan pertambahan Akseptor KB Baru sebanyak 32.915 pasangan, bertambah 8.579 dari tahun sebelumnya (2019), namun yang tercapai hanya 14.523 pasangan atau 44,12%, jauh lebih rendah dibanding tahun 2019 (67,68%) dan 2018 (97,02%). Menurunnya capaian akseptor baru berpengaruh pada peningkatan kelahiran yang pada gilirannya meningkatkan laju pertumbuhan penduduk

Alat kontrasepsi yang dipakai Akseptor KB Baru (14.523 pasangan) adalah alat kontrasepsi modern, dan kebanyakan menggunakan alkon suntikan (8.391) dan yang paling sedikit adalah alkon KW/MOW (180). Demikian juga untuk Peserta KB Aktif yang jumlahnya 80.834 pasangan, sebagian besar (45,30%) memakai alkon suntik diikuti dengan alkon PIL (38,16%). Perbandingan peserta KB Aktif terhadap PUS mencapai 71,40%. Capaian ini meningkat dibanding cakupan peserta KB tahun 2016 (69,40%) dan merupakan cakupan tertinggi di antara 14 Kabupaten/Kota lainnya.

Rata-rata jumlah anak per keluarga, dapat diketahui dari besaran Total Fertility Rate (TFR). Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, TFR Kabupaten Sambas 3,4. Ini berarti, rata-rata jumlah anak per keluarga antara 3 - 4 jiwa. TFR Kabupaten Sambas merupakan yang tertinggi di Kalimantan Barat.

- ***Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur***

Tabel 2.42 menunjukkan jumlah terbanyak penduduk Kabupaten Sambas menurut kelompok umur, berada pada kelompok umur 10 - 44 tahun (56.643 jiwa) dan terendah pada kelompok umur 70-74 tahun sebanyak 9.571 jiwa.

Selama periode 2010-2020, telah terjadi pergeseran struktur umur penduduk di Kabupaten Sambas dari penduduk usia muda menuju usia tua. Pergeseran ini tampak dari menurunnya proporsi usia muda non produktif (0-14 tahun) dari 33,65% tahun 2010 menjadi 26,88% tahun 2020 dan meningkatnya proporsi usia tua non produktif (65 tahun lebih) dari 4,78% menjadi 5,71%. Pada

periode yang sama, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) meningkat dari 61,57% menjadi 67,41%. Perubahan struktur penduduk ini dikarenakan peningkatan pembangunan parameter demografi dan sosial ekonomi yang pada gilirannya mengundang migrasi masuk ke Kabupaten Sambas. Pertambahan penduduk lansia erat kaitannya dengan perbaikan status sosial ekonomi rumah tangga.

Tabel 2. 58
Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	28.992	27.320	56.312
5-9	28.768	27.633	56.401
10-14	29.293	27.350	56.643
15-19	27.741	26.390	54.131
20-24	26.389	24.942	51.331
25-29	25.387	23.313	48.700
30-34	26.346	23.275	49.621
35-39	26.752	23.989	50.741
40-44	24.316	22.737	47.053
45-49	21.653	20.250	41.903
50-54	16.896	15.776	32.672
55-59	13.192	13.340	26.532
60-64	10.390	11.501	21.891
65-69	8.017	8.804	16.821
70-74	4.295	5.276	9.571
75+	3.946	5.636	9.582
Jumlah	322.373	307.532	629.905

Sumber: BPS Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2021

2.3.1.15. Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan juga menunjukkan trend positif yang dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah dermaga yang melayani pergerakan masyarakat dengan menggunakan alur sungai dan juga bertambah secara signifikannya Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) yang dipasang.

Tabel 2. 59
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Sambas 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Terminal	Unit	6	6	6	6	6
2	Halte	Unit	17	22	24	28	31
3	Dermaga/steigher	Unit	226	250	283	306	308
4	Rambu, marka, dan guardrill	Unit	334	429	498	521	524

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

Akan bertambahnya satu titik simpul transportasi baru yaitu titik simpul transportasi udara berupa bandara Liku di Paloh memerlukan perencanaan jaringan yang tepat, agar dapat dikelola dengan baik dan dapat membantu pergerakan orang dan barang di Kabupaten Sambas menjadi efisien.

Terbangunnya Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak yang merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia yang berjarak hanya 135 kilometer ke Kota Sambas atau 77,2 km ke batas Kabupaten Sambas seharusnya dapat ditarik sebesar mungkin keuntungan bagi masyarakat Kabupaten Sambas.

2.3.1.16.Komunikasi dan Informasi

Pembangunan infrastruktur jaringan komputer (LAN, WAN dan internet/global area network) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas hingga saat ini terus diupayakan pengembangannya. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksi tiap-tiap Perangkat Daerah dalam jaringan internet/ intranet, sehingga transformasi data dan informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan semakin lancar.

Kondisi di Kabupaten Sambas untuk layanan media elektronik dan cetak pada rentang tahun 2017-2020 mengalami stagnansi. Hal ini ditunjukkan dari tidak ada penambahan dalam hal jumlah dan cakupan layanan stasiun radio pemerintah, radio swasta, televisi pemerintah, dan televisi swasta. Tercatat hanya terdapat masing-masing satu stasiun radio dan televisi pemerintah dengan tiga stasiun radio swasta dan satu stasiun televisi swasta. Cakupan layanan sudah mencapai 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Untuk layanan surat kabar, terdapat data yang bertolak belakang. Surat kabar nasional sampai 2020 belum mampu melayani seluruh kecamatan, sementara surat

kabar lokal sudah berhasil menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Sambas.

Layanan-layanan publik juga sudah mulai diarahkan untuk memanfaatan teknologi informasi, seperti yang telah dilakukan LPSE, Pelaksanaan Ujian Akhir berbasis komputer pada beberapa sekolah, layanan informasi perijinan, serta layanan portal www.sambas.go.id. Selanjutnya dengan konsep e-gov, peran dan keterlibatan masyarakat dalam berinteraktif melalui jaringan elektronik akan lebih terberdayakan. Masyarakat dapat ikut terlibat dan berperan aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan.

Pada bulan Nopember 2021, Kabupaten Sambas memperoleh penganugrahan keterbukaan informasi badan publik se-Kalimantan Barat kategori Pemerintah/Kota se-Kalimantan Barat sebagai badan publik peringkat 3 kualifikasi Informatif atas partisipasi dalam implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2.3.1.17.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

Persentase Koperasi Aktif

Jumlah koperasi di Kabupaten Sambas mengalami peningkatan selama tahun 2016-2020. Meskipun kondisinya membaik di tahun 2020, namun jumlah koperasi tidak aktif mengalami peningkatan yang relatif besar sejak 2016-2019. Pada tahun 2016, jumlah koperasi sebanyak 351 unit, dan meningkat menjadi 402 unit pada tahun 2020. Jumlah koperasi aktif tahun 2016 sebanyak 240 Unit (68,38%), sedangkan yang tidak aktif 111 Unit (31,62%). Pada tahun 2020, jumlah koperasi aktif sebanyak 155 Unit (38,56%), sedangkan yang tidak aktif 247 Unit (61,44%). Bila dibandingkan dengan kondisi koperasi di Kalimantan Barat pada tahun 2020 (Dinas Koperasi dan UKM Prov.Kalimantan Barat: 2021), dari jumlah koperasi sebanyak 3.876 Unit, terdapat koperasi yang aktif sebanyak 2.772 Unit (71,52%), sedangkan jumlah koperasi yang tidak aktif sebanyak 1.104 Unit (28,48%).

Tabel 2. 60
Perkembangan Koperasi Dirinci Menurut Indikator Pokok
di Kabupaten Sambas, Tahun 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	Unit	351	363	380	389	402
2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	240	252	113	133	155
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Unit	111	111	267	256	247
4	Koperasi Aktif	%	68,38	69,42	29,74	34,19	38,56
5	Koperasi Tidak Aktif	%	31,62	30,58	60,26	65,81	61,44
6	Jumlah Anggota	Orang	22.258	30.489	11.814	12.432	16.438
7	Jumlah Pengurus	Orang	1.385	--	--	--	--
8	Jumlah Pengawas	Orang	1.053	--	--	--	--
9	Jumlah Manager	Orang	29	--	--	37	37
10	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	84	--	--	13	10
11	Jumlah Modal Sendiri	Juta Rp	11.816,28	4.989,00	26.111,93	32.725,03	46.070,03
12	Jumlah Modal Luar	Juta Rp	14.674,46	19.300,00	183.195,14	215.180,84	218.216,24
13	Volume Usaha	Juta Rp	17.705,51	11.669,00	49.400,62	62.744,86	140.027,17
14	Sisa Hasil Usaha (SHU)	Juta Rp	1.478,21	1.210,00	--	3.749,46	2.355,51

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sambas, Tahun 2021

Mengingat koperasi yang tidak aktif jumlahnya masih relatif cukup besar, maka perlu dilakukan upaya pembinaan secara berkelanjutan. Ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab meningkatnya koperasi tidak aktif, yaitu antara lain:

- Pembinaaan koperasi yang lebih fokus pada koperasi aktif, karena sulitnya berkomunikasi dengan pengurus koperasi yang sudah tidak aktif. Keadaan semakin sulit karena anggota koperasi yang tidak aktif juga merupakan anggota pasif yang tidak responsif terhadap kondisi yang sedang dialami oleh koperasinya.
- Berpindahnya sebagian pengurus dan anggota koperasi ke aktivitas usaha sendiri yang lebih menjanjikan, sehingga pengurus terbebas dari birokrasi rapat pengurus dan rapat anggota.
- Efisiensi dan daya saing yang sulit ditingkatkan sehingga koperasi kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang terus menerus meningkatkan kualitas produk.
- Terbatasnya dukungan infrastruktur yang menyebabkan aktivitas koperasi terganggu perkembangannya sehingga menyebabkan pengurus tidak termotivasi mengembangkan usaha. Hingga saat ini masih sering terjadi pemadaman listrik oleh PLN di Kabupaten Sambas, padahal ketersediaan

listrik merupakan faktor utama dalam menjalankan aktivitas usaha. Disamping ketersediaan pasokan listrik, kualitas dan kuantitas jalan juga sangat menentukan.

- Perubahan fungsi lahan dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke perkebunan yang memaksa sebagian koperasi pertanian kehilangan aktivitas.

Berdasarkan jenisnya, dari 402 koperasi yang ada koperasi di Kabupaten Sambas meliputi: KUD sebanyak 38 unit, KPRI (KPN) 35 unit (5,84%), Koperasi Perkebunan (KopBun) sebanyak 74 unit, Koperasi Tani (KopTan) 20 unit, dan Koperasi Lainnya sebanyak 146 unit. Adapun jenis koperasi di Kabupaten Sambas dirinci per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 61
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi per Kecamatan
di Kabupaten Sambas, Tahun 2020

No.	Kecamatan	KUD	KPN	KOP. BUN	KOP. TAN	KOP. NEL	KOP.KAR	KSU	KOP. LAINNYA
1.	Selakau	3	1	0	1	2	0	0	7
2.	Selakau Timur	1	0	1	2	0	0	0	3
3.	Pemangkat	3	3	0	2	2	3	6	18
4.	Semparuk	3	0	0	1	0	1	0	5
5.	Salatiga	1	0	0	0	0	0	1	2
6.	Tebas	6	1	6	3	0	2	4	19
7.	Tekarang	0	0	0	2	0	0	1	3
8.	Sambas	1	24	3	1	0	4	7	39
9.	Subah	4	0	38	1	0	0	0	3
10.	Sebawi	1	0	0	0	0	0	1	1
11.	Sajad	0	0	2	0	0	0	0	1
12.	Jawai	1	2	2	1	1	0	2	6
13.	Jawai Selatan	3	0	0	0	0	1	1	1
14.	Teluk Keramat	3	2	0	2	0	0	0	9
15.	Galing	2	0	6	0	0	0	4	2
16.	Tangaran	1	0	0	2	0	0	1	7
17.	Sejangkung	2	1	0	1	0	3	1	10
18.	Sajingan Besar	2	0	8	0	0	0	0	1
19.	Paloh	1	1	8	1	4	0	4	9
JUMLAH		38	35	74	20	9	14	33	146

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sambas, Tahun 2021

Selanjutnya, dilihat persebarannya berdasarkan kecamatan, sebagian besar koperasi berada di Kecamatan Sambas (85 unit atau 21,85%), dan di Kecamatan Subah (53 unit atau 13,62%), sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Sajad (3 unit atau 0,77%). Berdasarkan dari jenis kegiatan usahanya, sebagian besar koperasi di Kabupaten Sambas adalah koperasi produsen (217

unit atau 55,78%), dan yang lainnya merupakan koperasi konsumen (166 unit atau 42,67%), dan koperasi jasa (6 unit atau 1,55%).

Tabel 2. 62
Persebaran Koperasi Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Kegiatan Usaha di Kabupaten Sambas, Tahun 2020

No	KECAMATAN	Konsumen		Produsen		Simpan Pinjam		Jasa		Pemasaran		Jumlah
		Aktif	Tdk. Aktif	Aktif	Tdk. Aktif	Aktif	Tdk. Aktif	Aktif	Tdk. Aktif	Aktif	Tdk. Aktif	
1.	Selakau	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	15
2.	Selakau Timur	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	7
3.	Salatiga	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	4
4.	Pemangkat	3	4	5	24	0	0	1	0	0	0	37
5.	Semparuk	2	0	2	5	0	0	0	1	0	0	10
6.	Tebas	5	23	6	10	0	0	1	0	0	0	45
7.	Tekarang	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	6
8.	Jawai	1	0	4	10	0	0	0	0	0	0	15
9.	Jawai Selatan	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	6
10.	Sebawi	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	5
11.	Sambas	15	46	6	16	0	0	3	0	1	0	87
12.	Subah	6	9	31	7	0	0	0	0	0	0	53
13.	Sajad	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
14.	Sejangkung	5	6	8	2	0	0	0	0	0	0	21
15.	Teluk Keramat	3	5	2	6	0	0	0	0	0	0	16
16.	Tangaran	0	5	5	2	0	0	0	0	0	0	12
17.	Galing	2	5	3	5	0	0	0	0	0	0	15
18.	Paloh	3	7	13	8	0	0	1	0	0	0	32
19.	Sajingan Besar	3	3	4	2	0	0	1	0	0	0	13
		48	116	98	130	0	0	8	1	1	0	402
Koperasi Aktif		155										
Koperasi Tidak Aktif		247										

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sambas, Tahun 2021

Jumlah UMKM

Sampai tahun 2020, jumlah UMKM di Kabupaten Sambas sebanyak 21.438 Unit, yang terdiri dari Usaha Mikro sebanyak 19.124 unit (89,21%), Usaha Kecil sebanyak 2.157 Unit (10,06%), dan Usaha Menengah sebanyak 157 unit (0,73%). Adapun kondisi secara keseluruhan UMKM dilihat dari jenis usaha, jumlah unit usaha, tenaga kerja, jumlah omset, dan jumlah asset disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 63
Jumlah UMKM Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Sambas, Tahun 2020

No	Jenis Usaha	Unit Usaha	T.K (Org)		Jumlah T.K	Omset (Rp)	Asset (Rp)
			Laki2	Prpn			

No	Jenis Usaha	Unit Usaha	T.K (Org)		Jumlah T.K	Omset (Rp)	Asset (Rp)
			Laki2	Prpn			
1	Mikro	19.124	14.094	5.218	19.312	681.551.132.715	359.094.882.855
2	Kecil	2.157	2.574	568	3.142	253.313.195.000	453.557.805.500
3	Menengah	157	2.091	1	2.092	1.295.417.457.500	1.321.939.315.000
	Total	21.438	18.759	5.787	24.546	2.230.281.785.215	2.134.592.003.355

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sambas, Tahun 2021

Catatan : Jumlah Tenaga Kerja, Omset, dan Asset kondisi tahun 2019.

Adapun Usaha Mikro di Kabupaten Sambas, sebagian besar berupa bidang usaha lainnya yakni sebanyak 10.907 Unit (57,03%), bidang usaha kuliner sebanyak 5.730 unit (29,96%), dan bidang usaha fashion sebanyak 2.061 Unit (10,78%). Adapun persebaran bidang usaha UMKM di Kabupaten Sambas tahun 2017-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 64
Perkembangan Bidang Usaha UMKM
di Kabupaten Sambas Tahun 2017-2020

No	Bidang UMKM	2017	2018	2019	2020	Satuuan
I	Kuliner					
1	Usaha Mikro	580	751	784	5.730	Usaha
2	Usaha Kecil	42	44	44	52	Usaha
3	Usaha Menengah	1	1	1	1	Usaha
	Jumlah	632	796	829	5.783	Usaha
II	Fashion					
1	Usaha Mikro	816	381	382	2.061	Usaha
2	Usaha Kecil	75	84	84	89	Usaha
3	Usaha Menengah	1	1	1	1	Usaha
	Jumlah	892	466	467	2.151	Usaha
III	Pendidikan					
1	Usaha Mikro	0	0	0	4	Usaha
2	Usaha Kecil	0	0	0	0	Usaha
3	Usaha Menengah	0	0	0	0	Usaha
	Jumlah	0	0	0	4	Usaha
IV	Otomotif					
1	Usaha Mikro	0	113	113	311	Usaha
2	Usaha Kecil	0	0	0	4	Usaha
3	Usaha Menengah	0	0	0	0	Usaha
	Jumlah	0	113	113	315	Usaha
V	Agribisnis					
1	Usaha Mikro	8.671	8.759	8.768	96	Usaha
2	Usaha Kecil	434	432	432	430	Usaha
3	Usaha Menengah	51	51	51	51	Usaha
	Jumlah	9.156	9.212	9.251	586	Usaha
VI	Teknologi Internet					
1	Usaha Mikro	0	12	12	15	Usaha
2	Usaha Kecil	5	5	5	5	Usaha
3	Usaha Menengah	0	0	0	0	Usaha
	Jumlah	5	17	17	20	Usaha
VII	Bidang Lainnya					
1	Usaha Mikro	4.323	4.452	4.493	10.907	Usaha
2	Usaha Kecil	1.452	1.468	1.468	1.568	Usaha
3	Usaha Menengah	104	104	104	104	Usaha
	Jumlah	5.879	6.034	6.065	12.579	Usaha
	TOTAL UMRM	16.564	16.668	16.742	21.438	Usaha

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Kab. Sambas, Tahun 2021

2.3.1.18. Penanaman Modal

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, Kabupaten Sambas masih memerlukan dukungan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Untuk menjalankan urusan ini, BPMPTSP bertindak sebagai fasilitator dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, terbuka, efisien dan ekonomis, adil serta tepat waktu. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya suasana kondusif di kalangan masyarakat, sehingga akan menumbuhkan simpati masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Sambas.

Peningkatan jumlah investor di Kabupaten Sambas ternyata belum diikuti dengan jumlah nilai investasinya. Secara umum, dalam kurun waktu 2016-2020 terjadi kenaikan jumlah realisasi investasi, baik PMDN maupun PMA.

Tabel 2. 65
Jumlah Investasi PMDN dan PMA
di Kabupaten Sambas, Tahun 2016-2020

Tahun	PMDN		PMA		TOTAL REALISASI PMDN + PMA (Rp)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2016	3.175.630.000.000	3.287.991.648.724	3.912.997.200.000	4.096.287.100.000	7.384.278.748.724
2017	3.842.510.000.000	3.940.281.625.125	4.734.726.500.000	4.190.213.125.331	8.130.494.750.456
2018	4.226.750.000.000	4.975.629.381.653	5.208.199.080.000	4.210.721.219.274	9.186.350.600.927
2019	4.649.430.000.000	5.632.791.547.829	5.729.018.960.000	5.375.298.452.116	11.008.089.999.945
2020	5.114.380.000.000	5.573.399.790.000	4.501.372.000.000	9.916.251.430.000	15.489.651.220.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sambas, Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa total realisasi investasi PMDN dan PMA mengalami kenaikan sejak tahun 2016 sampai tahun 2020, yakni rata-rata 27,44% per tahun. Untuk realisasi investasi PMDN, mengalami kenaikan rata-rata 17,38% per tahun selama periode 2016-2020. Realisasi investasi PMDN megalami peningkatan tertinggi pada tahun 2018 yakni sebesar Rp 1.035.347.756.528. Khusus untuk realisasi investasi PMA, mengalami kenaikan rata-rata 35,52% per tahun selama periode 2016-2020. Realisasi investasi PMA mengalami penigkatan tertinggi pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 4.540.952.977.884.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan nilai investasi adalah kemana arah alokasi dari investasi tersebut. Sebagaimana umumnya pola investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam, investasi di Kabupaten Sambas pun sebagian besar di sektor primer terutama perkebunan. Dalam lima tahun ke depan, upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam perlu dilakukan dengan mengalokasikan investasi ke sektor industri pengolahan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa besaran PDRB daerah berdasarkan pendekatan pengeluaran dipengaruhi secara positif oleh empat variabel, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Setiap daerah umumnya mengharapkan sumber peningkatan utama berasal dari investasi dan ekspor karena kedua variabel ini berpengaruh langsung terhadap penurunan angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.

2.3.1.19. Pemuda dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga pada aspek pelayanan umum terkait dengan upaya persiapan generasi muda yang tangguh, cerdas dan berkompeten. Hal ini merupakan modal dasar pembangunan daerah di masa depan dan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berprestasi di bidang keolahragaan.

Pemuda dengan semangat dan kekuatannya merupakan potensi pembangunan yang luar biasa. Sehingga membangun dan melahirkan pemuda yang kreatif, inovatif serta berdaya juang tinggi menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah daerah. Pemuda merupakan penerus masa depan yang akan melanjutkan pembangunan di daerah. Keberhasilan menciptakan generasi muda yang cerdas dan profesional saat ini dapat memberi harapan keberhasilan pada masa yang akan datang. Jadi, pembangunan kepemudaan adalah sebuah investasi yang menjembatani kesuksesan di masa akan datang.

Menurut data dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sambas, pada tahun 2018 terdapat setidaknya 76 organisasi kepemudaan. Jika dibagi berdasarkan jenis organisasi, setidaknya terdapat organisasi bidang politik, olahraga, ekonomi, dan sosial. Jumlah organisasi kepemudaan bidang sosial mendominasi jumlah sebarannya dengan angka 30 organisasi. Begitu juga organisasi bidang olahraga dengan 29 organisasi.

Tabel 2. 66
Jenis Dan Jumlah Organisasi Kepemudaan

No	Jenis Organisasi Kepemudaan	2018	2019	2020
1.	Organisasi Bidang Politik	9	9	9
2.	Organisasi Bidang Olahraga	29	32	34
3.	Organisasi Bidang Sosial	30	13	13

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sambas

Demikian pula halnya dengan pelayanan umum di bidang keolahragaan juga ikut berkontribusi untuk melahirkan masyarakat, khususnya generasi muda yang sehat, kuat dan berprestasi. Olahraga akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan terlatih sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi resiko terserang penyakit. Selain itu, olahraga juga dapat berperan sebagai sarana hiburan sekaligus ajang berprestasi yang dapat mengarahkan masyarakat, khususnya generasi muda, pada kegiatan yang bernilai positif. Prestasi-prestasi di bidang kepemudaan dan akan memberikan kebanggaan kepada daerah baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Di Kabupaten Sambas, kegiatan keolahragaan didukung dengan beberapa prasarana olahraga dan klub olahraga. Kabupaten Sambas memiliki 122 lapangan bola voli, 78 lapangan bulu tangkis, 16 sasana tinju, 13 lapangan futsal, 6 lapangan bola basket, 5 kolam renang, 3 lapangan tenis serta masing-masing 2 lapangan sepakbola tipe C dan rumah billiard. Secara rinci jumlah prasarana olahraga di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 67
Jumlah Prasarana Olahraga di Kabupaten Sambas

KETERANGAN	2018	2019	2020	SATUAN
1. Jumlah Lapangan Bola Voli	122	174	176	Unit
2. Jumlah Lapangan Bola Basket	6	4	6	Unit
3. Jumlah Lapangan Tenis	3	3	4	Unit
4. Jumlah Lapangan Futsal	13	15	16	Unit
5. Jumlah Lapangan Sepak Bola	194	196	197	Unit
7. Jumlah Lapangan Bulu Tangkis	78	189	190	Unit
9. Jumlah Kolam Renang	5	3	4	Unit
10. Jumlah Sasana Tinju/Beladiri	16	2	2	Unit

KETERANGAN	2018	2019	2020	SATUAN
13. Jumlah Rumah Billiard	2	6	6	Unit

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sambas

2.3.1.20. Statistik

Aspek statistik di Kabupaten Sambas ditunjang dengan ketersediaan dokumen-dokumen yang mengintegrasikan data terkait dalam satu pemerintahan daerah. Dua dokumen tersebut adalah buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Sambas. Kedua dokumen ini dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak terkait untuk mengolah atau menggunakan data statistik yang diperlukan untuk melakukan aktifitas. Rincian kedua dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 68

Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PRDB Kabupaten di Kabupaten Sambas Tahun 2015-2020

Keterangan	Satuan	2017	2018	2019	2020
Buku Kabupaten Dalam Angka	bah	150	130	84	30
Buku PDRB Kabupaten	bah	10	15	10	10

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas

2.3.1.21. Persandian

Penyelenggaraan bidang persandian berada di Dinas Komunikasi dan Informasi. Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan informasi. Sehubungan dengan itu fungsi persandian adalah: merumuskan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi, melaksanakan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan informasi, melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan informasi; dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan informasi.

2.3.1.22. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sambas tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar

tertentu, namun juga untuk memanfaatkan kekayaan khasanah seni dan budaya dalam bidang ekonomi khususnya pendukung pariwisata daerah. Kekayaan budaya merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dapat menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Gelombang ekonomi keempat (*fourth wave economic*) yang kini tengah memasuki peradaban dunia di mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun manufaktur, tetapi lebih ditopang dari karya kreativitas, keahlian, dan bakat individu yang berakar dari karya budaya. Dalam rangka pengembangan nilai budaya, Pemerintah Kabupaten Sambas mendorong berdirinya berbagai macam sanggar seni budaya di masyarakat.

Potensi kebudayaan di Kabupaten Sambas tersebar di 19 kecamatan yang ada dengan klasifikasi kebudayaan berupa peninggalan bersejarah, kesenian tradisional, legenda/cerita rakyat, makanan/minuman tradisional, album lagu daerah, permainan anak/tradisional, dan kerajinan tradisional. Khusus untuk makanan/minuman tradisional terdiri dari jenis yang sama hampir di seluruh Kabupaten Sambas. Selain itu, Kabupaten Sambas juga memiliki satu milik pemerintah daerah dan satu museum milik swasta yang belum registrasi. Secara rinci kondisi seni budaya di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 69
Jumlah Prasarana Kebudayaan di Kabupaten Sambas Tahun 2017-2020

Keterangan	Satuan	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sanggar Kesenian	organisasi	23	21	22	22
Jumlah Gedung Kesenian	unit	0	0	0	
Jumlah Museum	unit	1	2	2	2
Jumlah Pengunjung Museum	orang	107	861	1.694	622
Jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya	unit	0	0	0	
Jumlah Kelompok Seni Lukis	kelompok	2	2	2	2
Jumlah Kelompok Seni Kriya/Kerajinan Tangan	kelompok	1	1	1	1
Jumlah Kelompok Seni Patung	kelompok	1	1	1	1
Jumlah Kelompok Seni Dekorasi	kelompok	1	1	1	1
Jumlah Kelompok Tari Kreasi Baru	kelompok	41	41	41	41
Jumlah Anggota Tari Kreasi Baru	orang	328	328	328	328
Jumlah Kelompok Tari Tradisional	kelompok	41	41	41	41
Jumlah Anggota Tari Tradisional	orang	429	429	429	429
Jumlah Kelompok Tari Modern	kelompok	41	41	41	41

Keterangan	Satuan	2017	2018	2019	2020
Jumlah Anggota Tari Modern	orang	348	348	348	348
Jumlah Kelompok Seni Suara/Vocal	kelompok	22	29	29	29
Jumlah Anggota Seni Suara/Vocal	orang	264	348	348	348
Jumlah Kelompok Seni Musik Tradisional	kelompok	6	22	22	22
Jumlah Anggota Seni Musik Tradisional	orang	180	264	264	264
Jumlah Kelompok Seni Sastra	kelompok	0	6	6	6
Jumlah Anggota Seni Sastra	orang	0	72	72	72
Jumlah Kelompok Seni Teater/Drama	kelompok	0	9	0	9
Jumlah Anggota Seni Teater/Drama	orang	0	180	0	180
Jumlah Benda Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah	unit	51	51	51	43
Jumlah Pengunjung Benda Cagar Budaya	orang	0	0	0	0
Jumlah Bangunan Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah	unit	42	42	3	6
Jumlah Pengunjung Bangunan Cagar Budaya	orang	0	0	1.000	4800
Jumlah Struktur Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah	unit	1	1	1	37
Jumlah Pengunjung Struktur Cagar Budaya	orang	0	0	0	0
Jumlah Situs Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah	unit	1	1	1	1
Jumlah Pengunjung Situs Cagar Budaya	orang	30	30	30	4800
Jumlah Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah yang Sudah Ditetapkan	unit	10	10	21	30
Jumlah Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah yang Belum Ditetapkan	unit	10	10	0	13
Jumlah Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah yang Sudah Dipugar	unit	6	6	3	16
Jumlah Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah yang Belum Dipugar	unit	14	14	8	27

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas

Tabel 2. 70
Potensi Budaya per Kecamatan di Kabupaten Sambas

Kecamatan	Potensi Budaya						
	Peninggalan Bersejarah	Kesenian Tradisional	Legenda/Cerita Rakyat	Makanan/Minuman Tradisional	Album Lagu Daerah	Permainan Anak/Tradisional	Kerajinan Tradisional
Sambas	Makam Sultan M. Tsafioeddin I	Tanda' Sambas	Asal usul bubur padas	Bubur padas	Lagu-lagu daerah Melayu Sambas Terigas - 1	Pang pang Sinabbu	Tenun Kain/Songket Sambas
	Makam Sultan M. Tajidin	Musik Tanjidor	Raje Tan Unggal	Asam Padas	The Terigas of Sambas Pemda Sambas dan Pesisir	Pong pong Alok	
	Makam Sultan Umar Aqamaddin		Muare Ulakan	Bingke Berendam	The Best of Sambas Karaoke	Cik cik Periuk	
	Makam Sultan Abubakar Kamaludin		Asal usul Kampung Tangga Emas	Bubur Ambo'	Tumpahan Salo Lagu daerah Sambas Vol. 1	Lem lem Tak	
	Makam Sultan Umar Aqamaddin II		Semangka Emas	Laksamana Mengamuk	Mini Album Lagu Daerah Sambas Negeri Tampatku	Ti'ti' Sinambung	
	Makam Muda Sultan Ahmad			Ae Sorbat	Album Lagu Daerah Sambas persembahan Tan Herlina Saleh	Sikopon	
	Makam Sultan Abubakar Tajuddin I			Cucor		Cang kelelet	
	Makam Sultan Muhammad Ali Tsyfiuddin			Kerabu Galli		Injit injit Samut	
	Makam Sultan Usman Kamaludin			Pacri Nanas		Engrang	
	Makam Sultan Umar Aqamaddin (Muhrum Tengah)			Botok Ikan		Tarik Uppeh	

Kecamatan	Potensi Budaya						
	Peninggalan Bersejarah	Kesenian Tradisional	Legenda/Cerita Rakyat	Makanan/Minuman Tradisional	Album Lagu Daerah	Permainan Anak/Tradisional	Kerajinan Tradisional
Makam Sultan Abu Bakar Tajuddin (Muhrum Cianjur)				Pindang Nanas		Gedong/ Main Ajong/Papan Congkak	
Makam Sultan Umar Kamaluddin				Juadah Mukun Ubi		Hom Pim Pah (Osom)	
Makam Sultan Muuhammad Tsafiuddin II				Juadah Mukun Karibang		Ju ju Binyak	
Makam Sultan Muhammad Ali Tsyfiuddin II				Serabi		Reng reng Bare	
Makam Sultan Muhammad Mulia Ibrohim Tsafiddin				Kue Talem Belauk		Wak wak Ampek	
Makam Ratu Sabar				Kue Sarifah Meninjau			
Gerattak Asam				Lappat			
Makam Opu Daeng Kemase				Srikaye Labu			
Gerattak Ilek				Srikaye Kembille'			
Keramat Lumbang (Makam Syech ABD. Jalil Al-Fatani)				Bubur Sumsum			
Kompleks Museum Negeri Sambas				Ukal Pulut			
Rumah Maha Raja Imam				Madu Lebah			
Makam Kerabat Lubuk Madung & Makan Keturunan Raja Brunei				Ne' ba' Kuning			

Kecamatan	Potensi Budaya						
	Peninggalan Bersejarah	Kesenian Tradisional	Legenda/Cerita Rakyat	Makanan/Minuman Tradisional	Album Lagu Daerah	Permainan Anak/Tradisional	Kerajinan Tradisional
	Rumah H. Siradj So'od (Markas Pejuang/To'Kaye)			Putri Sallat			
	Makam Maha Raja Imam			Putu Iris			
	Istana Alwatzikhoebillah			Dadar Gulung			
	Mesjid Jami'			Sari Mukke			
				Taek Lalla'			
				Gulai Rias			
				Ulam Singkel			
				Puttu Tattak			
				Rateh			
				Gunong Melatus			
				Dodol Tingkarok			
				Dodol Sirang			
				Sayur Asam Keladi			
				Gulai Asam			
				Putu Cangkir			
				Putu Mayang			
				Lapis Perancis			
				Kue Sabun			
				Lapis Susu			
				Lapis Belacan			
Selakau	Makam Keturunan Kesulthanans Sambas Pangeran Timba' Bayi (Dusun	Orkes Keroncong Sinar Purnama	Batu Perahu Wangkang Cina			Gasing	Anyaman Tikar

Kecamatan	Potensi Budaya						
	Peninggalan Bersejarah	Kesenian Tradisional	Legenda/Cerita Rakyat	Makanan/Minuman Tradisional	Album Lagu Daerah	Permainan Anak/Tradisional	Kerajinan Tradisional
	Baron Desa Bentunai)	Desa Parit Baru					
	Makam Ratu Anom Kusuma Yudha (Dusun Maya Sopa Ulu Sungai Selakau)	Musik Tanjidor					
Pemangkat	Makam F. J. Sorj (1850)	Tanjidor	Batu Mak Buang	Album lagu Melayu Kalbar-Melayu Sambas Vol. 1 Terigas Record Versi Karaoke dan Non-Karaoke			
	Benteng dan Sumur Tua	Seni Permainan Naga dan Seni Barongsai	Lorong Putus (Desa Pemangkat kota)	Album Pop Melayu Sambas Karya Bulyan Musthafa			
	Markas Polisi Belanda		Batu Balah (Desa Tanjung Batu)	Album Warisan Rumah Budaya Pusaka PMK			
	Rumah Tahanan Tugu Peringatan Korban Perang Jepang Indonesia-Tionghoa (No. 1 s/d 5 di Desa Tanjung Batu)						
	Kelenteng Dewa Ular Putih (Sebangkau)						
	Vihara Dewi Kwan In (Sebangkau)						
	Kelenteng Cina Tertua						

Kecamatan	Potensi Budaya						
	Peninggalan Bersejarah	Kesenian Tradisional	Legenda/Cerita Rakyat	Makanan/Minuman Tradisional	Album Lagu Daerah	Permainan Anak/Tradisional	Kerajinan Tradisional
Tekarang	Rumah Tua Petinggi Tekarang	Jepin Lembut (Desa Sempadian)					
	Makam Petinggi Tekarang (Desa Sempadian)	Musik Tanjidor					
Galing	Makam Ratu Sepudak	Seni Otar-Otar	Batu Betarup				
	Batu Betarup	Musik Tanjidor					
	Keramat Datok Sanggup	Musik Tanjidor Suling Bambu					
	Goa Huruf Paku						
Sajad	Keramat Bantilan			Botok Paddak			
Jawai Selatan	Benteng Belanda	Seni Permainan Naga dan Seni Barongsai	Putri Serayi				
			Bukit Raya				
			Batu Canggar				
			Batu Lappak				
			Pulau Pontianak				
Jawai	Rumah/Markas Pejuang	Seni Permainan Naga dan Seni Barongsai			Lagu-lagu karya M. Djohan (Alm) Sanggar Mayang Sari Jawai		
	Makam Dato' Buntar	Musik Tanjidor			Jawai		

Kecamatan	Potensi Budaya						
	Peninggalan Bersejarah	Kesenian Tradisional	Legenda/Cerita Rakyat	Makanan/Minuman Tradisional	Album Lagu Daerah	Permainan Anak/Tradisional	Kerajinan Tradisional
				Ibu			
				Azan			
				Memanggil Mars Sekolah			
				Hymne Ibu dan Bapak			
				Menuai Padi			
				Sanggar Ria			
				Remaja			
				Selamat Datang			
				Penyesalanku			
				Ku Tak Tahu			
				Bergembira			
				Tenanglah			
				Gembira di Pantai			
Tangaran		Budaya Antar Ajong	Asal usul Desa Semata			Gasing	
		Kesenian Kuntaw					
		Tari Jepin Lembut					
		Timang Bubu'					
		Timang Mayang					
Sejangkung	Monumen Bulloh Tajjar	Musik Tanjidor	Dato' Kullub				Anyaman Bambu dan Rotan
	Rumah Markas Pejuang	Radat Koko	Batu Layar				

Kecamatan	Potensi Budaya						
	Peninggalan Bersejarah	Kesenian Tradisional	Legenda/Cerita Rakyat	Makanan/Minuman Tradisional	Album Lagu Daerah	Permainan Anak/Tradisional	Kerajinan Tradisional
	Makam Keramat Dato' Kullub	Ratib Saman Bedande'	Batu Sawa'				
Sajingan Besar	Goa Maria	Tari Totokng		Tumplek			
		Tari Koncong		Bontong			
Paloh	Situs Pemandian Batu Bejamban	Alo' Gambang	Asal usul Batu Bejamban dan Batu Layang				
		Antar Ajong	Raden Sandhi				
		Musik Tanjidor					
Teluk Keramat		Japin Lembut	Kalan Maram (lampar) Dusun Teluk Durian Desa Sepadu				
		Ratib Saman	Asal mula terjadinya Burung Ruai				
		Raddat					
		Timmang Bubbu					
		Timang Mayang					
		Timang Karra'					
		Budaya Mbuar Wanyet					
		Alo' Galing					
Tebas		Japin Lembut	Batu Mak Jage	Album KMB Lagu Pop Daerah Sambas 2013	Gasing		

Kecamatan	Potensi Budaya						
	Peninggalan Bersejarah	Kesenian Tradisional	Legenda/Cerita Rakyat	Makanan/Minuman Tradisional	Album Lagu Daerah	Permainan Anak/Tradisional	Kerajinan Tradisional
	Seni Barongsai			Album KMB 2 Senandung Idul Fitri Sambas			
	Musik Tanjidor						
Sebawi	Surau Peninggalan Raden Sulaiman		Kesah Bukit Luwing				
	Peninggalan Kapal Inggris "Sari Borneo"		Bujang Nadi Dare Nandung				
	Makam Bujang Nadi Dare Nandung						
	Duplikat Tempat Peristirahatan Keluarga Raja						
Subah			Batu Ajok				
			Batu Dide				
			Riam Baya				
			Ramin Jadi				
			Batu Masipa				
Semparuk		Radat Koko					
		Seni Barongsai					
		Musik Tanjidor					

Sumber: Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas

2.3.1.23. Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan pada aspek pelayanan umum peningkatan angka literasi dan minat baca masyarakat. Semakin tinggi minat baca masyarakat maka semakin bertambah luasa wawasan masyarakat sehingga mampu mengembangkan berbagai inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas masyarakat pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan menghindarkan mereka dari keterpurukan baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Buku adalah jendela pengetahuan yang mampu mengantarkan manusia memasuki gerbang kemajuan zaman.

Dukungan atas peningkatan SDM di Kabupaten Sambas dilakukan dengan melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas bahan bacaan melalui perpustakaan. Sampai saat ini setidaknya terdapat dua jenis perpustakaan yang ada, yaitu Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah. Pada tahun 2019 terdapat pula perpustakaan online yang dapat diunduh pada playstore dengan nama **isambas**.

Pada tahun 2020 jumlah kunjungan perpustakaan sebanyak 1.034 orang, terjadi penurunan pengunjung perpustakaan sebanyak 1.009 orang. Walaupun terjadi penurunan pengunjung namun anggota perpustakaan meningkat sebanyak 36 orang pada tahun 2020 jika dibandingkan pada tahun 2019. Jumlah koleksi buku yang tersedia pada tahun 2020 juga bertambah sebanyak 350 judul buku.

Tabel 2. 71

Jumlah Perpustakaan, Pengunjung Perpustakaan, Anggota Perpustakaan, dan Koleksi Buku di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020

Keterangan	Satuan	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perpustakaan Kabupaten	Unit	1	1	1	1
Jumlah Perpustakaan Kecamatan	Unit	8	14	14	14
Jumlah Perpustakaan Desa	Unit	65	73	84	84
Jumlah Perpustakaan Umum Bacaan Masyarakat	Unit	21	38	43	47
Jumlah Perpustakaan Keliling	Unit	1	2	2	2
Judul Buku	Judul	15.619	16.167	17.087	17.437
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	5.286	5.428	2.043	1.034
Jumlah Anggota Perpustakaan	Orang	2.258	2.789	2.921	2.957

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas

2.3.1.24. Kearsipan

Arsip adalah hasil rekaman suatu peristiwa maupun kegiatan yang pernah terjadi, maka dengan ini arsip harus dijaga dan pelihara agar tetap ada. Perkembangan zaman saat ini, penyimpanan arsip dapat dilakukan dengan beberapa media baik cetak maupun elektronik (online). Pengelolaan arsip sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pada Undang-Undang ini mencakup semua hal yang berkaitan dengan arsip dan kearsipan. Pengelolaan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas meliputi penciptaan, pengelolaan, penyimpanan, perawatan, serta pemusnahan.

Pengelolaan/ pengolahan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas sudah melaksanakan dengan baik sesuai klasifikasi arsip dinamis dan statis. Namun karena sarana dan prasarana kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas sangat minim, maka penyimpanan arsip masih menggunakan media konvensional seperti filing kabinet dan rak arsip. Ini jauh dari perkembangan saat ini yang menggunakan digital sebagai media penyimpanannya. Perawatan arsip di Dinas Perpustakaan dan Pearsipan daerah Kabupaten Sambas dilakukan secara periodik selama 3 bulan sekali dengan perawatan seadanya seperti memberi kapur barus di setiap media penyimpanan arsip. Untuk pemusnahan arsip, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas belum pernah melakukan pemusnahan arsip berhubung dana yang terbatas dan pejabat yang menangani hal tersebut sering berganti-ganti sehingga pengetahuan tentang pemusnahan arsip belum memadai dan juga masih minimnya Sumber Daya Manusia (arsiparis) dalam pengelolaan dan pengolahan sebuah arsip daerah.

2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

a. Potensi Budidaya Perikanan

Potensi budidaya perikanan terdiri dari potensi budidaya laut, potensi budidaya air payau dan potensi budidaya air tawar. Potensi budidaya laut terdiri dari potensi potensi KJA di laut dengan luas potensi 800 ha terletak di muara Sungai Paloh di Kecamatan Paloh, Kecamatan Jawai, Jawai Selatan, Pemangjat, Tangaran, Salatiga dan Selakau. Saat ini pengembangan KJA sudah ada di muara Sungai Paloh berupa budidaya lobster dan ikan kakap. Untuk potensi

budidaya rumput laut berada di Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Jawai, Kecamatan Tangaran dan Kecamatan Paloh serta Kecamatan Pemangkat dan Salatiga. Luas potensi rumput laut 200 Ha dan baru dikembangkan sekitar 4 Ha di Kecamatan Jawai Selatan.

Potensi budidaya air payau terletak di 7 kecamatan pesisir yakni Selakau, Salatiga, Pemangkat, Jawai Selatan, Jawai, Tangaran dan Paloh. Potensi budidaya air payau seluas 6.457,6 Ha untuk budidaya udang windu, udang vaname, bandeng, kakap dan nila salin. Saat ini baruterbangun seluas 2.600 ha dengan produktivitas tambak yang aktif seluas 1.800 Ha.

Potensi budidaya ikan air tawar seluas 1.845 Ha terdiri dari budidaya ikan di kolam, kolam terpal dan budikdamber. Potensi budidaya air tawar menyebar di semua kecamatan di Kabupaten Sambas. Sedangkan potensi budidaya ikan dalam keramba, diperkirakan seluas 34,630 Ha di Sungai Sambas, Sungai Selakau, Sungai Sebangkau dan Sungai Paloh. Potensi budidaya KJA berupa ikan lele, ikan nila, ikan patin, ikan mas, dan ikan jelawat.

b. Produksi Perikanan

Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Sambas berasal dari perikanan laut, perairan umum dan budidaya. Pada tahun 2020 produksi perikanan dari perikanan laut paling besar yaitu 15.145,25 ton. Kemudian diikuti produksi perikanan budidaya sebesar 3.928,00 ton. Produksi perikanan dari perairan umum hanya sebanyak 327,88 ton. Produksi perikanan dalam empat tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup besar. Data perkembangan produksi perikanan di kabupaten Sambas tahun 2016 – 2020 tersaji pada Tabel 2.64.

Tabel 2. 72
Produksi (Ton) Perikanan di Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Perikanan Laut	Perairan umum	Budidaya
1.	2016	45 013,38	795,43	5 838,88
2.	2017	6 326,04	121,05	6 980,45
3.	2018	5 890,75	139,14	7 903,23
4.	2019	13 500,25	135,73	8 105,28
5.	2020	15 145,25	327,88	3 928,00

Sumber: Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun 2021

c. Nilai Produksi Perikanan Laut

Nilai produksi perikanan laut di Kabupaten Sambas dalam empat tahun terakhir cendrung meningkat, walaupun nilai ini masih lebih rendah dibandingkan lima tahun yang lalu. Pada tahun 2020 nilai produksi lebih rendah dibandingkan tahun 2019, walaupun produksinya lebih tinggi. Nilai produksi perikanan laut dapat dilihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2. 73

Nilai Produksi Perikanan Laut Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.000)
1.	2016	45 013,38	957 547 180
2.	2017	6 326,04	128 311 379
3.	2018	5 890,75	119 571 372
4.	2019	13 500,25	450 478 305
5.	2020	15 145,25	434 759 876

Sumber: Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun 2021

d. Nilai Produksi Perikanan Perairan Umum

Nilai produksi perikanan perairan umum di Kabupaten Sambas dalam empat tahun terakhir terus meningkat, walaupun nilainya masih dibawah dibandingkan lima tahun yang lalu. Peningkatan nilai produksi ini sejalan dengan peningkatan produksi. Nilai produksi perikanan perairan umum dapat dilihat pada Tabel 2.66.

Tabel 2. 74

Nilai Produksi Perikanan Perairan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.000)
1.	2016	795,43	22 448 830
2.	2017	121,05	3 270 104
3.	2018	139,14	3 710 400
4.	2019	135,73	4 215 055
5.	2020	327,88	10 895 840

Sumber: Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun 2021

e. Nilai Produksi Perikanan Budidaya

Nilai produksi perikanan budidaya di Kabupaten Sambas dalam lima tahun terakhir cendrung menurun. Penurunan nilai produksi ini sejalan dengan penurunan produksi. Nilai produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada Tabel 2.67.

Tabel 2. 75

Nilai Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.000)
1.	2016	5 838,88	124 014 952
2.	2017	6 980,45	220 500 130
3.	2018	7 903,23	184 764 765
4.	2019	8 105,28	197 980 540
5.	2020	3 928,00	91 674 270

Sumber: Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas,
Tahun 2021

2.3.2.2. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Komoditas pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sambas yang utama adalah tanaman padi. Komoditi pangan lainnya adalah jagung, kedelai dan ubi. Pada tahun 2018-2019 produksi tanaman padi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan produksi tanaman jagung dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Produksi tanaman pangan di kabupaten Sambas tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2. 76

Produksi (Ton) Tanaman Pangan di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2019

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tanaman Padi	282.597	212.593	158.240	168.632	
2.	Tanaman Jagung	331	1.558	6.759	13.054	
3.	Tanaman Kedelai	1.421	270	670	263	
4.	Tanaman Ubi	4.860	4.0854	5.118	6.772	
5.	Tanaman Lain	1.425	1.374	1.278	796	

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Tahun 2021

Tiga komoditi perkebunan yang produksi tertinggi di Kabupaten Sambas pada tahun 2020 berturut-turut kelapa sawit sebesar 148.306 ton, karet sebesar 17.711 ton dan Kelapa dalam sebesar 13.596 ton. Komoditi perkebunan yang juga cukup besar produksinya adalah lada dan kopi. Perkembangan produksi perkebunan di kabupaten Sambas dari Tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.66.

Tabel 2. 77

Produksi (Ton) Tanaman Perkebunan Menurut Jenisnya
di Kabupaten Sambas Pada Tahun 2016-2020

Jenis Komoditas Tanaman	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Karet	17.755	17.755	17.711	17.711	17.711
Kelapa dalam	13.525	13.525	13.596	13.596	13.596

Jenis Komoditas Tanaman	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelapa hibrida	45	45	44	44	44
Kelapa sawit	124.688	124.688	170.132	148.306	148.306
Lada	715	715	554	614	614
Kopi	700	700	597	597	597
Kakao	142	142	140	135	135
Sagu	158	158	219	219	219
Pinang	9	11	8	8	8
Cengkeh	2	2	2	2	2
Tebu	405	405	105	105	105
Jumlah	158 144	158 146	203 405	181 337	181 337

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Tahun 2021

Populasi ternak unggas yang tertinggi di Kabupaten Sambas pada tahun 2020 adalah ayam pedaging yaitu sebanyak 2.826.891 ekor, selanjutnya ayam buras/kampung yaitu sebanyak 448.905 ekor, dan itik sebanyak 257.975 ekor. Perkembangan populasi ternak unggas di Kabupaten Sambas Tahun 2016 – 2020 tersaji di Tabel 2.70.

Tabel 2. 78
Perkembangan Populasi (Ekor) Ternak Unggas
di Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2020

Jenis Ternak Unggas	2016	2017	2018	2019	2020
Ayam Pedaging	2.457.662	2.754.708	2.907.231	2.817.087	2.826.891
Ayam petelur	24.804	24.700	24.700	24.563	20.952
Ayam buras	439.679	439.785	415.801	439.559	448.905
Itik	266.939	267.259	267.534	265.687	257.975

Sumber: Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Tahun 2021

Populasi ternak tertinggi di Kabupaten Sambaspada tahun 2020 adalah kambing yaitu sebanyak 23.367 ekor, selanjutnya sapi potong yaitu sebanyak 11.328 ekor, dan babi sebanyak 6.676 ekor, sedangkan kerbau tidak ada datanya. Perkembangan populasi ternak di Kabupaten Sambas tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2. 79
Populasi (Ekor) Ternak Besar dan Kecil berdasarkan Jenis Ternak
di Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2020

Jenis Komoditas Peternakan	Populasi Ternak (ekor)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sapi potong	11.421	11.595	11.623	11.613	11.328
Kambing	25.022	25.226	25.292	24.851	23.367
Babi	7.126	7.262	7.291	7.261	6.676

Sumber: BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2021

2.3.2.3. Kehutanan

Luas kawasan hutan Kabupaten Sambas pada tahun 2018 sebesar 164.297,25 Ha sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014. Kawasan hutan tersebut mencakup Taman Wisata Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi dan Hutan Produksi Konservasi. Luas masing-masing kawasan tersaji pada Tabel 2.74. Berdasarkan luas kawasan hutan yang ada di Kabupaten Sambas, pemanfaatan terbesar untuk hutan produksi yaitu sebesar 55,79 %, sedangkan kawasan hutan produksi konservasi yang paling rendah yaitu 3,07%.

Tabel 2. 80
Luas Kawasan Hutan (Ha) di Kabupaten Sambas Tahun 2018

No	Jenis Kawasan Hutan	Luas kawasan (ha)	Percentase (%)
1	Taman Wisata Alam (TWA)	30.383,96	18,49
2	Hutan Lindung	26.020,83	15,84
3	Hutan Produksi Terbatas	11.180,02	6,80
4	Hutan Produksi (HP)	91.661,02	55,79
5	Hutan Produksi Konservasi (HPK)	5.051,41	3,07
Jumlah		164.297,25	100.00

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

2.3.2.4. Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan.

Saat ini setidaknya terdapat 71 objek wisata di Kabupaten Sambas, yang terdiri dari objek wisata alam, bahari, minat khusus, dan budaya. Potensi yang besar ini sesungguhnya akan berdampak cukup besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat kabupaten Sambas apabila dikelola dan dikembangkan secara profesional. Rincian objek wisata di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 81
Daftar Objek Wisata di Kabupaten Sambas

No	Objek Wisata	Jenis Wisata	Kecamatan	Lokasi
1	Pantai Polaria	Wisata Bahari		Sui Rusa
2	Pantai Saadi/Terigas	Wisata Bahari		
3	Makam Ratu Anom Kesuma Yuda	Wisata Budaya	Selakau	Semelagi Besar
4	Makam Pangeran Timba	Wisata Budaya		

No	Objek Wisata	Jenis Wisata	Kecamatan	Lokasi
	Bayi			
5	Pantai Tanjung Batu	Wisata Bahari		
6	Pantai Sinam	Wisata Bahari		
7	Toa Pekong Ular Putih	Wisata Minat Khusus	Pemangkat	Pemangkat Kota
8	Toa Pekong Dewi Kwan Im	Wisata Minat Khusus		
9	Air Terjun Gunung Selindung	Wisata Alam	Salatiga	Parit Baru
10	Taman Rekreasi Batu Mak Jage	Wisata Alam	Tebas	Mak Jage
11	Agro Wisata Matang Nangka	Wisata Agro		Serindang
12	Perkebunan Sawo	Wisata Agro		
13	Rumah Petinggi Tekarang	Wisata Budaya	Tekarang	Tekarang
14	Makam Petinggi Tekarang	Wisata Budaya		
15	Istana Alwatzikobillah	Wisata Sejarah		
16	Masjid Jami'	Wisata Sejarah		
17	Water Front City	Wisata Buatan		
18	Makam Syech Abdul Jalil Al Fatani	Wisata Budaya		
19	Kantor Wedana/Demang Sambas	Wisata Budaya		
20	Rumah Tinggal Maha Raja Imam Haji Muhammad Basiuni Imran	Wisata Budaya	Sambas	Dalam Kaum
21	Rumah Tinggal Haji Siraj Sood (Dato' Kaya Lela Mahkota)	Wisata Budaya		
22	Museum Sambas	Wisata Minat Khusus		
23	Perkampungan Tenun Songket	Wisata Minat Khusus		
24	Kebun Raya Sambas	Wisata Alam	Subah	
25	Rumah Batu	Wisata Alam		
26	Danau Sebedang	Wisata Alam	Sebawi	Sempalai Sebedang
27	Makam Bujang Nadi Dare Nandung	Wisata Budaya		
28	Surau Peninggalan Raden Sulaiman	Wisata Budaya		
29	Taman Istana Putri Danau Sebedang	Wisata Alam		
30	Makam Keramat Bantilan	Wisata Budaya	Sajad	Segerunding
31	Pantai Kahona	Wisata Bahari	Jawai	Sarang Burung Danau
32	Pantai Natuna Indah	Wisata Bahari		Sentebang
33	Pantai Dato' Bundar	Wisata Bahari		Dungun Laut

No	Objek Wisata	Jenis Wisata	Kecamatan	Lokasi
34	Pantai Putri Serayi	Wisata Bahari	Jawai Selatan	Jawai Laut
35	Benteng Peninggalan Kolonial Belanda (Kalang Bau)	Wisata Budaya		
36	Pantai Pesona Bahari	Wisata Bahari		
37	Perkebunan Salak	Wisata Agro	Teluk Keramat	Sekura
38	Makam Keramat Sungai Kumpai	Wisata Budaya		
39	Makam Ratu Sepudak	Wisata Budaya		
40	Makam Syech Muhammad Sattaruddin (Dato' Ki Puteh/Panglima Guntur)	Wisata Budaya	Galing	Ratu Sepudak
41	Makam Dato' Timalar Tan Azis Bujang	Wisata Budaya		
42	Makam Keramat Dato' Sanggup	Wisata Budaya		
43	Batu Betarup	Wisata Budaya	Tangaran	Pancur
44	Pantai Tanjung Terabitan	Wisata Bahari		
45	Pantai Muare Jalan Indah	Wisata Bahari		
46	Pantai Dataran Merdeka	Wisata Bahari	Sejangkung	Arung Parak
47	Pantai Venesia	Wisata Bahari		
48	Bukit Piantus	Wisata Alam		
49	TWA Gunung Senujuh	Wisata Alam	Sajingan Besar	Simpang Empat
50	Air Terjun Riam Merasap	Wisata Alam		
51	Goa Alam Santok	Wisata Alam		
52	Air Terjun Riam Cagat	Wisata Alam	Sejangkung	Piantus
53	Pantai Tanjung Lestari	Wisata Bahari		
54	Pantai Harapan	Wisata Bahari		
55	Pantai Pulau Selimpai	Wisata Bahari	Sajingan Besar	Semanga
56	Taman Rekreasi Batu Bejamban	Wisata Bahari		
57	Pantai Kampak Indah	Wisata Bahari		
58	TWA Tanjung Belimbing	Wisata Alam	Paloh	Kaliau
59	TWA Gunung Lintang	Wisata Alam		
60	TWA Gunung Asuansang	Wisata Alam		
61	Pantai Tanjung Bendera	Wisata Bahari	Paloh	Santaban
62	Pantai Tanjung Kemuning	Wisata Bahari		
63	Pantai Bayuan	Wisata Bahari		
64	Pantai Camar Bulan	Wisata Bahari	Temajuk	Sungai Bening
65	Dermaga Asam Jawe	Wisata Bahari		
66	Pantai Telok Atong	Wisata Bahari		

No	Objek Wisata	Jenis Wisata	Kecamatan	Lokasi
	Bahari			
67	Hutan Hujan Tropis Tanjung Dato'	Wisata Bahari		
68	Pantai Batu Pipih	Wisata Bahari		
69	Air Terjun Teluk Nibung	Wisata Bahari		
70	Air Terjun Gunung Panggi	Wisata Bahari		
71	Pantai Kalimantan	Wisata Bahari		Kalimantan

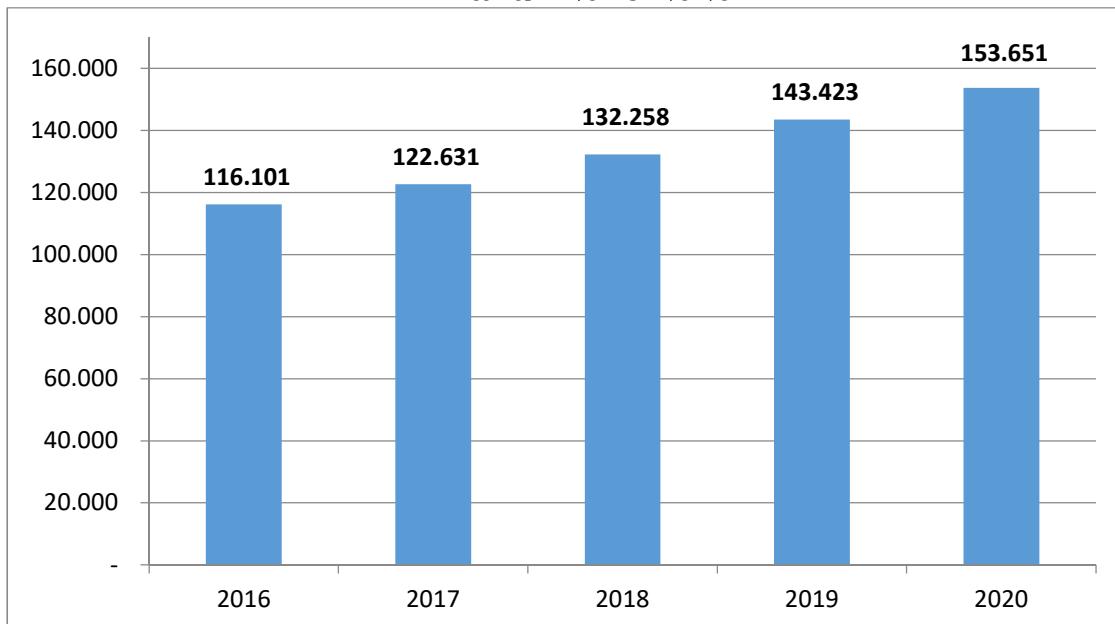
Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sambas

2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten maka urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas. Sejalan dengan itu penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral pada aspek pelayanan umum telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Grafik 2. 7

Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Sambas
Tahun 2016-2020



Sumber: Indikator Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sambas 2021, BPS

Disamping memberi daya dorong terhadap pengembangan sektor ekonomi, listrik juga saat ini menjadi kebutuhan masyarakat bukan hanya yang berdomisili di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Pada tahun 2020, jumlah pelanggan PLN mencapai 153.651 pelanggan. Setiap tahun pelanggan listrik PLN semakin bertambah, hal ini menunjukkan penyediaan infrastruktur listrik

sampai ke pedesaan semakin membaik. Namun demikian walaupun jumlah pelanggan PLN terus bertambah masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN.

Desa sudah berlistrik di Kabupaten Sambas sudah mencapai 98,97%. Masih ada 2 (dua) desa yang belum berlistrik yaitu desa Buduk Sempadang di Kecamatan Selakau dan Gayung Bersambut di Kecamatan Selakau Timur. Ada 1 (satu) desa menggunakan PLTS yaitu Desa Lambau di Kecamatan Jawai.

Tabel 2. 82
Listrik di Kabupaten Sambas

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Desa Berlistrik		Desa Belum Berlistrik
			PLN	Non PLN	
1	Selakau	11	10	-	Buduk Sempadang
2	Selakau Timur	4	3	-	Gayung Bersambut
3	Pemangkat	8	8		
4	Semparuk	5	5		
5	Salatiga	5	5		
6	Tebas	23	23		
7	Tekarang	7	7		
8	Sambas	18	18		
9	Subah	12	12		
10	Sebawi	7	7		
11	Sajad	4	4		
12	Jawai	13	12	1	
13	Jawai Selatan	9	9		
14	Teluk Keramat	25	25		
15	Galing	10	10		
16	Tangaran	8	8		
17	Sejangkung	12	12		
18	Sajingan Besar	5	5		
19	Paloh	8	8		
JUMLAH		194	191	1	2

Sumber : PT. PLN Wilayah Kalbar Tahun 2020

2.3.2.6. Perdagangan

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Perdagangan sebagai salah satu sektor yang memegang peranan cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Sambas, sehingga perlu terus dikembangkan seiring dengan kemajuan pembangunan guna meningkatkan pendapatan daerah, perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha. Apalagi sektor perdagangan merupakan tumpuan yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian daerah setelah sektor

pertanian.

Sektor perdagangan yang terdiri dari dua kategori, yaitu Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya dan Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor mempunyai kontribusi terbesar kedua (setelah sektor pertanian) terhadap PDRB Kabupaten Sambas. Pada tahun 2016, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sambas berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 2.788,07 Milyar. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Sambas tahun 2016 mencapai Rp 16.026,44 Milyar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Harga Berlaku Kabupaten Sambas tahun 2016 sebesar 17,40%. Kontribusi sektor perdagangan dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Kontribusi sektor ini pada tahun 2017 turun menjadi sebesar 17,25%, namun meningkat menjadi 17,62% pada tahun 2019. Selain kontribusinya cenderung membaik dalam dua tahun terakhir ini (2018-2019), sektor perdagangan juga menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat sejak tahun 2016 sampai tahun 2019. Meski tahun 2020, pertumbuhannya negatif (minus 6,97%).

Tabel 2. 83
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB Sektor Perdagangan (HB-Milyar)	2.788,07	3.020,14	3.288,10	3.617,12	3.517,96
2	Kontribusi Sektor Perdagangan (%)	17,40	17,25	17,32	17,62	17,02
3	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	4,45	4,07	3,99	5,37	-6.97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas Tahun 2021

Metode perhitungan PDRB dari sektor Perdagangan menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan relatif stagnan pada kisaran angka 17%. Artinya, perekonomian daerah ini tidak mengalami perubahan struktur yang relatif cepat. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa secara teoritis daerah yang maju akan ditandai oleh meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Berdasarkan kondisi ini, maka upaya yang perlu dilakukan pada lima tahun ke depan adalah bagaimana meningkatkan kontribusi tersebut agar lebih cepat dari 5 tahun sebelumnya sehingga besaran kontribusi sektor perdagangan bisa mendekati angka 18-20%.

Cakupan Bina Kelompok Pedagang

Dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah, keberadaan pasar akan mendorong aktifitas bisnis dan perdagangan masyarakat semakin berkembang. Ketersediaan pasar termasuk pasar tradisional sebagai prasarana perdagangan akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga dan menjual berbagai produk hasil produksinya. Sampai tahun 2020, terdapat 55 Pasar atau Bangunan Pasar di Kabupaten Sambas, dan jumlah los/kios/lapak sebanyak 952 buah, serta sebanyak 710 pedagang.

Jumlah minimarket di Kabupaten Sambas terus bertambah sejak tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2017 sebanyak 60 unit, dan pada tahun 2019 sebanyak 79 unit, atau bertambah sebanyak 19 unit dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2019, minimarket terbanyak berada di Kecamatan Sambas yaitu sebanyak 24 unit (bertambah 5 unit dari tahun 2018), selanjutnya Kecamatan Tebas 13 unit, Pemangkat 12 unit, Kecamatan Teluk Keramat sebanyak 9 unit, Kecamatan Paloh, Jawai dan Semparuk sama-sama 4 unit, Kecamatan Selakau 3 unit, Kecamatan Galing dan Sebawi sama-sama 2 unit, Kecamatan Tangaran dan Jawai Selatan masing-masing 1 unit. Sedangkan kecamatan yang belum memiliki minimarket adalah Kecamatan Sejangkung, Sajingan Besar, Subah, Tekarang, Sajad, Salatiga dan Selakau Timur.

Tabel 2. 84
Perkembangan Prasarana Perdagangan (Unit)
di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020

Tahun	Pasar Tradisional			Minimarket
	Permanen	Semi Permanen	Jumlah	
2016	12	40	52	43
2017	17	40	57	60
2018	24	33	57	66
2019	25	30	55	79
2020	32	23	55	87

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Kab.Sambas

Jumlah asosiasi pedagang di Kabupaten Sambas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah asosiasi pedagang aktif sebanyak 31 asosiasi (atau 54,39%), dan meningkat menjadi 32 asosiasi (atau 58,18%) pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 2. 85
Banyaknya Pengeluaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
di Kabupaten Sambas Tahun 2019 dan 2020

No	Kecamatan	2019	2020
1	Selakau	3	1
2	Selakau Timur	1	-
3	Pemangkat	77	13
4	Semparuk	11	3
5	Salatiga	2	-
6	Tebas	25	11
7	Tekarang	3	-
8	Sambas	88	69
9	Subah	5	9
10	Sebawi	5	1
11	Sajad	1	2
12	Jawai	16	4
13	Jawai Selatan	7	1
14	Teluk Keramat	17	7
15	Galing	3	2
16	Tangaran	3	5
17	Sejangkung	1	2
18	Sajingan Besar	1	3
19	Paloh	10	7
Jumlah		279	140

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sambas

Selanjutnya, kegiatan bongkar muat barang kebutuhan pokok dan komoditi strategis lainnya di pelabuhan ternyata turut memperlancar aktivitas perekonomian dan perdagangan daerah.

Tabel 2. 86
Perkembangan Bongkar Muat (Ton) Melalui Pelabuhan
di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020

Tahun	Bahan Pokok		Migas		Non Migas		Jumlah	
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
2016	9.605	25	-	310	38.640	46.532	48.245	46.867
2017	4.366	-	-	16	34.326	96.290	38.692	96.306
2018	9.537	202	-	6	49.063	164.738	58.600	164.900
2019	7.894	455	-	228	66.737	146.166	74.631	146.894
2020	4.141	918	-	331	98.200	111.486	102.961	112.735

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas Tahun 2021

2.3.2.7. Perindustrian

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan sektor/lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar ke tiga terhadap PDRB Kabupaten Sambas, setelah sektor Pertanian dan sektor Perdagangan. Pada tahun 2016 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Sambas berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 1.998,95 Milyar, atau kontribusinya sebesar 4,16%, dan kontribusinya mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 11,64%.

Tabel 2. 87
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB Sektor Industri (HB-Milyar)	1.988,95	2.210,25	2.291,41	2.423,53	2.406,48
2	Kontribusi Sektor Industri (%)	12,47	12,63	12,07	11,80	11,64
3	Pertumbuhan Sektor Industri %)	4,89	4,12	3,39	4,89	-3,03

Sumber: BPS Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2021

Dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun, kontribusi sektor industri pengolahan mengalami mengalami penurunan tahun 2018-2020. Meskipun kontribusinya cenderung menurun, namun sektor industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi periode 2016-2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan pertumbuhan negatif (minus 3,03%).

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa secara teoritis daerah yang maju akan ditandai oleh meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Di Kabupaten Sambas, ternyata perkembangan sektor industri di Kabupaten Sambas cenderung mengalami pelambatan. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh keterbatasan dukungan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan jalan. Akibatnya, daerah ini tidak memperoleh nilai tambah yang besar dari kegiatan pengolahan produksi primer (pertanian dan perkebunan). Berdasarkan kondisi ini, maka upaya yang perlu dilakukan pada lima tahun ke depan adalah bagaimana mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kontribusi sektor industri, sehingga kontribusi sektor industri pengolahan bisa berada pada kisaran 13-14%.

Cabang Bina Kelompok Pengrajin

Kebijakan percepatan pembangunan ekonomi melalui penciptaan beberapa unit industri baik formal dan non formal di Kabupaten Sambas memiliki banyak manfaat, antara lain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah, mendorong investor lain untuk menanamkan modal, dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Usaha industri di Kabupaten Sambas mengalami perkembangan cukup menggembirakan. Sampai tahun 2020, terdapat sebanyak 564 industri formal, yang terdiri dari 554 industri kecil, dan 1 industri menengah/sedang, serta 9 industri besar. Selain itu terdapat pula industri kecil non formal, yang tersebar dalam berbagai jenis kegiatan usaha. Perkembangan industri kecil non formal di Kabupaten Sambas meningkat pesat, semula sebanyak 842 unit usaha pada tahun 2016 kemudian meningkat menjadi 1.638 unit usaha pada tahun 2020.

Untuk industri kecil formal, ternyata perkembangan tumbuh pesat di Kabupaten Sambas, seiring dengan kemudahan fasilitas dan perizinan. Sebagaimana dimaklumi, bahwa industri kecil formal merupakan industri resmi yang proses pendiriannya perlu mendapatkan izin dari pemerintah melalui dinas terkait.

Pada tahun 2017, jumlah industri kecil formal sebanyak 512 unit, kemudian meningkat menjadi 538 unit pada tahun 2018. Pada tahun 2019, sebanyak 553 unit, dan tahun 2020 sebanyak 377 unit. Persebaran industri kecil formal pada tahun 2020 paling banyak di Kecamatan Pemangkat (99 unit atau 26,26%) dan di Kecamatan Sambas (79 unit atau 20,95%), serta paling sedikit di Kecamatan Sajad (1 unit atau 0,27%) dan di Kecamatan Selakau Timur (1 unit atau 0,27%).

Tabel 2. 88
Jumlah Usaha Industri Kecil Formal Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020

No	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Selakau	30	25	26	26	18
2.	Selakau Timur			1	1	1
3.	Pemangkat	156	148	149	151	99
4.	Semparuk	11	9	10	11	13
5.	Salatiga	3	4	4	4	2
6.	Tebas	71	68	74	75	49
7.	Tekarang	2	2	3	3	4
8.	Sambas	119	109	116	119	79
9.	Subali	2	2	2	2	4
10.	Sebawi	5	4	6	8	6
11.	Sajad					1
12.	Jawai	38	34	34	37	15
13.	Jawai Selatan	27	32	32	32	15
14.	Teluk Keramat	56	49	50	51	39
15.	Galing	2	3	4	4	3
16.	Tangaran	2	2	3	3	2
17.	Sejangkung	2	2	3	3	4
18.	Sajungan Besar	3	3	3	3	2
19.	Paloh	15	16	18	20	21
	Jumlah	544	512	530	553	377

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Kab.Sambas,
Tahun 2021

Berdasarkan klasifikasi usahanya, dari 377 unit usaha industri kecil formal tahun 2020, sebagian besar merupakan industri kimia, agro non pangan dan hasil hutan yakni sebanyak 123 unit, dan kelompok industri pangan sebanyak 120 unit. Sedangkan kelompok industri logam dan mesin sebanyak 86 unit, dan kelompok industri sandang kulit dan aneka sebanyak 48 unit. Perkembangan kelompok industri kecil formal, jumlah unit usaha, dan penyerapan tenaga kerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 89
Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Tenaga Kerja
di Kabupaten Sambas, Tahun 2017-2020

Jenis Data		2017	2018	2019	2020	Satuan
A. Unit Usaha Formal :						
1.	Kelompok Industri Pangan	98	103	110	120	Unit Usaha
	Tenaga Kerja :					
	Laki-Laki	360	372	394	354	Orang
	Perempuan	84	95	106	120	Orang
2.	Kelompok Industri Kimia, Agro Non Pangan & Hasil Hutan	116	135	137	123	Unit Usaha

Jenis Data	2017	2018	2019	2020	Satuan
Tenaga Kerja :					
Laki-Laki	845	878	883	1.184	Orang
Perempuan	18	23	24	190	Orang
3. Kelompok Industri Logam dan Mesin	250	259	266	86	Unit Usaha
Tenaga Kerja :					
Laki-Laki	532	558	573	177	Orang
Perempuan	36	39	39	38	Orang
4. Kelompok Industri Sandang Kulit dan Aneka	38	40	40	48	Unit Usaha
Tenaga Kerja :					
Laki-Laki	65	70	70	98	Orang
Perempuan	49	54	54	31	Orang

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Kab.Sambas,

Selain industri kecil formal, di Kabupaten Sambas terdapat 1 (satu) perusahaan industri sedang/menengah, dan 9 (sembilan) perusahaan industri besar. Perkembangan industri sedang/menengah dan industri besar tersebut dapat digambarkan dari penyerapan tenaga kerja, nilai investasi, dan nilai produksinya. Sampai tahun 2020, di Kabupaten Sambas terdapat 1 (satu) industri sedang/menengah yaitu industri pengolahan kayu dengan jumlah industri 1 unit, jumlah pekerja sebanyak 133 orang.

Tabel 2. 90
Jenis Industri Sedang
di Kabupaten Sambas Tahun 2020

Jenis Industri Sedang	2018	2019	2020	Satuan
Industri Pengolahan Kayu				
a. Jumlah Unit Industri	1	1	1	Unit
b. Jumlah Tenaga Kerja	133	133	133	Orang

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Kab.Sambas,

Sampai tahun 2020, di Kabupaten Sambas terdapat 2 (dua) jenis industri besar yaitu industri pengolahan karet dengan dengan 1 unit usaha dengan jumlah pekerja sebanyak 227 orang, serta industri pengolahan pangan dengan 8 unit usaha dan jumlah pekerja 336 orang.

Tabel 2. 91
Jenis Industri Besar
di Kabupaten Sambas Tahun 2020

Jenis Industri Besar	2018	2019	2020	Satuan
1.Industri Pengolahan Pangan				

Jenis Industri Besar	2018	2019	2020	Satuan
a. Jumlah Unit Industri	6	8	8	Unit
b. Jumlah Tenaga Kerja	336	336	336	Orang
2. Industri Pengolahan Karet				
a. Jumlah Unit Industri	1	1	1	Unit
b. Jumlah Tenaga Kerja	227	227	227	Orang

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Kab.Sambas,

2.3.2.8. Transmigrasi

Jumlah pemukiman transmigrasi Kabupaten Sambas ada di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Tebas, Sajingan Besar, dan Subah. Kecamatan yang memiliki pemukiman transmigrasi terluas adalah Kecamatan Subah dengan 1373 ha. Namun, jumlah kepala keluarga di Kecamatan Subah lebih sedikit bila dibandingkan Kecamatan Tebas yaitu hanya 250 kk. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Tebas yang luas pemukimannya 840 ha, tetapi jumlah kepala keluarganya 350 kk. Sampai dengan Desember 2020 belum ada perubahan luasan dan jumlah KK dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan status kepemilikan, pemukiman yang sudah diserahkan untuk transmigran terdapat di Kecamatan Tebas dan Subah. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas hingga bulan Oktober 2020, pemukiman transmigran di Kecamatan Sajingan Besar masih dalam binaan.

Adapun sarana yang tersedia di areal transmigrasi Kabupaten Sambas antara lain: rumah, puskesmas, rumah ibadah dan gedung sekolah SD. Di areal transmigrasi masing-masing telah memiliki 2 sarana ibadah dan 1 gedung SD di setiap kecamatan. Sedangkan jumlah dan kondisi puskesmas, antara lain masing-masing satu unit di Kecamatan Tebas dan Subah dengan kondisi rusak, sementara satu unit di Kecamatan Sajingan Besar dengan kondisi baik.

Pencadangan lahan transmigrasi nelayan hanya terdapat di Kecamatan Paloh. Luasan pada tahun 2020 bertambah 9,55 ha menjadi 652,79 ha jika dibandingkan tahun 2019. Dengan luas 652,79 ha lahan yang disiapkan pada tahun 2020 dapat menampung sekitar 300 kk. Kondisi tersebut didukung dengan luas pencadangan lahan dalam rencana sebanyak 850 ha. Sedangkan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) kawasan transmigrasi yang sudah

dikembangkan di Kabupaten Sambas terdapat di Kecamatan Subah dan Kecamatan Sajingan Besar

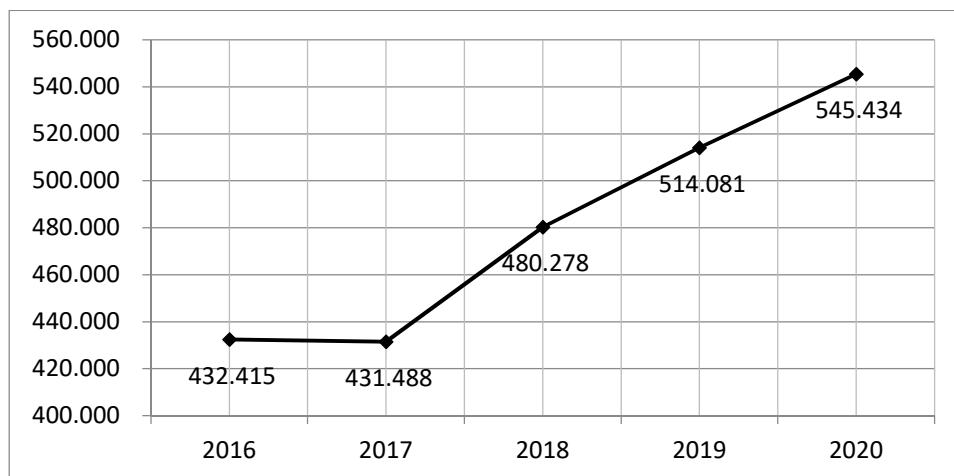
2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran rata-rata per kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Grafik 2. 8
Pengeluaran Rata-rata Per Kapita (Rp)
Kabupaten Sambas, Tahun 2016-2020

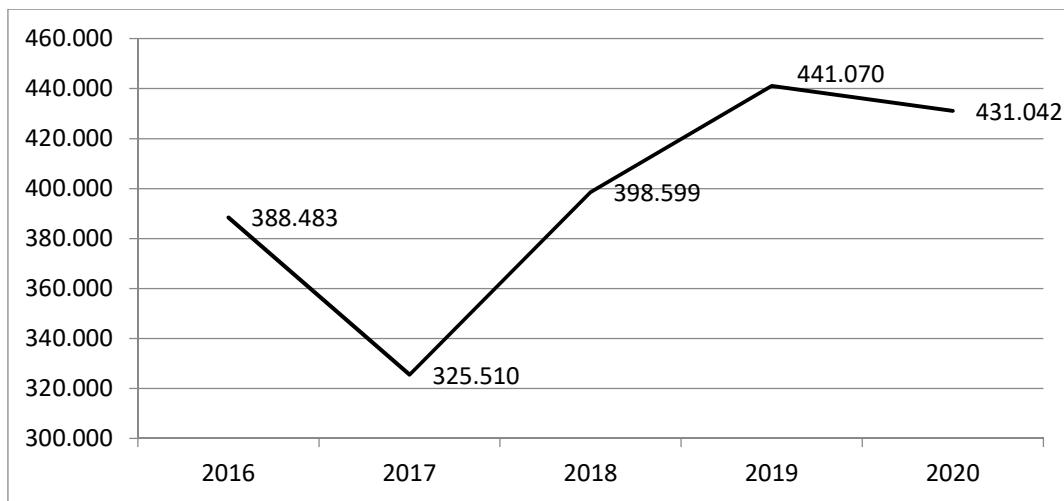


Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka

b. Pengeluaran Rata-rata per kapita (Non-Makanan)

Proporsi pengeluaran bukan makanan terhadap seluruh pengeluaran merupakan salah satu cerminan kesejahteraan penduduk. Hal ini sesuai dengan teori Hukum Engel, yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya, jika proporsi itu mengecil berarti refleksi tingkat kesejahteraan semakin menurun.

Grafik 2. 9
Pengeluaran Rata-Rata (Non Makanan) (Rp)
Kabupaten Sambas, Tahun 2016-2020



Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Aksesibilitas Daerah

Aksesibilitas di Kabupaten Sambas selama ini diperkuat dengan jaringan jalan atau moda transportasi darat dan oleh jaringan transportasi moda sungai dimana terdapat sejumlah dermaga/*steigher* baru yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Kedua moda transportasi ini diharapkan dapat terintegrasi dan mewujudkan sistem pergerakan barang dan orang yang aman, murah dan nyaman.

Tabel 2. 92
Angkutan Darat Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020	Satuan
1. Moda Angkutan Umum	1.064	114	114	114	Unit
a. Jumlah Bus	111	114	114	114	Unit
2. Jumlah Perusahaan Angkutan Umum	21	7	7	7	Perusahaan
a. Perusahaan Milik Pemerintah	1	1	1	1	Perusahaan
b. Perusahaan Milik Swasta	6	6	6	6	Perusahaan
3. Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum	1	1	1	1	Unit
4. Jumlah Terminal	21	5	5	5	Unit
a. Jumlah Terminal Tipe A	0	0	0	0	Unit
b. Jumlah Terminal Tipe B	1	1	1	1	Unit

Uraian	2017	2018	2019	2020	Satuan
c. Jumlah Terminal Tipe C	6	4	4	4	Unit
5. Penumpang Melalui Terminal					
a. Jumlah Penumpang Masuk	1.531	1.579	1.589	962	Orang
b. Jumlah Penumpang Keluar	1.834	1.876	1.892	1131	Orang

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

Pada bulan Mei 2021, Kabupaten Sambas memasuki babak baru berupa Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara TNI Angkatan Udara dengan Pemerintah Kabupaten Sambas tentang Penggunaan Bersama Barang Milik Negara TNI Angkatan Udara sebagai Bandar Udara Liku Paloh untuk kegiatan penerbangan perintis atau sipil di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Hal ini tentunya akan menambah tingkat aksesibilitas Kabupaten Sambas.

Tabel 2. 93
Angkutan Udara di Kabupaten Sambas

Uraian	Volume	Lokasi
1. Jumlah Bandar Udara Domestik	1	Liku, Paloh
2. Jumlah Pelabuhan Udara Perintis	1	Liku, Paloh
3. Jumlah Landasan Helikopter (Helipad)	3	1 di Kecamatan Sajingan Besar (milik Pengamanan Perbatasan), 1 di Kecamatan Sajingan (milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas) dan 1 di Kecamatan temajuk (milik Pengamanan Perbatasan)

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

2.4.2.2. Fasilitas Bank dan Non Bank

Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang-Cabangnya

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditegaskan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan dana masyarakat (tabungan, deposito,

dan giro), meminjamkan uang (kredit), dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan BankNote.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis. Sejalan dengan peran dan fungsi perbankan demikian, dinamika perekonomian di Kabupaten Sambas menjadikan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, DPK yang dihimpun perbankan di Kabupaten Sambas sebesar Rp 12,41 Trilyun atau tumbuh sebesar 4,63% dibandingkan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020, DPK sebesar Rp 13,79 Trilyun atau tumbuh sebesar 11,12% dibandingkan tahun 2019.

Tabel 2. 94
Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
di Kabupaten Sambas Tahun 2017-2020

TRIWULAN	2017 (Rp Trilyun)	2018 (Rp Trilyun)	2019 (Rp Trilyun)	2020 (Rp Trilyun)
Triwulan I	2,48	2,88	3,01	3,27
Triwulan II	2,66	2,91	3,08	3,33
Triwulan III	2,72	3,00	3,08	3,60
Triwulan IV	2,86	3,07	3,24	3,59
Jumlah	10,72	11,86	12,41	13,79

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Tahun 2021

Kebutuhan akan pembiayaan dana untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Sambas menjadikan penyaluran dana kepada masyarakat (kredit) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, kredit yang disalurkan perbankan di Kabupaten Sambas sebesar Rp 12,79 Trilyun atau tumbuh sebesar 8,67% dibandingkan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020, kredit yang disalurkan sebesar Rp 14,36 Trilyun atau tumbuh sebesar 12,28% dibandingkan tahun 2019.

Tabel 2. 95
Perkembangan Penyaluran Kredit Perbankan
di Kabupaten Sambas Tahun 2017-2020

TRIWULAN	2017 (Rp Trilyun)	2018 (Rp Trilyun)	2019 (Rp Trilyun)	2020 (Rp Trilyun)
Triwulan I	2,47	2,83	3,05	3,61
Triwulan II	2,57	2,91	3,11	3,51
Triwulan III	2,40	2,95	3,17	3,54
Triwulan IV	2,74	3,08	3,46	3,70

TRIWULAN	2017 (Rp Trilyun)	2018 (Rp Trilyun)	2019 (Rp Trilyun)	2020 (Rp Trilyun)
Jumlah	10,18	11,77	12,79	14,36

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Tahun 2021

Awal tahun 2020, seluruh dunia terserang pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*), termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 cukup memukul keras ekonomi Indonesia pada 2 sisi yaitu, permintaan dan penawaran. Pembatasan sosial telah berdampak pada berhentinya aktivitas ekonomi dan menurunnya kinerja ekonomi. Sejalan dengan hal itu, Pemerintah menyiapkan program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional untuk memulihkan ekonomi Indonesia melalui berbagai sektor. Oleh karena itu, untuk mewujudkan program PEN di atas diperlukan usaha keras dari seluruh rakyat, terutama pemerintah baik pusat dan daerah. Salah satu program untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan diluncurnya peraturan mengenai relaksasi pinjaman serta subsidi bunga program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di mana tujuan program tersebut adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan ekonomi Debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung program PEN. Pemerintah memutuskan untuk memberikan relaksasi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 persen sampai akhir Desember 2020.

Program Kredit berupa pemberian tambahan modal usaha kepada UMKM (KUR) Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dalam tahun 2020 telah mencapai sebesar Rp. 2.375,51 miliar (64.909 debitur), tiap tahun terus mengalami kenaikan baik dari jumlah akad kredit maupun jumlah debiturnya, jika dibandingkan antara periode tahun 2018 dengan tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp. 183,26 miliar atau 11,35, perbandingan antara periode tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sangat pesar yaitu sebesar Rp. 577,16 miliar atau 32,09 persen.

Tabel 2. 96
Penyaluran KUR Wilayah Kalimantan Barat

No	Kab/Kota	2018		2019		2020	
		Akad	Debitur	Akad	Debitur	Akad	Debitur
1	Kalimantan Barat	1.650.000.000	29	1.055.000.000	30	824.180.000	21
2	Sambas	172.012.480.000	5.063	178.155.490.000	4.706	243.274.362.215	6.728
3	Mempawah	117.141.764.400	3.853	117.924.669.245	3.337	160.082.722.368	6.604
4	Sanggau	137.303.602.000	3.683	151.852.745.000	3.768	241.431.669.252	7.168
5	Ketapang	134.775.029.932	3.445	115.111.754.000	3.193	193.303.766.064	5.616
6	Sintang	169.583.544.950	3.539	214.178.312.000	3.769	254.264.385.790	5.369
7	Kapuas Hulu	74.602.388.591	2.755	101.002.500.000	3.412	158.255.765.180	4.423
8	Bengkayang	62.169.980.000	1.909	61.608.265.000	2.069	107.447.490.000	3.405

No	Kab/Kota	2018		2019		2020	
		Akad	Debitur	Akad	Debitur	Akad	Debitur
9	Landak	84.971.200.000	2.710	99.536.500.000	2.866	141.815.265.000	4.499
10	Sekadau	82.259.245.000	1.715	76.000.490.000	1.679	94.080.326.000	2.158
11	Melawi	60.856.245.000	1.378	84.465.707.561	1.292	78.766.490.000	1.644
12	Kayong Utara	24.188.290.000	826	25.003.500.000	824	31.447.540.000	1.300
13	Kubu Raya	151.025.480.000	3.883	193.886.370.000	4.216	226.210.569.000	6.668
14	Pontianak	256.541.689.000	4.730	283.349.999.288	4.710	321.061.815.204	6.510
15	Singkawang	85.998.890.400	1.993	95.216.230.108	1.907	123.245.561.063	2.769
Total		1.615.079.829.273	41.511	1.798.347.532.202	41.778	2.375.511.907.136	64.909

Sumber : SIKP KUR

2.4.2.3. Ketersediaan Air Bersih

Berdasarkan data yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sambas terjadi kecenderungan penurunan dari volume air minum yang terjual yang berdampak pada nilai penjualan yang juga mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.86 di bawah ini.

Tabel 2. 97
Jumlah Air Minum Yang Terjual dan Nilai Penjualan
di Kabupaten Sambas

No.	Jenis Pelanggan	2019		2020	
		Air Minum Yang Terjual (M3)	Nilai Penjualan (Rp.000)	Air Minum Yang Terjual (M3)	Nilai Penjualan (Rp.000)
1	Golongan Sosial	39.257	66.722.413	70.934	123.939.418
	- Sosial Umum	7.905	9.445.303	12.932	15.364.028
	- Sosial Khusus	31.352	57.277.110	58.002	108.575.390
2	Golongan Rumah Tangga	742.348	4.767.320.846	1.403.874	9.071.196.469
	- Rumah Tangga A	23.368	88.535.607	55.323	214.005.954
	- Rumah Tangga B	2.872	14.422.824	4.219	20.718.928
	- Rumah Tangga C	632.036	4.046.692.170	1.177.038	7.609.300.497
	- Instansi Pemerintahan	84.072	617.670.245	167.294	1.227.171.090
3	Golongan Niaga	99.578	962.159.736	160.363	1.537.108.609
	- Niaga Kecil	27.568	211.913.530	49.251	377.952.328
	- Niaga Menengah	12.170	111.444.760	17.605	159.144.935
	- Niaga Besar	59.840	641.810.446	93.507	1.000.011.346
4	Industri	8.504	87.663.582	11.239	114.531.123
	- Industri Kecil	8.130	81.773.510	10.940	109.932.980
	- Industri Menengah	-	-	-	-
	- Industri Besar	374	5.890.072	299	4.598.143
5	Khusus	-	-	-	253.000
	- Pelabuhan	-	-	-	253.000
6	Karyawan	-	-	-	-
TOTAL		889.687	5.883.866.577	1.646.410	10.847.028.619

Sumber: PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas

2.4.2.4. Fasilitas Listrik

Pelayanan kelistrikan yang optimal akan sangat menentukan produktivitas masyarakat suatu daerah. Iklim usaha dan produksi akan tumbuh dan meningkatkan daya saing daerah. Kondisi Kelistrikan di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 98
Kondisi Kelistrikan di Kabupaten Sambas Tahun 2018 - 2020

No.	Lokasi	Terpasang (KW)	Daya Mampu (KW)	Beban Puncak (KW)	Produksi (KWH)
1	Pemangkat				
2	Sambas	225	175	84	405.158
3	Sekura	830	697	379	502.523
	2020	1.055	872	463	907.681
	2019	2.695	897	377	992.928
	2018	2.695	897	377	732.844

Sumber: PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat PLN Area Singkawang

2.4.2.5. Ketersediaan Restoran

Kondisi rumah makan/restoran di Kabupaten Sambas dalam tiga tahun terakhir mengalami pergeseran jumlah. Secara keseluruhan jumlah rumah makan di Kabupaten Sambas pada tahun 2020 sebanyak 149 unit. Angka menurun dibandingkan tahun 2019 dengan 161 unit. Patut dicermati dampak pandemi Covid-19 pada penurunan jumlah restoran/rumah makan. Selain itu, terdapat pula pola pergeseran kecamatan yang memiliki jumlah restoran/rumah makan terbanyak. Pada tahun 2018, Kecamatan Teluk Keramat memiliki restoran/rumah makan terbanyak dengan 64 unit, sementara dua tahun berikutnya jumlahnya jauh menurun menjadi hanya 9 unit saja. Namun, Kecamatan Sambas justru berkebalikan dengan memiliki lonjakan jumlah rumah makan dari hanya 17 unit di tahun 2018 menjadi 51 unit (2019) dan 69 unit (2020). Untuk lebih rinci, data tersebut kami jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2. 99
Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Sambas Tahun 2018-2020

Kecamatan	Tahun		
	2018	2019	2020
Selakau	0	2	3
Selakau Timur	0	1	0
Pemangkat	14	16	10
Semparuk	15	5	1
Salatiga	0	1	0
Tebas	1	21	19

Kecamatan	Tahun		
	2018	2019	2020
Tekarang	0	1	1
Sambas	17	51	69
Subah	8	0	0
Sebawi	0	1	3
Sajad	0	1	0
Jawai	1	12	10
Jawai Selatan	0	0	3
Teluk Keramat	64	9	9
Galing	0	13	13
Tangaran	0	11	0
Sejangkung	0	1	0
Sajingan Besar	0	8	7
Paloh	0	7	1
Kab. Sambas	120	161	149

Sumber: BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2021

2.4.2.6. Ketersediaan Penginapan

Pada tahun 2020 di Kabupaten Sambas, tingkat penghunian kamar hotel tercatat 12,47 persen. Total penginapan di Kabupaten Sambas berjumlah 82 unit yang terbagi atas 35 unit hotel melati, 27 homestay, dan 20 pondok wisata. Secara keseluruhan jumlah kamar yang tersedia adalah 763 kamar. Berdasarkan analisis dari BPS Kabupaten Sambas, bulan paling banyak dihuni oleh wisatawan adalah bulan Januari. Pada bulan Januari-April 2020, masih terdapat sekitar 1% wisatawan asing, namun dari Mei-Desember praktis tidak ada sama sekali. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang mempersulit kunjungan wisatawan mancanegara. Tabel-tabel berikut memberikan gambaran kondisi ketersediaan penginapan di Kabupaten Sambas.

Tabel 2. 100
Jumlah Penginapan dan Jumlah Kamar
di Kabupaten Sambas Pada Tahun 2018-2020

No	Keterangan	Satuan	2018	2019	2020
1	Jumlah Hotel Melati	unit	0	31	35
	Jumlah Kamar	kamar	376	506	539
2	Jumlah Homestay	unit	27	27	27
	Jumlah Kamar	kamar	58	58	58
3	Jumlah Pondok Wisata	unit	20	20	20
	Jumlah Kamar	kamar	166	166	166

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sambas dalam Buku Profil Kabupaten Sambas 2020

Tabel 2. 101

Persentase Hunian Kamar, Tempat Tidur, Tamu per Kamar, Tamu Asing, dan Tamu Domestik per Bulan Pada Tahun 2020 di Kabupaten Sambas

Bulan	Kamar	Tempat Tidur	Tamu per Kamar	Tamu Asing	Tamu Domestik
Januari	17,73	13,57	1,91	1,31	98,69
Februari	16,01	21,53	1,97	0,29	98,80
Maret	8,25	6,25	2,28	0,14	99,86
April	6,16	4,66	1,66	0,93	99,07
Mei	5,67	4,37	1,64	0,00	100,00
Juni	13,39	9,97	1,77	0,00	100,00
Juli	14,58	10,79	1,80	0,00	100,00
Agustus	12,33	9,23	2,46	0,00	100,00
September	14,68	10,97	2,15	0,00	100,00
Oktober	14,43	10,80	2,01	0,00	100,00
November	13,07	9,68	1,84	0,00	100,00
Desember	13,37	10,46	1,99	0,00	100,00
Rata-Rata	12,47	10,19	1,96	0,22	99,70

Sumber: BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2021

2.4.3. Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan sangat bergantung pada angka kriminalitas. Di Kabupaten Sambas angka tersebut dapat dilihat dari dua indikator berikut, yaitu jumlah tindak pidana kasus kriminalitas yang dilaporkan dan persentase penyelesaian tindak pidana. Data dari Kepolisian Resort (Polres) Sambas pada tahun 2020 tercatat sebanyak 350 kasus yang dilaporkan dengan 367 kasus yang diselesaikan. Secara keseluruhan persentase penyelesaian kasus yang dilaporkan sejumlah 104,86%. Dari total 350 kasus tersebut, kasus terbanyak yang dilaporkan adalah narkotika dengan 54 kasus atau 15,43% dari total kasus yang dilaporkan. Kasus kedua terbanyak adalah percabulan dan miras dengan 45 dan 43 kasus di tahun 2020. Kasus selanjutnya yang dilaporkan terbanyak berturut-turut adalah 30 kasus pencurian biasa, 27 kasus pencurian berat, 24 kasus anjaya, 19 kasus curanmor roda dua, 19 kasus perjudian, dan 14 kasus penggelapan. Jenis kejahatan lainnya yang dilaporkan tidak mencapai 10 kasus. Secara rinci, berikut kami sajikan tabel jenis kejahatan atau pelanggaran di Kabupaten Sambas pada tahun 2020.

Tabel 2. 102
Jenis Kejahatan atau Pelanggaran di Kabupaten Sambas Tahun 2020

No	Jenis Kejahatan	Dilaporkan	Diselesaikan	Persentase Penyelesaian Kasus
	Kejahatan Konvensional			
1	Aniaya	24	26	108,33
2	Pembunuhan	0	0	0,00
3	Pengancaman	1	2	200,00
4	Percabulan	45	49	108,89
5	Perzinahan	1	4	400,00
6	Pencurian Biasa	30	27	90,00
7	Pencurian Berat	27	34	125,93
8	Pencurian dengan Kekerasan	1	0	0,00
9	Curanmor Roda Dua	19	13	68,42
10	Curanmor Roda Empat	0	0	0,00
11	Penipuan	7	9	128,57
12	Penggelapan	14	12	85,71
13	Karena Alpa Menimbulkan Kebakaran	2	0	0,00
14	Perjudian	19	29	152,63
15	Penyerobotan Tanah	0	0	0,00
16	Pengrusakan	6	5	83,33
17	Sengaja Menimbulkan Kebakaran	0	0	0,00
18	Perdagangan Manusia	0	0	0,00
19	Memberikan Suap	0	0	0,00
20	Senjata Api/Sanjam/Handak	0	0	0,00
21	Pencemaran Nama Baik	0	0	0,00
22	Pemerasan dengan Pengancaman	1	2	200,00
23	Pengeroyokan/Premanisme	8	8	100,00
24	Perbuatan Tidak Menyenangkan	1	1	100,00
25	Pemalsuan Surat	0	0	0,00
26	Percobaan Pencurian	0	0	0,00
27	Penghinaan	0	0	0,00
28	Penistaan Agama	0	0	0,00
29	Kelalaian	0	0	0,00
30	Pemerkosaan	0	0	0,00
31	Percobaan Perkosaan	0	1	200,00
32	Kekerasan dalam Rumah Tangga	7	6	85,71
33	Penyalahgunaan Senjata Api/Bahan Peledak	1	4	400,00

No	Jenis Kejahatan	Dilaporkan	Diselesaikan	Persentase Penyelesaian Kasus
34	Kejahatan Narkotika (Dalam Negeri/Lokal)	0	0	0,00
35	Kejahatan Asal Usul Perkawinan	0	0	0,00
36	Pernikahan Tanpa Izin	0	0	0,00
37	Kecelakaan Laut/Air	0	0	0,00
38	Aborsi	0	0	0,00
39	Miras	43	46	106,98
40	Melarikan Orang Lain	0	0	0,00
41	Penemuan Mayat	0	0	0,00
42	Kejahatan Konvensional Lainnya	6	3	50,00
Kejahatan Transnasional				
43	Narkotika	54	54	100,00
44	Perdagangan Manusia	6	5	83,33
45	ITE	2	2	100,00
Kejahatan terhadap Kekayaan Negara				
46	Korupsi	2	2	100,00
47	Pengrusakan Hutan	3	2	66,67
48	Illegal Fishing	0	0	0,00
49	Illegal Mining/PETI	1	0	0,00
50	Karhutla	3	4	133,33
51	Tindak Pidana Migas	2	3	150,00
52	Cukai	0	0	0,00
53	Karantina	1	1	100,00
54	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	0	0	0,00
55	Perlindungan Konsumen	9	8	88,89
56	Konservasi SDA	3	4	133,33
57	Kepabeanan	1	1	100,00
58	Telekomunikasi/Pornografi	0	0	0,00
Total		350	367	104,86

Sumber: Kepolisian Resort Sambas dalam Kabupaten Sambas Dalam Angka 2021

2.4.3.2. Kemudahan Perizinan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi riil di dalam negeri direalisasikan dalam bentuk hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hadirnya Undang-Undang tersebut diharapkan penyelenggaraan penanaman modal semakin efektif untuk

melakukan perencanaan pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama penanaman modal, serta pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Izin usaha merupakan persyaratan legalitas yang harus dimiliki oleh setiap aktivitas usaha di Kabupaten Sambas sebagai bagian upaya perlindungan pemerintah baik terhadap investor maupun masyarakat umum. Semakin mudah dan sedikit jumlah perizinan yang harus dilengkapi oleh suatu unit usaha maka akan semakin memperlancar aktivitas usaha karena semakin sedikit waktu tunggu dan biaya yang harus diberikan investor untuk memulai aktivitas usahanya. Dalam dunia usaha yang sifatnya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan maka sumber daya waktu dan biaya haruslah diperhitungkan secara cermat. Waktu erat kaitannya dengan kesempatan dan peluang yang harus diraih dan dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha untuk membangun pondasi bisnisnya kedepan. Seringkali banyak dan lamanya proses perizinan membuat investor kehilangan momentum untuk memperoleh keuntungan yang besar. Sejalan dengan itu semakin cepat waktu dan mudahnya proses perizinan maka akan semakin meningkatkan iklim investasi daerah. Rincian mengenai perijinan di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 103
Jumlah dan Lama Perizinan di Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-Rata Lama Proses Perizinan	Hari	7	7	6	5	5
2	Jumlah Izin	Izin	1.563	1.297	956	2.486	3.558
3	Jumlah Pelimpahan Kewenangan Perizinan pada PTSP	Izin	34	34	34	94	80

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

2.4.4. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia Kabupaten Sambas secara kuantitatif bertambah dari tahun ke tahun dan merupakan nomor dua terbanyak di Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak. Namun kualitasnya masih tergolong rendah jika diukur dari IPM dan tingkat pendidikan angkatan kerja yang bekerja. Komposisi sumberdaya manusia Kabupaten Sambas berdasarkan kelompok umur menunjukkan ada pergeseran. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 dan 2020, proporsi penduduk usia non produktif (0-14) tahun berkurang 6,77% dan usia 65 tahun keatas bertambah 0,93%. Proporsi penduduk usia 15-64

tahun bertambah 5,84%. Perbandingan penduduk usia non produktif dengan usia produktif yang disebut *Dependency Ratio (DR)* atau Rasio Beban Ketergantungan (RBK) menurun dari 62,42 pada tahun 2010 menjadi 48,35 pada tahun 2020. Penurunan ini merupakan dampak dari keberhasilan dan kesadaran masyarakat menjalankan program KB. Rasio beban ketergantungan yang semakin kecil pertanda baik bagi daya saing daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan DR < 50, Kabupaten Sambas telah masuk dalam era bonus demografi dan ini merupakan kesempatan emas (*gold opportunity*) bagi Pemerintah Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kualitas SDM guna percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi yang terjadi di era digitalisasi ditandai dengan perubahan generasi dari Generasi X (kelahiran 1965-80) ke Generasi Milenial (kelahiran 1981-96); Generasi Z (1997-2012) dan Generasi Post Z (2013 - ...). Potensi Generasi Milenial, Generasi Z dan Generasi Post Z yang jumlahnya relatif besar (hampir 70% dari 629.905 jiwa penduduk Kabupaten Sambas) harus ditingkatkan kualitasnya dalam konteks percepatan pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tabel 2. 104
Struktur Penduduk dan *Dependency Ratio* Kabupaten Sambas
Tahun 2010 dan 2020

Umur (tahun)	2010		2020		Perubahan		Dependency Ratio (DR)	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	2010	2020
0 - 14	166.956	33,65	169.358	26,88	2.400	6,77	62,42	48,35
15 - 64	305.448	61,57	424.575	67,41	119.127	5,84		
65+	23.716	4,78	35.974	5,71	12.258	0,93		
Total	496.120	100,00	629.905	100,00	133.785		Bonus Demografi	

Sumber: Hasil SP 2010 dan SP 2020.

Tabel 2. 105
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sambas

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	5.06	4.93	4.76	-2,02
1.2	Pendapatan Perkapita Berlaku 2010	33.08	35.75	38.42	-
1.3	Pendapatan Perkapita Konstan 2010	23.45	24.64	25.52	-
1.4	Kemiskinan (%)	8,59	8.55	8,19	7,17
1.5	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,31	0.29	0,3	0,275
1.6	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	65.92	66.61	67,02	67,03
1.7	PDRB Harga Berlaku (Milyar Rupiah) - menurut lapangan usaha	17.523,30	18.984,60	20.532,00	-
1.8	PDRB Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah) - menurut lapangan usaha	12.420,05	13.023,70	13.643,10	-
1.9	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	11.92	12.52	12,60	12.61
1.10	Angka rata-rata lama sekolah	6.42	6.68	6,70	6.71
1.11	Angka partisipasi sekolah SD	91.37	93.23	85.84	91.90
1.12	Angka partisipasi sekolah SMP	89.66	58.24	69.58	73.03
1.13	Rasio Guru/murid pendidikan dasar	56.56	65.25	61.02	64.22
1.14	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4 - 6 Tahun	52.82	33.45	32.47	31.42
1.15	APK SD/MI/Paket A	109.30	110.67	101.41	118,25
1.16	APK SMP/MTs/Paket B	83.13	84.87	78.51	141,24
1.17	APM SD/MI/Paket A	91.37	93.23	85.84	91.90
1.18	APM SMP/MTs/Paket B	89.66	58.24	69.58	73.03
1.19	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan bagi Generasi Muda	0	50	0	220
1.20	Jumlah Kegiatan Penumbuhan Budi Pekerti bagi Siswa	5	6	180	200
1.21	Angka Harapan Hidup	68.17	68.50	68.83	68.93
1.22	Angka kematian IBU per 100.000 Kelahiran Hidup	64/100.000	64/100.000	77/100.000	74/100.000
1.23	Angka kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	8.5/1000	8.5/1000	6.9/1000	8/1000
1.24	Wilayah Bebas Rawan Gizi	33.54	40	40	62.18
1.25	Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight pada anak balita)	17.85	17.65	17.78	12.82
1.26	Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat Pendek) pada anak batuta (< 2 tahun)	21.06	21.60	14.62	11.97
1.27	Cakupan Desa Siaga aktif	93.26	92	90	35.57
1.28	Benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan	37	37	21	41

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
1.29	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan pada tahun berkenaan	40	58	0	50
1.30	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	-	-	-	3,1
1.31	PDRB Sektor Pertanian	-	-	-	33.52
1.32	PDRB Sektor Industri Pengolahan	-	-	-	11.64
1.33	PDRB Sektor Jasa Administrasi Perusahaan dan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	6.65
1.34	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	17.02
1.35	INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	-	-	-	61.36
1.36	Angka Partisipasi angkatan kerja	-	-	-	73,85
1.37	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan umum	-	-	-	83.86
1.38	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan kependudukan	-	-	-	80,20
2	Aspek Pelayanan Umum				
2,1	Layanan Urusan Wajib Dasar				
2.1.1	Pendidikan				
2.1.1.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	78.59	77.80	83.07	-
2.1.1.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	82.40	79.80	93.81	-
2.1.1.3	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.21	0.01	0.01	0.01
2.1.1.4	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.91	0.07	0.04	0.04
2.1.1.5	Persentase SD/SDLB yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	62.90	66.18	N/A	76,81
2.1.1.6	Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	58.30	53.29	N/A	-
2.1.1.7	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts	92.79	94.02	90.49	90.58
2.1.1.8	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA	88.24	84.64	103.43	103.46
2.1.1.9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	97.82	96.98	98.19	-
2.1.1.10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	87.12	84.64	96.60	-
2.1.1.11	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	80.37	86.67	68.09	78,78
2.1.1.12	Jumlah Desa yang Membentuk Taman Bacaan Masyarakat Desa (TBM)	N/A	38	43	-
2.1.1.13	Persentase guru yang memiliki	-	-	-	44,19

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
	sertifikat pendidik				
2.1.1.14	Persentase Kepala Sekolah yang bersertifikat	-	-	-	33,33
2.1.1.15	Persentase Pengawas yang bersertifikat	-	-	-	100
2.1.1.16	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan mental dan spiritual	-	-	-	37,52
2.1.1.17	Persentase Peserta yang Menyelesaikan Pendidikan Non Formal	-	-	-	38,88
2.1.1.18	Persentase Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	-	-	-	77,72
2.1.1.19	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Keaksaraan	-	-	-	800
2.1.2	Kesehatan				
2.1.2.1	Keberhasilan Pengobatan BTA Positif (Succes Rate)	98.14	98.14	98	97.70
2.1.2.2	Prevalensi HIV per 100.000 penduduk	10.57	0.5	0.00047	13.1
2.1.2.3	Prevalensi Malaria per 1000 Pddk	0.011	0.011	0.001	0.004
2.1.2.4	Cakupan Penduduk > 2 Tahun minum Obat Filaria	10.29	83.40	90	91.80
2.1.2.5	Insiciden Rate DBD per 100.000	57.23	20	257	2.4
2.1.2.6	Jumlah Institusi yang melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok	8	25	25	22
2.1.2.7	Cakupan Desa Uci	60.10	74.61	76.17	72.02
2.1.2.8	Jumlah Desa Berbasis STBM	0.00	10.00	10.00	-
2.1.2.9	Cakupan Pelayanan kesehatan lingkungan	43.00	43.00	43.00	48,28
2.1.2.10	Cakupan puskesmas yang tersertifikasi akreditasi nasional	44	53,00	96.43	100
2.1.2.11	Cakupan penderita ganguan jiwa berat (ODGJ) yg diobati	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.2.12	Cakupan fasilitas kesehatan primer kondisi baik.	87.00	87.00	75.00	74,19
2.1.2.13	Cakupan Penduduk yang menjadi Anggota Kepesertaan Jaminan Kesehatan	58	58	59.91	60.49
2.1.2.14	Cakupan ketersediaan obat dan vakkin di fasilitas kesehatan	81.33	81.33	83.30	96,09
2.1.2.15	Cakupan ketersediaan dokumen manajemen kesehatan yang berkualitas	100	100	100	100
2.1.2.16	Cakupan puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	50	50	50	78.57
2.1.2.17	Cakupan peningkatan kompetensi SDM kesehatan	56.17	56.1	56.1	19.82

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
2.1.2.18	Prosentase Indikator SPM yang mencapai target	33.3	90	90	41.67
2.1.2.19	Rata Rata Indeks kepuasan Masyarakat	N/A	88	86	-
2.1.2.20	Persentase terpenuhinya standar ketenagaan di RS	N/A	100	100	77
2.1.2.21	Prosentase ketersediaan pengadaan, pemeliharaan dan pembinaan Puskesmas	-	-	-	100
2.1.2.22	Cakupan dokumen pengembangan, pemantapan dan evaluasi di kesehatan	-	-	-	100
2.1.2.23	Cakupan ketersediaan sistem pengelolaan data informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer	-	-	-	80
2.1.2.24	Cakupan Desa yang melaksanakan pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	-	-	-	77.20
2.1.2.25	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan badan layanan umum	-	-	-	93.75
2.1.2.26	Cakupan pembinaan pelayanan kesehatan dasar	-	-	-	100
2.1.2.27	Cakupan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	-	-	-	71.43
2.1.2.29	Prosentase pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	-	-	-	57.14
2.1.2.30	Cakupan peningkatan manajemen mutu pelayanan kesehatan	-	-	-	96.77
2.1.2.31	Cakupan peningkatan kesehatan anak usia sekolah	-	-	-	78.38
2.1.2.32	Cakupan pengawasan obat dan Makanan	-	-	-	86.86
2.1.2.33	Cakupan ketersediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer.	-	-	-	82.14
2.1.2.34	Prevalensi Penderita Penyakit Menular	-	-	-	60
2.1.2.35	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan	-	-	-	6.82
2.1.2.36	Persentase Ketersediaan operasional Rumah Sakit	-	-	-	66.17
2.1.2.37	BOR Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	62.70
2.1.2.38	Cakupan Rumah Sakit Umum Daerah yang tersertifikasi akreditasi nasional	-	-	-	66,67
2.1.2.39	Cakupan LOS Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	77

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
2.1.2.40	Persentase ketersediaan tenaga di RSUD (Permenkes)	-	-	-	77
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2.1.3.1	Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	48.11% (Penambahan 43,60 Km)	49.73	52.66	-
2.1.3.2	Panjang jaringan jalan poros desa dalam kondisi baik	60.01% (Penambahan 52,03 Km)	65.98	67.079	-
2.1.3.3	Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	5	6	1	-
2.1.3.4	Persentase Infrastruktur dasar dalam kondisi baik	-	-	-	60,76
2.1.3.5	Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik	-	-	-	58,03
2.1.3.6	Persentase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	-	-	-	89,01
2.1.3.7	Persentase alat berat kebinamargaan dalam kondisi baik	-	-	-	25.8
2.1.3.8	Persentase Jumlah Bangunan Air dalam Konidisi Baik	-	-	-	82,21
2.1.3.9	Rasio Jaringan Irigasi/Rawa dalam Kondisi Baik (m/Ha)	-	-	-	31,11
2.1.3.10	Persentase Jalan Poros Desa dalam Kondisi Baik	-	-	-	76,69
2.1.4	Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman				
2.1.4.1	Panjang Jalan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (tahun berkenaan)	20.87	42.06	35.3	-
2.1.4.2	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	47.40	53.08	49.38	72,19
2.1.4.3	Rumah Tangga Bersanitasi	88.66	89.78	90.45	81.48
2.1.4.4	Rumah Layak Huni	90.76	78.44	78.72	79.12
2.1.4.5	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	-	-	-	0.69
2.1.4.6	Persentase konektivitas antar desa	-	-	-	92.05
2.1.4.7	Persentase jalan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman dalam kondisi baik	-	-	-	17.380 km
2.1.5	Ketentraman, Tibun & Linmas				
2.1.5.1	Meningkatnya budaya kesadaran dan ketiaatan hukum masyarakat	150	100	100	1547,69
2.1.5.2	Penegakan PERDA	100	100	82	-

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
2.1.5.3	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP.	3	3	3	3
2.1.5.4	Meningkatkan Peran Siskamling	69.13	36.56	5.11	25.44
2.1.5.5	Meningkatnya Kesadaran Swakarsa Masyarakat untuk Menjaga Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban	96.9	100	100	0
2.1.5.6	Meningkatnya Kerjasama dan Koordinasi antara Pemda dan Kepolisian dalam menjaga Keamanan,Ketenteraman dan Ketertiban	133.33	100	100	50
2.1.5.7	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 Penduduk	56	56	52	48
2.1.5.8	Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan	2	2	2	2.04
2.1.5.9	Cakupan Peserta yang mengikuti kegiatan ketahanan dan Nasionalisme pada tahun berkenaan	-	-	-	140
2.1.5.10	Persentase Patisipasi Masyarakat dalam kegiatan Manunggal TNI dan Masyarakat	-	-	-	75
2.1.5.11	Persentase Saran Prasarana Mitigasi Bencana yang terbangun	-	-	-	0
2.1.5.12	Tingkat Perencanaan & Kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	-	-	-	0
2.1.5.13	Persentase jumlah sarpras yang direhabilitasi dan direkonstruksi	-	-	-	0
2.1.5.14	Persentase tingkat pemulihan pasca bencana	-	-	-	0
2.1.5.15	Persentase penanganan kejadian bencana	-	-	-	73,33
2.1.5.16	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	-	-	-	0,0032
2.1.5.17	Persentase Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	-	-	66,67
2.1.5.18	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	-	-	-	21
2.1.5.19	Cakupan Desa Tangguh Bencana	-	-	-	78
2.1.5.20	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	-	-	-	23
2.1.5.21	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	-	-	-	18.46

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
2.1.5.22	Cakupan anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan wawasan kebangsaan	-	-	-	50
2.1.5.23	Jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum	-	-	-	985
2.1.6	Sosial				
2.1.6.1	PMKS yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan Sosial	4.542	671	1408	-
2.1.6.2	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	180	133	116	-
2.1.6.3	Persentase (%) PMKS yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial	-	-	-	58,97
2.1.6.4	Persentase (%) Desa yang dibina dalam hal pengelolaan keuangan dan aset, administrasi dan tata pemerintahan desa	-	-	-	100
2.1.6.5	Persentase (%) Ketersedian Profil Desa	-	-	-	100
2.1.6.6	Persentase (%) fakir miskin dan lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan pemberdayaan sosial	-	-	-	100
2.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
2.2.1	Ketenagakerjaan				
2.2.1.1	Pengangguran Terbuka (%)	4,24	3.34	3,58	3,7
2.2.1.2	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka	1.12	4.69	2.98	14.32
2.2.1.3	Rasio Penduduk yang Bekerja	0.952	0.73	0.964	-
2.2.1.4	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	-	-	-	73%
2.2.1.5	Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	-	79.389.138
2.2.1.6	Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun	-	-	-	4,2
2.2.1.7	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Jaminan Ketenagakerjaan	-	-	-	64%
2.2.1.8	Persentase penduduk angkatan kerja yang dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja	-	-	-	0,33%
2.2.1.9	Persentase Pengangguran Terbuka yang memiliki keterampilan	-	-	-	0,33%
2.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.2.2.1	Rasio Anak yang memerlukan Perlindungan	0.39	0.0174	0.023	2,8
2.2.2.2	Rasio Penanganan Kasus KDRT	0.018	0.019	0.006	0,035

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
2.2.3	Lingkungan Hidup				
2.2.3.1	Jumlah Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL/UKL/UPL/DPLH (buah)	10	35	35	-
2.2.3.2	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang di kelola	0.61	0.61	0.61	0.69
2.2.3.3	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	68
2.2.3.4	Jumlah Kampung Iklim yang ditangani	-	-	-	9
2.2.5	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				
2.2.5.1	Kepemilikan KTP	89,30	93,9	97,95	-
2.2.5.2	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 Penduduk	60,70	245,5	80,20	-
2.2.5.3	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada	Ada	Ada	-
2.2.5.4	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	-
2.2.5.5	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan	-	-	-	98
2.2.5.6	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan untuk setiap peristiwa penting kependudukan	-	-	-	77,05
2.2.5.7	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	-	-	30,77
2.2.5.8	Persentase Kepemilikan kartu keluarga	-	-	-	100
2.2.5.9	Persentase Penerbitan KTP Elektronik	-	-	-	100,38
2.2.5.10	Cakupan Pelayanan Pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting kependudukan	-	-	-	45,53
2.2.5.11	Persentase bayi berakta kelahiran	-	-	-	85,55
2.2.5.12	Persentase Kepemilikan Akta kelahiran Anak usia 0 -18 tahun	-	-	-	95,97
2.2.5.13	Persentase Kepemilikan akte Kelahiran	-	-	-	50,29
2.2.5.14	Persentase Kepemilikan akte Kematian	-	-	-	11,01
2.2.5.15	Persentase Kepemilikan akte Perceraian	-	-	-	12
2.2.5.16	Persentase Kepemilikan akte Perkawinan	-	-	-	18,37
2.2.5.17	Cakupan Pengelolaan Informasi yang cepat , akurat transparan dan akuntabel	-	-	-	99,9
2.2.5.18	Persentase Penapaian Data Kependudukan yang Akuran & Akuntabel	-	-	-	99,9

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
2.2.5.19	Cakupan pemanfatan Data & Inovasi pelayanan dlm meningkatkan kualitas pelayanan penduduk dan catatan sipil	-	-	-	0
2.2.5.20	Persentase Inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	-	-	-	0
2.2.5.21	Persentase Kerjasama pemanfaatan data & Dokumen Kependudukan	-	-	-	0
2.2.6	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
2.2.6.1	Persentase Posyandu Aktif	100	100	100	-
2.2.6.2	Rata - Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	48	48	48	-
2.2.6.3	Prosentase desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan	100	100	100	-
2.2.6.4	Jumlah BUM Desa	29	68	127	-
2.2.6.1	CAPAIAN STATUS KEMAJUAN DESA MANDIRI	-	-	8	38
2.2.6.2	Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengembangan Kawasan Pedesaan	-	-	-	1
2.2.6.3	Persentase pemanfaatan TTG.	-	-	-	50
2.2.6.4	Persentase Lembaga Ekonomi (Bumdes/ Bumdesma) Aktif.	-	-	-	79
2.2.6.5	Persentase Dokumen RKP Desa yang selesai tepat waktu	-	-	-	100
2.2.6.6	Persentase (%) lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	-	-	-	80 %
2.2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2.2.7.1	Jumlah Ketersedian Data dan Informasi Keluarga yang Akurat	1	1	1	-
2.2.7.2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)-TFR	2.91	2,9	2.90	2.92
2.2.7.3	Meningkatkan Persentase Peserta KB Aktif (CPR/ Contraceptive Prevalence Rate)	69.62	70,89	70.52	71.40
2.2.7.4	Menurunnya rata - rata jumlah jiwa dalam keluarga	4.8	4	4.70	3.56
2.2.7.5	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	-	-	-	1
2.2.8	Perhubungan				
2.2.8.1	Tersedianya dermaga/stegher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang	87.60	97.35	105.11	107,4
2.2.8.2	Jumlah dermaga/stegher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang	-	-	-	312

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
2.2.9	Komunikasi dan Informatika				
2.2.9.1	Persentase OPD yang menggunakan aplikasi untuk pelayanan kepada masyarakat	23.18	70.45	70.45	70,83
2.2.9.2	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah melalui Sosialisasi/ Media massa/ radio/ majalah / Televisi/ Media Online	24	24	24	-
2.2.9.3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
2.2.9.4	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	-	0
2.2.9.5	Rasio penyebaran informasi ke desa-desa di Kabupaten Sambas	-	-	-	100
2.2.10	Persandian				
2.2.10.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik Pemda	-	-	-	52
2.2.10.2	Persentase cakupan Pengembangan Dokumen Acuan Bahan Kebijakan untuk pembangunan daerah	-	-	-	65
2.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
2.2.11.1	Pertumbuhan Koperasi	1.65	2.98	3.44	-
2.2.11.2	Persentase pertumbuhan UKM	-	-	-	28.31
2.2.11.3	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro	-	-	-	1.03
2.2.11.4	JUMLAH SARANA PENDUKUNG PENGEMBANGAN UMKM	-	-	-	0
2.2.11.5	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	-	-	-	33.5
2.2.11.6	Persentase koperasi dalam pengawasan dan pemeriksaan	-	-	-	9
2.2.11.7	Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Peningkatan Manajemen Usaha	-	-	-	24.81
2.2.11.8	Persentase Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	-	-	-	100
2.2.12	Penanaman Modal				
2.2.12.1	Nilai Investasi PMDN	3940,28	4957,31	5632.79	7061,39
2.2.12.2	Nilai Investasi PMA	419021	483626	537529.84	507219,9
2.2.12.3	Jumlah Investor yang berinvestasi di Kab Sambas	-	-	-	71
2.2.12.4	Persentase Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	-	0,28
2.2.12.5	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	-	-	-	5%

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
2.2.13	Kepemudaan dan Olahraga				
2.2.13.1	Jumlah Pemuda Pelopor	2	4	1	-
2.2.13.2	Jumlah Cabang Olah Raga prestasi yang dibina	15	6	10	-
2.2.13.3	Cakupan organisasi pemuda aktif	-	-	-	58
2.2.13.4	Cakupan Atlet Berprestasi	-	-	-	52
2.2.13.5	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan bagi Generasi Muda	-	-	-	
2.2.13.6	Persentase penurunan kasus penyalahgunaan narkoba	-	-	-	
2.2.13.7	Jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional	-	-	-	6
2.2.13.8	Cakupan Pembinaan Cabang olahraga Berprestasi	-	-	-	20,59
2.2.14	Kebudayaan				
2.2.14.1	Jumlah Penampilan Seni Budaya Daerah	1	6	4	29
2.2.14.1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	-	-	-
2.2.14.2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	-	-	-	7
2.2.14.3	Jumlah Group Kesenian	-	-	-	29
2.2.15	Perpustakaan				
2.2.15.1	Jumlah Perpustakaan	65.00	73	77	182
2.2.15.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Per Tahun	5286	5428	2043	1304
2.2.15.3	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	20783	22709	24449	25149
2.2.15.4	Jumlah Desa yang membentuk Taman Bacaan Masyarakat Desa (TMB)	-	-	-	47
2.2.15.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	-	-	-	17.437
2.2.15.6	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	-	-	-	0,34
2.2.15.7	Persentase Pustakawan, tenaga teknis dan penilai Yang memiliki sertifikat	-	-	-	3,6
2.2.15.8	Persentase Koleksi Bahan Pustaka yang Rusak/Hilang	-	-	-	1,03
2.2.16	Kearsipan				
2.2.16.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	-	-	-	22,73
2.2.16.2	Jumlah arsip yang terjaga kelestariannya	-	-	-	49
2,3	Urusan Pilihan				
2.3.1	Pariwisata				

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
2.3.1.1	Jumlah Fasilitas Umum yang dibangun di lokasi Destinasi wisata	2	3	17	-
2.3.1.2	Cakupan DTW yang dikembangkan	-	-	-	0
2.3.1.3	Cakupan pelaksanaan pengawasan pengelolaan industri pariwisata	-	-	-	2,56
2.3.1.4	Jumlah kunjungan wisatawan per tahun	-	-	-	22597
2.3.1.5	Persentase kuantitas atraksi daya tarik wisata yang dikembangkan	-	-	-	3,89
2.3.1.6	Cakupan Organisasi Kepariwisataan yang aktif	-	-	-	72,73
2.3.1.7	Cakupan Pengembangan Ekraf	-	-	-	21
2.3.1.8	Cakupan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata	-	-	-	15,51
2.3.1.9	Persentase kualitas atraksi daya tarik wisata yang dikembangkan	-	-	-	
2.3.1.10	Persentase pengembangan pemasaran pariwisata	-	-	-	75
2.3.1.11	Cakupan pemuda berprestasi	-	-	-	N/A
2.3.2	Pertanian				
2.3.2.1	Jumlah Pameran/Promosi yang diikuti	-	-	-	N/A
2.3.2.2	Jumlah Penggunaan Teknologi Pertanian Tepat Guna	-	-	-	4
2.3.2.3	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani yang Mandiri	-	-	-	50
2.3.2.4	Persentase Petani yang melaksanakan pengendalian OPT	-	-	-	64
2.3.2.5	Jumlah bantuan saprodi perkebunan	-	-	-	1
2.3.2.6	Jumlah kelompok yang mendapatkan kerjasama kemitraan	-	-	-	20
2.3.2.7	Jumlah Penerapan Teknologi Pasca Panen	-	-	-	3
2.3.2.8	Jumlah Produksi Karet	17.810	17711	17452	17.711
2.3.2.9	% Petani yang menggunakan bibit unggul	-	-	-	50
2.3.2.10	Jumlah produksi padi	282.443	409.896	291.667	288.583,5
2.3.2.11	Persentase Peningkatan Indeks Petanaman	-	-	-	83.14
2.3.2.12	Jumlah produksi jeruk	77.767	107.097	100.887,37	109987
2.3.2.13	Jumlah Promosi Penerapan Teknologi Pasca Panen	-	-	-	2
2.3.2.14	Jumlah produksi Daging Sapi	734.40	873	888,58	823,92
2.3.3	Perdagangan				
2.3.3.1	Jumlah pasar yang dibangun dan direvitalisasi pemda	62	64	66	-
2.3.3.2	Persentase Peningkatan Calon Eksportir	-	-	-	50
2.3.3.3	Persentase perdagangan produk lokal	-	-	-	40

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
	dalam negeri				
2.3.4	Industri				
2.3.4.1	Pertumbuhan Industri	31.67	1.76	1.92	-
2.3.4.2	Persentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	-	-	-	23.8
2.3.4.3	Persentase pemgembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	-	-	-	70.91
2.3.4.4	PERSENTASE INDUSTRI KECIL MENENGAH YANG DIBINA	-	-	-	0
2.3.4.5	Persentase industri yang dibina	-	-	-	10.01
2.3.4.6	Persentase sentra industri unggulan yang direvitalisasi	-	-	-	15.5
2.3.5	Transmigrasi				
2.3.5.1	Jumlah kelompok masyarakat di kawasan transmigrasi yang diberdayakan	130	200	200	75
2.3.5.2	Cakupan Kelompok Masyarakat Kawasan Transmigrasi yang dibina dan diberdayakan	-	-	-	100%
2.3.5.3	Persentase Jumlah KK yang mendapatkan Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi di Lokasi Transmigrasi	-	-	-	3%
2.3.5.4	Persentase Penataan Penempatan Penduduk di Kawasan Transmigrasi	-	-	-	100%
2.3.5.5	Persentase Penyelesaian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Sertifikasi Lahan	-	-	-	41%
2.3.6	Kelautan dan Perikanan				
2.3.6.1	Jumlah produksi Perikanan Budidaya (ton)	6980,45	7,903.23	8105,28	3928
2.4	Layanan Urusan Penunjang				
2.4.1	Perencanaan Pembangunan				
2.4.1.1	Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	100	91.45	100	100
2.4.1.2	Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	80	85.81	86.16	99,10
2.4.1.3	Persentase data SIPD yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan	-	-	-	90
2.4.1.4	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	-	-	-	100
2.4.1.5	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	-	-	-	75
2.4.1.6	Persentase usulan prioritas Musrenbang yang masuk dalam RKPD	-	-	-	12%

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
2.4.1.7	Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahannya	-	-	-	100
2.4.1.8	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahannya	-	-	-	100
2.4.1.9	Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-	-	-	100
2.4.1.10	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-	-	-	98.71
2.4.1.11	Persentase pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	-	-	-	100
2.4.1.12	Jumlah rumusan kebijakan pembangunan	-	-	-	4 rumusan
2.4.2	Keuangan				
2.4.2.1	Penetapan APBD, APBD-P, Perda Pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.4.2.2	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.4.2.3	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.4.2.4	Persentase kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	40%
2.4.2.5	Persentase tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	-	-	-	100%
2.4.2.6	Persentase Peningkatan Pendapatan Sektor PBB	-	-	-	118.12%
2.4.2.7	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	-	-	-	96.47%
2.4.2.8	Persentase kinerja pengelolaan aset daerah	-	-	-	100%
2.4.2.9	Persentase tata kelola aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku	-	-	-	100%
2.4.3	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan				
2.4.3.1	Persentase PNS yang capaian kinerjanya minimal baik	-	-	-	96.12
2.4.3.2	Persentase data pegawai yang terintegrasi dengan sistem database kepegawaian secara online	-	-	-	100
2.4.3.3	Persentase jabatan fungsional yang mempunyai organisasi profesi tingkat kabupaten	-	-	-	52

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
2.4.3.4	Persentase realisasi formasi CPNS	-	-	-	98.87
2.4.3.5	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	-	83.813
2.4.3.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Proses Pensiun PNS	100	100	100	100
2.4.3.7	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS	100	100	100	100
2.4.3.8	Peningkatan Kompetensi Pejabat Struktural melalui Diklat Kepemimpinan	48.75	48.75	41.97	42.35
2.4.3.9	Persentase JPT yang pengisiannya dilakukan melalui proses seleksi pengisian jabatan secara terbuka				33.33
2.4.3.10	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti asesmen kompetensi				92.35
2.4.3.11	Persentase pengisian jabatan struktural	-	-	-	85.63
2.4.3.12	Persentase PNS yang memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara	-	-	-	70.66
2.4.3.13	Rata-rata jam pelajaran pengembangan kompetensi bagi setiap PNS	-	-	-	17.6
2.4.3.14	Penyelesaian Kasus - kasus pelanggaran disiplin Kepegawaian	72.73	66.67	88.89	87.5
2.4.3.15	Persentase penyelesaian usulan PNS yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penghargaan SLKS	-	-	-	100
2.4.3.16	Persentase PNS yang capaian kinerjanya minimal baik	-	-	-	96.12
2.4.4	Penelitian dan Pengembangan				
2.4.4.1	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	-	-	-	100%
2.4.4.2	Persentase operasional pengelolaan Kebun Raya Sambas	-	-	-	99,63%
2.4.5	Pengawasan				
2.4.5.1	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	-	-	-	78.19
2.4.5.2	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	-	100
2.4.5.3	Jumlah Perangkat Daerah dengan indeks Reformasi Birokrasi minimal B	-	-	-	10
2.4.5.4	Tingkat Kapabilitas APIP	-	-	-	Level 2
2.4.5.5	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai Evaluasi Lakip Minimal B	-	-	-	30
2.4.5.6	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan kerugian negara/daerah	-	-	-	70

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
2.4.5.7	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK	-	-	-	78.19
2.4.5.8	Persentase penyelesaian kasus pengaduan	-	-	-	100
2.4.6	Sekretariat Dewan				
2.4.6.1	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	99.47	96	98.99	98
2.4.6.2	Jumlah Produk hukum inisitif DPRD di thn	-	-	-	3
2.4.6.3	Persentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui reses		-	-	65
2.4.6.4	Jumlah program kerja DPRD dalam menjalankan Fungsinya	CAPAIAN KINERJA	-	-	10
2.4.6.5	Jumlah Produk hukum yang ditetapkan di tahun berkenaan	2017	2018	2019	2020
2.4.7	Sekretariat Daerah	-	-	-	65
2.4.7.1	Persentase petugas/penyuluhan keagamaan dan lembaga keagamaan yang dibina	-	-	-	10
2.4.7.2	Persentase kerjasama pembangunan yang dilakukan antar daerah	-	-	-	4
2.4.7.3	Pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga pembina agama	N/A	45	29	62
2.4.7.4	Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluhan dan bimbingan keagamaan	-	-	-	0
2.4.7.5	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama Daerah	-	-	-	0
2.4.7.6	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	-	-	4
2.4.7.7	Unit Pelayanan Publik dalam Kategori "Baik"	-	-	-	60
2.4.7.8	Penyampaian LAKIP dan TAPKIN tepat waktu	-	-	-	70
2.4.7.9	Prosentase SKPD yang telah menyusun SOP	-	-	-	70
2.4.7.10	Prosentase SKPD yang melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	-	-	-	100
2.4.7.11	Prosentase SKPD yang mencapai target SPM	-	-	-	65
2.4.7.12	Prosentase SKPD yang telah memiliki Perbup SPM	-	-	-	0
2.4.7.13	Tingkat Ketersediaan Pelaporan Capaian kinerja Organisasi	-	-	-	100
2.4.7.14	Jumlah Penyusunan Dokumen Pemerintahan OTDA	-	-	-	4
2.4.7.15	Persentase SKPD yang memenuhi Analisis Jabatan & Analisis beban	-	-	-	100

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
	Kerja				
2.4.7.16	Jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	-	-	-	1
2.4.7.17	Jumlah rapat Forkorpimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)	-	-	-	10
2.4.7.18	Prosentase regulasi pengendalian administrasi pengendalian pembangunan yang diterbitkan	-	-	-	100
2.4.7.19	Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan pengendalian pembangunan	-	-	-	100
2.4.7.20	Jumlah BUMD yang masuk kategori sehat	-	-	-	
2.4.7.21	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang ekonomi & SDA	-	-	-	2
2.4.7.22	Rumusan Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Pada Batas Negara	-	-	-	1
2.4.7.23	Rumusan Kebijakan Pengelolaan potensi Perbatasan Pada Batas Negara	-	-	-	1
2.4.7.24	Rumusan Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan Pada Batas Negara	-	-	-	1
2.4.7.25	Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	0
2.4.7.26	Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tepat waktu	-	-	-	Tepat Waktu
2.4.7.27	Rumusan kebijakan Penyelamatan Arsip Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	-	-	-	0
2.4.7.28	Jumlah Peringatan Hari Kebangsaan	-	-	-	5
2.4.7.29	Jumlah berita yang dirilis	-	-	-	
2.4.7.30	prosentase proses pengadaan barang dan jasa yang kridibel dan transparan	-	-	-	99,43
2.4.7.31	rumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	-	-	-	1
2.4.7.32	Prosentase data rupa bumi yang teridentifikasi dan terinventarisasi	-	-	-	246
2.4.7.33	Jumlah Produk Hukum (Perda) yang diterbitkan di tahun berkenaan	-	-	-	8
3	Aspek Daya Saing Daerah				
3.1	PPP (Pengeluaran Perkapita)	9403	9774	9924	9858
3.2	Penanganan Sampah Perkotaan	54.90	36.98	32	35

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA			
		2017	2018	2019	2020
3.3	Drainase dalam Kondisi Baik	3.80	12.90	13.96	14.41
3.4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja pelayanan di Kecamatan	86.48	88.34	91.21	-
3.5	Efektifitas koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan	98.12	98.37	99.41	-
3.6	Persentase jumlah desa yang dilayani dalam program PATEN	100	98.05	100	-
3.7	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	CC (57,26)	CC (57,26)	B	B
3.8	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	-	CC	B	B
3.9	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Lakip minimal B	-	-	-	100
3.10	Tingkat Kapabilitas APIP	-	-	-	Level 2

BAB III

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah menjadi faktor strategis dan berperan penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Dalam upaya mewujudkan keuangan daerah yang efektif dan efisien serta transparan, partisipatif dan akuntabel, dibutuhkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Mengingat begitu pentingnya pengelolaan keuangan daerah, maka pelaksanaannya harus mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah terakit erat dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Sejalan dengan prinsip, asas, dan landasan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, menuntut Pemerintah Daerah untuk menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif,

transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan dalam: (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang* Pemerintahan daerah, (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang* Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *tentang* Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang* Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 *tentang* Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dicermati pada kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi Neraca Daerah. Adapun kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari kapasitas keuangan daerah yang tercermin dalam Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sementara itu, Neraca Daerah dapat menggambarkan perkembangan asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah, serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sebelum penyusunan dan pelaksanaan anggaran, terlebih dahulu ditetapkan kebijakan umum anggaran yang telah disepakati bersama

antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, proses penyusunan APBD Kabupaten Sambas dilakukan dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama peraturan yang berkaitan dengan reformasi di bidang keuangan daerah. Adapun struktur APBD terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

APBD Kabupaten Sambas mengalami peningkatan cukup signifikan, dari Rp 1.530,82 Milyar tahun 2016 meningkat menjadi Rp 1.834,74 Milyar pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan tahun 2019, menjadi Rp 1.669,65 Milyar. Meskipun secara keseluruhan APBD mengalami peningkatan, namun pada tahun 2016 dan tahun 2020 menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Daerah cenderung lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan Belanja Daerah. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Sambas harus menggali sumber pembiayaan yang cukup besar untuk menutupi kekurangan pendapatan (defisit) pada tahun 2016 dan 2020 tersebut, yang sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas dalam kurun waktu 2016–2020 rata-rata 2,27% per tahun (Tabel 3.1). Dalam kurun waktu yang sama, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 6,77% per tahun. Peningkatan PAD yang cukup tinggi tersebut dikontribusi oleh pertumbuhan penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, rata-rata 12,95% per tahun. Selanjutnya, pertumbuhan Dana Perimbangan periode 2016–2020 rata-rata -1,38% per tahun. Pertumbuhan positif Dana Perimbangan dikontribusi oleh peningkatan penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil SDA. Selanjutnya, peningkatan penerimaan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama periode 2016–2020 rata-rata sebesar 7,29% per tahun. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut dikontribusi oleh pertumbuhan tertinggi yang bersumber dari penerimaan Hibah.

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sambas, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata2 Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
I. PENDAPATAN DAERAH	1,530,823,553,222.48	1,634,003,339,883.87	1,699,544,377,805.21	1,834,749,639,329.51	1,669,652,409,545.95	2.27
1. PAD	102,059,036,354.48	200,322,596,712.12	127,663,390,963.28	148,846,279,607.03	129,681,057,676.48	6.77
1.1 Pajak Daerah	3,259,019,202.75	25,335,726,895.81	29,750,525,984.98	53,863,790,697.96	31,059,856,363.27	12.95
1.2 Retribusi Daerah	3,259,019,202.75	2,416,435,071.39	3,528,145,802.99	3,480,929,982.19	3,909,461,569.39	4.99
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3,683,872,859.00	3,607,389,869.00	3,396,765,325.00	2,923,845,289.00	3,231,061,793.00	-3.07
1.4 Lain-lain PAD Yang Sah	72,652,835,213.36	168,963,044,875.92	90,987,953,850.31	88,577,713,637.88	91,480,677,950.82	5.64
2. PENDAPATAN TRANSFER	1,427,827,928,868.00	1,432,363,793,309.00	1,493,970,701,385.00	1,582,193,180,001.00	1,445,026,636,211.00	0.30
1.1 Transfer Pemerintah Pusat	1,363,285,150,577.00	1,380,646,738,181.00	1,425,144,152,145.00	1,513,526,229,774.00	1,377,703,358,913.00	0.26
a. Dana Perimbangan	1,243,434,973,577.00	1,227,460,944,080.00	1,252,299,914,145.00	1,308,548,444,744.00	1,174,750,191,513.00	-1.38
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	30,567,549,329.00	22,559,375,840.00	33,567,662,883.00	30,740,321,194.00	23,139,572,576.00	-6.08
1.1 DBH-Pajak	29,334,220,829.00	20,504,802,587.00	29,288,701,018.00	26,769,669,732.00	15,987,045,201.00	-11.38
1.2 DBH-SDA	1,233,328,500.00	871,250,908,000.00	4,278,961,865.00	3,970,651,462.00	7,152,527,375.00	119.98
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	882,308,489,000.00	871,250,908,000.00	873,609,250,000.00	894,193,050,000.00	813,946,622,000.00	-1.94
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	330,558,935,248.00	333,650,660,240.00	345,123,001,262.00	383,615,073,550.00	337,663,996,937.00	0.54
3.1 DAK Fisik	330,558,935,248.00	156,601,935,351.00	345,123,001,262.00	198,125,031,430.00	337,663,996,937.00	0.54
3.2 DAK Non Fisik	0.00	177,048,724,889.00	0.00	185,490,042,120.00	0.00	0.00
b. Dana Insentif Daerah (DID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Dana Keistimewaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Dana Desa (DD)	119,850,177,000.00	153,185,794,101.00	172,844,238,000.00	204,997,785,000.00	202,953,167,400.00	17.33
1.2 Transfer Antar Daerah	64,542,778,291.00	51,717,055,128.00	68,826,549,240.00	68,666,950,257.00	67,323,277,298.00	1.08
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	49,679,378,291.00	51,717,055,128.00	68,826,549,240.00	66,081,520,257.00	67,323,277,298.00	8.88
b. Bantuan Keuangan	14,863,400,000.00	0.00	0.00	2,585,430,000.00	0.00	-25.00
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	936,588,000.00	1,316,949,862.75	77,910,285,456.93	103,710,179,721.48	94,944,715,658.47	7.29
1. Hibah	936,588,000.00	807,538,775.00	77,910,285,456.93	103,710,179,721.48	94,944,715,658.47	7.29
2. Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata2 Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3. Lain-lain Pendapatan	-	509,411,087.75	0.00	0.00	0.00	0.00
II. BELANJA DAERAH	1,589,219,116,679.84	1,638,897,259,025.08	1,701,221,066,216.95	1,835,021,132,481.87	1,692,191,085,750.19	1.62
1. Belanja Operasi	1,046,373,540,252.87	1,072,650,389,102.62	1,147,790,347,628.49	1,192,771,286,328.78	1,157,874,378,464.66	2.66
1.1 Belanja Pegawai	674,519,731,066.42	609,037,702,782.01	606,234,979,216.00	626,368,853,989.00	714,208,603,231.51	1.47
1.2 Belanja Barang dan Jasa	360,671,959,685.53	424,623,058,239.89	460,761,647,453.99	543,055,458,830.85	365,202,091,038.63	0.31
1.3 Belanja Bunga	429,691,888.92	928,345,074.72	1,151,609,178.50	1,811,219,808.93	1,923,456,981.52	86.91
1.4 Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 Belanja Hibah	9,811,347,312.00	37,203,783,006.00	75,352,911,780.00	17,770,930,000.00	75,948,692,213.00	168.52
1.6 Belanja Bantuan Sosial	940,810,300.00	857,500,000.00	4,289,200,000.00	3,764,823,700.00	591,535,000.00	-9.28
1.7 Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Belanja Modal	327,918,328,127.37	319,523,642,409.54	286,654,817,075.64	339,865,824,788.00	237,810,768,754.89	-6.87
3. Belanja Tak Terduga	133,171,661.88	27,026,973.00	801,474,379.00	289,442,857.00	3,725,431,544.00	676.24
4. Belanja Transfer	214,794,076,637.72	246,696,200,539.92	265,974,427,133.82	302,094,578,508.09	292,770,506,986.64	9.08
SURPLUS/(DEFISIT)	-58,395,563,457.36	-4,893,919,141.21	-1,676,688,411.74	-271,493,152.36	-22,538,676,204.24	-15.35
III. PEMBIAYAAN	70,925,740,819.57	33,251,187,362.15	45,897,268,208.34	33,024,710,916.96	42,010,246,904.51	-10.19
1. Penerimaan Pembiayaan	115,422,740,819.57	87,490,177,362.21	123,357,268,208.34	128,941,585,916.86	127,760,246,904.51	2.67
1.1 SILPA tahun sebelumnya	61,183,390,819.57	12,530,177,362.21	28,357,268,208.34	44,191,585,916.86	32,760,246,904.51	-11.61
1.2 Pencairan Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 Hasil Penjualan KDYD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 Penerimaan Pinj. Daerah & Obligasi Daerah	54,239,000,000.00	74,960,000,000.00	95,000,000,000.00	84,750,000,000.00	95,000,000,000.00	18.79
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00
2. Pengeluaran Pembiayaan	44,497,000,000.00	54,238,990,000.00	77,460,000,000.00	95,916,874,999.90	85,750,000,000.00	23.18
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 Penyertaan Modal Daerah	2,000,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-12.50
2.3 Pembayaran Pokok Hutang	42,497,000,000.00	54,238,990,000.06	74,960,000,000.00	94,916,874,999.90	84,750,000,000.00	24.86
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pembiayaan Netto	70,925,740,819.57	33,251,187,362.15	45,897,268,208.34	33,024,710,916.96	42,010,246,904.51	-10.19
3.3 Sisa Lebih Pembiaya. Anggaran (SILPA)	12,530,177,362.21	28,357,268,220.94	44,220,579,796.60	32,753,217,764.60	19,471,570,700.27	13.85

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sambas
Tahun 2016-2020 (diolah)

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas selama periode 2016-2020 menunjukkan pencapaian yang belum optimal, rata-rata 85,81% per tahun. Kinerja Rasio Efektivitas perlu untuk terus menerus ditingkatkan, karena fluktuasinya relatif tinggi pada kisaran 61,24% s/d 172,78%. Untuk memperoleh rasio efektivitas yang cenderung linier, perlu langkah sistematis untuk meningkatkan kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, dengan fokus pada upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah yang basis pajak dan potensinya relatif cukup besar.

**Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Sambas, Tahun 2016-2020**

TAHUN	TARGET		REALISASI		Rasio Efektivitas (%)
	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	
2016	98.893.625.880,02	6,18	102.059.036.354,48	-14,59	103,20
2017	115.942.658.607,07	17,24	200.322.596.712,12	96,28	172,78
2018	208.453.882.650,56	79,79	127.663.390.963,28	-36,27	61,24
2019	162.133.154.873,35	-22,22	148.846.279.607,03	16,59	91,80
2020	131.008.857.870,66	-19,20	129.681.057.676,48	-12,58	98,99

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sambas, Tahun 2016-2020 (diolah)

3.1.2. Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah menginformasikan posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan

manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2016-2020, pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Sambas mencapai 6,05% per tahun, yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Sambas mengalami peningkatan yang relatif stabil. Pertumbuhan Aset dalam trend yang positif ini menunjukkan bahwa aset Pemerintah Kabupaten Sambas periode 2016-2020 berada pada kondisi sehat.

Aset daerah tersebut berupa Aset Lancar (uang Kas, Piutang, dan Penyisihan); Investasi Jangka Panjang; Aset Tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya); dan Aset Lainnya, yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Sambas.

Aset Lancar dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,25% per tahun. Investasi Jangka Panjang khususnya Investasi Permanen mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,99% per tahun, sedangkan Aset Tetap tumbuh rata-rata 4,04% per tahun. Komponen Aset Lainnya mengalami pertumbuhan paling tinggi, rata 112,74% per tahun. Secara keseluruhan, perkembangan kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas dalam kurun waktu 2016-2020 seperti terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Perkembangan Neraca Daerah
Kabupaten Sambas, Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan (%)
1	ASET	2,163,536,808,956.86	2,310,028,558,954.93	2,423,260,588,332.18	2,627,525,636,373.47	2,687,467,881,181.72	
2	ASET LANCAR	56,744,870,415.59	81,122,355,678.15	113,396,323,030.84	110,595,411,742.44	84,547,881,421.14	
3	Kas	17,805,537,396.21	28,357,268,208.34	44,202,323,032.86	32,760,246,904.51	19,464,541,560.36	
4	Kas di Kas Daerah	9,712,570,748.52	21,730,610,468.01	38,830,701,670.65	8,106,423,082.88	12,916,418,313.11	
5	Kas di Bendahara Penerimaan	9,562,700.00	0.00	0.00	0.00	1,679,000.00	
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	213,000.00	96,149,841.00	11,575,014.06	25,004,141.00	
7	Kas di Bendahara BLUD	2,808,043,913.69	3,381,261,385.16	1,554,238,239.17	1,732,722,220.04	1,497,192,357.79	
8	Kas di Bendahara BOS	5,275,360,034.00	3,245,183,355.17	3,721,233,282.04	22,909,526,587.53	5,024,247,748.46	
9	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	Piutang	21,610,381,286.02	28,452,657,362.74	39,732,589,933.51	49,727,373,054.47	37,356,538,237.15	
11	Piutang Pendapatan	29,489,713,374.06	37,991,308,404.06	51,735,625,878.06	62,775,450,675.28	53,878,700,469.21	
12	Piutang Pajak Daerah	11,864,352,646.00	12,364,074,735.00	14,562,417,201.00	16,666,770,200.00	15,723,336,009.00	
13	Piutang Retribusi Daerah	2,711,148,506.00	2,950,829,665.00	2,772,579,040.00	2,779,967,564.38	2,802,833,665.00	
14	Piutang Hsl Pengel. Kkyn Daerah Yg Dipisahkan	0.00	3,396,765,325.00	2,923,845,289.00	3,231,061,793.00	3,047,432,850.03	
15	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	14,914,212,222.06	19,260,638,679.06	18,946,295,305.06	20,472,089,547.06	22,782,300,284.32	
16	Piutang Pendapatan Transfer	0.00	0.00	12,511,489,043.00	19,592,838,730.00	9,503,797,660.86	
17	Piutang Pendapatan Lainnya	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	32,722,840.84	19,000,000.00	
18	Piutang Lainnya	257,819,141.78	120,573,500.00	120,573,500.00	120,573,500.00	120,573,500.00	

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan (%)
19	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	257,819,141.78	120,573,500.00	120,573,500.00	120,573,500.00	120,573,500.00	
20	Penyisihan Piutang	(8.137.151.229,82)	(9.659.224.541,32)	(12.123.609.444,55)	(13.168.651.120,81)	16,642,735,732.06	
21	Penyisihan Piutang Pendapatan	(8.016.577.729,82)	(9.538.651.041,32)	(12.003.035.944,55)	(13.168.651.12,81)	16,522,162,232.06	
22	Penyisihan Piutang Lainnya	(120.573.500,00)	(120.573.500,00)	(120.573.500,00)	-	120,573,500.00	
23	Beban Dibayar Dimuka	250,399,983.28	303,062,404.02	678,680,557.08	298,730,176.53	181,290,296.54	
24	Persediaan	17,078,551,750.08	24,009,367,703.05	28,782,729,507.39	27,809,061,606.93	27,545,511,327.09	
25	JUMLAH ASET LANCAR	56,744,870,415.59	81,122,355,678.15	113,396,323,030.84	110,595,411,742.44	84,547,881,421.14	12.25
26							
27	INVESTASI JANGKA PANJANG	34,425,834,255.48	34,549,815,258.96	37,578,061,888.12	38,679,940,866.66	39,920,527,558.27	
28	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	29,573,610.83	29,573,610.83	29,573,610.83	29,573,610.83	29,573,610.83	
29	Investasi Non Permanen Lainnya	1,063,309,621.00	1,063,309,621.00	1,063,309,621.00	29,573,610.83	29,573,610.83	
30	Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih	(1.033.736.010,17)	(1.033.736.010,17)	(1.033.736.010,17)	-	0.00	
31	Investasi Jangka Panjang Permanen	34,396,260,644.65	34,520,241,648.13	37,548,488,277.29	38,650,367,255.83	39,890,953,947.44	
32	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	34,396,260,644.65	34,520,241,648.13	37,548,488,277.29	38,650,367,255.83	39,890,953,947.44	
33	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	34,425,834,255.48	34,549,815,258.96	37,578,061,888.12	38,679,940,866.66	39,920,527,558.27	3.99
34							
35	ASET TETAP	2,036,509,707,864.56	2,067,385,796,439.68	2,159,702,316,990.44	2,265,555,624,595.77	2,365,443,242,682.01	

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan (%)
36	Tanah	126,777,345,855.69	324,067,218,261.19	331,221,186,263.39	342,020,218,619.95	385,255,248,815.95	
37	Peralatan dan Mesin	328,497,417,240.51	348,708,053,470.73	389,179,475,663.62	454,480,626,969.52	504,778,630,851.46	
38	Gedung dan Bangunan	872,923,434,105.51	813,181,776,531.11	900,459,535,498.41	984,515,098,353.20	1,054,922,711,282.56	
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,654,351,156,655.62	1,656,528,358,942.26	1,652,761,659,566.00	1,669,561,944,823.47	1,721,408,849,652.84	
40	Aset Tetap Lainnya	57,105,770,618.40	62,581,804,260.73	83,306,707,370.26	93,526,619,401.85	100,972,635,972.85	
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	28,763,433,895.60	31,237,613,232.58	18,925,497,845.34	18,657,752,584.02	17,611,606,777.14	
42	Akumulasi Penyusutan	(1,031,908,850,506.77)	(1.168.919.028.358,92)	(1.216.151.745.216,58)	(1.297.206.636.156,24)	1,419,506,440,670.79	
43	JUMLAH ASET TETAP	2,036,509,707,864.56	2,067,385,796,439.68	2,159,702,316,990.44	2,265,555,624,595.77	2,365,443,242,682.01	4.04
44							
45	DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46	Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48							
49	ASET LAINNYA	35,856,396,421.23	126,970,591,578.14	112,583,886,422.78	212,694,659,168.60	197,556,229,520.00	
50	Tagihan Penjualan Angsuran	7,787,540.00	7,787,540.00	7,787,540.00	7,787,540.00	7,787,540.00	
51	Aset Tak Berwujud	523,541,028.00	480,367,966.00	464,071,238.00	432,685,910.69	480,311,735.46	
	Lisensi dan Franchise	-	-	-	94,993,635.00	94,993,635.00	
52	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,562,575,312.00	2,238,900,583.10	2,634,047,083.11	2,815,346,784.03	3,102,278,784.03	
53	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.039.034.284,00)	(1.758.532.617,10)	(2.169.975.845,11)	(2.477.654.508,34)	2,716,760,683.57	
54	Aset Lain-lain	35,325,067,853.23	126,482,436,072.14	112,112,027,644.78	212,254,185,717.91	197,067,930,244.84	
55	Aset Lain-lain	35,325,067,853.23	162,255,327,407.73	193,648,252,384.32	212,254,185,717.91	197,067,930,244.84	
56	Akumulasi	0.00	(35.772.891.335,59)	(81.536.214.740,54)	-	0.00	

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan (%)
	Penyusutan Aset Lainnya						
57	JUMLAH ASET LAINNYA	35,856,396,421.23	126,970,591,578.14	112,583,886,422.78	212,694,659,168.60	197,556,229,520.30	112.74
58	JUMLAH ASET	2,163,536,808,956.86	2,310,028,558,954.93	2,423,260,588,332.18	2,627,525,636,373.47	2,687,467,881,181.72	6.06
59	KEWAJIBAN	66,404,312,820.14	93,631,135,724.88	121,952,025,577.35	119,888,899,539.86	132,707,294,916.12	
60	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	66,404,312,820.14	93,631,135,724.88	121,952,025,577.35	119,888,899,539.86	132,707,294,916.12	
61	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	0.00	0.00	0.00	7,029,139.91	4,552,720.00	
62	Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	158,333,333.33	
63	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64	Pendapatan Diterima Dimuka	114,569,004.71	141,732,981.42	129,407,573.50	96,722,239.59	113,694,573.40	
65	Utang Belanja	1,834,838,550.00	0.00	210,292,501.00	48,495,950.00	1,368,065,200.00	
66	Utang Jangka Pendek Lainnya	64,454,905,265.43	93,489,402,743.46	121,612,325,502.85	119,736,652,210.36	131,062,649,089.39	
67	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	66,404,312,820.14	93,631,135,724.88	121,952,025,577.35	119,888,899,539.86	132,707,294,916.12	24.96
68	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
69	Utang Dalam Negeri + Sektor Perbankan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
72	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan (%)
73	JUMLAH KEWAJIBAN	66,404,312,820.14	93,631,135,724.88	121,950,025,577.35	119,888,899,539.86	132,707,294,916.12	24.96
74	EKUITAS	2,097,132,496,136.70	2,216,397,423,230.05	2,301,308,562,754.83	2,507,636,736,833.61	2,554,760,586,265.60	
75	Ekuitas	2,097,132,496,136.70	2,216,397,423,230.05	2,301,308,562,754.83	2,507,636,736,833.61	2,554,760,586,265.60	
76	JUMLAH EKUITAS	2,097,132,496,136.70	2,216,397,423,230.05	2,301,308,562,754.83	2,507,636,736,833.61	2,554,760,586,265.60	5.46
77	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,163,536,808,956.84	2,310,028,558,954.93	2,423,260,588,332.18	2,627,525,636,373.47	2,687,467,881,181.72	6.05

Sumber: Neraca Pemerintah Kab. Sambas, Tahun 2016-2020 (diolah)

Dalam hal kewajiban daerah, baik Kewajiban Jangka Pendek maupun Kewajiban Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Kabupaten Sambas. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) selalu dapat diselesaikan. Pada 2016, Kewajiban Jangka Pendek Rp 66.404.312.820,14, dan meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi Rp 121.952.025.577,35. Peningkatan terus terjadi sampai tahun 2020, dengan jumlah Kewajiban Jangka Pendek Rp 132.707.294.916,12. Pemenuhan akan kewajiban jangka pendek selama periode 2016-2020 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas selama kurun waktu tersebut dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek secara tepat waktu.

Ekuitas dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Sambas selama kurun waktu 2016-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,46% per tahun, yang berarti bahwa ekuitas dana yang dimiliki relatif cukup tinggi.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara garis besar, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sambas tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *tentang* Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Pendapatan Transfer, yang meliputi transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa, serta

transfer antar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

- Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Daerah.
- Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat.
- Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan SKPD Penghasil/Pemungut.
- Meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
- Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pendapatan retribusi daerah.
- Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- Meningkatkan kinerja pelayanan melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional, serta pengembangan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Pekotaan, dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut oleh kabupaten. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Sambas bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 8,46% per tahun. Proporsi terbesar Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Transfer, yakni rata-rata 88,32% per tahun. Sedangkan proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata sebesar 3,21% per tahun.

Tabel 3.4
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Sambas, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata2 Pertu mbuh an (%)
1. PAD	102,059,036,354.48	200,322,596,712.12	127,663,390,963.28	148,846,279,607.03	129,681,057,676.48	
Proporsi	6.67%	12.26%	7.51%	8.11%	6.67%	8.46
2. Pendapatan Transfer	1,427,827,928,868.00	1,432,363,793,309.00	1,493,970,701,385.00	1,582,193,180,001.00	1,445,026,636,211.00	
Proporsi	93.27%	87.66%	87.09%	86.23%	86.55%	88.32
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	936,588,000.00	1,316,949,862.75	77,910,285,456.93	103,710,179,721.48	94,944,715,658.47	
	0.06%	0.08%	4.58%	5.65%	5.69%	3.21
Total Pendapatan Daerah	1,530,823,553,222.48	1,634,003,339,883.87	1,699,544,377,805.21	1,834,749,639,329.51	1,669,652,409,545.95	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kab. Sambas, Tahun 2016-2020 (diolah)

Tingginya proporsi pendapatan transfer dalam struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas selama kurun waktu 2016-2020 ditopang oleh penerimaan yang relatif besar dari transfer Pemerintah Pusat, yakni rata-rata 95,65%, sedangkan penerimaan dari transfer Antar Daerah rata-rata 4,35% per tahun.

3.2.1.2. Belanja Daerah

Selama periode tahun 2016-2020, proporsi Belanja Pegawai dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sambas (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) yaitu rata-rata sebesar 36,79% per tahun. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 41,29%, hal ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan rutin berupa belanja gaji dan tunjangan.

**Tabel 3.5.
Analisis Proporsi Belanja Pegawai
Kabupaten Sambas, Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Jumlah Belanja Pegawai (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase (%)
2016	674.519.731.066,42	1.633.716.116.679,84	41,29%
2017	609.037.702.782,01	1.693.136.249.025,14	35,97%
2018	606.234.979.216,00	1.778.681.066.216,95	34,08%
2019	626.368.853.989,00	1.930.938.007.481,77	32,44%
2020	714.208.603.231,51	1.777.941.085.750,19	40,17%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sambas, Tahun 2016-2020 (diolah)

Selama periode tahun 2016-2020, rata-rata proporsi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sambas (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) adalah sebesar 24,35%. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah melalui perangkat daerah. Proporsi Belanja Barang dan Jasa cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Proporsi realisasi Belanja Barang dan Jasa terendah terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar 20,54 %, dan tertinggi pada tahun 2019 yakni sebesar 28,12 %.

Tabel 3.6.
Analisis Proporsi Belanja Barang dan Jasa
Kabupaten Sambas, Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase (%)
2016	360.671.959.685,53	1.633.716.116.679,84	22,08%
2017	424.623.058.239,89	1.693.136.249.025,14	25,08%
2018	460.761.647.453,99	1.778.681.066.216,95	25,90%
2019	543.055.458.830,85	1.930.938.007.481,77	28,12%
2020	365.202.091.038,63	1.777.941.085.750,19	20,54%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sambas, Tahun 2016-2020 (diolah)

Selama periode tahun 2016-2020, rata-rata proporsi Belanja Modal dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sambas (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) adalah sebesar 17,21%.

Tabel 3.7.
Analisis Proporsi Belanja Modal
Kabupaten Sambas, Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Belanja Modal (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase (%)
2016	327.918.38.127,37	1.633.716.116.679,84	20,07%
2017	319.523.642.409,54	1.693.136.249.025,14	18,87%
2018	286.654.817.075,64	1.778.681.066.216,95	16,12%
2019	339.865.824.788,00	1.930.938.007.481,77	17,60%
2020	237.810.768.754,89	1.777.941.085.750,19	13,38%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sambas, Tahun 2016-2020 (diolah)

Proporsi belanja modal terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 sebesar 20,07%, kemudian turun menjadi 13,38% pada tahun 2020.

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Terkait pembiayaan daerah dalam struktur APBD, ditegaskan bahwa pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan, komponen yang dimasukkan dalam penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Adapun Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran yang perlu dibayar dan akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi penerimaan daerah), Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 apabila *performance budgeting* memperlihatkan defisit, maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutupi defisit tersebut, yaitu : a) SILPA; b) Pencairan Dana Cadangan; c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d) Penerimaan Pinjaman Daerah; e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan f) Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan bila terjadi surplus anggaran daerah maka akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah, berupa: a. Pembentukan dana cadangan; b. Penyertaan modal pemerintah daerah; c. Pembayaran pokok utang; d. Pemberian pinjaman daerah.

Adapun perkembangan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sambas pada kurun waktu 2016-2020 disajikan berikut ini.

Tabel 3.8.
Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Sambas, Tahun 2016 – 2020

PEMBIAYAAN	2016		2017		2018		2019		2020		Rata2
	Rp.M	Rp.M	%	Rp.M	%	Rp.M	%	Rp.M	%	(%)	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN											
a. Penggunaan Sisa Lebih Perhit. Anggaran (SILPA)	61.18	12.53	-79.52	28.36	126.34	44.19	55.82	32.76	-25.87	19.19	
b. Pinjaman Daerah	54.23	74.96	38.23	95.00	26.73	84.75	-10.79	95.00	12.09	16.57	
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.35	0	-100.00	0	0	0	0	0	0	-25.00	
JUMLAH PENERIMAAN	115.8	87.49	-141.3	123.4	153.1	128.9	45.03	127.8	-13.77	10.76	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN											
a. Penyertaan Modal Daerah	2.00	0.00	-100.00	2.50	0.00	1.00	-60.00	1.00	0.00	-40.00	
b. Pembayaran Pokok Hutang	42.49	54.23	27.63	74.96	38.23	94.92	26.63	84.75	-10.71	20.44	
JUMLAH PENGELUARAN	44.49	54.23	-72.37	77.46	38.23	95.92	-33.37	85.75	-10.71	-19.56	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sambas,
Tahun 2016-2020 (diolah)

Pada tabel tersebut, tampak bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah rata-rata 10,76% per tahun, dengan kontribusi terbesar dari Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sebaliknya, Pengeluaran Pembiayaan Daerah rata-rata -19,56% per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pembayaran Pokok Hutang.

Secara keseluruhan, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sambas periode 2016-2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.9
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sambas, Tahun 2016 – 2020

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,530,823,553,222.48	1,634,003,339,883.87	1,699,544,377,805.21	1,834,749,639,329.51	1,669,652,409,545.95
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	1,589,219,116,679.84	1,638,897,259,025.08	1,701,221,066,216.95	1,835,021,132,481.87	1,692,191,085,750.19
	<i>Surplus(Defisit)</i>	-58,395,563,457.36	-4,893,919,141.21	-1,676,688,411.74	-271,493,152.36	-22,538,676,204.24
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	115,422,740,819.57	87,490,177,362.21	123,357,268,208.34	128,941,585,916.86	127,760,246,904.51
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	44,497,000,000.00	54,238,990,000.06	77,460,000,000.00	95,916,874,999.90	85,750,000,000.00
	<i>Pembiayaan Netto</i>	70,925,740,819.57	33,251,187,362.15	45,897,268,208.34	33,024,710,916.96	42,010,246,904.51
5	Sisa Lebih Pemb. Anggaran (SILPA)	12,530,177,362.21	28,357,268,220.94	44,220,579,796.60	32,753,217,764.60	19,471,570,700.27

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sambas, Tahun 2016-2020 (diolah)

Pada tabel 3.9 tersebut tampak bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2016 mencapai Rp 12,53 Miliar, dan meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp 19,47 Miliar.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar Pemerintah Daerah setiap periodik dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas, yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Berikut disajikan perkembangan realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Sambas selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3.10
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Sambas, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata2 Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A. BELANJA OPERASI	1,046,373,540,252.87	1,072,650,389,102.62	1,147,790,347,628.49	1,192,771,286,328.78	1,157,874,378,464.66	2.66
1. Belanja Pegawai	674,519,731,066.42	609,037,702,782.01	606,234,979,216.00	626,368,853,989.00	714,208,603,231.51	1.47
2. Belanja Barang dan Jasa	360,671,959,685.53	424,623,058,239.89	460,761,647,453.99	543,055,458,830.85	365,202,091,038.63	0.31
3. Belanja Bunga	429,691,888.92	928,345,074.72	1,151,609,178.50	1,811,219,808.93	1,923,456,981.52	86.91
4. Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5. Belanja Hibah	9,811,347,312.00	37,203,783,006.00	75,352,911,780.00	17,770,930,000.00	75,948,692,213.00	168.52
6. Belanja Bantuan Sosial	940,810,300.00	857,500,000.00	4,289,200,000.00	3,764,823,700.00	591,535,000.00	-9.28
7. Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
B. PENGELOUARAN PEMBIAYAAN	44,497,000,000.00	54,238,990,000.00	77,460,000,000.00	95,916,874,999.90	85,750,000,000.00	23.18
1. Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2. Penyertaan Modal Daerah	2,000,000,000.00	-	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-12.5
3. Pembayaran Pokok Hutang	42,497,000,000.00	54,238,990,000.06	74,960,000,000.00	94,916,874,999.90	84,750,000,000.00	24.86
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL (A+B)	1,090,870,540,252.87	1,126,889,379,102.68	1,225,250,347,628.49	1,288,688,161,328.68	1,243,624,378,464.66	3.5

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sambas,
Tahun 2016-2020 (diolah)

Berdasarkan perhitungan tabel 3.10, diketahui bahwa pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada belanja operasi tumbuh rata-rata sebesar 2,66% per tahun, sedangkan pengeluaran pembiayaan tumbuh rata-rata sebesar 23,18% per tahun. Dengan demikian, diperoleh pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama tumbuh rata-rata sebesar 3,50% per tahun.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun tahap awal perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan melakukan proyeksi keuangan daerah Kabupaten Sambas untuk kurun waktu 2021-2026, sebagai berikut.

Tabel 3.11
Proyeksi Keuangan Daerah
Kabupaten Sambas, Tahun 2021-2026

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata2 Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
I. PENDAPATAN DAERAH	1,737,197,782,596.00	1,804,537,545,593.09	1,900,371,666,674.95	2,000,506,634,099.04	2,109,433,940,817.35	2,223,434,286,683.08	5.64
1.PAD	131,995,458,502.00	147,126,245,880.33	158,961,533,161.54	168,864,855,123.59	184,310,469,140.42	199,173,073,072.45	10.18
1.1. Pajak Daerah	40,036,463,733.00	48,043,756,479.60	57,652,507,775.52	63,417,758,553.07	71,662,067,164.97	78,828,273,881.47	19.38
1.2. Retribusi Daerah	4,543,103,200.00	4,770,258,360.00	5,008,771,278.00	5,259,209,841.90	5,522,170,334.00	5,798,278,850.69	5.53
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3,231,061,793.00	3,392,614,882.65	3,562,245,626.78	3,740,357,908.12	3,927,375,803.53	4,123,744,593.70	5.53
1.4. Lain-lain PAD Yang Sah	84,184,829,776.00	90,919,616,158.08	92,738,008,481.24	96,447,528,820.49	103,198,855,837.93	110,422,775,746.58	6.23
2.PENDAPATAN TRANSFER	1,573,045,029,297.00	1,623,646,140,175.91	1,707,307,322,381.19	1,795,833,827,286.62	1,888,599,360,954.32	1,986,276,138,459.12	5.30
1.1. Transfer Pemerintah Pusat	1,506,477,000,000.00	1,555,081,070,000.00	1,636,685,300,100.00	1,723,093,144,337.00	1,813,676,457,516.21	1,909,105,547,917.87	5.40
a. Dana Perimbangan	1,296,857,000,000.00	1,337,345,390,000.00	1,410,509,312,900.00	1,488,139,237,649.00	1,569,593,514,560.69	1,655,528,407,244.13	5.62
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	31,581,000,000.00	33,160,050,000.00	34,818,052,500.00	36,558,955,125.00	38,386,902,881.25	40,306,248,025.31	5.53
1.1. DBH-Pajak	21,783,000,000.00	22,872,150,000.00	24,015,757,500.00	25,216,545,375.00	26,477,372,643.75	27,801,241,275.94	5.53
1.2.DBH-SDA	9,798,000,000.00	10,287,900,000.00	10,802,295,000.00	11,342,409,750.00	11,909,530,237.50	12,505,006,749.38	5.53
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	830,337,000,000.00	843,150,000,000.00	886,993,800,000.00	933,560,974,500.00	982,106,145,174.00	1,033,175,664,723.05	5.02
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	434,939,000,000.00	461,035,340,000.00	488,697,460,400.00	518,019,308,024.00	549,100,466,505.44	582,046,494,495.77	6.76
3.1. DAK Fisik	245,996,000,000.00	260,755,760,000.00	276,401,105,600.00	292,985,171,936.00	310,564,282,252.16	329,198,139,187.29	6.76
3.2. DAK Non Fisik	188,943,000,000.00	200,279,580,000.00	212,296,354,800.00	225,034,136,088.00	238,536,184,253.28	252,848,355,308.48	6.76
b. Dana Insentif Daerah (DID)	6,728,000,000.00	6,728,000,000.00	6,728,000,000.00	6,728,000,000.00	6,728,000,000.00	6,728,000,000.00	-5.14
c. Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Dana Keistimewaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Dana Desa (DD)	202,892,000,000.00	211,007,680,000.00	219,447,987,200.00	228,225,906,688.00	237,354,942,955.52	246,849,140,673.74	4.33
1.2. Transfer Antar Daerah	66,568,029,297.00	68,565,070,175.91	70,622,022,281.19	72,740,682,949.62	74,922,903,438.11	77,170,590,541.26	3.19

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata2 Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	65,385,596,270.00	67,347,164,158.10	69,300,231,918.68	71,344,588,760.29	73,484,926,423.09	75,689,474,215.79	3.15
b. Bantuan Keuangan	1,182,433,027.00	1,217,906,017.81	1,321,790,362.50	1,396,094,189.34	1,437,977,015.02	1,481,116,325.47	5.05
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32,157,294,797.00	33,765,159,536.85	34,102,811,132.22	35,807,951,688.83	36,524,110,722.61	37,985,075,151.51	3.62
1. Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Lain-lain Pendapatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. BELANJA DAERAH	1,755,322,782,596.00	1,808,279,706,864.20	1,912,704,159,894.99	2,003,899,871,689.74	2,127,961,449,567.34	2,229,395,875,119.45	5.45
1. Belanja Operasi	1,190,626,944,046.00	1,062,614,878,300.20	1,065,157,688,470.19	1,083,699,373,508.37	1,134,237,969,168.32	1,192,635,651,439.32	0.03
1.1. Belanja Pegawai	655,136,327,715.00	674,405,219,100.75	680,051,469,041.76	693,921,241,727.59	736,232,675,026.75	758,699,443,756.51	3.16
1.2. Belanja Barang dan Jasa	449,434,748,812.00	352,806,277,817.42	348,669,859,651.94	352,278,095,488.46	359,409,965,180.73	394,954,925,432.37	-2.42
1.3. Belanja Bunga	4,000,000,000.00	4,120,000,000.00	4,243,600,000.00	4,370,908,000.00	4,502,035,240.00	4,547,055,592.40	2.74
1.4. Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5. Belanja Hibah	80,614,132,519.00	29,827,229,032.03	30,722,045,902.99	31,643,707,280.08	32,593,018,498.48	32,918,948,683.47	-11.83
1.6. Belanja Bantuan Sosial	1,441,735,000.00	1,456,152,350.00	1,470,713,873.50	1,485,421,012.24	1,500,275,222.36	1,515,277,974.58	1.02
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Belanja Modal	270,670,439,800.00	441,238,413,864.00	530,951,000,136.80	590,949,208,041.85	651,310,138,653.92	682,367,414,973.95	30.71
3. Belanja Tak Terduga	1,500,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	202,000,000.00	-17.31
4. Belanja Transfer	292,525,398,750.00	304,226,414,700.00	316,395,471,288.00	329,051,290,139.52	342,213,341,745.10	354,190,808,706.18	4.22
SURPLUS/(DEFISIT)	-18,125,000,000.00	-3,742,161,271.11	-12,332,493,220.04	-3,393,237,590.70	-18,527,508,750.00	-5,961,588,436.37	-13.42
III. PEMBIAYAAN	18,125,000,000.00	3,742,161,271.11	12,332,493,220.04	3,393,237,590.70	18,527,508,750.00	5,961,588,436.37	-6.17
1. Penerimaan Pembiayaan	114,625,000,000.00	100,242,161,271.11	98,832,493,220.04	99,893,237,590.70	105,027,508,750.00	102,461,588,436.37	-0.98
1.1. SiLPA tahun sebelumnya	19,625,000,000.00	15,242,161,271.11	13,832,493,220.04	14,893,237,590.70	20,027,508,750.00	17,461,588,436.37	4.49
1.2. Pencairan Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3. Hasil Penjualan KDYD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata2 Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.4. Penerimaan Pinj. Daerah & Obligasi Daerah	95,000,000,000.00	85,000,000,000.00	85,000,000,000.00	85,000,000,000.00	85,000,000,000.00	85,000,000,000.00	3.92
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Pengeluaran Pembiayaan	96,500,000,000.00	96,500,000,000.00	86,500,000,000.00	96,500,000,000.00	86,500,000,000.00	96,500,000,000.00	0.00
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. Penyertaan Modal Daerah	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00
2.3. Pembayaran Pokok Hutang	95,000,000,000.00	95,000,000,000.00	85,000,000,000.00	95,000,000,000.00	85,000,000,000.00	95,000,000,000.00	2.94
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pembayaran Netto	18,125,000,000.00	3,742,161,271.11	12,332,493,220.04	3,393,237,590.70	18,527,508,750.00	5,961,588,436.37	-6.17
3.3. Sisa Lbh Pembiy. Anggaran (SILPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Selanjutnya, pada tabel 3.12 menyajikan tentang proyeksi pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Sambas selama tahun 2021-2026. Proyeksi pembiayaan pembangunan daerah merupakan penjumlahan dari proyeksi total Pendapatan Daerah dengan proyeksi total Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Tabel 3.12
Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sambas, Tahun 2021 – 2026

Tahun	Proyeksi Pendapatan Daerah (Rp)	Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah (Rp)	Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah (Rp)
2021	1,737,197,782,596.00	114,625,000,000.00	1,851,822,782,596.00
2022	1,804,537,545,593.09	100,242,161,271.11	1,904,779,706,864.20
2023	1,900,371,666,674.95	98,832,493,220.04	1,999,204,159,894.99
2024	2,000,506,634,099.04	99,893,237,590.70	2,100,399,871,689.74
2025	2,109,433,940,817.35	105,027,508,750.00	2,214,461,449,567.35
2026	2,223,434,286,683.08	102,461,588,436.37	2,325,895,875,119.45

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Proyeksi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Sambas tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.13
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Sambas, Tahun 2021-2026

URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	Rata2 Pertumbu han (%)
A. BELANJA OPERASI	1,190,626,944,046.00	1,062,614,878,300.20	1,065,157,688,470.19	1,083,699,373,508.37	1,134,237,969,168.32	1,192,635,651,439.32	0.03
1. Belanja Pegawai	655,136,327,715.00	674,405,219,100.75	680,051,469,041.76	693,921,241,727.59	736,232,675,026.75	758,699,443,756.51	3.16
2. Belanja Barang dan Jasa	449,434,748,812.00	352,806,277,817.42	348,669,859,651.94	352,278,095,488.46	359,409,965,180.73	394,954,925,432.37	-2.42
3. Belanja Bunga	4,000,000,000.00	4,120,000,000.00	4,243,600,000.00	4,370,908,000.00	4,502,035,240.00	4,547,055,592.40	2.74
4. Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Belanja Hibah	80,614,132,519.00	29,827,229,032.03	30,722,045,902.99	31,643,707,280.08	32,593,018,498.48	32,918,948,683.47	-11.83
6. Belanja Bantuan Sosial	1,441,735,000.00	1,456,152,350.00	1,470,713,873.50	1,485,421,012.24	1,500,275,222.36	1,515,277,974.58	1.02
7. Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. PENGELOUARAN PEMBIAYAAN	96,500,000,000.00	96,500,000,000.00	86,500,000,000.00	96,500,000,000.00	86,500,000,000.00	96,500,000,000.00	0.00
1. Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Penyertaan Modal Daerah	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00
3. Pembayaran Pokok Hutang	95,000,000,000.00	95,000,000,000.00	85,000,000,000.00	95,000,000,000.00	85,000,000,000.00	95,000,000,000.00	2.94
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (A+B)	1,287,126,944,046.00	1,159,114,878,300.20	1,151,657,688,470.19	1,180,199,373,508.37	1,220,737,969,168.32	1,289,135,651,439.32	0.03

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Selanjutnya, perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi Pendapatan Daerah ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total penerimaan riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 tahun mendatang.

Perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendukung proses pembangunan daerah Kabupaten Sambas tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Sambas, Tahun 2021-2026

URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	Rata2 Pertumbuhan (%)
1. Pendapatan	1,737,197,782,596.00	1,804,537,545,593.09	1,900,371,666,674.95	2,000,506,634,099.04	2,109,433,940,817.35	2,223,434,286,683.08	5.64
2. Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	19,625,000,000.00	15,242,161,271.11	13,832,493,220.04	14,893,237,590.70	20,027,508,750.00	17,461,588,436.37	4.49
Total Penerimaan (1+2+3)	1,756,822,782,596.00	1,819,779,706,864.20	1,914,204,159,894.99	2,015,399,871,689.74	2,129,461,449,567.35	2,240,895,875,119.45	5.63
Dikurangi:							
Total Belanja dan Pengeluaran Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	1,287,126,944,046.00	1,159,114,878,300.20	1,151,657,688,470.19	1,180,199,373,508.37	1,220,737,969,168.32	1,289,135,651,439.32	0.03
Kapasitas Riil Kemampuan Keu. Daerah	469,695,838,550.00	660,664,828,564.00	762,546,471,424.80	835,200,498,181.37	908,723,480,399.03	951,760,223,680.13	20.97

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Berdasarkan proyeksi keuangan daerah, proyeksi pembiayaan pembangunan, proyeksi pengeluaran wajib, mengikat dan prioritas utama, serta perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah maka perlu disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sambas periode 2021-2026 yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di masa yang akan datang, prioritas kebijakan Pendapatan Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengefektifkan dan mengotimalkan penerimaan Pajak Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Menyesuaikan pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
 - Menetapkan parameter yang obyektif untuk mengukur prestasi peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah.
 - Penyajian secara terinci mengenai target dan realisasi masing-masing jenis Pajak Daerah, terutama pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam PAD Kabupaten Sambas.
 - Memperbarui sistem dan prosedur pemungutan Pajak Daerah.
 - Intensifikasi Pajak Daerah dengan melakukan pendataan basis pajak dan potensi pajak secara berkelanjutan.
 - Melakukan pemutakhiran data objek pajak sesuai dengan nama wajib Pajak yang tertera dalam surat kepemilikan tanah dan atau bangunan.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang pendapatan melalui pelatihan/bimbingan teknis.
 - Melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet, dengan mengintensifkan pemungutannya.
 - Mengefektifkan pemungutan pajak, seperti: Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang tidak dapat diukur secara faktual baik besaran pendapatan maupun penggunaannya, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame.
 - Mengadakan sosialisasi pada masyarakat dan dunia usaha.

- Melakukan penghapusan terhadap Nilai Objek Pajak (NOP) yang terindikasi ganda.
 - Melakukan penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak dengan mencetak piutang wajib pajak pada saat melakukan pembayaran di pelayanan PBB-P2 Kabupaten Sambas dan Bank Kalbar.
 - Melakukan pendekatan persuasif dan pemberian sanksi berupa denda kepada wajib pajak yang lalai.
 - Meningkatkan intensitas waktu pemungutan pajak.
 - Merevisi regulasi tentang besaran tarif yang dianggap tidak relevan lagi.
2. Mengefektifkan pungutan Retribusi Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah tentang retribusi yang belum dilaksanakan.
 - Mengoptimalkan pemungutan retribusi, dikarenakan penerimaannya yang cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya.
 - Membentuk tim terpadu untuk penertiban izin yang habis masa berlakunya dan yang belum memiliki izin seperti IMB, reklame, dan lain-lain.
 - Peningkatan pengawasan pemungutan dan penyetorannya.
3. Meningkatkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki kontribusi maksimal kepada Pemerintah Daerah.
 - Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD.
4. Meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Melaksanakan koordinasi dengan Bank dimana dana Pemerintah Daerah ditempatkan untuk peningkatan jasa giro dan deposito.
 - Mengoptimalkan pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) secara profesional dalam rangka peningkatan PAD.
5. Meningkatkan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.

- Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Penghasilan.
- Peningkatan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan pengalokasian dana penyesuaian (Tunjangan Kependidikan) sesuai dengan data terbaru.
- Koordinasi antara Pemerintah Daerah penghasil sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah/Kementerian terkait.
- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengenai penerimaan bagi hasil pajak dari provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Air Permukaan.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Belanja daerah tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Untuk itu, kebijakan Belanja Daerah tahun anggaran 2021-2026 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu:

- Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja daerah dialokasikan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sambas.

- Mengalokasikan belanja barang dan jasa yang akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, maupun untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- Mengalokasikan belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Sambas yang terdiri dari urusan wajib (Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar), urusan pilihan, dan urusan penunjang.
- Mengalokasikan belanja modal dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, berupa: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya, dengan kriteria digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.
- Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan pendidikan dengan fokus pada upaya penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun, serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan.
- Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian/perkebunan, peternakan, dan perikanan, penguatan struktur ekonomi perdesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan.
- Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur melalui penyiapan sumberdaya manusia yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana bantuan pelatihan ketenagakerjaan.
- Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa dalam rangka mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara proporsional untuk menunjang kegiatan operasionalisasi Pemerintah Desa, dan bantuan keuangan yang bersifat umum baik kepada Pemerintah Desa maupun kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Untuk kebijakan Pembiayaan Daerah, dari aspek penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk:

- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu sebagai sumber penerimaan pada APBD.
- Penggunaan pinjaman, melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek-proyek besar lainnya.

- Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) untuk menambah Dana Cadangan.
- Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pemberian pembangunan.
- Pemberian pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pemberian daerah pada masa mendatang diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:

- Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah daerah Kabupaten Sambas.
- Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Telaah Kebijakan Internasional (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan penyempurnaan dari agenda pembangunan global sebelumnya (MDGs), karena komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, namun juga pembangunan ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup. SDGs menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau *human wellbeing*. Apakah pembangunan akan menghasilkan kesejahteraan yang diinginkan manusia tergantung dari perilaku manusia itu sendiri terhadap alam dan pemanfaatannya untuk tujuan kesejahteraan saat ini dan untuk generasi mendatang.

SDGs terdiri dari 17 *goals* yang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar yang tidak terpisahkan dan saling memiliki ketergantungan. Empat pilar ini untuk menunjukkan ada dan pentingnya keseimbangan di antara 3 pilar utama yaitu pilar/dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan hidup, yang didukung dengan pilar tata kelola. Ketiga pilar ini merupakan pilar yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Pilar lingkungan merupakan unsur terpenting, kerena pertumbuhan saat ini yang digambarkan dalam pilar ekonomi, perlu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Demikian pula, perilaku sosial masyarakat yang digambarkan dalam pilar sosial, perlu berubah dan memiliki perilaku yang ramah terhadap lingkungan. Ke empat pilar tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

- 1. Dimensi/Pilar Sosial**, meliputi Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan); Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan); Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera); Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) dan Tujuan 5 (Kesetaraan Gender).
- 2. Dimensi/Pilar Ekonomi**, meliputi Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau); Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi); Tujuan 9 (Industri, inovasi dan Infrastruktur); Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan) dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk mencapai Tujuan).
- 3. Dimensi/Pilar Pembangunan Lingkungan**, meliputi Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi yang Layak); Tujuan 11 (Kota dan Permukiman

Berkelanjutan); Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan); Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim); Tujuan 14 (Ekosistem Laut) dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan).

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tatakelola, meliputi Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh).

Setelah Deklarasi SDGs dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015, pada Maret 2016 Komite Statistik baru menyepakati usulan indikator yang akan digunakan untuk pelaksanaan SDGs sebanyak 241 indikator.

Indonesia melakukan persiapan pelaksanaan SDGs sejak tahap awal, yaitu penyelarasan antara Draft RPJMN 2015-2019 dengan Konsep-konsep yang memberi masukan ke dalam SDGs. Indonesia telah berpengalaman dalam melaksanakan agenda global. Dalam 5 (lima) tahun pertama, Indonesia menggunakan target dan indikator di dalam RPJMN 2015-2019 dan berlanjut di dalam RPJMN 2019-2024. Pada tahun 2015 SDSN mengeluarkan SDGs Dashboard, dan menggunakan data yang ada dari Negara-negara, maka status SDGs di setiap Negara dapat diketahui.

Menurut SDSN, Indonesia memiliki skor 54,4 (0-100), sedikit lebih rendah dari rata-rata Asia dengan skor sebesar 54,6, meskipun dalam hal skor setiap Tujuan, Indonesia memiliki skor yang lebih tinggi dari skor ASEAN pada 8 (delapan) Tujuan yaitu: *Tujuan 4*:Pendidikan; *Tujuan 5*:Gender; *Tujuan 7*:Energi; *Tujuan 8*: Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Pekerjaan Layak; *Tujuan 12*:Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; *Tujuan 13*:Perubahan Iklim, *Tujuan 14*: Ekosistem Lautan; dan *Tujuan 16*:Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Sementara skor rata-rata dunia adalah sebesar 58,4.

Apabila, melihat pencapaian masing-masing Tujuan, maka Indonesia mencapai skor tertinggi pada Tujuan 13. Perubahan Iklim, Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan; Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas dan Goal 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Pencapaian yang paling rendah adalah pada Tujuan 17. Kemitraaan dan Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur serta Tujuan 15. Ekosistem Daratan (lihat Tabel 4.1).

Tabel 4.1.
Perbandingan Capaian Target SDGs Indonesia dan ASEAN

Target SDGs		Indonesia	Rata-Rata ASEAN
1	Tanpa Kemiskinan	76,87	83,7
2	Tanpa Kelaparan	44,82	47,1
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	53,79	61,24
4	Pendidikan Berkualitas	73,83	70,06
5	Kesetaraan Gender	62,09	55,76
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	79,10	80,97
7	Energi Bersih dan Terjangkau	61,78	58,49
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	63,71	59,55
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	21,52	24,27
10	Berkurangnya Kesenjangan	66,18	68,64
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	48,80	56,28
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	46,41	39,86
13	Penanganan Perubahan Iklim	83,96	69,84
14	Ekosistem Lautan	42,80	37,29
15	Ekosistem Daratan	33,65	46,22
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	59,51	56,37
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	8,57	21,18
SDGs Keseluruhan		54,4	54,6

Sumber: Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, BPS, 2016.

4.2. Telaah Kebijakan Nasional (RPJMN)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh pemerintah Kabupaten Sambas dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2021-2026. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelaah kebijakan nasional dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024 agar pembangunan Kabupaten Sambas berjalan sinergis dengan pembangunan nasional.

RPJMN tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024 juga dijelaskan bahwa periode tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Untuk itu Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan Presiden tersebut telah dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan demikian dokumen RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2021-2026 bukan sekedar harus sejalan, bahkan harus bisa menjabarkan ke 7 (tujuh)

agenda pembangunan nasional tersebut dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sambas. Artinya, dalam lima tahun ke depan (2021-2026) Pemerintah Kabupaten Sambas harus bisa memastikan bahwa dalam lingkup masyarakat Kabupaten Sambas juga terjadi penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan mental dan pembangunan kebudayaan, percepatan penyediaan infrastruktur, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dan transformasi pelayanan publik.

4.3. Telaah Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Kalimantan Barat)

Visi pembangunan Kalimantan Barat tahun 2018-2023 adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa hingga tahun 2023 yang akan datang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan tersebut akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang memiliki kualitas SDM relatif baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder-nya.

Untuk itu pada periode tahun 2018-2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melaksanakan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih,

- menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
 3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
 5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.

6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Dengan demikian dokumen RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2021-2026 juga harus bisa menjabarkan ke 6 (enam) misi pembangunan provinsi tersebut dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sambas. Artinya, dalam lima tahun ke depan (2021-2026) Pemerintah Kabupaten Sambas harus bisa memastikan bahwa dalam lingkup masyarakat Kabupaten Sambas juga akan terjadi percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, dan pembangunan berwawasan lingkungan yang tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan.

4.4. Telaah Kebijakan Kabupaten Sambas

Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Kemudian daerah ini dimekarkan menjadi 3 daerah dengan terbentuknya Kabupaten Bengkayang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1999 dan Kota Singkawang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2001. Meskipun sudah mengalami pemekaran dua kali namun daerah ini masih relatif luas, yaitu sekitar 6.395,70 Km² yang terbagi kedalam 19 kecamatan dan 193 desa dengan problem ekonomi dan sosial yang mendesak untuk diselesaikan.

Problem tersebut diantaranya: jumlah dan kualitas infrastruktur termasuk konektivitas antar kecamatan, kualitas sumber daya manusia dengan nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi yang terus menurun dalam lima tahun terakhir (2016-2020), jumlah orang miskin yang cukup besar bahkan dalam lima tahun terakhir menjadi kabupaten dengan jumlah orang miskin terbanyak kedua di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang, dan termasuk akibat dampak

pandemi Covid-19 terhadap kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat.

Dari aspek ekonomi misalnya, pada tahun 2020 sebagai akibat pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas terkontraksi lebih dalam, yaitu -2,02 persen, dibanding pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang juga terkontraksi tapi hanya -1,82 persen. Disamping itu, struktur ekonomi daerah ini juga relatif belum bertransformasi dimana kontribusi sektor pertanian, industri, dan perdagangan dalam lima tahun terakhir (2016-2020) cenderung stagnan masing-masing di sekitar angka 33 persen, 12 persen, dan 17 persen. Dari kondisi SDM nilai IPM nya pada tahun 2020 baru sebesar 67,03 masih di bawah nilai IPM Provinsi Kalimantan Barat (67,66). Sementara dari kondisi sosial, angka kemiskinannya pada tahun 2020 sebesar 7,70 persen jauh di atas angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat yang besarnya hanya 7,17 persen, dengan tingkat pengangguran yang cenderung meningkat dari 3,58% tahun 2019 menjadi 3,71% tahun 2020.

Faktor utama yang menyebabkan sulitnya mengatasi masalah ekonomi dan sosial tersebut adalah kebijakan pembangunan daerah yang belum menyentuh masalah pokok di Kabupaten Sambas, yaitu kondisi infrastruktur. Peningkatan ketersediaan infrastruktur sangat terbatas, khususnya infrastruktur jalan yang menghambat konektivitas. Dalam lima tahun terakhir (2016-2020), panjang jalan kabupaten tidak mengalami peningkatan tetap hanya 1.102,206 Km namun dengan panjang jalan dalam kondisi baik meningkat lambat, dari sekitar 581 Km tahun 2019 menjadi sekitar 640 Km pada tahun 2020. Situasi ini tentu saja sangat terkait dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah, dimana terdapat kecenderungan menurunnya proporsi belanja modal dari 20 persen tahun 2016 menjadi hanya 13 persen tahun 2020. Padahal pembangunan infrastruktur jalan sangat ditentukan oleh kebijakan belanja modal pemerintah daerah. Kondisi jalan yang panjangnya tetap dengan proporsi status jalan dengan kondisi baik yang relatif rendah tidak hanya mengganggu perekonomian daerah tapi juga menyulitkan masyarakat untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Pentingnya pembangunan infrastruktur sebenarnya sudah tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Sambas tahun 2005-2025 dan juga dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas tahun 2015-2035 sebagaimana diuraikan berikut ini.

4.4.1. Telaah RPJPD Kabupaten Sambas

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Kabupaten Sambas terunggul di Kalimantan Barat. Sambas terunggul di Kalimantan Barat tahun 2025 ditandai dengan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera yakni terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatnya perekonomian daerah, infrastruktur semakin memadai yang mendukung perekonomian daerah dan seluruh aktivitas masyarakat, lingkungan hidup terkendali, berkembangnya kawasan-kawasan strategis, meningkatnya kerjasama pembangunan, dan terciptanya kepemerintahan yang baik. Untuk itu, pembangunan Kabupaten Sambas diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, sehat, bermutu, bermoral, berbudaya dan berakhlak mulia, profesional, mandiri dan mampu bersaing dalam tatanan kehidupan global melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju yaitu membangun perekonomian daerah yang mampu memberikan daya unkit dan berdaya saing, dengan membangun struktur ekonomi daerah yang mantap dan berbasis pada potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya pendukung lainnya yang dimiliki, dengan menitikberatkan pada pertumbuhan dan pemerataan serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang bersinergi dengan investasi.
3. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai yaitu membangun sarana dan prasarana yang baik melalui peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas pelayanan, yang dapat mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya dan keamanan serta membuka keterisolasi dan mengurangi ketertinggalan daerah, menunjang pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan.

4. Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari yaitu membangun dan menjaga keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan memperhatikan fungsi dan daya dukung lingkungan; upaya konservasi dan rehabilitasi; menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan dalam kehidupan; melaksanakan pemanfaatan ruang yang serasi antar penggunaan untuk kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
5. Mewujudkan kawasan strategis dan cepat tumbuh yaitu membangun kawasan potensial dengan daya dukung yang dimiliki untuk menjadi kawasan cepat tumbuh yang dapat memberikan pengaruh positif ke wilayah sekitarnya, melalui penyediaan infrastruktur, pengelolaan tata ruang, serta didukung sistem kelembagaannya.
6. Mewujudkan Kerjasama yang menguntungkan yaitu membangun hubungan kerjasama antar kabupaten, propinsi, negara lain serta pihak lainnya yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi upaya memajukan daerah dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
7. Mewujudkan kepemerintahan yang baik yaitu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui pendayagunaan sistem perencanaan, pengendalian, pengawasan dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah serta menumbuhkan peran yang sinergis antara sektor swasta dan masyarakat.

Pencapaian sasaran pokok dalam jangka panjang tersebut (dua puluh tahun) dilakukan melalui tahapan dan skala prioritas yang menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan. Adapun tahapan dan skala prioritas lima tahunan itu adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap pertama (tahun 2006–2010) diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, industri, perdagangan, investasi dan teknologi pendukung, pengembangan sarana prasarana infrastruktur dasar serta infrastruktur penunjang, pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh, pengendalian pencemaran

- dan kerusakan lingkungan, dan reformasi birokrasi, kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap kedua (Tahun 2011–2015) merupakan keberlanjutan RPJMD tahap pertama yang ditujukan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan ekonomi kerakyatan, industri, perdagangan, investasi dan teknologi pendukung, pengembangan sarana prasarana infrastruktur dasar serta infrastruktur penunjang, pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan penguatan kepemerintahan yang baik dan kerja sama pemerintah daerah.
 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap ketiga (Tahun 2016–2020) merupakan keberlanjutan RPJMD ke-2, ditujukan untuk percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, percepatan peningkatan ekonomi kerakyatan, industri, perdagangan, investasi dan teknologi pendukung, percepatan pengembangan sarana prasarana infrastruktur dasar serta infrastruktur penunjang, percepatan pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh, percepatan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penguatan kepemerintahan yang baik dan kerja sama pemerintah daerah.
 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap keempat (Tahun 2021–2025) merupakan keberlanjutan RPJMD ke-3, yang ditujukan untuk pemantapan kualitas sumberdaya manusia, pemantapan peningkatan ekonomi kerakyatan, industri, perdagangan, investasi dan teknologi pendukung, pemantapan pengembangan sarana prasarana infrastruktur dasar serta infrastruktur penunjang, pemantapan pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh, pemantapan kualitas lingkungan hidup, dan pemantapan kepemerintahan yang baik dan kerja sama pemerintah daerah.

Berdasarkan tahapan dan skala prioritas lima tahunan tersebut tampak jelas adanya kesadaran bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Sambas terunggul faktor penentunya adalah ketersediaan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bahkan dalam RPJMD tahap keempat (Tahun 2021–2025) juga masih menekankan pada pemantapan kualitas SDM dan pemantapan pengembangan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang. Dengan

demikian sudah tepat apabila Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas periode tahun 2021-2026 juga menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar pada misi kedua dan ketiga dokumen RPJMD tahun 2021-2026.

4.4.2. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 mempunyai korelasi dan implikasi yang luas terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, hal ini terkait dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Penetapan Kawasan Strategis yang sudah dijabarkan secara terperinci di dalam Peraturan Daerah tersebut.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sambas meliputi pusat-pusat kegiatan yaitu : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); Sistem Jaringan Prasarana Utama yang meliputi : Sistem Jaringan Transportasi Darat, Sistem Jaringan Transportasi Laut, Sistem Jaringan Transportasi Udara dan Sistem Jaringan Perkeretaapian; serta Sistem Jaringan Prasarana Lainnya yang meliputi : Sistem Jaringan Energi, Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan.

Adapun rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sambas meliputi pemantapan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Pemantapan kawasan lindung di Kabupaten Sambas terdiri dari : kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; serta kawasan rawan bencana alam. Sedangkan pengembangan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan hutan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; serta kawasan peruntukan Lainnya.

Kawasan Strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis di wilayah Kabupaten Sambas terdiri atas :

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional terkait dengan wilayah Kabupaten Sambas, yaitu : Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa dan Kawasan Perbatasan Darat Republik Indonesia.
2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat di wilayah Kabupaten Sambas, yaitu : Kawasan Industri Semparuk (KIS), terminal khusus dan Kawasan Industri Tanjung Api di Kecamatan Paloh, Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) di Kecamatan Pemangkat serta kawasan rawan bencana alam Gayung Bersambut di Kecamatan Selakau.
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas yang terdiri dari : Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar; Kawasan Perkotaan Sambas; Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) yang meliputi Kecamatan Tebas dan Kecamatan Galing; Kawasan Minapolitan budidaya di Kecamatan Jawai Selatan dengan hinterlan Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Jawai; Kawasan Minapolitan penangkapan di Kecamatan Pemangkat dengan hinterland Kecamatan Selakau; Kawasan Waterfront City dan Komplek Istana Kesultanan Sambas (Istana Alwatzikoebillah, Masjid Jami', dan Makam Raja-raja Kesultanan Sambas); Kawasan Wisata di Pantai Sinam Kecamatan Pemangkat, Pantai Putri Serayi Kecamatan Jawai Selatan, Danau Sebedang Kecamatan Sebawi, Pantai Temajuk Kecamatan Paloh, dan Riam Merasap Kecamatan Sajingan Besar; Kawasan Industri Semparuk (KIS); Terminal khusus dan kawasan Industri Tanjung Api di Kecamatan Paloh; Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah dengan hinterland terletak di Kecamatan Sajad dan Kecamatan Sejangkung; Kota Terpadu Mandiri (KTM) Gerbang Mas Perkasa Sebunga dengan hinterland di Kecamatan Paloh, Galing dan Sejangkung; Kawasan Kebun Raya Sambas di Kecamatan Subah; Kawasan ekosistem Tanjung Belimbing di Kecamatan Paloh; serta Kawasan ekosistem Gunung Bentarang di Kecamatan Sajingan Besar.

4.4.3. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sambas 2021 – 2026

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. KLHS ini mengkaji dampak sebuah Kebijakan, Rencana dan Program (KRP), oleh karena itu hasil dari kajian ini akan bersifat strategik, untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan KRP yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. Adanya kajian yang mendalam dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan maka diharapkan akan adanya Pengendalian lingkungan dalam bentuk KLHS ini, dengan demikian permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisasi sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Sambas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup menjadi acuan dalam Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, selain itu acuan lain yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 69/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan operasionalisasinya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tersebut disebutkan bahwa KLHS RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD.

Berdasarkan batasan tersebut penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 tidak akan lepas dari indikator-indikator dalam

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sehingga selain menghasilkan masukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, KLHS RPJMD ini juga menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 ini pula merupakan operasionalisasi penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sambas yang memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan indikator-indikatornya yang menjadi bagian dalam penyusunan RPJMD.

Substansi rencana pembangunan dalam KLHS RPJMD didasarkan pada analisis Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan serta mengarahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka diharapkan sumbangan KLHS RPJMD Kabupaten Sambas dapat memastikan integrasi pembangunan berkelanjutan dalam Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) dan mendukung percepatan pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pentingnya mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam pembangunan adalah agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup pada dasarnya mengandung dua komponen yaitu komponen penyedia (supply) dan komponen pemanfaat/pengguna (demand).

Dalam konteks kajian ini, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang disajikan adalah Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup pangan, air, dan daya dukung lahan terkait pertanian, karena selain dapat menggambarkan struktur ekologis dan proses biofisik, juga dapat menggambarkan pola pemanfaatan sumberdaya alam suatu populasi di dalam satu wilayah.

Skenario kondisi lingkungan hidup dilakukan untuk melihat kemampuan lingkungan di Kabupaten Sambas dalam mendukung capaian program pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung kondisi kebutuhan air dan pangan di Kabupaten Sambas dilakukan untuk melihat kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan perhitungan skenario daya dukung air, dapat dilihat bahwa kebutuhan air domestik dan non domestik akan mengalami peningkatan mulai dari tahun 2020 sampai pada tahun 2040 (m³/tahun). Sementara itu dengan membuat skenario melalui pertimbangan proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Sambas maka ketersedian air sampai tahun 2040 masih surplus secara keseluruhan. Secara keseluruhan jasa ekosistem penyediaan air terbagi menjadi lima kelas. Terdistribusi menjadi sangat rendah 11,62%, rendah 0%, sedang 42,76%, tinggi 45,61%, dan sangat tinggi 0%. Wilayah dominan pada kelas rendah (sangat rendah dan rendah) terdapat pada kecamatan Sajad sebesar 53,67%, kecamatan Sambas 37,85%, kecamatan Sejangkung 35,68% dan kecamatan Jawai 30,69%. Secara keseluruhan untuk Kabupaten Sambas ketersediaan air masih dalam kategori aman karena kategori sedang dan tinggi masih sangat dominan yaitu 88,37% atau 465.640 Ha.

Berdasarkan skenario daya dukung pangan dengan skenario Business As Usual (BAU), menunjukkan bahwa pada tahun 2040 dapat dilihat bahwa kebutuhan pangan terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2020 sampai pada tahun 2040 dengan peningkatan sebesar 8.838 Ha/tahun dengan angka pertumbuhan penduduk sekitar 2,10% per tahun. Sementara itu dengan membuat skenario melalui pertimbangan proyeksi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sambas dan lahan pertanian serta produksi pertanian tidak mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan pertanian. Secara keseluruhan kebutuhan pangan masih di bawah dari nilai ketersediaan pangan di Kabupaten Sambas. Kecamatan Pemangkat, Selakau, Teluk Keramat dan Tebas merupakan kecamatan yang memiliki potensi pengembangan pangan sangat tinggi.

Secara keseluruhan bahwa potensi penyediaan pangan untuk Kabupaten Sambas dengan kategori sedang sampai sangat tinggi masuk kategori aman, yaitu kategori sangat rendah 1,74% atau hanya 9.064 Ha yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Jawai, Tangaran dan Subah, kategori rendah 12,49% atau 65.116 Ha yang tersebar di kecamatan Galing, Paloh, Sajingan Besar, Sambas, Sebawi, Selakau Timur, Tebas, Tekarang dan Subah. Kategori sedang 36,21% atau 188.757 Ha, tinggi 32,26% atau 168.181 Ha dan sangat tinggi 31,13% atau 162.285 Ha tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Sambas. Dengan demikian, intensifikasi lahan pertanian bisa dilakukan dengan cara penggunaan sistem tanam polikultur serta penggunaan bibit unggul. Selain itu, ketersediaan

pangan domestik, diperlukan usaha-usaha untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya konversi lahan-lahan pertanian yang produktif.

Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Isu Prioritas untuk sepenuhnya mencapai target TPB yang diharapkan oleh Pemda Kabupaten Sambas, perlu upaya tambahan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan hingga tahun 2030. Upaya yang diuraikan berupa arahan program yang harapannya dilaksanakan untuk menangani permasalahan penegakan serta tata kelola hukum dan pemerintahan daerah, peningkatan dan penguatan ekonomi daerah, pengelolaan ekosistem, serta tata kelola perkotaan dan kualitas hidup masyarakat yang menjadi Perumusan Rekomendasi Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, maka ada 4 hasil konsesus yang menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas ke depan. Hasil konsensus tersebut antara lain:

1. Penegakkan serta tata kelola hukum dan pemerintahan
2. Peningkatan dan penguatan ekonomi daerah
3. Pengelolaan ekosistem
4. Tata kelola perkotaan dan kualitas hidup masyarakat

Perumusan skenario merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis secara business as usual (BAU) terhadap tren perubahan kondisi lingkungan dan pencapaian target TPB berdasarkan kinerja Kabupaten Sambas yang telah dilakukan selama ini.

4.4.4. Telaah Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal

Pelimpahan wewenang di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal saat ini membuka kesempatan emas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui tata kelola ekonomi daerah yang inovatif, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.

Daya saing adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional (PPSK-BI: *Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia*). Berdasarkan definisi tersebut, daya

saing merupakan kemampuan daerah yang direfleksikan dengan menguatnya fundamental perekonomian daerah, membaiknya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya daya beli, tingginya daya tarik daerah bagi para pihak luar untuk berinvestasi.

Kabupaten Sambas sebagai salah satu kabupaten otonom di Provinsi Kalimantan Barat, memiliki luas wilayah 6.394,70 Km² atau 4,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Daerah ini terbagi menjadi 19 kecamatan dan 193 desa, serta memiliki penduduk sebanyak 629.905 jiwa, dengan kepadatan 98 Jiwa/Km².

Kemampuan ekonomi daerah yang direfleksikan dengan fundamental pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat menjadi daya tarik bagi pelaku ekonomi untuk mengembangkan perekonomian dan daya saing daerah. Meski pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas pada tahun 2020 mengalami kontraksi (minus 2,02%). Namun pada beberapa tahun sebelumnya angka pertumbuhan relatif tinggi. Tahun 2016 dan 2017, capaian pertumbuhan ekonomi Kab. Sambas sebesar 5,24% dan 5,06%. Namun periode tahun 2018 s/d 2019 terus mengalami penurunan, yakni 4,93% dan 4,76%.

Secara sektoral, terdapat tiga sektor penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas selama periode 2016-2019, yakni sektor informasi dan komunikasi (pada kisaran 6,48% s/d 14,54%), sektor pengadaan listrik dan gas (pada kisaran 5,11% s/d 12,66%), dan sektor jasa kauangan (pada kisaran 7,42% s/d 13,71%).

Selama lima tahun terakhir (2016-2020), struktur lapangan usaha didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (pada kisaran 32,52% s/d 33,62%). Selain pertanian kehutanan dan perikanan, kontribusi terbesar berikutnya berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran (pada kisaran 17,02% s/d 17,62%); kemudian diikuti sektor industri pengolahan (pada kisaran 11,64% s/d 12,63%), serta sektor konstruksi (pada kisaran 8,09% s/d 8,34%).

Kabupaten Sambas memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanian. Komoditi utama dari sektor pertanian diantaranya padi dan produk hortikultura (sayuran dan palawija). Komoditi sub sektor perkebunan diantaranya berupa kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kopi dan kakao, sedangkan komoditi dari sektor kehutanan berupa kayu bulat dan kayu belian. Untuk sektor kelautan dan perikanan, kondisi geografis

Kabupaten Sambas yang memiliki wilayah pesisir yang relatif panjang sangat memungkinkan bagi pengembangan perikanan tangkap, dan daya dukung beberapa kecamatan untuk pengembangan budidaya (keramba dan budidaya kolam). Komoditi sektor peternakan diantaranya babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang terdiri dari itik dan ayam), dan sektor pertambangan (Batu Bara, Tembaga, Zikon, Emas, Batu Pecah dan lain-lain).

Selain potensi sumber daya alam daerah, Kabupaten Sambas juga memiliki potensi di sektor pariwisata terutama wisata alam, wisata bahari, wisata agro, wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata minat khusus. Saat ini setidaknya terdapat 71 objek wisata di Kabupaten Sambas, dan salah satu yang dikenal luar daerah dan mancanegara adalah wisata Temajuk. Potensi wisata Temajuk sesungguhnya akan berdampak cukup besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat kabupaten Sambas apabila dikelola dan dikembangkan secara profesional.

Persaingan antar daerah yang semakin ketat, menuntut Pemerintah Kabupaten Sambas untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah agar dapat menarik minat investor. Selama periode 2016-2020, sektor ekonomi unggulan Kabupaten Sambas (*memiliki nilai LQ > 1*) diantaranya adalah: pertanian, kehutanan, dan perikanan (LQ 2020 = 1,49); perdagangan besar dan eceran (LQ 2020 = 1,22); dan jasa pendidikan (LQ 2020 = 1,16). Adapun keunggulan kompetitif perekonomian Kabupaten Sambas (*memiliki nilai Differential Shift yang positif*) dikontribusi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, serta sektor pengadaan air. Sedangkan secara total, bauran industri yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Sambas (*memiliki nilai total Shift Share tertinggi*) adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Dalam upaya pengembangan perekonomian daerah, perlu didukung dengan percepatan penyediaan infrastruktur dasar, dan disertai dengan menumbuhkembangkan potensi komoditi unggulan diantaranya: jeruk siam, padi, kopi, kelapa dalam, karet, sawit, tenun Sambas, kerajinan anyaman rotan & bambu, wisata alam, industri pengolahan jeruk siam, dan industri pengolahan hasil perikanan, yang memiliki daya ungkit (*leverage*) terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan strategis terutama dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan dan birokrasi,

pengembangan mutu sumber daya manusia, dan pengembangan kawasan cepat tumbuh, sebagai upaya menyeluruh dalam upaya mewujudkan perekonomian daerah yang kompetitif dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif melalui pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan yang menciptakan serta memperluas peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat serta menjamin penurunan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

4.5. Telaah Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi dan Sosial

Seluruh daerah di Kalimantan Barat saat ini sedang menghadapi pandemi yang disebabkan oleh SARS COVID-19. Pandemi ini mempengaruhi berbagai perubahan di sektor sosial ekonomi seluruh wilayah yang terjangkit. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Sambas, bahwa sejak tahun 2019 hingga tanggal 23 Agustus 2021 jumlah yang terpapar Covid-19 berjumlah 2490 orang dan yang meninggal sebanyak 21 orang. Dari 19 (Sembilan belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas, ada 5 (lima) kecamatan yang selalu memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terpapar Covid-19, yaitu Kecamatan Paloh, Sambas, Tebas, Pemangkat dan Teluk Keramat.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat mempengaruhi kegiatan dan aktivitas masyarakat. Setidaknya ada dua dampak Covid-19 terhadap aktivitas masyarakat, yaitu berdampak terhadap aktivitas sosial masyarakat dan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat khususnya. Terlebih sejak diberlakukannya berbagai kebijakan pemerintah yang membatasi ruang gerak sosial atau *social distancing* dalam aktivitas kehidupan masyarakat. Pada pemberlakuan, masyarakat diimbau agar menjauhi kontak fisik antara satu orang dengan lainnya, selalu berdiam di rumah, menghindari kerumunan, selalu mencuci tangan, hingga selalu memakai masker. Semua kegiatan atau aktivitas formal beralih fungsi dari yang asalnya serba tatap muka, menjadi daring. Sekolah diliburkan sementara dan belajar *online* lewat media digital, pegawai kantor bekerja dari rumah, bahkan dampak terburuknya adalah banyak masyarakat yang kehilangannya sumber penghasilan karena banyak para pegawai yang di-PHK, atau pedagang yang kehilangan pembeli sebagai akibat dibatasinya ruang gerak masyarakat ditempat-tempat umum dan termasuk aktivitas ekonomi.

Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 serta kebijakan kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini belum sepenuhnya efektif mampu menanggulangi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini.

Pada aspek ketenagakerjaan, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu:

- a. Pengangguran Karena Covid-19;
- b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19;
- c. Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19; dan
- d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan
- e. Jam Kerja Karena Covid-19.

Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 pada mereka yang berhenti bekerja, kehilangan pekerjaan karena di PHK, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja. Pengangguran yang bertambah akan diikuti dengan bertambahnya penduduk miskin. Dampak yang ditimbulkan pandemic Covid-19 dapat memperlambat pencapaian target SDGs, terutama Tujuan 1; Tujuan 2; Tujuan 3; Tujuan dan Tujuan 8.

Dampak ekonomi yang dialami Kabupaten Sambas pada masa pandemi Covid-19 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi. pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, jasa pendidikan, jasa perusahaan, jasa keuangan dan asuransi, transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Upaya pemulihan sektor-sektor ekonomi yang terdampak negatif tersebut harus menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sambas lima tahun ke depan (2021-2026).

Sebaliknya pandemi Covid-19 sepertinya hanya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor informasi dan komunikasi yang masing-masing tumbuh 19,57 persen dan

8,12 persen. Sementara sektor-sektor lainnya meskipun tumbuh positif tapi pertumbuhannya cenderung lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan di tahun sebelumnya.

Dampak ikutan dari pandemic ini adalah pada dimensi ekonomi dari 3 (tiga) dimensi pembangunan manusia. Perlambatan pertumbuhan IPM Kabupaten Sambas tahun 2020 lebih disebabkan menurunnya pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita/tahun tahun 2020 turun sebesar 0,67%, yakni dari Rp.9,924 juta tahun 2019 menjadi Rp. 9,858 juta tahun 2020.

4.6. Permasalahan Pembangunan

4.6.1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.6.1.1. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

Dimensi pendidikan merupakan salah satu indikator dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, pembangunan urusan pendidikan menjadi sangat berarti, terlebih terdapat dua aspek yang menjadi indikator pembentukan IPM, yaitu aspek rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kontribusi dimensi pendidikan terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Sambas tergolong rendah dibandingkan dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi.

Permasalahan pembangunan di bidang pendidikan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan adalah:

1. Mentuntaskan penduduk buta huruf dan Angka Putus Sekolah ke tingkat yang lebih rendah (mendekati nol persen) dan menumbuhkan minat sekolah. Angka buta huruf Kabupaten Sambas hingga tahun 2020 masih ada 8,56% dan angka putus sekolah SD/MI 0,79%; SMP/MTs 1,20%. .
2. Rata-rata lama sekolah (6,71 tahun) masih tergolong rendah (tamat SD) dan berada di rangking 13 dari 14 Kabupaten/Kota
3. Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2020 sebesar 12,61 tahun atau setara Diploma-1 dan berada di rangking 4 dari 14 Kabupaten/Kota
4. APM Kabupaten Sambas yang cenderung menurun pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, dimana APM SMA/SMK/MA menurun menjadi 50,26% dan SMP/MTs menjadi 62,81%. Capaian ini dapat memperlambat peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai salah satu indikator pembentukan IPM.

5. Rasio Murid-Guru dan rasio Murid Sekolah masih di bawah standard nasional, terutama pada jenjang pendidikan dasar yang berdampak pada inefisiensi.
6. Ruang kelas yang rusak berat dan rusak total pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.
7. Kekurangan Guru dan Guru yang belum tersertifikasi pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.

Sedangkan yang menjadi isu-isu strategis pada bidang pendidikan di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM dari aspek pendidikan terus didigalakkan dengan menjamin peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun manajemen talenta Indonesia. Sejalan dengan tujuan ke 4 pembangunan berkelanjutan (SDGs), isu strategis bidang pendidikan adalah mewujudkan pendidikan berkualitas yang ditandai dengan meningkatnya tingkat partisipasi sekolah (APK dan APM) pada semua jenjang pendidikan bagi semua penduduk, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pendidikan untuk semua kelompok masyarakat, guna mentuntaskan buta huruf dan putus sekolah, termasuk kelompok masyarakat difabel (penyandang cacat).
3. Penataan kurikulum pendidikan disertai dengan peningkatan kuantitas dan kualitas guru untuk lebih meningkatkan kemampuan matematika, membaca dan sains pelajar guna merespon era digital dan bonus demografi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2019-2024.
4. Dengan pendidikan berkualitas, diharapkan dalam jangka panjang (target SDGs 2030) jumlah pemuda dan orang dewasa (terutama Generasi Z dan Post Z) yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

4.6.1.2. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

Berbagai usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, salah satunya dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana prasarana tersebut meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), posyandu, dan klinik maupun

mitra pelayanan kesehatan di tingkat desa terus ditingkatkan keberadaan dan kualitasnya agar tetap dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang kesehatan masyarakat.

Sebagaimana pembangunan urusan pendidikan yang terkait dengan pembentukan IPM, pembangunan urusan kesehatan pun terkait erat dengan indikator pembentukan IPM (yaitu usia harapan hidup/UHH). Semakin tinggi UHH pertanda semakin berkurang Angka Kematian Bayi (AKB). Penurunan AKB pertanda membaiknya layanan kesehatan dan meningkatnya kesadaran merawat kehamilan.

Permasalahan pembangunan urusan Kesehatan di Kabupaten Sambas adalah:

- 1) Status gizi masyarakat masih rendah, ditandai dengan pertambahan jumlah bayi lahir BBLR dan gizi buruk. Bayi lahir BBLR dan gizi buruk berpengaruh negatif terhadap proses pertumbuhan fisik yaitu sangat pendek dan pendek (stunting).
- 2) Tenaga medis (terutama dokter spesialis dan dokter gigi) masih kurang dalam segi jumlah dan mutu untuk melayani kesehatan masyarakat.
- 3) Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal.
- 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan.
- 5) Masih kurang efektif dan efisien manajemen dan pengelolaan pelayanan kesehatan dan pengelolaan BLUD di Fasyankes.

Pembangunan SDM dari aspek kesehatan terus ditingkatkan dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting, kematian ibu, kematian bayi. Kesehatan dan gizi anak yang rendah, pravalensi penyakit tidak menular tinggi, pravalensi merokok yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang.

Target SDGs hingga tahun 2030 yang harus diwujudkan dalam proses pembangunan kesehatan, yang dituangkan dalam RPJMN antara lain adalah :

1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka

- Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.
3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
 4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
 5. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
 6. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

4.6.1.3. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- **Jalan**

Beberapa permasalahan yang terkait infrastruktur transportasi atau bidang kebinamargaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Panjang jalan yang merupakan wewenang Kabupaten Sambas dengan kondisi permukaan aspal, meskipun memiliki kecenderungan meningkat, dari 29,24% di tahun 2016 menjadi 35,63% di tahun 2020, namun panjang jalan dengan permukaan tanah masih mendominasi. Ditahun 2016 terdapat 56,63% jalan yang masih berpermukaan tanah dan hanya berkurang sedikit menjadi 50,18% pada tahun 2020. Kondisi yang diharapkan adalah persentase jalan dengan permukaan aspal lebih tinggi dari pada panjang jalan dengan permukaan tanah.

Untuk Kondisi Jalan yang mantap memerlukan beberapa tahapan pekerjaan yang diseusaikan dengan kondisi segmen jalan tersebut, baik penimbunan, LPB, LPA,dan Tanah Pilihan. dan hal tersebut kaitannya adalah dengan Anggaran yang tersedia oleh Pemerintah Kabupaten, mengingat untuk Pembangunan jalan Aspal Dana yang diperlukan perkilometer + 3 (tiga) Miliar Rupiah, Pada Realisasi Kondisi Jalan Kabupaten Kondisi Mantap Kegiatan

Penyelenggaraan Jalan TA 2021 adalah sebesar 66,12 % atau sepanjang 728,778 Km.

Grafik pada Bab 2 mengenai prosentase jalan berdasarkan jenis permukaan dapat diinterpretasikan sebagai permasalahan dari segi biaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dari jalan tanah menjadi jalan dengan permukaan aspal. Dengan kondisi keuangan yang sangat terpengaruh secara negatif akibat pandemi covid-19 diperlukan strategi baru atau terobosan untuk tetap menjaga kualitas kinerja infrastruktur jalan yang kondusif buat kemajuan di berbagai bidang baik ekonomi, pertanian, industri jika ingin dicapai kemajuan atau perbaikan di Kabupaten Sambas.

- **Jembatan**

Kondisi jembatan di wilayah Kabupaten Sambas relatif baik dengan prosentase jembatan dengan kondisi rusak tidak terlalu tinggi. Di mana untuk Jembatan Kabupaten jembatan dengan kondisi rusak ringan hanya 1,78% dan yang dalam kondisi rusak berat hanya 0,99%. Meskipun tidak banyak namun perhatian tetap harus diberikan sehingga tidak ada lagi jembatan dengan kondisi rusak berat di Kabupaten Sambas.

- **Irigasi**

Meskipun terdapat peningkatan panjang jaringan irigasi rawa dalam kondisi baik, namun dengan belum dicapainya angka 75% pada tahun 2017 masih terdapat pekerjaan besar bagi bidang sumber daya air untuk meningkatkan kinerjanya. Tingginya tingkat sedimentasi/pertumbuhan gulma didaerah irigasi menyebabkan tingkat kerusakan Jaringan dan Saluran irigasi yg sangat cepat bahkan dalam hitungan bulan untuk setiap tahunnya, sehingga diperlukan biaya Rehabilitasi/Pemeliharan Jaringan yg lumayan besar untuk mencapai kondisi optimal yg diinginkan.

- **Penataan Ruang**

Masih terdapat beberapa permasalahan terkait bidang penataan ruang antara lain :

1. Penyelesaian peraturan daerah RTRW Kabupaten Sambas yang hingga kini masih dalam proses penyempurnaan substansi Pola Ruang. Adanya

peraturan terbaru yaitu Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang, membuat dokumen RTRW yang telah disusun untuk disesuaikan Kembali Basis Data nya dengan peraturan tersebut.

Selanjutnya mengenai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan persub, antara lain: Surat Permohonan Persub Bupati, Surat Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tanggung Jawab Kualitas, SK Peninjauan Kembali, SK Tim Peninjauan Kembali, Dokumen Hasil Peninjauan Kembali, Berita Acara TKPRD Kab. Sambas, Berita Acara TKPRD Provinsi Kalbar, Berita Acara Kesepakatan dengan DPRD Kab. Sambas, Materi Teknis, Naskah Akademik, Berita Acara Konsultasi Publik, Berita Acara Daerah Berbatasan, Berita Acara BIG (BA Peta DASAR), Surat Validasi KLHS, Dokumen Perda Lama, Dokumen Raperda beserta peta dan Tabel Pemeriksaan Mandiri.

2. Minimnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di wilayah kecamatan dan zonasi pusat kegiatan, yang disebabkan karena keterbatasan anggaran. Pemkab Sambas sudah Menyusun Dok. RDTR. Dari 19 Kecamatan, hanya beberapa kecamatan yang baru disusun, antaran lain kec. Pemangkat, Tebas, Jawai, Jawai Selatan, Tekarang dan Teluk Keramat. RDTR ini nantinya akan disesuaikan Kembali dengan permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Hal tersebut agar memudahkan Perizinan secara OSS maka RDTR harus dibuat berbasis digital (GISTARU).
3. Kurang optimalnya koordinasi antar sektor yang berdampak pada meningkatnya potensi konflik dalam pemanfaatan ruang. Sehubung dengan Penyusunan Rencana Kerja. OPD teknis sudah melakukan koordinasi berupa seminar, rapat teknis, dsb. Sesuai dengan amanat Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dan Permen ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang. Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik tata ruang dan tidak menghambat investasi. OPD terkait seharusnya memberikan Saran dan Masukan terkait program – program strategis untuk 20 tahun kedepan. Sehingga produk tata ruang sejalan dengan RPJMD Daerah.

Sedangkan yang menjadi isu-isu strategis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

1. Terdapat lebih dari 50% panjang jalan dalam wewenang kabupaten dengan permukaan tanah yang tentunya memiliki tingkat pelayanan rendah.
2. Masih lebih dari $\frac{1}{4}$ panjang jaringan iringasi dalam kondisi baik.

4.6.1.4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Adapun permasalahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut:

- **Air Bersih**

Air minum yang terjual yang merupakan produk dari PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas pada tahun 2019 menunjukkan penurunan jika dibandingkan pada tahun 2018. Penurunan ini sudah selayaknya dicermati agar masalah yang muncul dapat diselesaikan. Program yang disusun juga harus mempertimbangkan angka kebutuhan pokok minimal pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PM No. 14/PRT/M/2020) sebesar 60 liter/orang/hari.

Sedangkan untuk air minum yang dikelola PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas masih memerlukan pekerjaan besar untuk dapat memberikan pelayanan yang baik

- **Perumahan**

1. Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni.
2. Rendahnya penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan masyarakat terdampak relokasi Program Pemerintah.
3. Belum Optimalnya penanganan Infrastruktur di kawasan kumuh, perkotaan dan perdesaan.

4. Penanganan yang belum optimal terhadap rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Air Minum Layak dan Air Minum Aman.

4.6.1.5. Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perkembangan global, nasional dan perubahan sosial politik di daerah telah membawa implikasi pada kehidupan masyarakat Kabupaten Sambas. Apakah lagi secara geografis Kabupaten Sambas memiliki perbatasan darat dan laut dengan negara tetangga Malaysia Timur. Dalam kaitannya dengan itu, adapun permasalahan yang dihadapi dalam bidang politik, ketentraman, dan ketertiban adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya pelanggaran terhadap K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) terkait aktivitas masyarakat
2. Masih maraknya penyakit masyarakat (PEKAT); pasangan tidak syah suami istri, penggunaan minuman beralkohol, perjudian, pencabulan dan narkotika
3. Pembinaan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang belum maksimal
4. Masih adanya keterbatasan fasilitas pendukung sarana dan prasarana operasional dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
5. Walaupun dalam tiga tahun terakhir telah terjadi peningkatan rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk, namun angka tersebut masih sangat kecil terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat.
6. Masih terbatasnya jumlah Linmas di Kabupaten Sambas, di mana sampai saat ini hanya memiliki kurang lebih 56 orang linmas untuk melakukan perlindungan masyarakat kepada 193 desa di 19 kecamatan daerah ini
7. Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
8. Belum adanya payung hukum yang dapat melindungi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi resiko hukum pada setiap pelaksanaan kegiatan penegakan hukum (Perda dan Perkada) dan Produk hukum tentang Ketertiban Umum yang segera untuk dilakukan revisi guna memaksimalkan penindakan terhadap pelanggaran TIPIRING.

9. Adanya kerawanan dan pencemaran serta gangguan keamanan lingkungan dan Kelestarian Lingkungan serta dampak dari aktivitas PETI
10. Pemberdayaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang belum maksimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Upaya penanggulangan bencana perlu diawali dengan pemahaman atas risiko bencana yang ada berdasarkan hasil kajian risiko. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Adanya penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian tentunya dapat membantu upaya untuk pengurangan risiko bencana di suatu daerah.

Bencana yang terjadi umumnya mempunyai dampak yang merugikan, antara lain adanya korban jiwa, kehilangan harta benda, kerusakan bangunan serta sarana prasarana layanan masyarakat. Kejadian bencana juga sangat berkaitan erat dengan perlunya penyediaan dan pemberian bantuan yang berdampak terhadap pencapaian pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan pada sub urusan bencana, antara lain :

1. Belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan
2. Masih perlu peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase prabencana, tanggap darurat dan pascabencana
3. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan pemerintah daerah serta masyarakat dalam menghadapi bencana
4. Diperlukan Penguatan Kelembagaan terkait Kebencanaan dan Pengelolaan Data dan Informasi menuju SATU DATA BENCANA
5. Diperlukan penguatan kerjasama dan kemitraan banyak pihak dan banyak sektor dalam mitigasi dan pengurangan risiko bencana
6. Diperlukan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam terjadinya pergeseran batas wilayah
7. Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana dan belum memadainya ketersediaan sarana prasarana kebencanaan.

4.6.1.6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial

Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial PMKS yang penyelenggaranya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah. Adapun bidang-bidang yang menjadi ursuan bidang sosial adalah kebijakan bidang sosial, perencanaan bidang sosial, kerjasama bidang sosial, pembinaan bidang sosial, identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, pengasuhan dan pengangkatan anak, penanggulangan korban bencana, pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Adapun permasalahan sosial yang masih mengemuka di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih cukup tingginya angka kemiskinan
2. Masuk dalam kategori daerah rawan bencana
3. Masih belum optimalnya kemampuan dalam penanganan masalah kebencanaan
4. Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat
5. Masih cukup banyak masyarakat penyandang masalah sosial dan dalam penanganan dan pemberdayaannya belum terjadi sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat
6. Masih belum tersedianya panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
7. Keberlanjutan penyelengaraan KUBE yang belum signifikan mengangkat perekonomian masyarakat/ anggota
8. Belum adanya desa yang melaksanakan sistem pelayanan sosial terpadu melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)
9. Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial

10. Belum tersedianya Salter atau rumah singgah bagi Penanganan PMKS khususnya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan Orang Terlantar (OT) masih mengalami kesulitan
11. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat akibat dari pandemi covid-19.

4.6.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.6.2.1. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Sambas terkait erat dengan kualitas tenaga kerja. Sebagian besar (77,19%) berlatar belakang pendidikan rendah (SMP ke bawah) dan sebagian besar terserap di sektor Pertanian, Perkebunan, Perburuan dan Perikanan (60,43%). Perencanaan tenaga kerja merespon era digitalisasi kini dan masa datang belum tersedia, terutama dalam memanfaatkan era bonus demografi yang ditandai dengan peralihan generasi penduduk usia kerja dari generasi X ke generasi Millenial, Generasi Z, dan Generasi Post Z. Timpangnya TPAK laki-laki dengan TPAK Perempuan disertai TPT Perempuan yang lebih tinggi menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja meskipun bertambah, namun pertambahannya relatif lambat.

Pasar kerja Indonesia, termasuk Kabupaten Sambas, menunjukkan ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran. Penawaran tenaga kerja bertambah lebih cepat dari permintaannya, akibatnya tingkat pengangguran terbuka meningkat. Posisi tawar tenaga kerja rendah, disertai dengan produktivitas kerja rendah sehingga upah yang diperoleh tenaga kerja rendah. Perencanaan tenaga kerja disertai reposisi dan revitalisasi BLK dalam merespon era digitalisasi menjadi isu strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan daya saing daerah. Rendahnya perlindungan terhadap pekerja / karyawan, sehingga banyaknya kasus perselisihan Hubungan Industrial (HI) di Kabupaten Sambas.

4.6.2.2. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perempuan dan anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan, padahal kesetaraan gender harus

menjadi prinsip dalam pelaksanaan pencapaian SDG's. Masih adanya kesenjangan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) khususnya yang dialami perempuan dan anak menjadi tantangan pemerintah untuk mempercepat program pemberdayaan perempuan untuk mengejar kemajuan laki-laki. Prinsipnya, *no one left behind*. Kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan harus diupayakan bersama.

Isu gender masuk dalam berbagai bidang pembangunan, diantaranya kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perkawinan anak, ekonomi, dan politik. Besaran isu gender dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat dan daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG menjadi suatu strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.

Selain pembangunan pemberdayaan perempuan, isu yang tidak kalah penting dan juga menjadi fokus perhatian pemerintah ialah pemenuhan hak anak. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil Sensus Penduduk 2020 mengungkapkan terdapat sekitar 223.487 jiwa (35,5%) penduduk umur <18 tahun di Kabupaten Sambas yang disebut sebagai anak. Hal tersebut menjadi alasan pemerintah harus bekerja keras menciptakan anak-anak yang siap untuk membangun masa depan berkualitas. Keberhasilan pemenuhan hak anak dapat diukur dari Kabupaten/Kota layak anak .

4.6.2.3. Urusan Pemerintah Bidang Pangan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang pangan adalah Masih rendahnya ketersediaan pangan daerah. Sedangkan yang menjadi isu-isu strategis bidang pangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan laju peningkatan produksi pangan menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas.

-
2. Alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi lahan tanaman perkebunan menyebabkan menyusutnya luas lahan sawah dan ladang.

4.6.2.4. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan bidang lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
2. Belum Terkoordinasi sistem penaatan dan penegakan hukum Lingkungan secara baik.
3. Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup (air, udara, tanah).
4. Perubahan iklim akibat Pemanasan Global.
5. Pembuangan Limbah yang belum optimal.
6. Menurunnya/menghilangnya Keanekaragaman Hayati.
7. Meningkatnya jumlah penduduk dengan berbagai Aktifitasnya.
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.

Isu strategis bidang lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya alam masih belum berkelanjutan dan relatif mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis.
2. Rendahnya penanganan sampah di Kabupaten Sambas perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah karena dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.
3. Pembukaan lahan untuk perkebunan, pengelolaan sumber daya kehutanan, aktivitas pemukiman, aktifitas industri, pembukaan lahan, ternak, hotel rumah sakit serta perluasan jaringan infrastruktur berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan menurunkan jumlah flora dan fauna.
4. Masih adanya penambangan emas tanpa izin (PETI) menyebabkan berbagai kerusakan dan pencemaran. Perubahan bentang alam, kerusakan hutan,

- erosi, dan pencemaran air baik oleh merkuri maupun bahan terlarut lainnya.
5. Kerusakan terumbu karang dapat merusak ekosistem laut sehingga dapat mengancam kelestarian makhluk hidup yang ada di dalamnya.

4.6.2.5. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang cukup penting adalah terkait dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan Tiga Tertib Administrasi Kependudukan meliputi Tiga Tertib; Tertib Administrasi Kependudukan, Tertib Penerbitan NIK dan Tertib Penerbitan Dokumen Kependudukan, juga masih memunculkan beberapa permasalahan diantaranya adalah:

- 1) Masih belum optimalnya pemutakhiran data penduduk berdasarkan sistem administrasi kependudukan
- 2) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi informasi berkaitan dengan SIAK dan jaringan data
- 3) Belum optimal sistem penyebarluasan informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi infomasi (TI) dan sistem informasi penunjang berbasis TI lainnya.
- 4) Belum sepenuhnya masyarakat Kabupaten Sambas sadar akan pentingnya pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan.
- 5) Belum sepenuhnya masyarakat Kabupaten Sambas sadar akan pentingnya pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting kependudukan.

4.6.2.6. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun yang menjadi urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah terkait dengan pemerintahan desa dan kelurahan, penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Adapun permasalahan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa yang ada di Kabupaten Sambas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya keterbatasan sebagian SDM Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Masih rendahnya pemahaman aparatur Desa tentang Tugas Pokok dan Fungsi, sehingga menimbulkan banyak permasalahan/kasus antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD dan Masyarakat.
3. Belum optimalnya administrasi dan pengelolaan asset pemerintah desa.
4. Belum optimalnya fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam proses pembangunan di desa.
5. Lembaga Ekonomi Desa khususnya BUMDes masih belum sepenuhnya berkontribusi terhadap peningkatan PADes.
6. Masih belum optimalnya kegiatan progress/kemajuan Indeks Desa Membangun (IDM).
7. Dari total 193 desa yang ada di Kabupaten Sambas, baru ada 65 Desa Mandiri, 82 Desa Maju, sisanya 46 Desa Berkembang.

4.6.2.7. Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Kabupaten Sambas bertambah setiap tahunnya meskipun dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang masih tergolong rendah. Pertambahan penduduk disebabkan perubahan parameter kependudukan yaitu jumlah kelahiran lebih banyak dari kematian dan migrasi masuk lebih banyak dari migrasi keluar. Pertambahan penduduk ini perlu dikendalikan/ditata dan persebarannya pun belum merata antar kecamatan. Di sisi lain, pertambahan penduduk lansia cenderung membebani pengeluaran daerah, jika tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk kegiatan produktif.

Permasalahan dalam KB terkait dengan masih terdapat penduduk usia di bawah 15 tahun yang menikah dan melahirkan. Selain kebutuhan alat KB yang belum terpenuhi (*unmeet need*), target realisasi pencapaian akseptor KB baru tergolong rendah. Serta Pilihan sebagian besar Akseptor KB terhadap pemakaian alat kontrasepsi non MKJP dan pilihan kontrasepsi mantap (MKJP) masih sangat minim.

- Isu strategis bidang pengendalian penduduk dan KB meliputi
1. Isu strategis pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan terutama terkait: bonus demografi, grand design kependudukan, pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga (Bangga Kencana) dan satu data kependudukan;
 2. Isu Strategis pemenuhan layanan dasar terkait; penggunaan kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR), Kesehatan Reproduksi Remaja, Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need), dan Stunting (gagal tumbuh);
 3. Isu Strategis membangun kebudayaan dan karakter bangsa terkait; pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi keluarga, dan perempuan menikah pertama usia dibawah 16 tahun.

4.6.2.8. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

Adapun permasalahan bidang perhubungan di Kabupaten Sambas saat ini adalah dengan jumlah dermaga yang meningkat hingga 27,55% yaitu dari 196 unit dermaga pada tahun 2016 menjadi 250 dermaga pada tahun 2017, dapat diketahui bahwa pergerakan antar wilayah di Kabupaten Sambas, terutama dengan moda transportasi sungai masih sangat diminati. Hal ini mensyaratkan ditingatkannya aspek keselamatan dalam transportasi sungai yang kadang-kadang masih tidak menjadi perhatian para pelaku transportasi.

4.6.2.9. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi

Sebagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta bidang persandian. Adapun permasalahan bidang komunikasi dan informasi yang ada di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengembangan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. Terbatasnya pembangunan dan pengembangan jaringan computer LAN,WAN dan internet / global area network dilingkungan pemerintah Kabupaten Sambas

3. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur bidang komunikasi dan informatika
4. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika belum memadai, terlebih di daerah perbatasan dan pedalaman
5. Kurangannya Komitmen dan kesadaran dari seluruh OPD terkait dengan pentingnya keterbukaan informasi publik dan pentingnya desiminasi inforamsi pembangunan Daerah
6. Belum terintegrasinya sistem informasi, aplikasi dan data di Kabupaten Sambas
7. Belum memadainya sarana dan prasarana di bidang komunikasi dan informatika
8. Masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD dalam pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi.

4.6.2.10. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Adapun permasalahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan manajerial pengelola koperasi dan pelaku UKM masih rendah
2. Kurangnya kemampuan koperasi dan pelaku UKM untuk memenuhi keperluan akan sarana dan prasarana usaha
3. Terbatasnya informasi jaringan pemasaran dan akses permodalan bagi koperasi dan pelaku UKM
4. Masih lemahnya jaringan distribusi pemasaran produk.

4.6.2.11. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal

Adapun permasalahan bidang penanaman modal di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat regulasi terkait Penanaman Modal yang belum disusun dan perlu disempurnakan
2. Belum optimalnya penyusunan data base potensi dan peluang investasi didaerah
3. Belum optimalnya pelaksanaan promosi potensi investasi
4. Infrastruktur penunjang investasi yang belum memadai
5. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan belum maksimal

6. Kemampuan operator pelayanan secara elektronik belum memadai.

4.6.2.12.Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan Olahraga

Adapun permasalahan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga
2. Minimnya tenaga keolahragaan seperti pelatih dan wasit yang bersertifikasi
3. Belum optimalnya sistem pembinaan olahraga prestasi
4. Masih rendahnya SDM dan daya saing pemuda
5. Minimnya kreatifitas dan kepeloporan pemuda
6. Belum optimalnya pembinaan pemuda berprestasi dan berbakat
7. Belum optimalnya peran serta pemuda dan keterlibatan organisasi kepemudaan sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan
8. Minimnya jumlah wira usaha muda
9. Masih belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan
10. Masih minimnya sarana dan prasarana kepemudaan.

4.6.2.13.Urusan Pemerintah Bidang Statistik

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi yang menyelenggarakan urusan statistik sektoral adalah sebagai walidata terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kewenangan daerah dari masing-masing perangkat daerah yang menyelenggarakan kewenangan daerah. Hal tersebut juga diarahkan untuk mendukung Satu Data bagi kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

Adapun permasalahan yang terkait dengan statistik di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih Ketersediaan data statistik sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja daerah masih belum lengkap Karena belum teridentifikasi kebutuhan data masing-masing OPD serta potensi data di masing-masing OPD.
2. Kemampuan SDM perangkat daerah yang belum optimal dalam penyediaan basic data dan SDM yang Kurang.

4.6.2.14.Urusan Pemerintah Bidang Persandian

Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan, agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet, apalagi jika kontennya masuk dalam rahasia negara. Urusan persandian merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Adapun permasalahan persandian di daerah saat ini adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan persandian di Kabupaten Sambas karena Masih terbatasnya SDM dan kemampuan untuk mengamankan jumlah informasi dan konten informasi yang diamankan dengan sistem persandian;
2. Belum terlaksananya dengan baik pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
3. Masih adanya keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian.

4.6.2.15.Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

Seni budaya di Kabupaten Sambas dapat dibagi ke dalam beberapa penjelasan, yaitu objek pemajuan kebudayaan, makanan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya.

Adapun permasalahan di bidang kebudayaan di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni.
2. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional.
3. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya.

4. Masih terbatasnya kelembagaan seni dan belum optimalnya pagelaran seni budaya daerah.
5. Masih minimnya literatur dan dokumentasi tentang kebudayaan daerah.
6. Semakin rendahnya minat generasi muda dalam upaya mempelajari dan melestarikan budaya daerah.
7. Masih minimnya kegiatan festival seni dan budaya di Kabupaten Sambas.

4.6.2.16. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

Urusan perpustakaan mengenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan perpustakaan daerah serta kekayaan koleksi buku-buku yang dimiliki serta dalam upaya menumbuh kembangkan minat baca bagi masyarakat. Adapun permasalahan yang terkait dengan bidang perpustakaan saat ini adalah:

1. Jumlah Pengelolaan Perpustakaan belum ditangani SDM yang berkompeten dibidangnya (belum ada tenaga pustakawan)
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana untuk membaca buku dan menambah pengetahuan
3. Belum optimalnya layanan perpustakaan keliling dalam menjangkau lapisan masyarakat yang membutuhkan
4. Belum adanya Regulasi Daerah yang mengatur di bidang Perpustakaan daerah.

4.6.2.17. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

Arsip merupakan rekaman informasi secara resmi seluruh kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh jajaran penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Sesuai dengan perkembangan prinsip-prinsip *e-government*, maka pengelolaan data berbasis IT menjadi sangat penting, karena tidak hanya menyangkut keamanan data, akan tapi kecepatan dalam memberikan pelayanan penyediaan data yang diperlukan.

Adapun beberapa permasalahan dibidang kearsipan saat ini adalah:

1. Masih Belum optimalnya kemampuan maupun jumlah SDM pengelola Kearsipan (Kab. Sambas baru memiliki 1 orang jafung Arsiparis)

2. Belum adanya Regulasi Pemerintah Daerah mengenai standar Pengelolaan Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten
3. Sarana dan prasarana pendukung untuk penyimpanan dan pengamanan Arsip daerah belum terpenuhi
4. Pengelolaan Arsip belum dilakukan secara terintegrasi dan sistematis dalam satu kesatuan sistem pengelolaan arsip daerah
5. Masih rendahnya atensi OPD terhadap penyelenggaraan kearsipan dilingkungannya.

4.6.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

4.6.3.1. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan

Adapun permasalahan bidang kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut:

1. Penurunan potensi Sumberdaya Ikan (SDI)
2. Rendahnya SDM para Pelaku Usaha Perikanan (nelayan, pembudidaya dan Pengolah Hasil Perikanan) maupun petugas Teknis Perikanan
3. Terbatasnya sarana prasarana baik di sektor Penangkapan Ikan, Budidaya Perikanan, pengolahan hasil Perikanan dan kurangnya penerapan Teknologi tepat guna
4. Rendahnya Pengawasan disektor perikanan tangkap, Budidaya perikanan dan Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang belum memenuhi persyaratan mutu.

Sedangkan yang menjadi isu-isu strategis bidang kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut:

1. Kurang tersedianya pakan lokal yang berkualitas menyebabkan nelayan membeli pakan yang bersasal dari luar daerah dengan harga yang cukup tinggi.
2. Kurang tersedianya bibit unggul ikan, baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga mengakibatkan rendahnya produksi ikan.
3. Kurang optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi perikanan di Kabupaten Sambas.

4.6.3.2. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

Daya tarik wisata di Kabupaten Sambas beragam dari alam, sejarah, dan budaya. Selain jumlah kunjungan wisman, faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata Kabupaten Sambas adalah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) termasuk juga wisatawan lokal dari dalam dan luar Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas memiliki potensi sektor pariwisata yang sangat menjanjikan terutama untuk wisata alam (*ecotourism*).

Namun demikian, ada beberapa permasalahan kepariwisataan di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan tenaga kerja di bidang pariwisata
2. Rendahnya kualitas perencanaan pembangunan pariwisata
3. Belum adanya kajian tentang segmentasi pasar pada setiap daya tarik dan kawasan wisata
4. Kurang memadainya aksesibilitas menuju dan pada kawasan pariwisata
5. Kurangnya Infrastruktur Dasar, Sarana dan Aktifitas pada daya tarik dan suatu kawasan pariwisata
6. Rendahnya kontribusi usaha jasa pariwisata terhadap pendapatan daerah
7. Belum optimalnya penggunaan media terhadap kegiatan promosi pariwisata
8. Rendahnya pemahaman dan belum adanya sinergitas antar stakeholder dalam pembangunan pariwisata
9. Sulitnya menghitung angka kunjungan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan secara real
10. Belum tergalinya potensi sektor ekonomi kreatif

4.6.3.3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

Adapun permasalahan bidang pertanian dan yang ada di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
2. Masih rendahnya produktivitas pertanian dan indeks pertanaman.
3. Tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk, dan pestisida.

4. Masih rendahnya penggunaan benih unggul padi yang bersertifikat.
5. Minimnya modal usaha atau akses permodalan bagi petani belum merata sehingga membatasi upaya pengelolaan tanaman sesuai standar teknis dan untuk pengembangan usaha.
6. Ketersediaan lahan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.
7. Adanya serangan Organisme Penganggu Tanaman (OPT) penting yang belum terkendali secara optimal.
8. Kemampuan pengelolaan panen dan pengolahan hasil serta peningkatan mutu hasil masih rendah.
9. Akses jalan produksi untuk mengangkut sarana dan mengeluarkan hasil belum memadai.
10. Kapasitas kelembagaan petani belum optimal dan kemitraan usaha belum berkembang.
11. Informasi pasar dan aksesnya masih sangat terbatas.
12. Produksi dan produktivitas peternakan masih rendah.

Adapun yang menjadi isu-isu strategis di bidang pertanian adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan usaha pertanian yang konvensional menyebabkan daya saing usaha pertanian menjadi rendah dan kurang ekonomis.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian menyebabkan rendahnya produksi dan produktivitas pertanian.
3. Irigasi yang belum memadai menyebabkan rendahnya lahan padi yang bisa dialiri secara cukup dan kontinyu.
4. Terpencarnya lahan usaha tani tidak dalam suatu kawasan menyebabkan sulitnya pengelolaan usaha tani secara efisien, baik untuk pengolahan tanah sampai pengendalian hama dan penyakit.
5. Masih dominannya karet lokal yang dibudidayakan oleh masyarakat sehingga produktifitas yang dihasilkan masih rendah. Hal ini akan berdampak pada tingkat pendapatan petani dan kesejahteraan petani dari hasil perkebunan.
6. Tanaman perkebunan yang diusahakan petani pada umumnya sudah tua, sehingga perlu peremajaan pada tanaman.

7. Pelatihan dan pendampingan terhadap pekebun sangat diperlukan agar kapasitas pekebun serta kemandirian kelembagaan petani dapat berkembang.

4.6.3.4. Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan

Adapun permasalahan bidang kehutanan di Kabupaten Sambas saat ini adalah masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengangu kesehatan. Sedangkan yang menjadi isu-isu strategis di bidang kehutanan di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut:

1. Rusaknya kawasan hutan dan luasnya lahan kritis menyebabkan rendahnya penutupan tanah menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air dan sungai. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kekeringan pada musim kemarau dan banjir di musim hujan.
2. Terbakarnya hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun menyebabkan rusaknya lingkungan hidup seperti berkurangnya keanekaragaman hayati, berkurangnya cadangan carbon, berbagai penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta berkurangnya jarak pandang.

4.6.3.5. Urusan Pemerintah Bidang Energi, Sumber Daya dan Mineral

Adapun permasalahan bidang energi, sumber daya dan mineral di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut:

- **Energi Listrik dan Lainnya**

Listrik masih menjadi sumber energi utama yang digunakan masyarakat Kabupaten Sambas meskipun beberapa sumber energi seperti pembangkit listrik tenaga lain seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH). juga dikembangkan. Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan listrik PLN.

- **Sumber Daya Mineral**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten maka urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas. Permasalahan di bidang sumber daya mineral adalah

terjadinya penambangan emas liar antara lain terjadi di Desa Buduk Sempadang, Kecamatan Selakau Timur.

4.6.3.6. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

Adapun permasalahan bidang perdagangan di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pemanfaatan gudang SRG
2. Ketersedian fasilitas dan sarana fisik pengelolaan pasar tradisional masih kurang
3. Masih lemahnya pengawasan terhadap ketersediaan dan pengendalian harga barang-barang pokok dan barang penting lainnya
4. Terbatasnya ketersediaan informasi komoditi perdagangan yang berpotensi untuk diekspor
5. Promosi produk unggulan daerah masih sangat terbatas dan belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

4.6.3.7. Urusan Pemerintah Bidang Industri

Adapun permasalahan bidang industri di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kompetensi SDM pelaku IKM dalam pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam untuk hilirisasi
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana teknologi untuk proses hilirisasi produk
3. Belum optimalnya pemanfaatan digital marketing untuk promosi dan pemasaran produk
4. Terbatasnya kompetensi SDM IKM dalam aspek standarisasi kualitas sehingga daya saing produk belum optimal
5. Pembinaan dan pengawasan perijinan masih belum optimal

4.6.3.8. Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi

Sampai saat ini program mendatangkan transmigran dari luar ke Kabupaten Sambas memang tidak dilakukan. Pada masa lalu, transmigrasi dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Adapun permasalahan secara umum yang dihadapi oleh bidang transmigrasi ini adalah:

1. Program transmigrasi masih sepenuhnya tergantung dari kebijakan pemerintah pusat

2. Lokasi tujuan transmigrasi seringkali belum siap, baik sarana dan prasarana dan administrasi pertanahan
3. Masih adanya permasalahan batas desa sehingga menjadi kendala ketika akan membagikan lahan usaha.

4.6.4. Unsur Pendukung

4.6.4.1. Urusan Sekretariat Daerah

Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan sebuah pemerintahan daerah yang sesuai dengan mandat dan harapan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun permasalahan yang terkait dengan bidang pemerintahan yang dimaksud meliputi: Partisipasi, Akuntabilitas, Transparan, Responsif, Efektif dan Efisiensi, Perlakuan Sama, serta Kebijaksanaan.

Adapun permasalahan yang terjadi pada urusan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah, serta kurangnya jumlah aparatur
2. Belum sepenuhnya efektif penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
3. Masih belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Masih kurangnya tenaga penyusun produk hukum (*legal drafting*) dan tenaga teknis untuk publikasi produk hukum.
5. Tingkat koordinasi relatif kurang berjalan dengan baik antar Bagian karena kurangnya pemahaman terkait peran sekretariat daerah
6. Pembinaan administrasi pemerintahan di daerah bawahannya (Kecamatan dan Desa) belum optimal karena banyaknya jumlah dan luas wilayah administrasi daerah bawahannya.
7. Panjangnya rantai birokrasi relatif menghambat percepatan penyelesaian administrasi.
8. Masih belum optimalnya penataan Capaian Kinerja Penyenggaraan Pemerintah Daerah.

4.6.4.2. Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Adapun permasalahan secara umum yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya DPRD dalam melaksanakan tupoksi.
2. Masih sering tumpang tindihnya kepentingan antar fraksi.
3. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD (Kuantitas maupun Kualitas) yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
5. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD.
6. SOTK Sekretariat DPRD saat ini belum sepenuhnya mengacu pada Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota

4.6.5. Unsur Penunjang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang dimaksud dengan "unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masing-masing fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah agar fungsi penunjang tersebut dapat terselenggara secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan

fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila beban kerja sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)) maka penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut, digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik fungsi penunjang Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut.

4.6.5.1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang perencanaan pembangunan di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1. Masih lemahnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan, serta antar pusat dan daerah.
2. Pengembangan basis data dan up to date sebagai landasan penyusunan rencana dan kebijakan belum terintegrasi dengan baik.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Belum optimalnya kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.

4.6.5.2. Urusan Keuangan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang keuangan di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset daerah belum optimal
2. Masih banyak kendala dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan belum efektifnya pengelolaan keuangan
3. Belum optimalnya pemungutan pendapatan asli daerah disebabkan kesadaran wajib pajak yang masih kurang dan keterbatasan sarana prasarana dalam pemungutan pajak daerah
4. Pengelolaan sistem aplikasi dalam perencanaan dan penganggaran masih belum optimal
5. Masih perlu peningkatan akuntabilitas pengelolan keuangan daerah.
6. Rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada Pemerintah pusat masih tinggi.

4.6.5.3. Urusan Kepegawaian

Sampai pada tahun 2020 tercatat bahwa jumlah PNS yang bekerja di lingkungan Pemda Kabupaten Sambas sebanyak 6.237 orang yang terdiri dari 3.082 orang pegawai laki-laki dan 3.155 orang pegawai perempuan. Dari 6.237 orang pegawai negeri tersebut, 0,26 persen golongan I; 12,14 persen golongan II; 59,56 persen golongan III, dan 28,04 persen golongan IV. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, 0,34 persen dari pegawai tersebut berpendidikan SD, 0,72 persen berpendidikan SMP, 16,26 persen berpendidikan SMA, 12,03 persen berpendidikan Diploma I/II dan 14,00 persen berpendidikan Diploma III, 54,61 berpendidikan Sarjana.

Adapun permasalahan yang terkait dengan kepegawaian di daerah saat ini adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas sumber daya aparatur masih belum ideal, terjadi kekurangan SDM aparatur.
2. Masih terkendalanya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan SDM aparatur sesuai dengan bidang kerjanya.
3. Belum semua sumber daya aparatur yang ada bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
4. Belum optimalnya pemahaman SDM aparatur terhadap peraturan kepegawaian.
5. Masih lambannya adaptasi ASN terhadap kebijakan reformasi birokrasi dalam upaya percepatan perbaikan tata kelola pemerintahan serta daya ungkit dan pengaruh inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
6. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelatihan serta pembinaan pegawai masih belum optimal.
7. Belum Optimalnya Penerapan Reward dan Punishment
8. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait penyederhanaan terhadap Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional akan berimbas terhadap Manajemen ASN di Daerah Khususnya Kabupaten Sambas
9. Kualifikasi Pendidikan SDM aparatur masih perlu ditingkatkan

4.6.5.4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Upaya merealisasikan kehendak masyarakat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kompetensi SDM

aparatur yang mendukung. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM aparatur harus dilakukan secara berkesinambungan dan menjadi suatu keharusan melalui pembinaan. Salah satu wujud pembinaan tersebut diantaranya melalui Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

Adapun permasalahan yang terkait dengan urusan Diklat adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur untuk meningkatkan kemampuan teknis dan fungsional menuju aparatur yang profesional.
2. Dalam hal penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, pengiriman peserta diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV serta pengiriman peserta Diklat Teknis Fungsional, masih dirasakan minimnya dana yang ada
3. Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahunnya;
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana Diklat.
5. Masih rendahnya kompetensi manajerial, teknis dan fungsional sumber daya manusia aparatur.
6. Masih belum terpenuhinya kapasitas penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

4.6.5.5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya koordinasi penelitian dan pengembangan di daerah secara tepat dan terarah dengan SKPD, kabupaten/kota, dan provinsi.
- 2) Belum optimalnya ketersediaan data serta informasi peneltian dan pengembangan daerah yang akan mampu memberikan kelengkapan informasi terhadap rencana dan pelaksanaan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Belum optimalnya penerapan sistem, mekanisme serta proses penelitian dan pengembangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat dan terarah, sehingga hasil penelitian secara

implementatif akan memberikan kontribusi terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan daerah.

4.6.6. Unsur Pengawas

4.6.6.1. Urusan Inspektorat

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah sebagai salah satu unit kerja memiliki peranan yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam melakukan manajemen pengawasan. Adapun permasalahan saat ini yang terkait dengan bidang pengawasan atau inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Masih belum dilakukannya secara optimal aspek pencegahan dan lemahnya bangunan sistem peringatan dini juga;
2. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah masih belum optimal;
3. Inspektorat masih belum memiliki sistem deteksi dini dalam mencegah TIPIKOR;
4. Masih belum optimalnya manajemen tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Pegawai inspektorat yang mengikuti Diklat substantive bagi auditor masih terbatas;
6. Masih lemahnya koordinasi dan pelaksanaan dengan SKPD lain dalam penguatan Waskat/SPIP dan wasmas.
7. Masih kurangnya peningkatan kerjasama dengan lembaga pengawasan lainnya.

4.6.7. Unsur Kewilayahan

4.6.7.1. Urusan Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati.

Adapun permasalahan yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan saat ini di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

- 1) Masih lemahnya pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar.

- 2) Masih lambanya pelaksanaan reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel.
- 3) Masih rendahnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.6.8. Unsur Pemerintahan Umum

4.6.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sebagai konsekuensi dari kemajemukan sosial dalam masyarakat berdampak masih adanya potensi benturan antar kelompok warga masyarakat. Adanya kepentingan sosial, politik dan ekonomi serta pengaruh negatif arus lobalisasi yang penuh keterbukaan, sehingga secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Adapun permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di Kabupaten Sambas saat ini dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Masih minimnya pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi tentang Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, sehingga menimbulkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah yang ada.
2. Masih rendahnya rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk.
3. Degradasi pemahaman rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) dalam kehidupan masyarakat, yang diakibatkan dari penyerapan informasi yang keliru, sehingga berpotensi menimbulkan suasana tidak kondusif.
4. Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum.
5. Masih kurangnya pendidikan politik masyarakat.
6. Perhatian penanganan bencana non alam masih terbatas, termasuk bencana kesehatan.
7. Masih minimnya data dan informasi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Sambas

8. Masih terbatasnya SDM aparatur dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

4.7. Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Sambas. Berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis, sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami perlambatan dan semakin diperparah akibat dampak pandemi covid 19
2. Masih rendahnya infrastruktur dalam kondisi mantap sehingga kurang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di kabupaten sambas
3. Tingkat pengangguran terbuka yang cenderung semakin meningkat dan berpotensi semakin parah akibat dampak pandemi covid 19
4. Jumlah penduduk miskin yang tergolong tinggi dan persentase kemiskinan masih diatas rata-rata Provinsi
5. Pertumbuhan indeks pembangunan manusia yang masih tergolong rendah di Kalimantan Barat,
6. Rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah dan Usia Harapan Hidup masih menjadi permasalahan utama dalam upaya peningkatan IPM.
7. Masih tingginya potensi terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan, aktivitas masyarakat dan akibat dampak bencana alam
8. Masih tingginya Indeks Resiko Bencana Daerah terutama yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan serta banjir dan kekeringan
9. Belum optimalnya penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
10. Masih tingginya permasalahan sosial dimasyarakat yang mempengaruhi kondisi keamanan ,ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.
11. Belum optimalnya pembangunan di kawasan perbatasan sehingga masih terjadi ketimpangan dengan daerah atau wilayah lainnya.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk di wujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun kedepan, jargon yang digunakan adalah “**Sambas Baru, Berkemajuan**”, yang dapat dimaknai dengan pemimpin baru dan semangat baru bersama dan bekerjasama bergerak ke depan untuk lebih unggul. Kata **Berkemajuan** merupakan singkatan dari:

- **Ber** = **Beriman** kepada Allah SWT
- **Ke** = **Kemandirian**
- **Maju** = **Maju**
- **An** = **Berkelanjutan**

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta melihat perkembangan kondisi umum Kabupaten Sambas hingga tahun 2020 sebagaimana digambarkan pada bab 2, maka visi pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2021-2026 adalah:

“TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman, dan bertakwa pada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (*good and clean Government*).

Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar

untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, peningkatan kontribusi sektor industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Maju adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode lima tahun sebelumnya (2016-2021). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.

Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa RPJMD kabupaten/kota harus mempedomani RPJMD provinsi dan RPJMD provinsi harus mempedomani RPJMN. Berdasarkan hal itu, maka perumusan visi Kabupaten Sambas berpedoman pada visi pembangunan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” yang disebut sebagai Nawacita kedua. Visi Kabupaten Sambas juga berpedoman pada visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”.

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.1.
Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan
RPJMD Kabupaten Sambas

Visi Pembangunan Nasional 2020-2024:

“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-Royong”



Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui
Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola
Pemerintahan”



Visi Pembangunan Kabupaten Sambas 2021-2026:

“Terwujudnya Kabupaten Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju, dan
Berkelanjutan”

5.2. Misi

Visi RPJMD Kabupaten Sambas tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mewujudkan masyarakat yang taqwa serta taat dan tertib hukum dan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah (good and clean Government) dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi

2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi, yaitu mewujudkan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman) untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan desa mandiri, peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta untuk pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri.

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas, produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing

4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja, yaitu dengan meningkatkan investasi, maka akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja sehingga berdampak terhadap mengurangi berkurangnya angka pengangguran, angka kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan.

5. Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya alam dan lingkungan

Misi RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Keselarasan antara Misi RPJMN dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat
dan RPJMD Kabupaten Sambas

No	Misi Pembangunan RPJMN 2020-2024 (Nawacita Kedua)	Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023	Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sambas 2021-2026
1	Peningkatan Kualitas manusia indonesia	Misi 3: mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif	Misi 3: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	Misi 4: Mewujudkan masyarakat sejahtera	Misi 2: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi, yaitu mewujudkan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, energi

No	Misi Pembangunan RPJMN 2020-2024 (Nawacita Kedua)	Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023	Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sambas 2021-2026
			<p>listrik, air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman) untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan desa mandiri, peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta untuk pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri</p> <p>Misi 4: Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja</p>
3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Misi 1: mewujudkan percepatan pembangunan infrastuktur	Misi 2: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi, yaitu mewujudkan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman) untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan desa mandiri, peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta untuk pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri
4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Misi 6: Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	Misi 5: Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang tertib	Misi 1: Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan
6	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat , dan terpercaya	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip governance	Misi 1: Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan

No	Misi Pembangunan RPJMN 2020-2024 (Nawacita Kedua)	Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023	Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sambas 2021-2026
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang tertib	Misi 1: Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan
8	Pengelolaan pemerintahan bersih, efektif, terpercaya	Misi 2: mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip governance	Misi 1: Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan
9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan	Misi 2: mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip governance	Misi 1: Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada Tabel 5.2 sebagai berikut

TABEL 5.2
VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SAMBAS

Tujuan	Sasaran	INDIKATOR_SASARAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
M1	Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan								
1 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya	Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah	1 Cakupan Pemajuan Pengeleloaan Seni Budaya, Sejarah dan Museum Daerah	~~	25.50	27.52	29.05	32.56	35.00	35.00
2 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, bersatu, dan berwawasan kebangsaan.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, bersatu, dan berwawasan kebangsaan.	1 Tingkat kualitas hidup beragama	~~	76	79	82	85	88	88
		2 Tingkat Kesadaran Hukum dan Trantib	~~	68.33	73.33	76.33	79.33	82.67	82.67
		3 Tingkat Kerukunan Hidup dan Wasbang	~~	95	95	95	95	95	95
3 Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Tingkat efektivitas koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	~~	100	100	100	100	100	100
		2 Tingkat dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	~~	92	94	96	98	98	98
		3 Indeks Penerapan Sistem Merit	skor 200	skor 225	skor 250	skor 275	skor 300	skor 300	skor 300
		4 SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	~~	21.24	22.19	23.14	24.09	25.04	25.04
		4 SAKIP Komponen Capaian Kinerja	-	11,46	11,76	12,06	12,36	12,66	12,66
		5 Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Adminkuk	84	84.20	84.40	84.60	84.80	85.00	85.00
		6 Tingkat Pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	~~	65	70	75	80	85	85

Tujuan	Sasaran	INDIKATOR_SASARAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3 Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	7 Tingkat keterbukaan informasi publik	~~	90	95	100	100	100	100
		8 Cakupan data statistik OPD	~~	100	100	100	100	100	100
		9 Tingkat keamanan cyber daerah	~~	36	40	43	46	50	50
		10 Tingkat Pengelolaan Arsip	~~	55	61	65	68	72	72
		11 (1) Persentase Implementasi Rencana Kelitbangda (2) Indeks Inovasi Daerah (IIDa)	~~ (1) 100 (2) Sangat Inovatif	(1) 100 (2) Sangat Inovatif					
		12 Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	~~	80.5-84.5 (B)	84.6-88.30 (B)	88.31-90.0 (A)	90.01-92.00 (A)	92.01-94.00 (A)	92.01-94.00 (A)
3 Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan	1 Tingkat Sistem Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah	100	100	100	100	100	100	100
		2 Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.1
M2 Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi									
1 Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	Meningkatnya laju PDRB di setiap sektor	1 Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	2.00	2.00	2.36	2.42	3.16	3.55	3.55
		2 Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.00	2.66	3.17	3.75	4.03	4.11	4.11
		3 Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dan Perikanan	3.85	3.90	4.18	4.60	5.52	5.90	5.90
		4 Persentase peningkatan kunjungan wisata	2.21	4.33	6.22	7.81	9.06	9.97	9.97
		5 Laju Pertumbuhan PDRB sektor Jasa Perusahaan (%)	1.49	1.50	1.89	2.47	2.55	3.43	3.43
		6 Persentase Koperasi Yang Berkualitas	21.14	25.48	27.71	29.62	31.25	32.80	32.80

Tujuan	Sasaran	INDIKATOR_SASARAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1 Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	Meningkatnya laju PDRB di setiap sektor	7 Rasio Kewirausahaan	2.993	2.997	2.999	3.002	3.004	3.006	3.006
1 Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1 Indeks Ketahanan Pangan	55.42	55.17	56.79	57.69	59.04	60.91	60.91
2 Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang mantap untuk mendorong perekonomian daerah	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah	1 (1) Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (2) Persentase Jalan Poros Desa dalam kondisi mantap	(1) 66.07 (2) 60.10	(1) 68.62 (2) 61.60	(1) 71.76 (2) 63.10	(1) 73.70 (2) 64.60	(1) 76.24 (2) 66.10	(1) 78.78 (2) 68.50	(1) 78.78 (2) 68.50
		2 Rasio jaringan Irigasi	31.02	31.20	31.40	31.60	31.80	32.00	32.00
		3 Rasio tersedianya dermaga / steher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang	61.46	63.56	65.65	67.66	69.62	71.51	71.51
		4 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum	55.33	58.78	62.24	65.72	69.22	72.74	72.74
		5 Persentase rumah tangga bersanitasi	81.93	82.66	83.39	84.12	84.85	85.58	85.58
		6 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	80.24	80.29	80.34	80.40	80.45	80.50	80.50
3 Meningkatnya status kemajuan desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa	1 Persentase satuan pemukiman transmigrasi menuju tahap kemandirian	~~	65	68	71	74	77	77
		2 Persentase Peningkatan Status Desa	33.68	41.03	48.72	56.41	64.10	71.79	71.79

M3

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

1 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing	1 (1) Harapan Lama Sekolah (HLS) (2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	(1) 12.71 (2) 7.30	(1) 12.65 (2) 6.94	(1) 12.73 (2) 7.06	(1) 12.82 (2) 7.17	(1) 12.90 (2) 7.29	(1) 13.21 (2) 7.41	(1) 13.21 (2) 7.41
		2 Angka Harapan Hidup (AHH)	70.83	74.17	74.33	74.50	74.67	74.84	74.84
		3 Indeks Pembangunan Literasi	~~	35	36	37	38	39	39
		4 Tingkat Prestasi Pemuda	~~	3	6	6	6	6	6

Tujuan	Sasaran	INDIKATOR_SASARAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing	5 Tingkat Prestasi Olah Raga 6 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 7 Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak 8 Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	~~	30	12	12	19	35	35
1 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap PMKS	1 Tingkat Perlindungan Sosial	-	80	83.75	87.50	91.25	95.00	95.00
M4 Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja									
1 Meningkatnya kesempatan kerja	Tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan	1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74.28	74.65	74.71	74.77	74.79	74.81	74.81
M5 Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan									
1 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Indeks kualitas air 2 Indeks kualitas udara 3 Indeks kualitas lahan	51.00 90.10 40.14	51.10 90.15 40.15	51.20 90.20 40.16	51.30 90.25 40.17	51.40 90.30 40.18	51.50 90.35 40.19	51.50 90.35 40.19
2 Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana	Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana	1 Indeks Ketahanan Daerah 2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTRW	~~ 100	0.59 100	0.61 100	0.63 100	0.65 100	0.68 100	0.68 100

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sambas periode tahun 2021-2026.

Dengan demikian, arah kebijakan akan menjadi penuntun terhadap program-program indikatif yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. Rangkaian strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel 6.1.

**Tabel 6.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026**

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan diperlukan arah kebijakan untuk efektifitas dan efisiensi pencapaian pembangunan daerah. Oleh karena itu, rumusan tahapan - tahapan pembangunan sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Rangkaian arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel 6.2

Tabel 6.2.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026

6.3. Program Pembangunan Daerah

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas merumuskan 9 (sembilan) program prioritas yaitu :

1. Program **BENTUK IMAN** (Pembentukan insan madani).

Program **Bentuk Iman** (Pembentukan Insan Madani) merupakan program yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kerukunan antar umat beragama berdasarkan nilai agama, budaya dan norma sosial yang berlaku. Strategi yang dilakukan untuk pelaksanaan program ini antara lain:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti.
 - b. Peningkatan kepedulian dan kepekaan sosial dalam meningkatkan kerukunan umat beragama.
 - c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, kesadaran hukum, rasa kebangsaan dan nilai budaya daerah.
2. Program **Pengembangan OVOP** (One Village One Product) atau satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi.

Yaitu program satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi, yang bertujuan mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat serta memajukan ekonomi daerah melalui kebijakan meningkatkan pengembangan dan pemasaran produk barang atau jasa yang dihasilkan secara berkelanjutan.

Adapun strategi pengembangan *OVOP* antara lain ;

- a. Mengembangkan komoditas unggulan daerah.
- b. Pembinaan dan pendampingan intensif pada desa-desa yang memiliki kegiatan ekonomi sebagai salah satu Produk Unggulan Daerah.
- c. Penyediaan Infrastruktur dasar yang memadai.
- d. Keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh lintas pelaku usaha, Pemda, akademisi dan Masyarakat.
- e. Mendukung percepatan Desa Mandiri.
- f. Menata distribusi barang.
- g. Penataan kebudayaan daerah untuk menunjang ekonomi kreatif.

3. Program **RUSIMAH** (Pengurusan Ijin di Rumah).

Melalui penataan kelembagaan perizinan dan meningkatkan sarana prasarana pendukung perizinan dan investasi .

Program tersebut, diintegrasikan dengan kebijakan pusat melalui optimalisasi sistem OSS/*Online Single Submission Risk Based Approach* dan diimplementasikan dengan :

- a. Pelayanan perizinan keliling ke Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sambas (19 Kecamatan).
- b. Melaksanakan pendampingan/layanan berbantuan bagi pelaku usaha
- c. Peningkatan peran PATEN di Kecamatan dalam memberikan layanan pendampingan bagi pengusaha.
- d. Memberikan layanan informasi dan konsultasi secara online (melalui smartphone)

4. Program **TEMA SIPINDU** (Tingkat Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu).

Yaitu program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui simpan pinjam terpadu, yang bertujuan mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil, penguatan pembiayaan usaha bagi UMKM dan penyediaan infrastruktur pendukung.

Adapun strategi program tersebut antara lain:

- a. Pola pengembangan, pemberdayaan, pembinaan dan kolaborasi untuk mendorong percepatan pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro antara Pemerintah, Perguruan Tinggi, swasta, pelaku usaha dan media.
- b. Kolaborasi dan optimalisasi program antar Lembaga Penyalur KUR (Perbankkan), Lembaga Penyalur KUR (Non Perbankan), Lembaga Pelaksana Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas SDM non Pemerintah serta Instansi Pemerintah pengampu UMKM.
- c. Pemutakhiran data, kemitraan serta digitalisasi guna mendorong Usaha Mikro naik kelas.

5. Program ***PasminumMas*** (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat).

Adapun yang menjadi strategi program ini antara lain ;

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih.
- b. Fasilitasi peningkatan layanan air bersih dan air minum.

6. Program ***E-Government***

Program *E-Government* adalah program untuk mendorong peningkatan kualitas dan tata kelola Pemerintahan yang baik, melalui :

- a. Penggunaan teknologi informasi oleh Pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat;
- b. Penyediaan sistem aplikasi yang terintegrasi antar perangkat daerah termasuk untuk pengamanan sistem informasi;
- c. Penataan database kepegawaian yang terpadu serta pengembangan kompetensi ASN;
- d. Pendekatan pelayanan adminduk sampai ke tingkat Kecamatan;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan.

7. Program ***Pelayanan diktan*** (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)

Program **Pelayan Diktan** merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Bidang pendidikan
 1. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
 2. Meningkatkan karakter siswa,
 3. Menekan angka putus sekolah melalui beasiswa bagi siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah dan beasiswa untuk siswa berprestasi
 4. Meningkatkan infrastruktur dasar pendidikan.
- b. Bidang kesehatan
 1. Pengobatan gratis kelas 3 di seluruh Rumah Sakit di Kabupaten Sambas atau Prosesar (Program Sehat Satono-Rofi),

2. Peningkatan infrastruktur dasar kesehatan seperti ketersediaan tempat tidur di RS, pelayanan ambulance pasien maupun ambulance gawat darurat, kemudahan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan SDM Kesehatan
3. Peningkatan kesehatan ibu dan anak guna menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui persalinan wajib di fasilitas pelayanan kesehatan, majelis taklim ibu hamil, serta perbaikan gizi anak untuk penurunan *stunting* dengan replikasi Pos Gita (Pos Gizi Balita),
4. Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat.

8. Program **Pemuda Siap Kerja**

Program **Pemuda Siap Kerja** adalah program untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan dan perluasan kesempatan kerja. Penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui :

- a. Peningkatan jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi,
- b. Peningkatan mutu Balai Latihan Kerja (BLK).
- c. Penyebarluasan informasi peluang kesempatan kerja di setiap Kecamatan.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia.
- e. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pemuda putus sekolah. Sasaran dalam pelaksanaan program ini yaitu angkatan kerja (pencari kerja dan pekerja), pemuda putus sekolah, serta aparatur Kantor Camat dan aparatur Desa.

9. Program **Green Growth** (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan), melalui kebijakan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pelanggaran tata ruang, peningkatan teknologi produksi dan konservasi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup berbasis komoditas dengan strategi ;

- a. Melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
- b. Memastikan pelaksanaan pembangunan memiliki Izin Lingkungan.
- c. Pengendalian dalam pemanfaatan ruang.
- d. Penataan terhadap perizinan khususnya yang bersinggungan dengan lahan di Kabupaten Sambas.

Untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sambas menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan daerah disajikan pada tabel 6.3 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.3.
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai
Pagu Indikatif Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026

TABEL 6.1
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KABUPATEN SAMBAS

NO	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	STRATEGI
M1	<p>Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, bersatu, dan berwawasan kebangsaan.</p> <p>Meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya</p> <p>Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)</p>	<p>Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, bersatu, dan berwawasan kebangsaan.</p> <p>Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah</p> <p>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p> <p>Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>Peningkatan kesadaran hukum dan ketentraman serta keteriban masyarakat</p> <p>Peningkatan kerukunan hidup dan rasa wawasan kebangsaan kebangsaan.</p> <p>Peningkatan pembinaan keagamaan di segala sektor kehidupan bermasyarakat</p> <p>Peningkatan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya lokal</p> <p>Peningkatan koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah</p> <p>Peningkatan Implementasi Rencana Kelitbang dan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah</p> <p>Peningkatan komunikasi, informasi dan transparansi pemerintahan</p> <p>Peningkatan tata kelola kearsipan</p> <p>Peningkatan kualitas statistik daerah</p> <p>Peningkatan penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)</p> <p>Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Peningkatan dukungan terhadap peningkatan kinerja DPRD</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang adminduk</p> <p>Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</p> <p>Peningkatan persandian</p> <p>Peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap ASN</p> <p>Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah</p>

NO	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	STRATEGI
M1	Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
M2	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi	Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	Meningkatnya laju PDRB di setiap sektor	Peningkatan Rasio Kewirausahaan
				Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan dalam perekonomian daerah
				Peningkatan Persentase Koperasi Yang Berkualitas
				Peningkatan laju pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Administrasi Perusahaan dalam perekonomian daerah
				Peningkatan Kunjungan Wisata
				Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, perikanan dalam perekonomian daerah
				Peningkatan laju pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam perekonomian daerah
				Peningkatan ketersediaan pangan
				Peningkatan ketersediaan dan kelayakan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar dan Peningkatan jalan poros desa dalam kondisi mantap
				Peningkatan ketersediaan dermaga / steher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang
				Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni
				Peningkatan jaringan Irigasi dalam kondisi baik
				Peningkatan Rumah Tangga Pengguna Air Minum
				Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi Layak
				Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
				Peningkatan status perkembangan satuan pemukiman transmigrasi
M3	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing	Peningkatan perlindungan terhadap anak
				Peningkatan akses pendidikan masyarakat dan Peningkatan derajat dan mutu pendidikan masyarakat
				Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta peningkatan kualitas keluarga
				Peningkatan pembinaan pemuda

NO	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	STRATEGI
M3	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing	Peningkatan pembangunan literasi masyarakat Peningkatan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Peningkatan pembinaan olah raga
M4	Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap PMKS	Peningkatan perlindungan dan rehabilitasi sosial Peningkatan kesempatan kerja
M5	Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana	Tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana	Peningkatan kualitas lahan Peningkatan kualitas air Peningkatan kualitas udara Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan tata ruang Peningkatan kewaspadaan dini terhadap bencana dan perlindungan terhadap resiko bencana

TABEL 6.2
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KAB SAMBAS 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	OPD
M1	Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan			
1 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya	Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah	1 Peningkatan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya lokal	1 Meningkatkan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai budaya di masyarakat dalam pemajuan kebudayaan	DIKBUD
2 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, bersatu, dan berwawasan kebangsaan.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, bersatu, dan berwawasan kebangsaan.	Peningkatan pembinaan keagamaan di segala sektor kehidupan bermasyarakat 2 Peningkatan kesadaran hukum dan ketentraman serta keteriban masyarakat	1 Meningkatkan pembinaan penyuluhan agama, tokoh agama, guru ngaji, amil dan lebai, kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan, dan tempat-tempat ibadah serta meningkatkan kerukunan antar umat beragama 2 Meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum terpadu serta pembinaan kepada masyarakat dan kelompok keluarga sadar hukum	SETDA
3 Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	3 Peningkatan kerukunan hidup dan rasa wawasan kebangsaan kebangsaan.	1 Meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat 2 Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan kehidupan politik di masyarakat	KESBANG
		1 Peningkatan koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah 2 Peningkatan dukungan terhadap peningkatan kinerja DPRD 3 Peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap ASN	1 Meningkatkan koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah 1 Meningkatkan dukungan dan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRD 1 Meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap ASN	SETDA
		4 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	2 Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan 1 Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	SET DPRD
				BKPSDM
				BAPPEDA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	OPD
3 Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	4 Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 5 Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang adminduk	2 Meningkatkan efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang adminduk	BAPPEDA CAPIL
			2 Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan daerah	CAPIL
		6 Peningkatan penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	1 meningkatkan penerapan Aplikasi Informatika pada Pemerintah Daerah / e-Government	KOMINFO
		7 Peningkatan komunikasi, informasi dan transparansi pemerintahan	1 Meningkatkan komunikasi, informasi dan transparansi pemerintahan	KOMINFO
		8 Peningkatan kualitas statistik daerah	1 Meningkatkan kualitas statistik daerah	KOMINFO
		9 Peningkatan persandian	1 Meningkatkan persandian	KOMINFO
		10 Peningkatan tata kelola kearsipan	1 Meningkatkan tata kelola kearsipan dan pengelola arsip	ARPUSDA
		11 Peningkatan Implementasi Rencana Kelitbang dan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	1 Meningkatkan kemanfaatan hasil kelitbang dan fasilitasi penerapan inovasi bagi pembangunan daerah	BAPPEDA
		12 Peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan	1 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketenrraman ketertiban, dan pelayanan publik	KECAMATAN
	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan	1 Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah 2 Peningkatan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah 1 Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2 Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	BAKUDA INSPEKTORAT INSPEKTORAT

M2

Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi

1 Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	Meningkatnya laju PDRB di setiap sektor	1 Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan dalam perekonomian daerah 2 Peningkatan laju pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam perekonomian daerah 3 Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, perikanan dalam perekonomian daerah 4 Peningkatan Kunjungan Wisata 5 Peningkatan laju pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Administrasi Perusahaan dalam perekonomian daerah 6 Peningkatan Persentase Koperasi Yang Berkualitas 7 Peningkatan Rasio Kewirausahaan Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1 Meningkatkan Pembinaan dan pengembangan industri 1 Meningkatnya pertumbuhan nilai ekspor 2 Peningkatan pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas 3 Terjaganya stabilitas harga bahan kebutuhan pokok 1 Meningkatkan produktivitas mekanisasi pertanian dan pemanfaatan teknologi tepat guna 2 Meningkatkan produksi di bidang kelautan dan perikanan 3 Meningkatkan produksi di sektor peternakan 1 Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif 1 Meningkatkan kemudahan perizinan dan layanan investasi 2 Meningkatkan investasi, penanaman modal dan kelancaran izin usaha 1 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi 1 Meningkatkan persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha 2 Meningkatkan rasio wirausaha berskala mikro naik kelas 1 Meningkatkan ketersediaan pangan	KUMINDAG KUMINDAG KUMINDAG PERTANIAN DPPKH DPPKH DISPARPORA PTSP PTSP KUMINDAG KUMINDAG KUMINDAG KUMINDAG PERTANIAN
--	---	--	---	--

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	OPD
2 Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang mantap untuk mendorong perekonomian daerah	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah	<p>1 Peningkatan ketersediaan dan kelayakan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar dan Peningkatan jalan poros desa dalam kondisi mantap</p> <p>2 Meningkatkan penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya</p> <p>2 Peningkatan jaringan Irigasi dalam kondisi baik</p> <p>3 Peningkatan ketersediaan dermaga / steher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang</p> <p>4 Peningkatan Rumah Tangga Pengguna Air Minum</p> <p>5 Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi Layak</p> <p>6 Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni</p>	<p>1 Meningkatkan Jalan Kabupaten dan jalan poros desa dalam kondisi mantap</p> <p>2 Meningkatkan penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya</p> <p>1 Meningkatkan jaringan Irigasi dalam kondisi baik</p> <p>1 Meningkatkan konektivitas, keteriban dan keamanan di sektor perhubungan</p> <p>1 Meningkatkan Rumah Tangga Pengguna Air Minum yang Layak</p> <p>1 Meningkatkan Rumah Tangga Bersanitasi yang Layak</p> <p>1 Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni</p> <p>1 Meningkatkan komponen dimensi dan peubah satuan pemukiman</p>	PU PR PU PR PU PR DISHUB PERKIM LH PERKIM LH PERKIM LH NAKERTRANS DINSOS PMD
3 Meningkatnya status kemajuan desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa	<p>1 Peningkatan status perkembangan satuan pemukiman transmigrasi</p> <p>2 Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa</p>	<p>1 Meningkatkan penataan desa dan pemberdayaan masyarakat desa</p>	DINSOS PMD

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

M3

1 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia

Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing

1 Peningkatan akses pendidikan masyarakat dan Peningkatan derajat dan mutu pendidikan masyarakat

1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan

DIKBUD

2 Meningkatkan keterjangkauan dan kemudahan akses pendidikan

DIKBUD

2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

1 Meningkatkan kesehatan perorangan dan masyarakat

DINKES

2 Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan dan Sarpras Kesehatan

DINKES

3 Peningkatan pembangunan literasi masyarakat

1 Meningkatkan budaya literasi masyarakat

ARPUSDA

4 Peningkatan pembinaan pemuda

1 Meningkatkan prestasi dan daya saing pemuda

DISPARPORA

5 Peningkatan pembinaan olah raga

1 Meningkatkan pembinaan olah raga

DISPARPORA

6 Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta peningkatan kualitas keluarga

2 Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan

DP3AP2KB

3 Meningkatkan kualitas keluarga

DP3AP2KB

7 Peningkatan perlindungan terhadap anak

1 Meningkatkan perlindungan terhadap anak

DP3AP2KB

8 Peningkatan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera

1 Meningkatkan pengendalian penduduk

DP3AP2KB

Meningkatnya perlindungan sosial terhadap PMKS

1 Peningkatan perlindungan dan rehabilitasi sosial

1 Meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi sosial

DINSOS PMD

2 Meningkatkan pemberdayaan sosial

DINSOS PMD

M4

Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja

1 Meningkatnya kesempatan kerja

Tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan

1 Peningkatan kesempatan kerja

1 Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja

NAKERTRANS

2 Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja

NAKERTRANS

M5

Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

1 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

1 Peningkatan kualitas air

1 Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Penanganan Pengaduan Kualitas Air

PERKIM LH

2 Meningkatkan penanganan sampah perkotaan

PERKIM LH

2 Peningkatan kualitas udara

1 Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Penanganan Pengaduan Kualitas Udara

PERKIM LH

3 Peningkatan kualitas lahan

1 Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Raya Sambas

BAPPEDA

2 Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana

Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana

1 Peningkatan kewaspadaan dini terhadap bencana dan perlindungan terhadap resiko bencana

1 Meningkatkan sosialisasi kewaspadaan dini dan perlindungan terhadap bencana

BPBD

2 Meningkatkan sosialisasi kewaspadaan dini dan perlindungan terhadap kebakaran

BPBD

2 Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan tata ruang

1 Meningkatkan penataan ruang dalam pembangunan daerah

PU PR

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI RPJMD

ARAH KEBIJAKAN RPJMD

OPD

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
Misi 1	Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan													
<hr/>														
Tujuan	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, bersatu, dan berwawasan kebangsaan.	Indeks Kerukunan Sosial	79.77		82.44		84.44		86.44		88.55		88.55	
Sasaran	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, bersatu, dan berwawasan kebangsaan.	INDIKATOR SASARAN :												
	Tingkat kualitas hidup beragama		76		79		82		85		88		88	
Program														
** PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02		12,481,841,597.00		13,113,433,677.00		13,654,647,234.00		14,372,484,115.00		14,948,254,674.00		14,948,254,674.00	SETDA
	1 Cakupan Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	1 Cakupan pelayanan bidang hukum	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
	2 persentase PD dengan Penataan Administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
	INDIKATOR SASARAN :													
	Tingkat Kesadaran Hukum dan Trantib		68.33		73.33		76.33		79.33		82.67		82.67	
Program														
** PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02		5,172,547,947.00		5,696,314,415.00		5,993,576,286.00		6,300,648,239.00		6,632,192,776.00		6,632,192,776.00	SATPOL PP
	1 Persentase Gangguan Ketenteraman dan	75%		80%		82%		83%		85%		85%		

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan														
2	Percentase Penegakan PERDA/PERKADA		60%		65%		67%		70%		73%		73%	
3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		70%		75%		80%		85%		90%		90%	
** PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02-C		536,749,632.00		591,837,114.00		621,428,969.00		658,714,707.00		691,650,442.00		691,650,442.00	SETDA
INDIKATOR SASARAN :														
Tingkat Kerukunan Hidup dan Wasbang														
Program														
** PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02		150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00	KESBANGPOL
1	Percentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu separatisme di daerah	95%	95%		95%		95%		95%		95%		95%	
** PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	KESBANGPOL
1	Percentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
** PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	KESBANGPOL
1	Percentase Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	60%	70%		75%		80%		85%		90%		90%	
** PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05		1,504,972,452.00		1,524,716,604.00		1,658,263,838.00		1,768,114,498.00		1,898,114,468.00		1,898,114,468.00	KESBANGPOL
1	Percentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat	85%	85%		85%		85%		85%		85%		85%	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
** PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06		160,000,000.00		170,000,000.00		190,000,000.00		200,000,000.00		220,000,000.00		220,000,000.00	KESBANGPOL
	1 Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
INDIKATOR SASARAN :														
	Tingkat keterbukaan informasi publik	90		95		100		100		100		100		
Program														
** PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02		655,440,256.30		685,028,314.03		710,867,792.98		746,018,734.66		774,760,207.52		774,760,207.52	KOMINFO
	1 Persentase pelayanan informasi publik dan penyelenggaraan desiminasi informasi yang telah dilakukan Pemda untuk masyarakat Kab. Sambas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
INDIKATOR SASARAN :														
	Cakupan data statistik OPD	100		100		100		100		100		100		
Program														
** PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02		176,575,283.26		182,849,377.43		188,328,592.25		195,782,285.90		201,876,863.28		201,876,863.28	KOMINFO
	1 Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
INDIKATOR SASARAN :														
	Tingkat keamanan cyber daerah	36		40		43		46		50		50		
Program														
** PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02		32,923,392.02		35,062,287.76		36,930,201.90		39,471,233.83		41,548,930.66		41,548,930.66	KOMINFO
	1 Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
INDIKATOR SASARAN :														
	Tingkat Pengelolaan Arsip	55		61		65		68		72		72		

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab	
			Target	Rp.	Target										
** PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02			1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,050,000,000.00		1,090,000,000.00		1,180,000,000.00		1,180,000,000.00	PERPUS ARDA
	1 Persentase OPD yang mengelola Arsip secara baku	55%		56%		68%		79%		90%		100%		100%	
	2 Tingkat ketersediaan arsip			30		40		50		60		70		70	
** PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2.24.03			445,000,000.00		465,000,000.00		495,000,000.00		695,000,000.00		800,000,000.00		800,000,000.00	PERPUS ARDA
	1 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban			30		40		60		70		80		80	
** PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	2.24.04			35,000,000.00		45,000,000.00		55,000,000.00		75,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00	PERPUS ARDA
	1 Persentase permintaan penggunaan arsip yang dapat dipenuhi.			90		95		95		95		95		95	
	INDIKATOR SASARAN :														
	Tingkat dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD			92		94		96		98		98		98	
Program															
** PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	4.02.01			30,061,089,897.00		31,797,117,838.00		33,313,204,416.00		35,375,624,902.00		37,061,980,941.00		37,061,980,941.00	SET DPRD
	1 Cakupan pelayanan administrasi umum SKPD (akuntabel dan tepat waktu)			100		100		100		100		100		100	
** PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02			14,863,666,196.00		15,722,042,918.00		16,471,669,925.00		17,491,431,010.00		18,325,247,526.00		18,325,247,526.00	SET DPRD
	1 Persentase Raperda yang disetujui menjadi Perda			80		85		90		95		95		95	
	2 Persentase peningkatan kapasitas DPRD			90		92		94		96		98		98	
	3 Pesentase aspirasi masyarakat yang terakomodir menjadi pokok-pokok pikiran			92		93		95		97		98		98	
	4 Persentase Fasilitasi Pembahasan dan Pengawasan Anggaran			100		100		100		100		100		100	
	INDIKATOR SASARAN :														
	Indeks Penerapan Sistem Merit			(I) skor 225		(II) skor 250		(II) skor 275		(II) skor 300		(II) skor 300		(II) skor 300	

Program

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
** PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02		5,703,898,462.00		5,748,788,308.00		5,977,417,139.00		6,308,767,561.00		6,592,423,932.00		6,592,423,932.00	BKPSDM
	1 Persentase ASN yang terukur secara kualifikasi, kompetensi,kinerja dan disiplin		82%		84%		86%		88%		90%		90%	
	2 Persentase keterisian Pengukuran Komponen Indeks NSPK		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
** PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02		994,400,000.00		1,249,711,888.00		1,283,251,547.00		1,308,544,124.00		1,316,500,000.00		1,316,500,000.00	BKPSDM
	1 Rata-Rata capaian pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan fungsional		46%		51%		56%		61%		66%		66%	
	INDIKATOR SASARAN :													
	(1) Persentase Implementasi Rencana Kelitbangda (2) Indeks Inovasi Daerah (IIDa)		(1) 100 (2) Sangat Inovatif		(1) 100 (2) Sangat Inovatif		(1) 100 (2) Sangat Inovatif		(1) 100 (2) Sangat Inovatif		(1) 100 (2) Sangat Inovatif		(1) 100 (2) Sangat Inovatif	
Program														
** PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02		1,300,000,000.00		1,470,000,000.00		1,886,468,838.00		2,020,000,000.00		1,975,000,000.00		1,975,000,000.00	BAPPEDA
	1 Persentase capaian realisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	INDIKATOR SASARAN :													
	Tingkat efektivitas koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah		100		100		100		100		100		100	
Program														
** PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	4.01.01		30,837,864,667.00		32,443,112,076.00		33,875,517,411.00		35,858,873,241.00		37,481,734,621.00		37,481,734,621.00	SETDA
	1 Persentase OPD Dengan Nilai SAKIP B		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	2 Persentase PD yang melakukan peningkatan kinerja melalui Reformasi Birokrasi		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	3 Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	4 Persentase OPD yang menyediakan Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		0%		100%		100%		100%		100%		100%	
	5 Indeks Kepuasan Masyarakat		0%		80%		87%		88%		88.5%		89%	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab	
			Target	Rp.											
** PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03			2,473,000,000.00		2,626,649,999.00		2,757,982,498.95		2,923,961,449.00		3,066,659,519.00		3,066,659,519.00	SETDA
	1 Cakupan Pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang transparan dan akuntabel	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	2 Cakupan Implementasi Kebijakan Perekonomian dan SDA	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	3 Cakupan Implementasi pembangunan daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
** PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	5.06.02			135,599,036.00		142,378,987.00		149,497,936.00		158,467,813.00		166,391,202.00		166,391,202.00	SETDA
	1 Cakupan Implementasi kebijakan pengelolaan perbatasan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	INDIKATOR SASARAN :														
	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Adminduk			84.20		84.40		84.60		84.80		85.00		85.00	
Program															
** PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02			2,845,991,473.00		2,926,676,820.00		3,228,136,112.00		3,502,192,868.00		3,726,277,758.00		3,726,277,758.00	CAPIL
	1 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	2 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	13,86%		56,00%		58,00%		60,00%		62,00%		68,00%		68,00%	
	3 Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	96,78%		99,3%		99,4%		99,5%		99,6%		99,7%		99,7%	
** PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03			508,560,000.00		558,560,000.00		558,560,000.00		558,560,000.00		558,560,000.00		558,560,000.00	CAPIL
	1 Persentase Bayi Berakta Kelahiran	80,49%		86,00%		87,00%		88,00%		90,00%		92,00%		92,00%	
	2 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun	92,91%		95,00%		96,00%		97,00%		98,00%		99,00%		99,00%	
	3 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	43,61%		50,00%		52,00%		54,00%		56,00%		58,00%		58,00%	
	4 Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	24,40%		18,50%		20,00%		21,00%		22,00%		23,00%		23,00%	
	5 Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	59,55%		13,00%		15,00%		17,00%		19,00%		20,00%		20,00%	
	6 Persentase Kepemilikan Akta Kematian	8,33%		12,00%		13,00%		14,00%		15,00%		16,00%		16,00%	
** PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04			560,000,000.00		640,000,000.00		640,000,000.00		640,000,000.00		640,000,000.00		640,000,000.00	CAPIL

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target									
	1 Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	99,90%		99,90%		99,90%		99,90%		99,90%		99,90%	
	2 Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah		17,50%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
	3 Persentase Inovasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
	4 Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
	5 Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
** PROGRAM PENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN	2.12.05		80,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	CAPIL
	1 Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	99,90%	99,90%		99,90%		99,90%		99,90%		99,90%		99,90%	
	INDIKATOR SASARAN :													
	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan		80.5-84.5 (B)		84.6-88.30 (B)		88.31-90.00 (A)		90.01-92.00 (A)		92.01-94.00 (A)		92.01-94.00 (A)	
<u>Program</u>														
** PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01		1,421,606,503.01		1,492,686,828.16		1,567,321,169.57		1,645,687,228.05		1,727,971,589.45		1,727,971,589.45	KANTOR CAMAT
** PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02		239,136,660.00		251,093,493.00		263,648,167.65		276,830,576.03		290,672,104.83		290,672,104.83	KANTOR CAMAT
	1 Persentase pelayanan yang terselesaikan di tingkat kecamatan		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
** PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03		111,177,742.73		116,736,629.86		122,573,461.35		128,702,134.42		135,137,241.14		135,137,241.14	KANTOR CAMAT
	1 Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	2 Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina		100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target									
** PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05		35,169,750.00		36,928,237.50		38,774,649.38		40,713,381.84		42,749,050.94		42,749,050.94	KANTOR CAMAT
	1 Peningkatan jumlah kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan		8-10 kali		10-12 kali		12-14 kali		14-16 kali		16-18 kali		16-18 kali	
** PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06		127,460,025.00		133,833,026.25		140,524,677.56		147,550,911.44		154,928,457.01		154,928,457.01	KANTOR CAMAT
	1 Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi dengan baik		70%		75%		80%		85%		90%		90%	
	INDIKATOR SASARAN :													
	Tingkat Pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)			65		70		75		80		85		85
Program														
** PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03		1,039,281,741.48		1,106,799,550.32		1,165,763,373.73		1,245,975,281.26		1,311,561,244.62		1,311,561,244.62	KOMINFO
	1 Cakupan Layanan Telekomunikasi	75%	75%		80%		85%		90%		95%		95%	
	INDIKATOR SASARAN :													
	SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja			21.24		22.19		23.14		24.09		25.04		25.04
Program														
** PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03		1,178,800,000.00		1,408,500,000.00		1,455,000,000.00		1,515,000,000.00		1,580,000,000.00		1,580,000,000.00	BAPPEDA
	1 Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dan program RKPD kedalam APBD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	INDIKATOR SASARAN :													
	SAKIP Komponen Capaian Kinerja			11,46		11,76		12,06		12,36		12,66		12,66
Program														
** PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02		950,000,000.00		949,000,000.00		991,000,000.00		1,050,000,000.00		1,185,000,000.00		1,185,000,000.00	BAPPEDA
	1 Persentase kesesuaian pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunna daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
Tujuan														
Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				WTP									
Sasaran														
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan														
INDIKATOR SASARAN :														
Tingkat Sistem Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah														
Program														
** PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02		309,504,492,802.00		327,981,235,342.00		343,223,826,042.00		364,845,819,713.00		382,079,021,489.00		382,079,021,489.00	BAKUDA
	1	Persentase dokumen perencanaan anggaran, laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan perundangan	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
** PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03		1,476,623,374.00		1,561,898,372.00		1,636,369,686.00		1,737,677,334.00		1,820,512,411.00		1,820,512,411.00	BAKUDA
	2	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
** PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04		1,709,411,109.00		1,778,234,023.00		1,894,341,219.00		2,011,619,882.00		2,107,513,803.00		2,107,513,803.00	BAKUDA
	3	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan Asli daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
INDIKATOR SASARAN :														
Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi														
Program														
** PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02		1,941,478,374.00		2,133,598,750.00		2,271,514,338.00		2,424,714,591.00		2,533,626,936.00		2,533,626,936.00	INSPEKTORAT
	1	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2,5		Level 2,6		Level 2,7		Level 2,8		Level 2,9		Level 3,0	
	2	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah Di	2,6		2,7		2,8		2,9		3,0		3,1	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target									
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas														
3	Percentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal BB	23%	34%		68%		68%		100%		100%		100%	
4	Percentase Perangkat Daerah dengan nilai pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah minimal BB.	23%	36%		68%		68%		100%		100%		100%	
5	Percentase Tindak Lanjut Temuan	85%	85%		85%		85%		85%		85%		85%	
** PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03		485,369,593.00		533,399,687.00		567,878,585.00		606,178,648.00		633,406,734.00		633,406,734.00	INSPEKTORAT
1 Tingkat Kapabilitas APIP														
2	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas	2,6	2,7		2,8		2,9		3,0		3,1		3,1	
3	Percentase Perangkat Daerah yang telah menyusun manajemen risiko	23%	32%		68%		100%		100%		100%		100%	
4	Percentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengendalian korupsi	0%	25%		68%		100%		100%		100%		100%	
5	Percentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal BB	23%	34%		68%		68%		100%		100%		100%	
6	Percentase Perangkat Daerah dengan nilai pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah minimal BB	23%	36%		68%		68%		100%		100%		100%	
Tujuan														
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya	Tingkat Pemajuan Budaya		20.35		23.45		25.80		27.92		30.50		30.50	
Sasaran														
Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah														
INDIKATOR SASARAN :														
Cakupan Pemajuan Pengeleloaan Seni Budaya, Sejarah dan Museum Daerah														
Program														
** PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04		216,000,000.00		237,000,000.00		245,000,000.00		260,000,000.00		275,000,000.00		275,000,000.00	DIKBUD
1 Percentase pengembangan objek pemajuan kebudayaan														

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab	
			Target	Rp.	Target										
1			60%		70%		80%		80%		90%		90%		
** PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03			653,237,044.00		784,021,315.00		821,659,336.00		872,475,730.00		914,026,196.00		914,026,196.00	DIKBUD
1	Persentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang tersertifikasi		40.00		40.00		50		57.14		62.50		62.50		
** PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05			622,491,632.00		659,924,042.00		691,604,603.00		734,377,624.00		769,351,357.00		769,351,357.00	DIKBUD
1	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		45.25		48.75		52.00		55.60		60.75		60.75		
2	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan		2 buah		4 buah		6 buah		8 buah		10 buah		10 buah		
3	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi		52 buah		54 buah		57 buah		60 buah		63 buah		63 buah		
** PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06			711,508,246.00		754,293,510.00		790,504,407.00		839,393,992.00		879,368,986.00		879,368,986.00	DIKBUD
1	Jumlah kunjungan museum		1360		1545		1710		1885		2060		2060		

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Misi 2	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi													
Tujuan														
Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		3.35	3.62	4.05	4.68	5.03	5.03					
Sasaran														
Meningkatnya laju PDRB di setiap sektor		INDIKATOR SASARAN :												
		Percentase Koperasi Yang Berkualitas		25.48	27.71	29.62	31.25	32.80	32.80					
Program														
** PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPANPINJAM	2.17.02		90,000,000.00	100,000,000.00	110,000,000.00	120,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00						PERINDAGKOP
	1	Percentase pelayanan izin KSP/USP	18,18%	15,90%	15,90%	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%				
** PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03		80,000,000.00	160,000,000.00	167,000,000.00	185,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00						PERINDAGKOP
	1	Percentase pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	4,37%	4,98%	5,56%	6,11%	6,64%	7,14%	7,14%					
** PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.04		85,000,000.00	130,000,000.00	140,000,000.00	150,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00						PERINDAGKOP
	1	Percentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	30,76%	30,76%	30,76%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%					
** PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05		390,304,000.00	260,000,000.00	295,000,000.00	400,000,000.00	462,000,000.00	462,000,000.00						PERINDAGKOP
	1	Percentase Koperasi yang berikan pendidikan dan pelatihan	11,65%	23,22%	35,41%	48,19%	61,50%	74,45%	74,45%					
** PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06		130,000,000.00	150,000,000.00	160,000,000.00	170,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00						PERINDAGKOP
	1	Percentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	7,76%	9,95%	13,89%	17,64%	21,68%	25,75%	25,75%					

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
INDIKATOR SASARAN :														
	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Jasa Perusahaan (%)		1.50		1.89		2.47		2.55		3.43		3.43	
<u>Program</u>														
** PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02		416,081,000.00		457,689,100.00		499,297,200.00		540,905,300.00		582,513,400.00		582,513,400.00	PTSP
	1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) Di Kabupaten Sambas	56	82		88		95		103		111		111	
** PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03		117,965,900.00		129,762,500.00		141,559,000.00		153,355,600.00		165,152,200.00		165,152,200.00	PTSP
	1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Per Tahun	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
** PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04		710,239,000.00		781,262,900.00		852,286,800.00		923,310,700.00		994,334,600.00		994,334,600.00	PTSP
	1 Standar Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
** PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05		381,383,000.00		419,521,300.00		457,659,600.00		495,797,900.00		533,936,200.00		533,936,200.00	PTSP
	1 Nilai Investasi di Kabupaten Sambas	PMA = 6.932.11 2.880.00 0,00 PMDN = 7.877.559.498.53 = 1,00 5.625.82 0.000.00 0,00 Total = 12.557.9 32.880.00	PMA = 7.701.186.888.98 4,00 3,00 PMDN = 8.665.315.448.38 4,00 Total = 15.578.746.387.5 16,00	PMA = 8.471.305.577.88 3,00 PMDN = 9.531.846993.22 4,00 Total = 17.136.621.026.2 67,00	PMA = 9.318.436.135.67 1,00 PMDN = 10.485.031.692.5 3,00 Total = 18.850.283.128.8 94,00	PMA = 10.250.279.749.2 38,00 PMDN = 11.533.534.861.8 45,00 Total = 20.735.311.441.7 84,00	PMA = 11.275.307.724.1 62,00 PMDN = 11.533.534.861.8 00,00 Total = 22.808.842.585.9 62,00	PMA = 11.275.307.724.1 62,00 PMDN = 11.533.534.861.8 00,00 Total = 22.808.842.585.9 62,00	PMA = 11.275.307.724.1 62,00 PMDN = 11.533.534.861.8 00,00 Total = 22.808.842.585.9 62,00					
** PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.18.06		135,000,000.00		148,500,000.00		162,000,000.00		175,500,000.00		189,000,000.00		189,000,000.00	PTSP
	1 Cakupan data dan informasi penanaman modal	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
INDIKATOR SASARAN :														
	Percentase peningkatan kunjungan wisata		4.33		6.22		7.81		9.06		9.97		9.97	
Program														
** PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02		2,952,000,000.00		3,128,500,000.00		3,206,000,000.00		3,376,000,000.00		3,421,000,000.00		3,421,000,000.00	DISPARPORA
	1 Cakupan pengembangan daya tarik, kawasan dan destinasi wisata		11,36%		12,88%		14,39%		24,24%		25,76%		25,76%	
** PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03		210,000,000.00		700,000,000.00		685,000,000.00		860,000,000.00		860,000,000.00		860,000,000.00	DISPARPORA
	1 Lingkup pemasaran pariwisata daerah	60%	60%		80%		80%		80%		100%		100%	
** PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04		130,000,000.00		305,000,000.00		345,000,000.00		280,000,000.00		280,000,000.00		280,000,000.00	DISPARPORA
	1 Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		5,88%		11,76%		17,65%		23,53%		29,41%		29,41%	
** PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05		345,000,000.00		782,260,000.00		842,260,000.00		847,260,000.00		941,260,000.00		941,260,000.00	DISPARPORA
	1 Cakupan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata		0,77%		1,54%		2,31%		3,08%		3,85%		3,85%	
	2 Cakupan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		1,95%		3,91%		5,86%		7,81%		9,77%		9,77%	
INDIKATOR SASARAN :														
	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dan Perikanan		3.90		4.18		4.60		5.52		5.90		5.90	
Program														
** PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03		3,210,000,000.00		2,892,581,250.23		3,042,664,324.04		3,263,632,822.12		3,436,133,048.73		3,436,133,048.73	P2 KESWAN
	1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	22.140 Ton	21.900 Ton		21.965 Ton		22.030 Ton		22.095 Ton		22.160 Ton		22.160 Ton	
** PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04		2,297,500,000.00		2,427,870,625.12		2,541,724,296.41		2,696,606,047.41		2,823,246,457.73		2,823,246,457.73	P2 KESWAN
	1 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.426 Ton	1.930 Ton		2.135 Ton		2.340 Ton		2.545 Ton		2.750 Ton		2.750 Ton	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab	
			Target	Rp.	Target										
** PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05			1,020,000,000.00		1,084,680,000.03		1,141,165,542.40		1,218,006,101.01		1,280,835,452.25		1,280,835,452.25	P2 KESWAN
	1 Jumlah POKMASWAS yang Dibina		3 POKMASWAS / Tahun		3 POKMASWAS / Tahun		3 POKMASWAS / Tahun		3 POKMASWAS / Tahun		3 POKMASWAS / Tahun		3 POKMASWAS / Tahun		
** PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06			45,000,000.00		546,929,999.96		557,982,022.38		556,214,939.35		562,946,655.54		562,946,655.54	P2 KESWAN
	1 Jumlah Produksi Pengolahan		167 Ton		183 Ton		205 Ton		219 Ton		228 Ton		228 Ton		
** PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02			1,434,926,980.00		1,530,647,605.07		1,614,241,164.40		1,727,958,330.41		1,820,940,158.91		1,820,940,158.91	P2 KESWAN
	1 Jumlah Populasi Ternak (Ekor)		3590790		3633879		3677486		3732648		3788638		3788638		
** PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03			1,302,573,020.00		1,366,098,020.08		1,421,574,892.01		1,497,043,297.83		1,558,750,695.18		1,558,750,695.18	P2 KESWAN
	1 Rasio Pengembangan Prasarana Peternakan		20%		20%		20%		20%		20%		20%		
** PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04			659,752,559.00		699,008,269.30		733,290,584.28		779,926,803.37		818,059,314.13		818,059,314.13	P2 KESWAN
	1 Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)		60%		60%		60%		60%		60%		60%		
** PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06			40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00	P2 KESWAN
	1 Persentase Penerbitan Izin Usaha Peternakan (Nomor Induk Berusaha / NIB)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
** PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02			8,923,000,000.00		9,080,000,000.00		9,320,000,000.00		9,438,000,000.00		9,548,000,000.00		9,548,000,000.00	PERTANIAN
	1 Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Pangan (Padi)	1.80%	2.00%		2.2%		2.4%		2.6%		3%		3%		
	2 Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Hortikultura (Jeruk)	4%	4%		4%		4%		4%		4		4		
	3 Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Perkebunan (Karet)	2.00%	3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		
** PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03			12,070,000,000.00		12,565,000,000.00		13,200,000,000.00		14,430,000,000.00		15,049,000,000.00		15,049,000,000.00	PERTANIAN
	1 Persentase Luas Lahan Sawah ditanami 2	69.84	71.9		73.04		74.16		75.33		76.53		76.53		

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
kali															
** PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05			620,000,000.00		720,000,000.00		750,000,000.00		775,000,000.00		845,000,000.00		845,000,000.00	PERTANIAN
	1	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	1.28	1.66	2.93		4.24		5.58		6.92		6.92		
** PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06			350,000,000.00		390,000,000.00		390,000,000.00		400,000,000.00		440,000,000.00		440,000,000.00	PERTANIAN
	1	Persentase Penerbitan Izin Usaha Peternakan (Nomor Induk Berusaha/NIB)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	1	Persentase Peningkatan Pertimbangan Teknis untuk Usaha Pertanian yang diterbitkan	2	2.8	4.1		5.6		7		8.5		8.5		
** PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07			2,440,000,000.00		2,913,000,000.00		3,095,000,000.00		3,220,000,000.00		3,585,000,000.00		3,585,000,000.00	PERTANIAN
	1	Jumlah kelembagaan ekonomi petani (KEP) yang tumbuh dan berkembang	1 Unit Tumbuh dan 1 Pengembangan	2 Unit Tumbuh dan 1 Pengembangan	2 Unit Tumbuh dan 1 Pengembangan										
INDIKATOR SASARAN :															
		Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		2.66		3.17		3.75		4.03		4.11		4.11	
Program															
** PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02			202,500,000.00		208,000,000.00		210,000,000.00		214,850,000.00		230,000,000.00		230,000,000.00	PERINDAGKOP
	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	45,64%	54,20%	62,25%		70,05%		72,22%		84,00%		84,00%		
** PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03			2,856,395,128.00		1,804,158,000.00		1,924,000,000.00		2,038,000,000.00		2,165,292,438.00		2,165,292,438.00	PERINDAGKOP
	1	Persentase pengembangan dan pengeloaan sarana distribusi perdagangan	48,18%	96,55%	47,41%		48,28%		49,14%		49,15%		49,15%		
** PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04			492,000,000.00		680,000,000.00		713,500,000.00		769,000,000.00		787,350,000.00		787,350,000.00	PERINDAGKOP
	1	Persentase Koefesien variasi harga antar waktu Perkomoditas bahan pokok (a. Beras; b. Tepung Terigu; C. Telur; d.	<9%	<9%	<9%		<9%		<9%		<9%		<9%		

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
Daging Ayam; e. Gula Pasir; f. Minyak Goreng)														
** PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05			330,000,000.00		400,000,000.00		418,690,000.00		435,580,000.00		462,500,000.00		462,500,000.00 PERINDAGKOP
	1 Jumlah nilai ekspor non migas per tahun	Rp 9.374.47 7.531		Rp 10.311.925.284		Rp 11.343.117.813		Rp 12.477.429.594		Rp 13.725.172.553		Rp 15.09.7689.808		Rp 15.09.7689.808
** PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06			224,750,000.00		338,406,106.00		346,870,000.00		360,000,000.00		385,000,000.00		385,000,000.00 PERINDAGKOP
	1 Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	64,13%		66,24%		68,33%		70,41%		72,47%		74,52%		74,52%
** PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07			161,000,000.00		195,000,000.00		203,500,000.00		207,000,000.00		220,000,000.00		220,000,000.00 PERINDAGKOP
	1 Persentase peningkatan penggunaan Produk Lokal Kabupaten Sambas	5% dari 65 % dari keseluruhan didapat 7%		5% dari 65 % dari keseluruhan didapat 7%		5% dari 65 % dari keseluruhan didapat 7%		5% dari 65 % dari keseluruhan didapat 7%		5% dari 65 % dari keseluruhan didapat 7%		5% dari 65 % dari keseluruhan didapat 7%		5% dari 65 % dari keseluruhan didapat 7%
INDIKATOR SASARAN :														
	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan		2.00		2.36		2.42		3.16		3.55		3.55	
Program														
** PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02			2,940,000,000.00		3,783,022,312.00		3,876,801,772.00		4,020,561,459.00		4,092,000,000.00		4,092,000,000.00 PERINDAGKOP
	1 persentase Pembinaan IKM	13,56%		14,69%		15,74%		16,64%		17,30%		17,69%		17,69%
** PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03			50,000,000.00		80,000,000.00		90,000,000.00		93,000,000.00		95,000,000.00		95,000,000.00 PERINDAGKOP
	1 Persentase Pembinaan Perizinan Kegiatan Usaha Industri Kewenangan Kabupaten	11,82%		18,83%		22,85%		24,67%		25,00%		24,51%		24,51%
** PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04			50,000,000.00		60,000,000.00		80,000,000.00		90,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00 PERINDAGKOP
	1 Persentase perusahaan industri yang menyampaikan data ke SII Nas	3,07%		5,23%		8,79%		10,89%		11,94%		12,25%		12,25%

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
INDIKATOR SASARAN :														
	Rasio Kewirausahaan		2.997		2.999		3.002		3.004		3.006		3.006	
Program														
** PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07		195,000,000.00		245,000,000.00		270,000,000.00		300,000,000.00		341,000,000.00		341,000,000.00	PERINDAGKOP
	1 Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	7,40%	8,68%		10,20%		12,02%		14,06%		16,01%		16,01%	
** PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08		80,000,000.00		285,200,000.00		300,000,000.00		350,000,000.00		380,000,000.00		380,000,000.00	PERINDAGKOP
	1 rasio wirausaha berskala mikro naik kelas	0,38%	0,47%		0,66%		0,77%		0,84%		0,91		0,91	
Tujuan														
Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	Indeks Ketahanan Pangan		55.17		56.79		57.69		59.04		60.91		60.91	
Sasaran														
Meningkatnya ketahanan pangan daerah														
INDIKATOR SASARAN :														
	Indeks Ketahanan Pangan		55.17		56.79		57.69		59.04		60.91		60.91	
Program														
** PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KMANDIRIAN PANGAN	2.09.02		1,250,000,000.00		1,370,000,000.00		1,370,000,000.00		1,615,000,000.00		1,840,000,000.00		1,840,000,000.00	PERTANIAN
	1 Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten	78.72	78.75		79		80		80		80		80	
** PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03		593,000,000.00		702,000,000.00		916,000,000.00		969,000,000.00		1,020,000,000.00		1,020,000,000.00	PERTANIAN
	1 Jumlah Ketersediaan Energi	2.975 Kkal/Kap /Hr	3.054 Kkal/Kap/Hr	3.085 Kkal/Kap/Hr	3131 Kkal/Kap/Hr		3.178 Kkal/Kap/Hr		3.226 Kkal/Kap/Hr		3.226 Kkal/Kap/Hr			
	2 Jumlah Ketersediaan Protein	77,3 Gr.Prot/ Kap/Hr	78,7 Gr.Prot/Kap/Hr	79,2 Gr.Prot/Kap/Hr	79,6 Gr.Prot/Kap/Hr		80,1 Gr.Prot/Kap/Hr		80,5 Gr.Prot/Kap/Hr		80,5 Gr.Prot/Kap/Hr			
	4 Penguanan Cadangan pangan Kabupaten	43.90%	40%	40%	40%		40%		40%		40%		40%	
	5 Konsumsi Energi Penduduk	1.838 Kkal/Kap /Hr	1.857 Kkal/Kap/Hr	1.896 Kkal/Kap/Hr	1.917 Kkal/Kap/Hr		1.938 Kkal/Kap/Hr		1.958 Kkal/Kap/Hr		1.958 Kkal/Kap/Hr			

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
6 Konsumsi Protein Penduduk	55,6 Gr.Prot/Kap/Hr	56,1 Gr.Prot/Kap/Hr	56,3 Gr.Prot/Kap/Hr	56,5 Gr.Prot/Kap/Hr	56,7 Gr.Prot/Kap/Hr	57,0 Gr.Prot/Kap/Hr	57,0 Gr.Prot/Kap/Hr							
7 Konsumsi Beras Penduduk	93,5 Kg/Kap/Thn	93,4 Kg/Kap/Thn	93,3 Kg/Kap/Thn	93,1 Kg/Kap/Thn	93,20 Kg/Kap/Thn	92,9 Kg/Kap/Thn	92,9 Kg/Kap/Thn							
** PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04	110,000,000.00	110,000,000.00	130,000,000.00	135,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00						PERTANIAN	
1 Tingkat Kerawanan Pangan	16.96	16	15	14	13	12	12							
** PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05	120,000,000.00	155,000,000.00	170,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00						PERTANIAN	
1 Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	78.80	80	82	84	88	90	90							

Tujuan

Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang mantap untuk mendorong perekonomian daerah

Persentase Infrastruktur dalam kondisi mantap

69.25 71.08 72.70 74.41 76.27 76.27

Sasaran

Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah

INDIKATOR SASARAN :

- (1)Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap
- (2)Persentase Jalan Poros Desa dalam kondisi mantap

(1)68.62 (2)61.60 (1)71.76 (2)63.10 (1)73.70 (2)64.60 (1)76.24 (2)66.10 (1)78.78 (2)68.50 (1)78.78 (2)68.50

Program

** PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08	5,148,026,733.00	10,414,880,616.00	10,949,320,709.00	12,353,644,905.00	13,173,644,905.00	13,173,644,905.00	PU PR
1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	204 Rekomendasi Teknis	220 Rekomendasi Teknis	242 Rekomendasi Teknis	260 Rekomendasi Teknis	270 Rekomendasi Teknis	270 Rekomendasi Teknis	270 Rekomendasi Teknis	
2 Persentase Penanganan Gedung Pemerintahan	11/99	10/99	10/99	11/99	11/99	12/99	12/99	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target									
** PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09		4,673,921,249.00		4,673,921,249.00		4,893,921,249.00		5,073,921,249.00		5,996,677,864.00		5,996,677,864.00	PU PR
	1 Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	14/99	10/99		10/99		10/99		10/99		10/99		10/99	
** PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10		111,507,182,200.00		113,807,182,200.00		118,991,134,021.00		125,621,102,516.00		128,822,920,377.00		128,822,920,377.00	PU PR
	1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	0.6608	0.6584		0.6833		0.7010		0.7223		0.7471		0.7471	
	2 Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk	0.00170 8439	0.001668072		0.001628658		0.001590176		0.001552603		0.001515918		0.001515918	
** PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11		150,000,000.00		500,000,000.00		700,000,000.00		1,000,000,000.00		1,250,000,000.00		1,250,000,000.00	PU PR
	1 Persentase tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat	-	15		30		40		50		60		60	
	INDIKATOR SASARAN :													
	Rasio tersedianya dermaga / steher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang		63.56		65.65		67.66		69.62		71.51		71.51	
<u>Program</u>														
** PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02		31,546,613,234.00		33,789,917,898.00		35,674,631,730.00		38,397,983,057.00		40,517,661,271.00		40,517,661,271.00	DISHUB
	1 Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		3 paket		3 paket		3 paket		3 paket		3 paket		3 paket	
	2 Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		14 kegiatan		14 kegiatan		14 kegiatan		14 kegiatan		14 kegiatan		14 kegiatan	
	3 Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	
	4 Julmlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit	
	5 Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			7 dokumen		7 dokumen								
	6 Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3 unit		3 unit								
	7 Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			1 Tahun		1 Tahun								

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
8 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun				
** PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03			10,150,000,000.00		10,454,500,000.00		10,768,135,000.00		11,091,179,050.00		11,423,914,422.00		11,423,914,422.00	DISHUB	
	1 Jumlah Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		DISHUB		
** PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04			100,000,000.00		110,000,000.00		121,000,000.00		133,100,000.00		146,410,000.00		146,410,000.00	DISHUB	
	INDIKATOR SASARAN :															
				Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni		80.29		80.34		80.40		80.45		80.50	80.50	
<u>Program</u>																
** PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06			9,047,612,643.00		9,332,412,643.00		9,617,212,643.00		9,902,012,643.00		10,140,260,904.82		10,140,260,904.82	PERKIM LH	
	1 Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase	14.61%		14.83%		15.05%		15.27%		15.49%		15.71%		15.71%		
** PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07			15,618,797,815.00		18,161,878,896.15		20,046,995,670.26		23,343,465,483.32		25,886,546,564.47		25,886,546,564.47	PERKIM LH	
	1 Panjang Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	46,08 km		51,08 km		56,08 km		61,08 km		66,08 km		71,08 km		71,08 km		
** PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02			953,821,748.25		1,001,512,835.66		1,051,588,477.45		1,104,167,901.32		1,159,376,296.38		1,159,376,296.38	PERKIM LH	
	1 Jumlah Unit Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Kabupaten Kota	6		33		55		77		99		122		122		
** PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03			2,051,800,000.00		2,158,600,000.00		2,265,400,000.00		2,372,200,000.00		2,479,000,000.00		2,479,000,000.00	PERKIM LH	
	1 Jumlah Unit Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni prasejahtera	191		191		291		391		491		591		591		
** PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04			2,076,790,458.75		2,180,629,981.69		2,289,661,480.77		2,404,144,554.81		2,524,351,782.55		2,524,351,782.55	PERKIM LH	
	1 Jumlah Unit Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR	191		191		291		391		491		591		591		
** PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05			1,453,400,000.00		1,506,800,000.00		1,560,200,000.00		1,613,600,000.00		1,667,000,000.00		1,667,000,000.00	PERKIM LH	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
1	Persentase Penyediaan PSU diperumahan untuk menunjang fungsi hunian	0	2%		4%		6%		8%		10%		10%	
INDIKATOR SASARAN :														
	Rasio jaringan Irigasi		31.20		31.40		31.60		31.80		32.00		32.00	
Program														
** PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02		29,307,220,401.00		29,893,364,809.00		31,388,033,050.00		32,957,434,702.00		36,253,178,173.00		36,253,178,173.00	PU PR
1	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	75,80%	76,00%		76,21%		76,44%		76,68%		76,89%		76,89%	
INDIKATOR SASARAN :														
	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum		58.78		62.24		65.72		69.22		72.74		72.74	
Program														
** PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03		20,874,050,944.00		21,016,450,944.00		21,158,850,944.00		21,301,250,944.00		21,443,650,944.00		21,443,650,944.00	PERKIM LH
1	Persentase Rumah Tangga Akses Air Minum yang Layak	55.33%	58.78%		62.24%		65.72%		69.22%		72.74%		72.74%	
INDIKATOR SASARAN :														
	Persentase rumah tangga bersanitasi		82.66		83.39		84.12		84.85		85.58		85.58	
Program														
** PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05		9,943,275,600.00		10,245,875,600.00		10,548,475,600.00		10,851,075,600.00		11,153,675,600.00		11,153,675,600.00	PERKIM LH
1	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi yang Layak	81.93%	82.66%		83.39%		84.12%		84.85%		85.58%		85.58%	
Tujuan														
Meningkatnya status kemajuan desa	Jumlah Desa Mandiri		80		95		110		125		140		140	
Sasaran														
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa														

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
INDIKATOR SASARAN :														
	Percentase Peningkatan Status Desa		41.03		48.72		56.41		64.10		71.79		71.79	
Program														
** PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02		40,000,000.00		115,000,000.00		140,000,000.00		165,000,000.00		190,000,000.00		190,000,000.00	DINSOS PMD
	1 Persentase penataan desa	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
	2 Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
** PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2.13.03		40,000,000.00		65,000,000.00		90,000,000.00		115,000,000.00		140,000,000.00		140,000,000.00	DINSOS PMD
	1 Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	10 %	20 %		30 %		40 %		50 %		60 %		60 %	
	2 Persentase kawasan perdesaan yang dibangun dan dikembangkan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
** PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04		4,734,260,885.00		3,460,931,950.00		3,513,184,386.00		3,860,932,631.00		3,564,830,540.00		3,564,830,540.00	DINSOS PMD
	1 Persentase Evaluasi Perkembangan Desa Melalui Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM)	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
	2 Persentase penetapan dan penegasan batas desa	30 %	50 %		65 %		80 %		90 %		100 %		100 %	
	3 Persentase Desa yang memiliki BUMDesa terdaftar dan berbadan hukum	72 %	75 %		80 %		85 %		90 %		100 %		100 %	
** PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05		220,000,000.00		295,000,000.00		330,000,000.00		355,000,000.00		380,000,000.00		380,000,000.00	DINSOS PMD
	1 Persentase (%) Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina dan diberdayakan	10 %	30 %		40 %		50 %		60 %		70 %		70 %	
	2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	5	6		6		6		6		6		6	
	3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	35	36		37		38		39		40		40	
	4 Persentase PKK aktif	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
	5 Persentase posyandu aktif	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
	6 Persentase pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan TTG di pedesaan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
INDIKATOR SASARAN :														
	Percentase satuan pemukiman transmigrasi menuju tahap kemandirian		65		68		71		74		77		77	
<u>Program</u>														
** PROGRAM PERENCANAAN KAWASANTRANSMIGRASI	3.32.02		400,000,000.00		400,000,000.00		350,000,000.00		400,000,000.00		400,000,000.00		400,000,000.00	NAKERTRANS
	1 Persentase Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan		29,03%		12,90%		19,35%		19,35%		19,35%		19,35%	
** PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASANTRANSMIGRASI	3.32.03		300,000,000.00		332,677,991.00		424,774,686.00		413,417,960.00		445,014,969.00		445,014,969.00	NAKERTRANS
	1 Persentase warga Transmigrasi yang dilakukan Pendataan dan Penataan		20%		20%		20%		20%		20%		20%	
** PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04		700,000,000.00		732,677,991.00		774,774,686.00		813,417,960.00		845,014,969.00		845,014,969.00	NAKERTRANS
	1 Persentase kk transmigran yang dibina		17,5%		18,75%		20%		21,25%		22,5%		22,5%	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Misi 3 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia														
Tujuan														
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		68.16		68.73		69.27		69.83		70.39		70.39	
Sasaran														
Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing														
INDIKATOR SASARAN :														
	Angka Harapan Hidup (AHH)		74.17		74.33		74.50		74.67		74.84		74.84	
Program														
** PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02		258,803,569,624.00		273,528,749,248.00		286,218,932,793.00		303,778,158,767.00		317,840,578,026.00		317,840,578,026.00	DINKES
	1 Rasio ketersediaan Faskes	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %						
	2 Persentase indikator SPM yang memenuhi target	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
	3 Prevalensi Stunting (Balita)	17 %	16 %	15,5%	14,5%	13,5%	13%	13%						
	4 Cakupan kepesertaan JKN	65 %	65 %	70%	90 %	90%	100%	100%						
	5 Prevalensi Penyakit Menular	80 %	79 %	78%	77 %	76 %	77 %	77 %						
	6 Prevalensi Penyakit Tidak Menular	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
	7 Indeks kepuasan masyarakat	80 %	85 %	89 %	95 %	100 %	100 %	100 %						
** PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03		3,020,000,000.00		3,432,000,000.00		3,775,200,000.00		4,152,720,000.00		4,567,992,000.00		4,567,992,000.00	DINKES
	1 Persentasi FKTP yang memiliki SDM yang sesuai dengan standar (9 kriteria nakes)	90 %	92%	93%	94 %	95 %	96 %	96 %						
	2 cakupan pemenuhan SDM tenaga kesehatan	80 %	85 %	90 %	95%	100 %	100 %	100 %						
	3 Persentase perijinan tenaga Kesehatan yang standar (9 kriteria nakes)	90 %	91%	92 %	93 %	94 %	95 %	95 %						
** PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04		1,440,000,000.00		1,584,000,000.00		1,742,400,000.00		1,916,640,000.00		2,108,304,000.00		2,108,304,000.00	DINKES

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target									
	1 Rasio sarana kefarmasian terhadap jumlah penduduk	90%	91%		92%		93%		94%		95%		95%	
	2 Cakupan perijinan sarana kefarmasian	60%	65%		70%		75%		80%		85%		85%	
** PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05		900,000,000.00		990,000,000.00		1,089,000,000.00		1,197,900,000.00		1,317,690,000.00		1,317,690,000.00	DINKES
	1 Persentase desa siaga aktif	70%	72%		74%		76%		76%		78%		78%	
	2 Cakupan desa yang melaksanakan pilar STBM	90%	91%		92%		93%		94%		95%		95%	
	3 Cakupan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	48%	55%		65%		83%		86%		89%		89%	
	INDIKATOR SASARAN :													
	Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak		300		400		500		530		570		570	
Program														
** PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06		402,734,012.00		415,476,127.00		455,299,997.00		479,352,140.00		469,519,443.00		469,519,443.00	DP3AP2KB
	1 Nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak	162,25	185		215		250		270		290		290	
** PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07		271,431,690.00		466,082,573.00		314,373,807.00		333,502,749.00		500,820,739.00		500,820,739.00	DP3AP2KB
	1 Nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak	68,8	75		80		90		100		110		110	
	INDIKATOR SASARAN :													
	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)		57.90		58.90		59.90		60.90		61.90		61.90	
Program														
** PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02		900,632,222.00		938,598,201.00		486,315,803.00		500,408,952.00		1,031,437,904.00		1,031,437,904.00	DP3AP2KB
	1 Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3,75	3,70		3,65		3,60		3,55		3,50		3,50	
** PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03		6,694,338,130.00		6,825,847,374.00		7,395,149,533.00		7,680,614,296.00		7,508,837,405.00		7,508,837,405.00	DP3AP2KB
	1 Rasio Akseptor KB	87%	87,66%		88,53%		89,41%		90,28%		90,28%		90,28%	
** PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04		935,777,303.00		948,493,414.00		1,021,534,199.00		1,050,487,209.00		1,021,024,204.00		1,021,024,204.00	DP3AP2KB

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
	1 Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	19,2%	19,2%		38,4%		57,6%		76,9%		96,15%		96,15%	
	INDIKATOR SASARAN :													
	Tingkat Prestasi Olah Raga		30		12		12		19		35		35	
<u>Program</u>														
** PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03		3,431,903,548.00		2,025,293,977.00		2,120,895,431.00		2,175,834,443.00		2,322,907,576.00		2,322,907,576.00	DISPARPORA
	1 Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	12,15%	34,38%		29,88%		33,50%		35,17%		42,57%		42,57%	
	INDIKATOR SASARAN :													
	Indeks Pembangunan Literasi		35		36		37		38		39		39	
<u>Program</u>														
** PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02		1,565,000,000.00		1,735,000,000.00		2,011,398,960.00		2,304,739,273.00		2,764,740,244.00		2,764,740,244.00	PERPUS ARDA
	1 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		0.00056		0.00060		0.00065		0.00080		0.00095		0.00095	
	2 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		2.8		3,36		3,92		4,48		5,6		5,6	
** PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03		261,527,011.00		261,527,011.00		261,527,011.00		375,000,000.00		380,000,000.00		380,000,000.00	PERPUS ARDA
	1 Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah kuno yang dilestarikan		10		20		30		40		50		50	
	INDIKATOR SASARAN :													
	Tingkat Prestasi Pemuda		3		6		6		6		6		6	
<u>Program</u>														
** PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02		965,000,000.00		1,510,000,000.00		1,560,000,000.00		1,680,000,000.00		1,740,000,000.00		1,740,000,000.00	DISPARPORA
	1 Cakupan penyadaran dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	1,98%	1,94%		2,18%		2,18%		2,19%		2,19%		2,19%	
** PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04		170,000,000.00		140,000,000.00		170,000,000.00		170,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00	DISPARPORA

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	1 Cakupan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan		50%		50%		50%		50%		50%		50%	
	INDIKATOR SASARAN :													
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		65.26		67.26		69.26		71.26		73.26		73.26	
<u>Program</u>														
** PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02		496,521,385.00		553,595,378.00		655,848,805.00		741,881,045.00		721,073,514.00		721,073,514.00	DP3AP2KB
	1 Persentase ARG pada belanja operasional APBD	60%	60%		70%		80%		90%		100%		100%	
** PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03		1,158,549,897.00		1,291,722,548.00		1,530,313,878.00		1,731,055,771.00		1,850,755,351.00		1,850,755,351.00	DP3AP2KB
	1 Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
** PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04		772,366,598.00		861,148,365.00		1,020,209,252.00		1,154,037,180.00		1,217,813,045.00		1,217,813,045.00	DP3AP2KB
	1 Partisipasi angkatan kerja perempuan	63,3%	63,5%		64%		64,5%		65%		65,5%		65,5%	
** PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05		55,169,043.00		61,510,597.00		72,872,090.00		82,431,227.00		88,131,207.00		88,131,207.00	DP3AP2KB
	1 Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	INDIKATOR SASARAN :													
	(1) Harapan Lama Sekolah (HLS) (2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		(1) 12.65 (2) 6.94		(1) 12.73 (2) 7.06		(1) 12.82 (2) 7.17		(1) 12.90 (2) = 7.29		(1) 13.21 (2) 7.41		(1) 13.21 (2) 7.41	
<u>Program</u>														
** PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02		58,466,836,488.00		61,982,634,120.00		64,958,195,706.00		68,975,604,302.00		72,260,473,364.00		72,260,473,364.00	DIKBUD
	1 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A		104.67%		103.20%		102.50%		101.30%		100%		100%	
	2 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A		91.97%		92.15%		92.38%		92.52%		92.72%		92.72%	
	3 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A		95.30%		96.15%		97.24%		98.58%		99.37%		99.37%	
	4 Angka Putus Sekolah SD/MI		0.34%		0.33%		0.32%		0.30%		0.27%		0.27%	
	5 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B		99.57%		99.65%		99.73%		99.88%		99.95%		99.95%	
	6 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B		75.67%		77.50%		78.85%		80.25%		82.15%		82.15%	
	7 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket		92.80%		93.15%		94.25%		95.61%		96.77%		96.77%	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
C														
8	Angka Putus Sekolah SMP/MTs		0.65%		0.63%		0.55%		0.47%		0.30%		0.30%	
9	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		60.25		61.75		62.87		63.75		65.28		65.28	
10	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		560		565		570		577		580		580	
11	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		99.85%		99.89%		99.92%		99.95%		99.97%		99.97%	
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		98.92%		98.94%		98.97%		99.05%		99.15%		99.15%	
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		90.4%		90.52%		90.65%		90.78%		90.85%		90.85%	
14	Angka Partisipasi Kasar Paud		60.52%		60.89%		61.21%		61.54%		62.08%		62.08%	
15	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		99.83%		99.87%		99.90%		99.92%		99.95%		99.95%	
** PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03		103,762,196.00		110,001,749.00		115,282,534.00		122,412,305.00		128,242,024.00		128,242,024.00	DIKBUD
	1	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan		15%		17%		18.50%		19.25%		20.05%		20.05%
** PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN	1.01.04		4,530,774,218.00		4,803,224,144.00		5,033,809,524.00		5,345,130,819.00		5,599,685,383.00		5,599,685,383.00	DIKBUD
	1	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV		85.60%		87.85%		89.54%		91.25%		92.58%		92.58%
<hr/> Tujuan														
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	(1) Angka Kemiskinan (2) Indeks Gini		(1)7.28 (2)0.271		(1)7.07 (2)0.270		(1)6.86 (2)0.269		(1)6.65 (2)0.268		(1)6.44 (2)0.267		(1)6.44 (2)0.267	
<hr/> Sasaran														
Meningkatnya perlindungan sosial terhadap PMKS	INDIKATOR SASARAN :													
	Tingkat Perlindungan Sosial		80		83.75		87.50		91.25		95.00		95.00	
<hr/> Program														
** PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	1.06.02		40,000,000.00		140,000,000.00		145,000,000.00		150,000,000.00		155,000,000.00		155,000,000.00	DINSOS PMD
	1	Persentase (%) Pemberdayaan Sosial bagi Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaga dan Pekerja Sosial) dan Komunitas Adat Terpencil	10 %	20 %	30 %		40 %		50 %		60 %		60 %	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
** PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.06.03		100,000,000.00		125,000,000.00		150,000,000.00		175,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00	DINSOS PMD
	1	Persentase (%) penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
** PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04		245,000,000.00		1,290,000,000.00		1,235,000,000.00		930,000,000.00		1,310,000,000.00		1,310,000,000.00	DINSOS PMD
	1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	2,17%		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
** PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05		280,000,000.00		305,000,000.00		330,000,000.00		355,000,000.00		380,000,000.00		380,000,000.00	DINSOS PMD
	1	Persentase (%) masyarakat rentan yang mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial	50 %		60 %		70 %		80 %		90 %		100 %	
	2	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	50 %		60 %		70 %		80 %		90 %		100 %	
	3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	50 %		60 %		70 %		80 %		90 %		100 %	
** PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06		130,000,000.00		230,000,000.00		255,000,000.00		280,000,000.00		305,000,000.00		305,000,000.00	DINSOS PMD
	1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	86,58%		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
** PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.06.07		75,000,000.00		100,000,000.00		125,000,000.00		150,000,000.00		175,000,000.00		175,000,000.00	DINSOS PMD
	1	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab												
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.														
Misi 4	Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja																									
<hr/>																										
<u>Tujuan</u>																										
Meningkatnya kesempatan kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka		3.34		3.16		2.97		2.79		2.60		2.60												
<u>Sasaran</u>																										
Tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan																										
INDIKATOR SASARAN :																										
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		74.65		74.71		74.77		74.79		74.81		74.81														
<u>Program</u>																										
** PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		2.07.02		133,333,000.00		139,766,800.00		141,785,700.00		225,000,000.00		240,000,000.00		240,000,000.00												
	1	Percentase lapangan usaha atau bidang pekerjaan utama yang menjadi sektor pilihan dalam penyusunan tenaga kerja		11.11%		22.22%		33.33%		44.44%		55.56%		55.56%												
		2		Percentase perusahaan besar yang menyusun perencanaan tenaga kerja mikro		0%		0%		0%		1.33%		1.33%												
** PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		2.07.03		2,414,319,118.00		2,506,553,010.00		2,675,699,849.00		2,740,429,459.00		2,849,970,791.00		2,849,970,791.00												
	1	1). Percentase Peserta Pelatihan Vokasi dengan Latar Belakang Pendidikan Tidak Tamat SD, SD, SMP dan SMA.		25,00%		27,78%		30,00%		31,82%		33,33%		33,33%												
		2		Percentase Pekerja yang Ditingkatkan Produktivitasnya		0,03%		0,08%		0,12%		0,17%		0,23%												
		3		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kopetensi		60%		65%		70%		75%		80%												
** PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		2.07.04		466,667,000.00		507,567,265.00		517,611,036.00		536,011,036.00		547,482,248.00		547,482,248.00												
	1	Percentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Antar Kerja		0,23%		0,47%		1,22%		1,50%		2,11%		2,11%												
		2		Percentase Angkatan Kerja yang Diberdayakan Melalui Perluasan		0,01%		0,01%		0,01%		0,01%		0,01%												

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target									
Kesempatan Kerja														
3 Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan			50%		55%		60%		65%		70%		70%	
** PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05		700,000,000.00		732,677,991.00		774,774,686.00		813,417,966.00		845,014,969.00		845,014,969.00	NAKERTRANS
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagaakerjaan)		30.49%		30.78%		31,22%		31,58%		31,92%		31,92%	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
Misi 5	Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan													
Tujuan														
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		65.50		65.75		66.00		66.25		66.50		66.50
Sasaran														
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		INDIKATOR SASARAN :												
		Indeks kualitas lahan		40.15		40.16		40.17		40.18		40.19		40.19
Program														
** PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04		1,155,000,000.00		1,212,750,000.00		1,273,387,500.00		1,337,056,875.00		1,403,909,718.75		1,403,909,718.75	PERKIM LH
	1	Persentase kesesuaian program Keanekaragaman Hayati	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	2	Jumlah lokasi lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0		1		2		2		2		2	
** PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06		315,000,000.00		330,750,000.00		347,287,500.00		364,651,875.00		382,884,468.75		382,884,468.75	PERKIM LH
	1	Persentase Jumlah Pengawasan dan Pemantauan LH terhadap Pemegang Dokumen Lingkungan	5.70%		6.70%		7.70%		8.70%		9.70%		9.70%	
** PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04-B		511,031,902.00		515,000,000.00		520,000,000.00		650,000,000.00		728,711,653.00		728,711,653.00	BAPPEDA
	1	Persentase kesesuaian program pengelolaan Keanekaragaman hayati	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		INDIKATOR SASARAN :												
		Indeks kualitas air		51.10		51.20		51.30		51.40		51.50		51.50
Program														

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target									
** PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03		682,500,000.00		716,625,000.00		752,456,250.00		790,079,062.50		829,583,015.63		829,583,015.63	PERKIM LH
	1 Jumlah DAS yang Dipantau	4	4		4		4		4		4		4	
	2 Jumlah Pemantauan Kualitas Udara (kecamatan)	1	1		1		1		1		1		1	
	3 Jumlah Luas Tutupan Lahan Terinventarisir dan Terkelola (Ha)	110	210		310		410		510		550		550	
	4 Jumlah Kampung Iklim yang Masuk Dalam Sistem Registrasi Nasional (Desa)	9	12		15		18		21		24		24	
** PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05		15,750,000.00		16,537,500.00		17,364,375.00		18,232,593.75		19,144,223.44		19,144,223.44	PERKIM LH
	1 Persentase Pengelolaan Penghasil Limbah B3 Medis Kabupaten Sambas (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
** PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10		105,000,000.00		110,250,000.00		115,762,500.00		121,550,625.00		127,628,156.25		127,628,156.25	PERKIM LH
	1 Persentase Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
** PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11		11,297,418,398.20		11,820,306,508.21		12,567,789,023.72		13,352,645,665.01		13,890,001,117.55		13,890,001,117.55	PERKIM LH
	1 Persentase Pelayanan Persampahan	37%	44%		51%		58%		65%		72%		72%	
	INDIKATOR SASARAN :													
	Indeks kualitas udara		90.15		90.20		90.25		90.30		90.35		90.35	
Program														
** PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02		470,251,367.75		483,763,936.14		497,952,132.94		512,849,739.59		528,492,226.57		528,492,226.57	PERKIM LH
	1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan/atau Kajian Lingkungan Hidup	2 dokumen	-		1 dokumen									

Tujuan

Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana

INDEKS RESIKO BENCANA

163.59

157.46

151.32

145.19

139.05

139.05

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target				
Sasaran																	
Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana																	
INDIKATOR SASARAN :																	
Indeks Ketahanan Daerah																	
Program																	
** PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			1.05.03		1,495,000,000.00	1,525,000,000.00	1,515,000,000.00	1,610,000,000.00	1,640,000,000.00	1,640,000,000.00	BPBD						
			1	Percentase Penanganan Kejadian Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
** PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			1.05.04		822,089,500.00	839,088,338.00	890,132,786.00	850,967,928.00	866,622,017.00	866,622,017.00	BPBD						
			1	Cakupan Layanan Penanggulangan Kebakaran di Kab/Kota	70%	70%	75%	75%	80%	85%	85%						
			2	Cakupan Layanan Penanggulangan Non Kebakaran di Kab/Kota	70%	70%	75%	75%	80%	85%	85%						
INDIKATOR SASARAN :																	
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTRW																	
Program																	
** PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1.03.12		562,596,592.00	800,000,000.00	800,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	PU PR						
			1	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan RTRW	-	50%	54%	58%	61%	65%	65%						
** PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			2.10.05		67,111,878.75	70,467,472.69	73,990,846.32	77,690,388.64	81,574,908.07	81,574,908.07	PERKIM LH						
			1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
** PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			2.10.10		5,175,828,363.30	5,434,619,781.47	5,706,360,770.54	5,991,668,309.07	6,291,251,724.52	6,291,251,724.52	PERKIM LH						
			1	Tersedianya jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan bab yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dan juga memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas pada RPJMD Kab. Sambas Tahun 2021-2026 yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah maupun untuk pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk periodesasi RPJMD ini.

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2021 hingga 2026, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Indikasi rencana program dan kegiatan telah disesuaikan dengan perkembangan situasi yang mendasari dilakukannya perubahan RPJMD ini serta telah menyesuaikan dengan OPD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Sambas.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Indikasi program prioritas dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2021-2026 disajikan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 7.1. dan Tabel 7.2. Indikasi program, pagu indikatif dan target kinerja tahun 2021-2026 tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Belanja Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026
Kabupaten Sambas

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA DAERAH	1.808.279.706.864,20	1.912.704.159.894,99	2.003.899.871.689,74	2.127.961.449.567,34	2.229.395.875.119,45
1. Belanja Operasi	1.062.614.878.300,20	1.065.157.688.470,19	1.083.699.373.508,37	1.134.237.969.168,32	1.192.635.651.439,32
1.1. Belanja Pegawai	674.405.219.100,75	680.051.469.041,76	693.921.241.727,59	736.232.675.026,75	758.699.443.756,51
1.2. Belanja Barang dan Jasa	352.806.277.817,42	348.669.859.651,94	352.278.095.488,46	359.409.965.180,73	394.954.925.432,37
1.3. Belanja Bunga	4.120.000.000,00	4.243.600.000,00	4.370.908.000,00	4.502.035.240,00	4.547.055.592,40
1.4. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.5. Belanja Hibah	29.827.229.032,03	30.722.045.902,99	31.643.707.280,08	32.593.018.498,48	32.918.948.683,47
1.6. Belanja Bantuan Sosial	1.456.152.350,00	1.470.713.873,50	1.485.421.012,24	1.500.275.222,36	1.515.277.974,58
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0
2. Belanja Modal	441.238.413.864,00	530.951.000.136,80	590.949.208.041,85	651.310.138.653,92	682.367.414.973,95
3. Belanja Tak Terduga	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	202.000.000,00
4. Belanja Transfer	304.226.414.700,00	316.395.471.288,00	329.051.290.139,52	342.213.341.745,10	354.190.808.706,18

Tabel 7.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI PENDANNAAN TAHUN 2022 - 2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
1.01 PENDIDIKAN														
** PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			58.466.836.488,00		61.982.634.120,00		64.958.195.706,00		68.975.604.302,00		72.260.473.364,00		72.260.473.364,00	DIKBUD
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		98.92%		98.94%		98.97%		99.05%		99.15%		99.15%	
	- Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket C		92.80%		93.15%		94.25%		95.61%		96.77%		96.77%	
	- Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A		104.67%		103.20%		102.50%		101.30%		100%		100%	
	- Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A		91.97%		92.15%		92.38%		92.52%		92.72%		92.72%	
	- Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A		95.30%		96.15%		97.24%		98.58%		99.37%		99.37%	
	- Angka Putus Sekolah SD/MI		0.34%		0.33%		0.32%		0.30%		0.27%		0.27%	
	- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B		75.67%		77.50%		78.85%		80.25%		82.15%		82.15%	
	- Angka Putus Sekolah SMP/MTs		0.65%		0.63%		0.55%		0.47%		0.30%		0.30%	
	- Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		60.25		61.75		62.87		63.75		65.28		65.28	
	- Angka Kelulusan (AL) SD/MI		99.85%		99.89%		99.92%		99.95%		99.97%		99.97%	
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		90.4%		90.52%		90.65%		90.78%		90.85%		90.85%	
	- Angka Partisipasi Kasar Paud		60.52%		60.89%		61.21%		61.54%		62.08%		62.08%	
	- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		99.83%		99.87%		99.90%		99.92%		99.95%		99.95%	
	- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B		99.57%		99.65%		99.73%		99.88%		99.95%		99.95%	
	- Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		560		565		570		577		580		580	
** PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			103.762.196,00		110.001.749,00		115.282.534,00		122.412.305,00		128.242.024,00		128.242.024,00	DIKBUD
	- Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan		15%		17%		18.50%		19.25%		20.05%		20.05%	
** PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			4.530.774.218,00		4.803.224.144,00		5.033.809.524,00		5.345.130.819,00		5.599.685.383,00		5.599.685.383,00	DIKBUD
	- Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV		85.60%		87.85%		89.54%		91.25%		92.58%		92.58%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
1.02 KESEHATAN														
** PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			258.803.569.624,00		273.528.749.248,00		286.218.932.793,00		303.778.158.767,00		317.840.578.026,00		317.840.578.026,00	DINKES
	- Rasio ketersediaan Faskes	80 %		81 %		82 %		83 %		84 %		85 %		85 %
	- Indeks kepuasan masyarakat	80 %		85 %		89 %		95 %		100 %		100 %		100 %
	- Persentase indikator SPM yang memenuhi target	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %
	- Cakupan kepesertaan JKN	65 %		65 %		70%		90 %		90%		100%		100%
	- Prevalensi Penyakit Tidak Menular	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %
	- Prevalensi Penyakit Menular	80 %		79 %		78%		77 %		76 %		77 %		77 %
	- Prevalensi Stunting (Balita)	17 %		16 %		15,5%		14,5%		13,5%		13%		13%
** PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			3.020.000.000,00		3.432.000.000,00		3.775.200.000,00		4.152.720.000,00		4.567.992.000,00		4.567.992.000,00	DINKES
	- Persentase perijinan tenaga Kesehatan yang standar (9 kriteria nakes)	90 %		91%		92 %		93 %		94 %		95 %		95 %
	- cakupan pemenuhan SDM tenaga kesehatan	80 %		85 %		90 %		95%		100 %		100 %		100 %
	- Persentasi FKTP yang memiliki SDM yang sesuai dengan standar (9 kriteria nakes)	90 %		92%		93%		94 %		95 %		96 %		96 %
** PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			1.440.000.000,00		1.584.000.000,00		1.742.400.000,00		1.916.640.000,00		2.108.304.000,00		2.108.304.000,00	DINKES
	- Cakupan perijinan sarana kefarmasian	60%		65%		70%		75%		80%		85%		85%
	- Rasio sarana kefarmasian terhadap jumlah penduduk	90%		91%		92%		93%		94%		95%		95%
** PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			900.000.000,00		990.000.000,00		1.089.000.000,00		1.197.900.000,00		1.317.690.000,00		1.317.690.000,00	DINKES
	- Cakupan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	48%		55%		65%		83%		86%		89%		89%
	- Persentase desa siaga aktif	70%		72%		74%		76%		76%		78%		78%
	- Cakupan desa yang melaksanakan pilar STBM	90%		91%		92%		93%		94%		95%		95%
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
** PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			29.307.220.401,00		29.893.364.809,00		31.388.033.050,00		32.957.434.702,00		36.253.178.173,00		36.253.178.173,00	PU PR
	- Persentase Irigasi Kabupaten Dalam	75,80%		76,00%		76,21%		76,44%		76,68%		76,89%		76,89%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
Kondisi Baik														
** PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			5.148.026.733,00		10.414.880.616,00		10.949.320.709,00		12.353.644.905,00		13.173.644.905,00		13.173.644.905,00	PU PR
	- Persentase Penanganan Gedung Pemerintahan	11/99	10/99		10/99		11/99		11/99		12/99		12/99	
	- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	204 Rekomendasi Teknis	220 Rekomendasi Teknis		242 Rekomendasi Teknis		260 Rekomendasi Teknis		270 Rekomendasi Teknis		270 Rekomendasi Teknis		270 Rekomendasi Teknis	
** PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			4.673.921.249,00		4.673.921.249,00		4.893.921.249,00		5.073.921.249,00		5.996.677.864,00		5.996.677.864,00	PU PR
	- Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	14/99	10/99		10/99		10/99		10/99		10/99		10/99	
** PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			111.507.182.200,00		113.807.182.200,00		118.991.134.021,00		125.621.102.516,00		128.822.920.377,00		128.822.920.377,00	PU PR
	- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	0.6608	0.6584		0.6833		0.7010		0.7223		0.7471		0.7471	
	- Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk	0.001708439	0.001668072		0.001628658		0.001590176		0.001552603		0.001515918		0.001515918	
** PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			150.000.000,00		500.000.000,00		700.000.000,00		1.000.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00	PU PR
	- Persentase tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat	-	15		30		40		50		60		60	
** PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			562.596.592,00		800.000.000,00		800.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00	PU PR
	- Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan RTRW	-	50%		54%		58%		61%		65%		65%	
** PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			20.874.050.944,00		21.016.450.944,00		21.158.850.944,00		21.301.250.944,00		21.443.650.944,00		21.443.650.944,00	PERKIM LH
	- Persentase Rumah Tangga Akses Air Minum yang Layak	55.33%	58.78%		62.24%		65.72%		69.22%		72.74%		72.74%	
** PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			9.943.275.600,00		10.245.875.600,00		10.548.475.600,00		10.851.075.600,00		11.153.675.600,00		11.153.675.600,00	PERKIM LH
	- Persentase Rumah Tangga Bersanitasi yang Layak	81.93%	82.66%		83.39%		84.12%		84.85%		85.58%		85.58%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
** PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	- Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase	14.61%	9.047.612.643,00		9.332.412.643,00		9.617.212.643,00		9.902.012.643,00		10.140.260.904,82		10.140.260.904,82	PERKIM LH
** PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	- Panjang Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	46,08 km	15.618.797.815,00		18.161.878.896,15		20.046.995.670,26		23.343.465.483,32		25.886.546.564,47		25.886.546.564,47	PERKIM LH

1.04 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

** PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		953.821.748,25	1.001.512.835,66	1.051.588.477,45	1.104.167.901,32	1.159.376.296,38	1.159.376.296,38	PERKIM LH
	- Jumlah Unit Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Kabupaten Kota	6	33	55	77	99	122	122
** PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		2.051.800.000,00	2.158.600.000,00	2.265.400.000,00	2.372.200.000,00	2.479.000.000,00	2.479.000.000,00	PERKIM LH
	- Jumlah Unit Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni prasejahtera	191	191	291	391	491	591	591
** PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		2.076.790.458,75	2.180.629.981,69	2.289.661.480,77	2.404.144.554,81	2.524.351.782,55	2.524.351.782,55	PERKIM LH
	- Jumlah Unit Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR	191	191	291	391	491	591	591
** PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		1.453.400.000,00	1.506.800.000,00	1.560.200.000,00	1.613.600.000,00	1.667.000.000,00	1.667.000.000,00	PERKIM LH
	- Persentase Penyediaan PSU diperumahan untuk menunjang fungsi hunian	0	2%	4%	6%	8%	10%	10%

1.05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

** PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		5.172.547.947,00	5.696.314.415,00	5.993.576.286,00	6.300.648.239,00	6.632.192.776,00	6.632.192.776,00	SATPOL PP
	- Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	75%	80%	82%	83%	85%	85%	
	- Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	70%	75%	80%	85%	90%	90%	
	- Persentase Penegakan PERDA/PERKADA	60%	65%	67%	70%	73%	73%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab	
			Target	Rp.											
** PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.495.000.000,00		1.525.000.000,00		1.515.000.000,00		1.610.000.000,00		1.640.000.000,00		1.640.000.000,00	BPBD
	- Percentase Penanganan Kejadian Bencana	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
** PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				822.089.500,00		839.088.338,00		890.132.786,00		850.967.928,00		866.622.017,00		866.622.017,00	BPBD
	- Cakupan Layanan Penanggulangan Non Kebakaran di Kab/Kota	70%		70%		75%		75%		80%		85%		85%	
	- Cakupan Layanan Penanggulangan Kebakaran di Kab/Kota	70%		70%		75%		75%		80%		85%		85%	
1.06 SOSIAL															
** PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				40.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00	DINSOS PMD
	- Percentase (%) Pemberdayaan Sosial bagi Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaga dan Pekerja Sosial) dan Komunitas Adat Terpencil	10 %		20 %		30 %		40 %		50 %		60 %		60 %	
** PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	DINSOS PMD
	- Percentase (%) penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
** PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				245.000.000,00		1.290.000.000,00		1.235.000.000,00		930.000.000,00		1.310.000.000,00		1.310.000.000,00	DINSOS PMD
	- Percentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	2,17%		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
** PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				280.000.000,00		305.000.000,00		330.000.000,00		355.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00	DINSOS PMD
	- Percentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	50 %		60 %		70 %		80 %		90 %		100 %		100 %	
	- Percentase (%) masyarakat rentan yang mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial	50 %		60 %		70 %		80 %		90 %		100 %		100 %	
	- Percentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	50 %		60 %		70 %		80 %		90 %		100 %		100 %	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
** PROGRAM PENANGANAN BENCANA	- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	86,58%	130.000.000,00		230.000.000,00		255.000.000,00		280.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00	DINSOS PMD
** PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	- Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	100%	75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00	DINSOS PMD
2.07 TENAGA KERJA														
** PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			133.333.000,00		139.766.800,00		141.785.700,00		225.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00	NAKERTRANS
	- Persentase perusahaan besar yang menyusun perencanaan tenaga kerja mikro		0%		0%		0%		1.33%		1.33%		1.33%	
	- Persentase lapangan usaha atau bidang pekerjaan utama yang menjadi sektor pilihan dalam penyusunan tenaga kerja		11.11%		22.22%		33.33%		44.44%		55.56%		55.56%	
** PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			2.414.319.118,00		2.506.553.010,00		2.675.699.849,00		2.740.429.459,00		2.849.970.791,00		2.849.970.791,00	NAKERTRANS
	- Persentase Pekerja yang Ditingkatkan Produktivitasnya		0,03%		0,08%		0,12%		0,17%		0,23%		0,23%	
	- 1).Persentase Peserta Pelatihan Vokasi dengan Latar Belakang Pendidikan Tidak Tamat SD, SD, SMP dan SMA.		25,00%		27,78%		30,00%		31,82%		33,33%		33,33%	
	- Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kopetensi		60%		65%		70%		75%		80%		80%	
** PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			466.667.000,00		507.567.265,00		517.611.036,00		536.011.036,00		547.482.248,00		547.482.248,00	NAKERTRANS
	- Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan		50%		55%		60%		65%		70%		70%	
	- Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Antar Kerja		0,23%		0,47%		1,22%		1,50%		2,11%		2,11%	
	- Persentase Angkatan Kerja yang Diberdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja		0,01%		0,01%		0,01%		0,01%		0,01%		0,01%	
** PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			700.000.000,00		732.677.991,00		774.774.686,00		813.417.966,00		845.014.969,00		845.014.969,00	NAKERTRANS
	- Persentase Perusahaan yang menerapkan		30,49%		30,78%		31,22%		31,58%		31,92%		31,92%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagaakerjaan)														
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
** PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			496.521.385,00		553.595.378,00		655.848.805,00		741.881.045,00		721.073.514,00		721.073.514,00	DP3AP2KB
	- Percentase ARG pada belanja operasional APBD	60%		60%		70%		80%		90%		100%		100%
** PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			1.158.549.897,00		1.291.722.548,00		1.530.313.878,00		1.731.055.771,00		1.850.755.351,00		1.850.755.351,00	DP3AP2KB
	- Percentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
** PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			772.366.598,00		861.148.365,00		1.020.209.252,00		1.154.037.180,00		1.217.813.045,00		1.217.813.045,00	DP3AP2KB
	- Partisipasi angkatan kerja perempuan	63,3%		63,5%		64%		64,5%		65%		65,5%		65,5%
** PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			55.169.043,00		61.510.597,00		72.872.090,00		82.431.227,00		88.131.207,00		88.131.207,00	DP3AP2KB
	- Percentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
** PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			402.734.012,00		415.476.127,00		455.299.997,00		479.352.140,00		469.519.443,00		469.519.443,00	DP3AP2KB
	- Nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak	162,25		185		215		250		270		290		290
** PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			271.431.690,00		466.082.573,00		314.373.807,00		333.502.749,00		500.820.739,00		500.820.739,00	DP3AP2KB
	- Nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak	68,8		75		80		90		100		110		110
2.09	PANGAN													
** PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYAEKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			1.250.000.000,00		1.370.000.000,00		1.370.000.000,00		1.615.000.000,00		1.840.000.000,00		1.840.000.000,00	PERTANIAN
	- Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten		78,72		78,75		79		80		80		80	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
** PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			593.000.000,00		702.000.000,00		916.000.000,00		969.000.000,00		1.020.000.000,00		1.020.000.000,00	PERTANIAN
	- Konsumsi Protein Penduduk	55,6 Gr.Prot/Kap/Hr	56,1 Gr.Prot/Kap/Hr		56,3 Gr.Prot/Kap/Hr		56,5 Gr.Prot/Kap/Hr		56,7 Gr.Prot/Kap/Hr		57,0 Gr.Prot/Kap/Hr		57,0 Gr.Prot/Kap/Hr	
	- Konsumsi Energi Penduduk	1.838 Kkal/Kap/Hr		1.857 Kkal/Kap/Hr		1.896 Kkal/Kap/Hr		1.917 Kkal/Kap/Hr		1.938 Kkal/Kap/Hr		1.958 Kkal/Kap/Hr		1.958 Kkal/Kap/Hr
	- Jumlah Ketersediaan Protein	77,3 Gr.Prot/Kap/Hr		78,7 Gr.Prot/Kap/Hr		79,2 Gr.Prot/Kap/Hr		79,6 Gr.Prot/Kap/Hr		80,1 Gr.Prot/Kap/Hr		80,5 Gr.Prot/Kap/Hr		80,5 Gr.Prot/Kap/Hr
	- Jumlah Ketersediaan Energi	2.975 Kkal/Kap/Hr		3.054 Kkal/Kap/Hr		3.085 Kkal/Kap/Hr		3131 Kkal/Kap/Hr		3.178 Kkal/Kap/Hr		3.226 Kkal/Kap/Hr		3.226 Kkal/Kap/Hr
	- Konsumsi Beras Penduduk	93,5 Kg/Kap.Thn		93,4 Kg/Kap.Thn		93,3 Kg/Kap.Thn		93,1 Kg/Kap.Thn		93,20 Kg/Kap.Thn		92,9 Kg/Kap.Thn		92,9 Kg/Kap.Thn
	- Penguatan Cadangan pangan Kabupaten	43,90%		40%		40%		40%		40%		40%		40%
** PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			110.000.000,00		110.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00	PERTANIAN
	- Tingkat Kerawanan Pangan	16.96		16		15		14		13		12		12
** PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			120.000.000,00		155.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00	PERTANIAN
	- Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	78,80		80		82		84		88		90		90

2.10 PERTANAHAN

** PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			67.111.878,75		70.467.472,69		73.990.846,32		77.690.388,64		81.574.908,07		81.574.908,07	PERKIM LH
	- Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
** PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			5.175.828.363,30		5.434.619.781,47		5.706.360.770,54		5.991.668.309,07		6.291.251.724,52		6.291.251.724,52	PERKIM LH
	- Tersedianya jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

2.11 LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
** PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	- Jumlah Dokumen Perencanaan dan/atau Kajian Lingkungan Hidup	2 dokumen	-		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		PERKIM LH	
** PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	- Jumlah Luas Tutupan Lahan Terinventarisir dan Terkelola (Ha)	110	210		310		410		510		550		550	
	- Jumlah DAS yang Dipantau	4	4		4		4		4		4		4	
	- Jumlah Pemantauan Kualitas Udara (kecamatan)	1	1		1		1		1		1		1	
	- Jumlah Kampung Iklim yang Masuk Dalam Sistem Registrasi Nasional (Desa)	9	12		15		18		21		24		24	
** PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			1.155.000.000,00		1.212.750.000,00		1.273.387.500,00		1.337.056.875,00		1.403.909.718,75		1.403.909.718,75	PERKIM LH
	- Persentase kesesuaian program Keanekaragaman Hayati	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	- Jumlah lokasi lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0	1		2		2		2		2		2	
** PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.593,75		19.144.223,44		19.144.223,44	PERKIM LH
	- Persentase Pengelolaan Penghasil Limbah B3 Medis Kabupaten Sambas (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
** PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			315.000.000,00		330.750.000,00		347.287.500,00		364.651.875,00		382.884.468,75		382.884.468,75	PERKIM LH
	- Persentase Jumlah Pengawasan dan Pemantauan LH terhadap Pemegang Dokumen Lingkungan	5.70%	6.70%		7.70%		8.70%		9.70%		9.70%		9.70%	
** PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			105.000.000,00		110.250.000,00		115.762.500,00		121.550.625,00		127.628.156,25		127.628.156,25	PERKIM LH
	- Persentase Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
** PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			11.297.418.398,20		11.820.306.508,21		12.567.789.023,72		13.352.645.665,01		13.890.001.117,55		13.890.001.117,55	PERKIM LH
-	Percentase Pelayanan Persampahan	37%		44%		51%		58%		65%		72%		72%
** PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			511.031.902,00		515.000.000,00		520.000.000,00		650.000.000,00		728.711.653,00		728.711.653,00	BAPPEDA
-	Percentase kesesuaian program pengelolaan Keanekaragaman hayati	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
** PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			2.845.991.473,00		2.926.676.820,00		3.228.136.112,00		3.502.192.868,00		3.726.277.758,00		3.726.277.758,00	CAPIL
-	Percentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	96,78%		99,3%		99,4%		99,5%		99,6%		99,7%		99,7%
-	Percentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	13,86%		56,00%		58,00%		60,00%		62,00%		68,00%		68,00%
-	Percentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
** PROGRAM PENCATATAN SIPIL			508.560.000,00		558.560.000,00		558.560.000,00		558.560.000,00		558.560.000,00		558.560.000,00	CAPIL
-	Percentase Kepemilikan Akta Perkawinan	24,40%		18,50%		20,00%		21,00%		22,00%		23,00%		23,00%
-	Percentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun	92,91%		95,00%		96,00%		97,00%		98,00%		99,00%		99,00%
-	Percentase Kepemilikan Akta Kelahiran	43,61%		50,00%		52,00%		54,00%		56,00%		58,00%		58,00%
-	Percentase Bayi Berakta Kelahiran	80,49%		86,00%		87,00%		88,00%		90,00%		92,00%		92,00%
-	Percentase Kepemilikan Akta Kematian	8,33%		12,00%		13,00%		14,00%		15,00%		16,00%		16,00%
-	Percentase Kepemilikan Akta Perceraian	59,55%		13,00%		15,00%		17,00%		19,00%		20,00%		20,00%
** PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			560.000.000,00		640.000.000,00		640.000.000,00		640.000.000,00		640.000.000,00		640.000.000,00	CAPIL
-	Percentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah		17,50%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
-	Percentase Inovasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
-	Percentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	- Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
	- Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%		99,90%		99,90%		99,90%		99,90%		99,90%		99,90%
** PROGRAM PENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN			80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	CAPIL
	- Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	99,90%		99,90%		99,90%		99,90%		99,90%		99,90%		99,90%

2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

** PROGRAM PENATAAN DESA			40.000.000,00		115.000.000,00		140.000.000,00		165.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00	DINSOS PMD
	- Persentase penataan desa	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %
	- Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %
** PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			40.000.000,00		65.000.000,00		90.000.000,00		115.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00	DINSOS PMD
	- Persentase kawasan perdesaan yang dibangun dan dikembangkan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %
	- Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	10 %		20 %		30 %		40 %		50 %		60 %		60 %
** PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			4.734.260.885,00		3.460.931.950,00		3.513.184.386,00		3.860.932.631,00		3.564.830.540,00		3.564.830.540,00	DINSOS PMD
	- Persentase Evaluasi Perkembangan Desa Melalui Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM)	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %
	- Persentase Desa yang memiliki BUMDesa terdaftar dan berbadan hukum	72 %		75 %		80 %		85 %		90 %		100 %		100 %
	- Persentase penetapan dan penegasan batas desa	30 %		50 %		65 %		80 %		90 %		100 %		100 %
** PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			220.000.000,00		295.000.000,00		330.000.000,00		355.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00	DINSOS PMD
	- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	35		36		37		38		39		40		40
	- Persentase (%) Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina dan diberdayakan	10 %		30 %		40 %		50 %		60 %		70 %		70 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
	- Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	5	6		6		6		6		6		6	
	- Persentase pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan TTG di pedesaan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %
	- Persentase PKK aktif	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %
	- Persentase posyandu aktif	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %

2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

** PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		900.632.222,00	938.598.201,00	486.315.803,00	500.408.952,00	1.031.437.904,00	1.031.437.904,00	DP3AP2KB
	- Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3,75	3,70	3,65	3,60	3,55	3,50	3,50
** PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		6.694.338.130,00	6.825.847.374,00	7.395.149.533,00	7.680.614.296,00	7.508.837.405,00	7.508.837.405,00	DP3AP2KB
	- Rasio Akseptor KB	87%	87,66%	88,53%	89,41%	90,28%	90,28%	90,28%
** PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		935.777.303,00	948.493.414,00	1.021.534.199,00	1.050.487.209,00	1.021.024.204,00	1.021.024.204,00	DP3AP2KB
	- Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	19,2%	19,2%	38,4%	57,6%	76,9%	96,15%	96,15%

2.15 PERHUBUNGAN

** PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		31.546.613.234,00	33.789.917.898,00	35.674.631.730,00	38.397.983.057,00	40.517.661.271,00	40.517.661.271,00	DISHUB
	- Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		1 Tahun	1 Tahun				
	- Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3 unit	3 unit				
	- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1 tahun	1 tahun				
	- Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		7 dokumen	7 dokumen				
	- Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	14 kegiatan						
	- Jumlah Penerbitan Izin Penyelegaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3 paket						

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
** PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	- Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	
	- Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit	
** PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	- Jumlah Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		10.150.000.000,00		10.454.500.000,00		10.768.135.000,00		11.091.179.050,00		11.423.914.422,00		11.423.914.422,00	DISHUB
			12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan	
			100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		146.410.000,00	DISHUB

2.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

** PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		655.440.256,30	685.028.314,03	710.867.792,98	746.018.734,66	774.760.207,52	774.760.207,52	KOMINFO
	- Persentase pelayanan informasi publik dan penyelenggaraan desiminasi informasi yang telah dilakukan Pemda untuk masyarakat Kab. Sambas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
** PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		1.039.281.741,48	1.106.799.550,32	1.165.763.373,73	1.245.975.281,26	1.311.561.244,62	1.311.561.244,62	KOMINFO
	- Cakupan Layanan Telekomunikasi	75%	75%	80%	85%	90%	95%	95%

2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

** PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPANPINJAM		90.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	PERINDAGKOP
	- Persentase pelayanan izin KSP/USP	18,18%	15,90%	15,90%	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%
** PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		80.000.000,00	160.000.000,00	167.000.000,00	185.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	PERINDAGKOP
	- Persentase pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	4,37%	4,98%	5,56%	6,11%	6,64%	7,14%	7,14%
** PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		85.000.000,00	130.000.000,00	140.000.000,00	150.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	PERINDAGKOP
	- Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	30,76%	30,76%	30,76%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
** PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	- Persentase Koperasi yang berikan pendidikan dan pelatihan	11,65%	390.304.000,00		260.000.000,00		295.000.000,00		400.000.000,00		462.000.000,00		462.000.000,00	PERINDAGKOP
** PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	- Persetase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	7,76%	130.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00	PERINDAGKOP
** PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	- Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	7,40%	195.000.000,00		245.000.000,00		270.000.000,00		300.000.000,00		341.000.000,00		341.000.000,00	PERINDAGKOP
** PROGRAM PENGEMBANGAN UMMK	- rasio wirausaha berskala mikro naik kelas	0,38%	80.000.000,00		285.200.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00	PERINDAGKOP

2.18 PENANAMAN MODAL

** PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) Di Kabupaten Sambas	56	416.081.000,00	457.689.100,00	499.297.200,00	540.905.300,00	582.513.400,00	582.513.400,00	PTSP
** PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	- Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Per Tahun	100%	117.965.900,00	129.762.500,00	141.559.000,00	153.355.600,00	165.152.200,00	165.152.200,00	PTSP
** PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	- Standar Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	PTSP
** PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	- Nilai Investasi di Kabupaten Sambas	PMA = 6.932.11 2.880.00 0,00 PMDN = 7.877.559.498,53 1,00 Total = 15.578.746.387,5	PMA = 7.701.186.888,98 4,00 PMDN = 8.471.305.577,88 3,00 Total = 17.136.621.026,2	PMA = 8.471.305.577,88 1,00 PMDN = 9.531.846.993,22 4,00 Total = 18.850.283.128,8	PMA = 9.318.436.135,67 38,00 PMDN = 10.485.031.692,5 3,00 Total = 20.735.311.441,7	PMA = 10.250.279.749,2 62,00 PMDN = 11.533.534.861,8 45,00 Total = 22.808.842.585,9	PMA = 11.275.307.724,1 62,00 PMDN = 11.533.534.861,8 00,00 Total = 22.808.842.585,9	PMA = 11.275.307.724,1 62,00 PMDN = 11.533.534.861,8 00,00 Total = 22.808.842.585,9	PTSP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
		0,00 Total = 12.557.9 32.880.0 00	16,00		67,00		94,00		84,00		62,00		62,00	
** PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			135.000.000,00		148.500.000,00		162.000.000,00		175.500.000,00		189.000.000,00		189.000.000,00	PTSP
	- Cakupan data dan informasi penanaman modal	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
** PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			965.000.000,00		1.510.000.000,00		1.560.000.000,00		1.680.000.000,00		1.740.000.000,00		1.740.000.000,00	DISPARPORA
	- Cakupan penyadaran dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	1,98%		1,94%		2,18%		2,18%		2,19%		2,19%		2,19%
** PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			3.431.903.548,00		2.025.293.977,00		2.120.895.431,00		2.175.834.443,00		2.322.907.576,00		2.322.907.576,00	DISPARPORA
	- Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	12,15%		34,38%		29,88%		33,50%		35,17%		42,57%		42,57%
** PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			170.000.000,00		140.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	DISPARPORA
	- Cakupan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan		50%		50%		50%		50%		50%		50%	
2.20 STATISTIK														
** PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			176.575.283,26		182.849.377,43		188.328.592,25		195.782.285,90		201.876.863,28		201.876.863,28	KOMINFO
	- Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
2.21 PERSANDIAN														
** PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			32.923.392,02		35.062.287,76		36.930.201,90		39.471.233,83		41.548.930,66		41.548.930,66	KOMINFO
	- Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
perangkat daerah														
2.22 KEBUDAYAAN														
** PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			59.345.343,00		62.913.969,00		65.934.240,00		70.012.013,00		73.346.240,00		73.346.240,00	DIKBUD
	- Persentase pengembangan objek pemajuan kebudayaan		60%		70%		80%		80%		90%		90%	
	-		60%		70%		80%		80%		90%		90%	
** PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			653.237.044,00		784.021.315,00		821.659.336,00		872.475.730,00		914.026.196,00		914.026.196,00	DIKBUD
	- Persentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang tersertifikasi		40.00		40.00		50		57.14		62.50		62.50	
** PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			622.491.632,00		659.924.042,00		691.604.603,00		734.377.624,00		769.351.357,00		769.351.357,00	DIKBUD
	- Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi		52 buah		54 buah		57 buah		60 buah		63 buah		63 buah	
	- Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan		2 buah		4 buah		6 buah		8 buah		10 buah		10 buah	
	- Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		45.25		48.75		52.00		55.60		60.75		60.75	
** PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			711.508.246,00		754.293.510,00		790.504.407,00		839.393.992,00		879.368.986,00		879.368.986,00	DIKBUD
	- Jumlah kunjungan museum		1360		1545		1710		1885		2060		2060	
2.23 PERPUSTAKAAN														
** PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			1.565.000.000,00		1.735.000.000,00		2.011.398.960,00		2.304.739.273,00		2.764.740.244,00		2.764.740.244,00	PERPUS ARDA
	- Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		2.8		3,36		3,92		4,48		5,6		5,6	
	- Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		0.00056		0.00060		0.00065		0.00080		0.00095		0.00095	
** PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			261.527.011,00		261.527.011,00		261.527.011,00		375.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00	PERPUS ARDA
	- Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah kuno yang dilestarikan		10		20		30		40		50		50	
2.24 KEARSIPAN														

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
** PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	- Persentase OPD yang mengelola Arsip secara baku	55%	56%		68%		79%		90%		100%		100%	PERPUS ARDA
** PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	- Tingkat ketersediaan arsip		30		40		50		60		70		70	
** PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	- Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban		30		40		60		70		80		80	
			35.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	PERPUS ARDA
	- Persentase permintaan penggunaan arsip yang dapat dipenuhi.		90		95		95		95		95		95	

3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN

** PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			3.210.000.000,00	2.892.581.250,23	3.042.664.324,04	3.263.632.822,12	3.436.133.048,73	3.436.133.048,73	P2 KESWAN
	- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	22.140 Ton	21.900 Ton	21.965 Ton	22.030 Ton	22.095 Ton	22.160 Ton	22.160 Ton	
** PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			2.297.500.000,00	2.427.870.625,12	2.541.724.296,41	2.696.606.047,41	2.823.246.457,73	2.823.246.457,73	P2 KESWAN
	- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.426 Ton	1.930 Ton	2.135 Ton	2.340 Ton	2.545 Ton	2.750 Ton	2.750 Ton	
** PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.020.000.000,00	1.084.680.000,03	1.141.165.542,40	1.218.006.101,01	1.280.835.452,25	1.280.835.452,25	P2 KESWAN
	- Jumlah POKMASWAS yang Dibina		3 POKMASWAS / Tahun						
** PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			45.000.000,00	546.929.999,96	557.982.022,38	556.214.939,35	562.946.655,54	562.946.655,54	P2 KESWAN
	- Jumlah Produksi Pengolahan		167 Ton	183 Ton	205 Ton	219 Ton	228 Ton	228 Ton	

3.26 PARIWISATA

** PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			2.952.000.000,00	3.128.500.000,00	3.206.000.000,00	3.376.000.000,00	3.421.000.000,00	3.421.000.000,00	DISPARPORA
	- Cakupan pengembangan daya tarik, kawasan dan destinasi wisata		11,36%	12,88%	14,39%	24,24%	25,76%	25,76%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab	
			Target	Rp.											
** PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	- Lingkup pemasaran pariwisata daerah	60%		210.000.000,00		700.000.000,00		685.000.000,00		860.000.000,00		860.000.000,00		DISPARPORA	
** PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	- Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			130.000.000,00		305.000.000,00		345.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		DISPARPORA	
** PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	- Cakupan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		5,88%		11,76%		17,65%		23,53%		29,41%		29,41%		
	- Cakupan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata			345.000.000,00		782.260.000,00		842.260.000,00		847.260.000,00		941.260.000,00		941.260.000,00	DISPARPORA

3.27 PERTANIAN

** PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1.434.926.980,00		1.530.647.605,07		1.614.241.164,40		1.727.958.330,41		1.820.940.158,91		1.820.940.158,91	P2 KESWAN
	- Jumlah Populasi Ternak (Ekor)		3590790		3633879		3677486		3732648		3788638		3788638	
** PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			1.302.573.020,00		1.366.098.020,08		1.421.574.892,01		1.497.043.297,83		1.558.750.695,18		1.558.750.695,18	P2 KESWAN
** PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	- Rasio Pengembangan Prasarana Peternakan		20%		20%		20%		20%		20%		20%	
** PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	- Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)		659.752.559,00		699.008.269,30		733.290.584,28		779.926.803,37		818.059.314,13		818.059.314,13	P2 KESWAN
	- Persentase Penerbitan Izin Usaha Peternakan (Nomor Induk Berusaha / NIB)		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	P2 KESWAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
** PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			8.923.000.000,00		9.080.000.000,00		9.320.000.000,00		9.438.000.000,00		9.548.000.000,00		9.548.000.000,00	PERTANIAN
	- Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Hortikultura (Jeruk)	4%		4%		4%		4%		4%		4		4
	- Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Perkebunan (Karet)	2.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%
	- Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Pangan (Padi)	1.80%		2.00%		2.2%		2.4%		2.6%		3%		3%
** PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			12.070.000.000,00		12.565.000.000,00		13.200.000.000,00		14.430.000.000,00		15.049.000.000,00		15.049.000.000,00	PERTANIAN
	- Persentase Luas Lahan Sawah ditanami 2 kali	69.84		71.9		73.04		74.16		75.33		76.53		76.53
** PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			620.000.000,00		720.000.000,00		750.000.000,00		775.000.000,00		845.000.000,00		845.000.000,00	PERTANIAN
	- Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	1.28		1.66		2.93		4.24		5.58		6.92		6.92
** PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			350.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		400.000.000,00		440.000.000,00		440.000.000,00	PERTANIAN
	- Persentase Peningkatan Pertimbangan Teknis untuk Usaha Pertanian yang diterbitkan	2		2.8		4.1		5.6		7		8.5		8.5
	- Persentase Penerbitan Izin Usaha Peternakan (Nomor Induk Berusaha/NIB)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
** PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			2.440.000.000,00		2.913.000.000,00		3.095.000.000,00		3.220.000.000,00		3.585.000.000,00		3.585.000.000,00	PERTANIAN
	- Jumlah kelembagaan ekonomi petani (KEP) yang tumbuh dan berkembang	1 Unit Tumbuh dan 1 Pengembangan	2 Unit Tumbuh dan 1 Pengembangan											
3.30 PERDAGANGAN														
** PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			202.500.000,00		208.000.000,00		210.000.000,00		214.850.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00	PERINDAGKOP
	- Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	45,64%		54,20%		62,25%		70,05%		72,22%		84,00%		84,00%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
** PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	- Persentase pengembangan dan pengeloaan sarana distribusi perdagangan	2.856.395.128,00	96,55%	1.804.158.000,00	47,41%	1.924.000.000,00	48,28%	2.038.000.000,00	49,14%	2.165.292.438,00	49,15%	2.165.292.438,00	PERINDAGKOP	
** PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	- Persentase Koefesien variasi harga antar waktu Perkomoditas bahan pokok (a. Beras; b. Tepung Terigu; C. Telur; d. Daging Ayam; e. Gula Pasir; f. Minyak Goreng)	492.000.000,00	<9%	680.000.000,00	<9%	713.500.000,00	<9%	769.000.000,00	<9%	787.350.000,00	<9%	787.350.000,00	PERINDAGKOP	
** PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	- Jumlah nilai ekspor non migas per tahun	330.000.000,00	Rp 9.374.477.531	400.000.000,00	Rp 10.311.925.284	418.690.000,00	Rp 11.343.117.813	435.580.000,00	Rp 12.477.429.594	462.500.000,00	Rp 13.725.172.553	462.500.000,00	Rp 15.09.7689.808	PERINDAGKOP
** PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	- Persentase Alat-Alat Ukar, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	224.750.000,00	64,13%	338.406.106,00	66,24%	346.870.000,00	68,33%	360.000.000,00	70,41%	385.000.000,00	72,47%	385.000.000,00	74,52%	PERINDAGKOP
** PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	- Persentase peningkatan penggunaan Produk Lokal Kabupaten Sambas	161.000.000,00	5% dari 65 % dari keseluruhan didapat 7%	195.000.000,00	5% dari 65 % dari keseluruhan didapat 7%	203.500.000,00	5% dari 65 % dari keseluruhan didapat 7%	207.000.000,00	5% dari 65 % dari keseluruhan didapat 7%	220.000.000,00	5% dari 65 % dari keseluruhan didapat 7%	220.000.000,00	5% dari 65 % dari keseluruhan didapat 7%	PERINDAGKOP

3.31 PERINDUSTRIAN

** PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	- persentase Pembinaan IKM	2.940.000.000,00	13,56%	3.783.022.312,00	14,69%	3.876.801.772,00	15,74%	4.020.561.459,00	16,64%	4.092.000.000,00	17,30%	4.092.000.000,00	17,69%	PERINDAGKOP
** PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	- Persentase Pembinaan Perizinan Kegiatan Usaha Industri Kewenangan Kabupaten	50.000.000,00	11,82%	80.000.000,00	18,83%	90.000.000,00	22,85%	93.000.000,00	24,67%	95.000.000,00	25,00%	95.000.000,00	24,51%	PERINDAGKOP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
** PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	- Persentase perusahaan industri yang menyampaikan data ke SIINas		50.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	PERINDAGKOP
3.32 TRANSMIGRASI			3,07%		5,23%		8,79%		10,89%		11,94%		12,25%	12,25%
** PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	- Persentase Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan		400.000.000,00		400.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	NAKERTRANS
** PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	- Persentase warga Transmigrasi yang dilakukan Pendataan dan Penataan		300.000.000,00		332.677.991,00		424.774.686,00		413.417.960,00		445.014.969,00		445.014.969,00	NAKERTRANS
** PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	- Persentase kk transmigran yang dibina		700.000.000,00		732.677.991,00		774.774.686,00		813.417.960,00		845.014.969,00		845.014.969,00	NAKERTRANS
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			17,5%		18,75%		20%		21,25%		22,5%		22,5%	
** PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	- Indeks Kepuasan Masyarakat		30.837.864.667,00		32.443.112.076,00		33.875.517.411,00		35.858.873.241,00		37.481.734.621,00		37.481.734.621,00	SETDA
	- Persentase PD yang melakukan peningkatan kinerja melalui Reformasi Birokrasi		0%		80%		87%		88%		88,5%		89%	89%
	- Persentase OPP Dengan Nilai SAKIP B		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	- Persentase OPP yang menyediakan Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		0%		100%		100%		100%		100%		100%	
	- Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
** PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	- persentase PD dengan Penataan Administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku		12.481.841.597,00		13.113.433.677,00		13.654.647.234,00		14.372.484.115,00		14.948.254.674,00		14.948.254.674,00	SETDA
	- Cakupan Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
- Cakupan pelayanan bidang hukum	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
** PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			536.749.632,00		591.837.114,00		621.428.969,00		658.714.707,00		691.650.442,00		691.650.442,00	SETDA
** PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			2.473.000.000,00		2.626.649.999,00		2.757.982.498,95		2.923.961.449,00		3.066.659.519,00		3.066.659.519,00	SETDA
- Cakupan Implementasi pembangunan daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
- Cakupan Pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
- Cakupan Implementasi Kebijakan Perekonomian dan SDA	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
4.02 SEKRETARIAT DPRD														
** PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA			30.061.089.897,00		31.797.117.838,00		33.313.204.416,00		35.375.624.902,00		37.061.980.941,00		37.061.980.941,00	SET DPRD
- Cakupan pelayanan administrasi umum SKPD (akuntabel dan tepat waktu)	100	100	100		100		100		100		100		100	
** PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			14.863.666.196,00		15.722.042.918,00		16.471.669.925,00		17.491.431.010,00		18.325.247.526,00		18.325.247.526,00	SET DPRD
- Persentase Raperda yang disetujui menjadi Perda	80	85	90		95		95		95		95		95	
- Persentase Fasilitasi Pembahasan dan Pengawasan Anggaran	100	100	100		100		100		100		100		100	
- Pesentase aspirasi masyarakat yang terakomodir menjadi pokok-pokok pikiran	92	93	95		97		98		98		98		98	
- Persentase peningkatan kapasitas DPRD	90	92	94		96		98		98		98		98	
5.01 PERENCANAAN														
** PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			950.000.000,00		949.000.000,00		991.000.000,00		1.050.000.000,00		1.185.000.000,00		1.185.000.000,00	BAPPEDA
- Persentase kesesuaian pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
** PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dan program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA	
5.02 KEUANGAN														
** PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Persentase dokumen perencanaan anggaran, laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan perundangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAKUDA	
** PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	- Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAKUDA	
** PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase peningkatan penerimaan pendapatan Asli daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAKUDA	
5.03 KEPEGAWAIAN														
** PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	- Persentase ASN yang terukur secara kualifikasi, kompetensi,kinerja dan disiplin	5.703.898.462,00	5.748.788.308,00	5.977.417.139,00	6.308.767.561,00	6.592.423.932,00	6.592.423.932,00	6.592.423.932,00	6.592.423.932,00	6.592.423.932,00	6.592.423.932,00	6.592.423.932,00	BKPSDM	
	- Persentase keterisian Pengukuran Komponen Indeks NSPK	82%	84%	86%	88%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%		
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
** PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	- Rata-Rata capaian pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan fungsional	994.400.000,00	1.249.711.888,00	1.283.251.547,00	1.308.544.124,00	1.316.500.000,00	1.316.500.000,00	1.316.500.000,00	1.316.500.000,00	1.316.500.000,00	1.316.500.000,00	1.316.500.000,00	BKPSDM	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
** PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			1.300.000.000,00		1.470.000.000,00		1.886.468.838,00		2.020.000.000,00		1.975.000.000,00		1.975.000.000,00	BAPPEDA
	- Percentase capaian realisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN														
** PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			135.599.036,00		142.378.987,00		149.497.936,00		158.467.813,00		166.391.202,00		166.391.202,00	SETDA
	- Cakupan Implementasi kebijakan pengelolaan perbatasan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
6.01 INSPEKTORAT DAERAH														
** PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			1.941.478.374,00		2.133.598.750,00		2.271.514.338,00		2.424.714.591,00		2.533.626.936,00		2.533.626.936,00	INSPEKTORAT
	- Percentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal BB	23%		34%		68%		68%		100%		100%		
	- Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2,5		Level 2,6		Level 2,7		Level 2,8		Level 2,9		Level 3,0		Level 3,0
	- Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas	2,6		2,7		2,8		2,9		3,0		3,1		3,1
	- Percentase Perangkat Daerah dengan nilai pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah minimal BB.	23%		36%		68%		68%		100%		100%		100%
	- Percentase Tindak Lanjut Temuan	85%		85%		85%		85%		85%		85%		85%
** PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			485.369.593,00		533.399.687,00		567.878.585,00		606.178.648,00		633.406.734,00		633.406.734,00	INSPEKTORAT
	- Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas	2,6		2,7		2,8		2,9		3,0		3,1		3,1
	- Percentase Perangkat Daerah dengan nilai pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah minimal BB	23%		36%		68%		68%		100%		100%		100%
	- Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2,5		Level 2,6		Level 2,7		Level 2,8		Level 2,9		Level 3,0		Level 3,0
	- Percentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal BB	23%		34%		68%		68%		100%		100%		100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	- Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengendalian korupsi	0%		25%		68%		100%		100%		100%		
	- Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun manajemen risiko	23%		32%		68%		100%		100%		100%		

7.01 KECAMATAN

** PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.421.606.503,01	1.492.686.828,16	1.567.321.169,57	1.645.687.228,05	1.727.971.589,45	1.727.971.589,45	KANTOR CAMAT
** PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			239.136.660,00	251.093.493,00	263.648.167,65	276.830.576,03	290.672.104,83	290.672.104,83	KANTOR CAMAT
** PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			111.177.742,73	116.736.629,86	122.573.461,35	128.702.134,42	135.137.241,14	135.137.241,14	KANTOR CAMAT
** PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			35.169.750,00	36.928.237,50	38.774.649,38	40.713.381,84	42.749.050,94	42.749.050,94	KANTOR CAMAT
** PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			127.460.025,00	133.833.026,25	140.524.677,56	147.550.911,44	154.928.457,01	154.928.457,01	KANTOR CAMAT

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

** PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	KESBANGPOL
	- Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu separatisme di daerah	95%		95%		95%		95%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab
			Target	Rp.										
** PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		KESBANGPOL	
	- Percentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
** PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KESBANGPOL	
	- Percentase Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	60%		70%		75%		80%		85%		90%		
** PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			1.504.972.452,00		1.524.716.604,00		1.658.263.838,00		1.768.114.498,00		1.898.114.468,00		KESBANGPOL	
	- Percentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat	85%		85%		85%		85%		85%		85%		
** PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			160.000.000,00		170.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		KESBANGPOL	
	- Percentase pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat	100%		100%		100%		100%		100%		100%		



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggambarkan indikator kinerja perangkat daerah dalam mendukung indikator kinerja utama daerah.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 8.1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Pertumbuhan ekonomi	-2,02	2,32	3,14	3,62	4,05	4,68	5,03	5,03	
2	Indeks Gini	0,275	0,273	0,271	0,270	0,269	0,268	0,267	0,267	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,71	3,53	3,34	3,16	2,97	2,79	2,60	2,60	
4	Angka Kemiskinan	7,70	7,49	7,28	7,07	6,86	6,65	6,44	6,44	
5	Indeks Pembangunan Manusia	67,03	67,60	68,16	68,73	69,27	69,83	70,39	70,39	
6	Indeks Resiko Bencana	172,2	144,38	163,59	157,46	151,32	145,19	139,05	137,8	
7	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	64,39	68,85	69,25	71,08	72,70	74,41	76,27	76,27	
8	Indeks Reformasi Birokrasi	B	A	BB	BB	A	A	A	A	
9	Nilai SAKIP	B	BB	BB	BB	A	A	A	A	
10	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
11	Jumlah Desa Mandiri	38	38	80	95	110	125	140	140	
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,00	65,25	65,50	65,75	66,00	66,25	66,50	66,50	

8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator sasaran pembangunan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama daerah, dijelaskan dalam tabel 8.2 berikut ini:

TABEL 8.2
INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah				
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.65	12.73	12.82	12.90	13.21
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6.94	7.06	7.17	7.29	7.41
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	104.67 %	103.20 %	102.50 %	101.30 %	100 %
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	91.97 %	92.15 %	92.38 %	92.52 %	92.72 %
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	95.30 %	96.15 %	97.24 %	98.58 %	99.37 %
Angka Putus Sekolah SD/MI	0,34 %	0,33 %	0,32 %	0,30 %	0,27 %
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	99.57 %	99.65 %	99.73 %	99.88 %	99.95 %
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	75.67 %	77.50 %	78.85 %	80.25 %	82.15 %
Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket C	92.80 %	93.15 %	94.25 %	95.61 %	96.77 %
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.65 %	0.63 %	0.55 %	0.47 %	0.30 %
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	60.25 %	61.75 %	62.87 %	63.75 %	65.28 %
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	560	565	570	577	580
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99.85 %	99.89 %	99.92 %	99.95 %	99.97 %
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98.92 %	98.94 %	98.97 %	99.05 %	99.15 %
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	90.4 %	90.52 %	90.65 %	90.78 %	90.85 %
Angka Partisipasi Kasar Paud	60.52 %	60.89 %	61.21 %	61.54 %	62.08 %
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99.83 %	99.87 %	99.90 %	99.92 %	99.95 %
Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan	15 %	17 %	18,50 %	19,25 %	20,05 %
Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	85.60 %	87.85 %	89.54 %	91.25 %	92.58 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
Angka Harapan Hidup (AHH)	74.17 Tahun	74.33 Tahun	74.50 Tahun	74.67 Tahun	74.84 Tahun
Rasio ketersediaan Faskes	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
Persentase indikator SPM yang memenuhi target	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Prevalensi Stunting (Balita)	16 %	15,5 %	14,5 %	13,5 %	13 %
Cakupan kepesertaan JKN	65 %	70 %	90 %	90 %	100 %
Prevalensi Penyakit Menular	79 %	78 %	77 %	76 %	77 %
Prevalensi Penyakit Tidak Menular	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Indeks kepuasan masyarakat	85 %	89 %	95 %	100 %	100 %
Persentasi FKTP yang memiliki SDM yang sesuai dengan standar (9 kriteria nakes)	92 %	93 %	94 %	95 %	96 %
Cakupan pemenuhan SDM tenaga kesehatan	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
Persentase perijinan tenaga Kesehatan yang standar (9 kriteria nakes)	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %
Rasio sarana kefarmasian terhadap jumlah penduduk	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %
Cakupan perijinan sarana kefarmasian	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %
Persentase desa siaga aktif	72 %	74 %	76 %	76 %	78 %
Cakupan desa yang melaksanakan pilar STBM	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %
Cakupan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	55 %	65 %	83 %	86 %	89 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	68.62 %	71.76 %	73.70 %	76.24 %	78.78 %
Persentase Jalan Poros Desa dalam kondisi mantap	61.60 %	63.10 %	64.60 %	66.10 %	68.50 %
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTRW	100	100	100	100	100
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	76,00 %	76,21 %	76,44 %	76,68 %	76,89 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah				
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum yang Layak	58,78 %	62,29 %	65,72 %	69,22 %	72,74 %
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak	82,66 %	83,39 %	84,12 %	84,85 %	85,58 %
Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase	14,83 %	15,05 %	15,27 %	15,49 %	15,71 %
Panjang Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	38,69 km	43,69 km	48,69 km	53,69 km	58,69 km
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	220 Reko mendasi Teknis	242 Reko mendasi Teknis	260 Reko mendasi Teknis	270 Reko mendasi Teknis	270 Reko mendasi Teknis
Persentase Penanganan Gedung Pemerintahan	10/99	10/99	11/99	11/99	12/99
Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	10/99	10/99	10/99	10/99	10/99
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	0,6584	0,6833	0,701	0,7223	0,7471
Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk	0,001668 072	0,001628 658	0,001590 176	0,001552 603	0,001515 918
Persentase tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat	15	30	40	50	60
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan RTRW	50 %	54 %	58 %	61 %	65 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	80,29	80,34	80,40	80,45	80,50
Jumlah Unit Pembangunan dan rehabilitasi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	33	55	77	99	122
Jumlah Unit Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni prasejahtera	191 Unit	291 Unit	391 Unit	491 Unit	591 Unit
Jumlah Unit Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR	191 Unit	291 Unit	391 Unit	491 Unit	591 Unit
Persentase Penyediaan PSU diperumahan untuk menunjang fungsi hunian	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Tingkat Kesadaran Hukum dan Trantib	68,33	73,33	76,33	79,33	82,67
INDEKS RESIKO BENCANA	163,59 indeks	157,46 indeks	151,32 indeks	145,19 indeks	139,05 indeks
Indeks Ketahanan Daerah	0,59	0,61	0,63	0,65	0,68
Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	75 %	80 %	82 %	83 %	85 %
Persentase Penegakan PERDA/PERKADA	60 %	65 %	67 %	70 %	73 %
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
Persentase Penanganan Kejadian Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Cakupan Layanan Penanggulangan Kebakaran di Kab/Kota	70 %	75 %	75 %	80 %	85 %
Cakupan Layanan Penanggulangan Non Kebakaran di Kab/Kota	70 %	75 %	75 %	80 %	85 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
Indeks Kerukunan Sosial	79,77	82,44	84,44	86,44	88,55
Persentase (%) Pemberdayaan Sosial bagi Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaga dan Pekerja Sosial) dan Komunitas Adat Terpencil	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %
Persentase (%) penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah				
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase (%) masyarakat rentan yang mendapatkan	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74.65	74.71	74.77	74.79	74.81
Persentase Lapangan Usaha atau Bidang Pekerjaan Utama yang menjadi Sektor Pilihan dalam Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro	11,11	22,22	33,33	44,44	55,56
Persentase Perusahaan Besar yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	0 %	0 %	0 %	1,33 %	1,33 %
Persentase Pekerja yang Ditingkatkan Produktivitasnya	0,03 %	0,08 %	0,12 %	0,17 %	0,23 %
Persentase Peserta Pelatihan Vokasi dengan Latar Belakang Pendidikan Tidak Tamat SD, SD, SMP dan SMA.	25 %	27,78 %	30 %	31,82 %	33,33 %
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kopetensi	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Antar Kerja	0,23 %	0,47 %	1,22 %	1,50 %	2,11 %
Persentase Angkatan Kerja yang Diberdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	30,49 %	30,78 %	31,22 %	31,58 %	31,92 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65.26	67.26	69.26	71.26	73.26
Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	300	400	500	530	570
Persentase ARG pada belanja Operasional APBD	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Partisipasi angkatan kerja perempuan	63,5 %	64 %	64,5 %	65 %	65,5 %
Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak	185	215	250	270	290
Nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak	75	80	90	100	110
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten	55,17	56,79	57,69	59,04	60,91
Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten	78.72	78.75	79	79	80

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah				
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Konsumsi Energi Penduduk	1.857 Kka l/Kap/Hr	1.896 Kka l/Kap/Hr	1.917 Kk al/Kap/Hr	1.938 Kk al/Kap/Hr	1.958 Kk al/Kap/Hr
Konsumsi Protein Penduduk	56,1 Gr.P rot/Kap/ Hr	56,3 Gr.P rot/Kap/ Hr	56,5 Gr.P rot/Kap/ Hr	56,7 Gr.P rot/Kap/ Hr	57,0 Gr.P rot/Kap/ Hr
Konsumsi Beras Penduduk	93,4 Kg/K ap/Thn	93,3 Kg/K ap/Thn	93,1 Kg/K ap/Thn	93,0 Kg/K ap/Thn	92,9 Kg/K ap/Thn
Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Jumlah Ketersediaan Energi	3.054 Kka l/Kap/Hr	3.085 Kka l/Kap/Hr	3.131 Kk al/Kap/Hr	3.178 Kk al/Kap/Hr	3.226 Kk al/Kap/Hr
Jumlah Ketersediaan Protein	78,7 Gr.P rot/Kap/ Hr	79,2 Gr.P rot/Kap/ Hr	79,6 Gr.P rot/Kap/ Hr	80,1 Gr.P rot/Kap/ Hr	80,5 Gr.P rot/Kap/ Hr
Tingkat Kerawanan Pangan	16 %	15 %	14 %	13 %	12 %
Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	80 %	82 %	84 %	88 %	90 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tersedianya jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
Indeks kualitas air	51,10	51,20	51,30	51,40	51,50
Indeks kualitas udara	90,15	90,20	90,25	90,30	90,40
Indeks kualitas lahan	40,15	40,16	40,17	40,18	40,19
Jumlah Dokumen Perencanaan dan/atau Kajian Lingkungan Hidup	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Jumlah DAS yang Dipantau	4	4	4	4	4
Jumlah Pemantauan Kualitas Udara (kecamatan)	1	1	1	1	1
Jumlah Luas Tutupan Lahan Terinventarisir dan Terkelola	210 Ha	310 Ha	410 Ha	510 Ha	550 Ha
Jumlah Kampung Iklim yang Masuk Dalam Sistem Registrasi Nasional	12 Desa	15 Desa	18 Desa	21 Desa	24 Desa
Jumlah Lokasi Lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi
Persentase kesesuaian program pengelolaan Keanekaragaman hayati	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Pengelolaan Penghasil Limbah B3 Medis Kabupaten Sambas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Jumlah Pengawasan dan Pemantauan LH terhadap Pemegang Dokumen Lingkungan	6,70 %	7,70 %	8,70 %	9,70 %	9,70 %
Persentase Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Pelayanan Persampahan	44 %	51 %	58 %	65 %	72 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Adminduk	84.20	84.40	84.60	84.80	85.00
Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	56 %	58 %	60 %	62 %	68 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah				
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	99,3 %	99,4 %	99,5 %	99,6 %	99,7 %
Persentase Bayi Berakta Kelahiran	86 %	87 %	88 %	90 %	92 %
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	50 %	52 %	54 %	56 %	58 %
Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	18,50 %	20 %	21 %	22 %	23 %
Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	13 %	15 %	17 %	19 %	20 %
Persentase Kepemilikan Akta Kematian	12 %	13 %	14 %	15 %	16 %
Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi	99,90 %	99,90 %	99,90 %	99,90 %	99,90 %
Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah	17,50 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Persentase Inovasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia (BHI) Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia (BHI) Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	99,90 %	99,90 %	99,90 %	99,90 %	99,90 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
Persentase Peningkatan Status Desa	41,03 %	48,72 %	56,41 %	64,10 %	71,79 %
Persentase penataan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %
Persentase kawasan perdesaan yang dibangun dan dikembangkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Evaluasi Perkembangan Desa Melalui Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase penetapan dan penegasan batas desa	50 %	65 %	80 %	90 %	100 %
Persentase Desa yang memiliki BUMDesa terdaftar dan berbadan hukum	75 %	80 %	85 %	90 %	100 %
Persentase (%) Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina dan diberdayakan	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	6	6	6	6	6
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	36	37	38	39	40
Persentase PKK aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase posyandu aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan TTG di pedesaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	57,90	58,90	59,90	60,90	61,90
Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3,70	3,65	3,60	3,55	3,50
Rasio Akseptor KB	87,66 %	88,53 %	89,41 %	90,28 %	90,28 %
Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	19,2 %	38,4 %	57,6 %	76,9 %	96,15 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah				
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Rasio tersedianya dermaga / steher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang	63.56	65.65	67.66	69.62	71.51
Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket
Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen
Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan
Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
Jumlah Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Tingkat Pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis	65	70	75	80	85
Tingkat keterbukaan informasi publik	90	95	100	100	100
Cakupan pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Terlaksananya Desiminasi informasi secara Menyeluruh Dikabupaten Sambas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Cakupan Layanan Telekomunikasi	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
Persentase Koperasi Yang Berkualitas	25.48 %	27.71 %	29.62 %	31.25 %	32.80 %
Rasio Kewirausahaan	2,997	2,999	3,002	3,004	3,006
Persentase pelayanan izin KSP/USP	15,90 %	15,90 %	18,18 %	18,18 %	18,18 %
Persentase pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	4,98 %	5,56 %	6,11 %	6,64 %	7,14 %
Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	30,76 %	30,76 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %
Persentase Koperasi yang berikan pendidikan dan pelatihan	23,22 %	35,41 %	48,19 %	61,50 %	74,45 %
Persetase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	9,95 %	13,89 %	17,64 %	21,68 %	25,75 %
Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	8,68 %	10,20 %	12,02 %	14,06 %	16,01 %
rasio wirausaha berskala mikro naik kelas	0,47 %	0,66 %	0,77 %	0,84 %	0,91 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
Laju Pertumbuhan PDRB sektor Jasa Perusahaan	1.50 %	1.89 %	2.47 %	2.55 %	3.43 %
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) Di Kabupaten Sambas	82 %	88 %	95 %	103 %	111 %
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Per Tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Standar Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Nilai Investasi di Kabupaten Sambas	15.578.74 6.387.516 Rp	17.136.62 1.026.267 Rp	18.850.2 83.128.8 94 Rp	20.735.3 11.441.7 84 Rp	22.808.8 42.585.9 62 Rp
Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Tingkat Prestasi Pemuda	3	6	6	6	6

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah				
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Tingkat Prestasi Olah Raga	30	12	12	19	35
Cakupan penyadaran dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	1,94	2,18	2,18	2,19	2,19
Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	34,38 %	29,88 %	33,50 %	35,17 %	42,57 %
Cakupan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
Tingkat Pemajuan Budaya	20,35	23,45	25,8	27,92	30,5
Cakupan Pemajuan Pengeleloaan Seni Budaya, Sejarah dan Museum Daerah	25.50 %	27.52 %	29.05 %	32.56 %	35.00 %
Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	60 %	70 %	80 %	80 %	90 %
Persentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang tersertifikasi	40 %	40 %	50 %	57.14 %	62.50 %
Persentase Pembinaan Sejarah Lokal	12 %	16 %	19 %	21 %	23 %
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	45.25 %	48.75 %	52 %	55.60 %	60.75 %
Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	2 Buah	4 Buah	6 Buah	8 Buah	10 Buah
Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	52 Buah	54 Buah	57 Buah	60 Buah	63 Buah
Jumlah Kunjungan Museum	1360	1545	1710	1885	2060
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
Indeks Pembangunan Literasi	35	36	37	38	39
Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.00056	0.00060	0.00065	0.00080	0.00095
Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	2.8 %	3,36 %	3,92 %	4,48 %	5,6 %
Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah kuno yang dilestarikan	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
Tingkat Pengelolaan Arsip	55	61	65	68	72
Persentase OPD yang mengelola Arsip secara Baku	56 %	68 %	79 %	90 %	100 %
Tingkat Ketersediaan Arsip	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban	30 %	40 %	60 %	70 %	80 %
Persentase permintaan penggunaan arsip yanng dapat dipenuhi	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	21.900 Ton	21.965 Ton	22.030 Ton	22.095 Ton	22.160 Ton
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.930 Ton	2.135 Ton	2.340 Ton	2.545 Ton	2.750 Ton
Jumlah POKMASWAS yang Dibina	3 POKMA SWAS / Tahun	3 POKMA SWAS / Tahun	3 POKMA SWAS / Tahun	3 POKMA SWAS / Tahun	3 POKMA SWAS / Tahun
Jumlah Produksi Pengolahan	167 Ton	183 Ton	205 Ton	219 Ton	228 Ton
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
Persentase peningkatan kunjungan wisata	4.33 %	6.22 %	7.81 %	9.06 %	9.97 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah				
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Cakupan pengembangan daya tarik, kawasan dan destinasi wisata	11,36 %	12,88 %	14,39 %	24,24 %	25,76 %
Lingkup pemasaran pariwisata daerah	60 %	80 %	80 %	80 %	100 %
Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	5,88 %	11,76 %	17,65 %	23,53 %	29,41 %
Cakupan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	0,77 %	1,54 %	2,31 %	3,08 %	3,85 %
Cakupan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1,95 %	1,95 %	5,86 %	7,81 %	9,77 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dan Perikanan	3,9	4,18	4,6	5,52	5,9
Jumlah Populasi Ternak	3.590.790 Ekor	3.633.879 Ekor	3.677.486 Ekor	3.732.648 Ekor	3.788.638 Ekor
Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Pangan (Padi)	2 %	2,2 %	2,4 %	2,6 %	3 %
Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Hortikultura (Jeruk)	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Perkebunan (Karet)	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Rasio Pengembangan Prasarana Peternakan	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Persentase Luas Lahan Sawah ditanami 2 kali	71.9 %	73.04 %	74.16 %	75.33 %	76.53 %
Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	1,66 %	2,93 %	4,24 %	5,58 %	6,92 %
Persentase Penerbitan Izin Usaha Peternakan (Nomor Induk Berusaha / NIB)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Peningkatan Pertimbangan Teknis untuk Usaha Pertanian yang diterbitkan	2,8 %	4,1 %	5,6 %	7 %	8,5 %
Jumlah kelembagaan ekonomi petani (KEP) yang tumbuh dan berkembang	2 Unit Tumbuh dan 1 Pengemb angan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.66 %	3.17 %	3.75 %	4.03 %	4.11 %
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	54,20 %	62,25 %	70,05 %	77,22 %	84,00 %
Persentase pengembangan dan pengeloaan sarana distribusi perdagangan	96,55 %	47,41 %	48,28 %	49,14 %	49,15 %
Persentase Koefesien variasi harga antar waktu Perkomoditas bahan pokok (a. Beras; b. Tepung Terigu; C. Telur; d. Daging Ayam; e.Gula Pasir; f. Minyak Goreng)	<9 %	<9 %	<9 %	<9 %	<9 %
Jumlah nilai ekspor non migas per tahun	10.311.925.284 Rp	11.343.317.813 Rp	12.477.429.594 R p	13.725.172.523 R p	15.097.689.808 R p

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah				
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	66,24 %	68,33 %	70,41 %	72,47 %	74,52 %
Persentase peningkatan penggunaan Produk Lokal Kabupaten Sambas	5% dari 65 % dari keseluru han didapat 7%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	2 %	2.36 %	2.42 %	3.16 %	3.55 %
persentase Pembinaan IKM	14,69 %	15,74 %	16,64 %	17,30 %	17,69 %
Persentase Pembinaan Perizinan Kegiatan Usaha Industri Kewenangan Kabupaten	18,83 %	22,85 %	24,67 %	25,00 %	24,51 %
Persentase perusahaan industri yang menyampaikan data ke SII Nas	5,23 %	8,79 %	10,89 %	11,90 %	12,25 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
Persentase satuan pemukiman transmigrasi menuju tahap kemandirian	65 %	68 %	71 %	74 %	77 %
Persentase Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan	29,03 %	12,90 %	19,35 %	19,35 %	19,35 %
Persentase warga Transmigrasi yang dilakukan Pendataan dan Penataan	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Persentase kk transmigran yang dibina	17,5 %	18,75 %	20 %	21,25 %	22,5 %
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT DAERAH					
Tingkat kualitas hidup beragama	76	79	82	85	88
Tingkat efektivitas koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan bidang hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Cakupan Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase PD dengan Penataan Administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Cakupan Pengelolaan Layanan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang transparan dan akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Cakupan Implementasi Kebijakan Perekonomian SDA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Cakupan Implementasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase OPD dengan Nilai SAKIP B	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
Persentase OPD yang menyediakan Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Indeks Kepuasan Masyarakat	86 %	87 %	88 %	88,5 %	89 %
Persentase OPD yang melakukan peningkatan kinerja melalui Reformasi Birokrasi	75 %	77,3 %	79,6 %	81,8 %	84,1 %
Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
SEKRETARIAT DPRD					
Tingkat dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	92	94	96	98	98
Persentase Raperda yang disetujui menjadi Perda	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %
Persentase Aspirasi Masyarakat yang terakomodir menjadi pokok-pokok pikiran	92 %	93 %	95 %	97 %	98 %
Persentase Fasilitasi Pembahasan dan Pengawasan Anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah				
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
PERENCANAAN					
SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21.24	22.19	23.14	24.09	25.04
SAKIP Komponen Capaian Kinerja	11,46	11,76	12,06	12,36	12,66
Persentase kesesuaian pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dan program RKPD kedalam APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
KEUANGAN					
Tingkat Sistem Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah	100	100	100	100	100
Persentase tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase peningkatan penerimaan pendapatan Asli daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
KEPEGAWAIAN					
Indeks Penerapan Sistem Merit	225	250	275	300	300
Persentase ASN yang terukur secara kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin	82 %	84 %	86 %	88 %	90 %
Persentase Keterisian Pengukuran Komponen Indeks NSPK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
Rata - rata capaian pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	46 %	51 %	56 %	61 %	66 %
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangam	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Indeks Inovasi Daerah (IIDA)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
Persentase capaian realisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
PENGELOLAAN PERBATASAN					
Cakupan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
INSPEKTORAT DAERAH					
Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	2.7	2.8	2.9	3	3.1
Tingkat Kapabilitas APIP Elemen Peran dan Layanan Pengawasan	Level 2,3	Level 2,4	Level 2,5	Level 2,6	Level 2,7
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah Area Intervensi Pengawasan Assurance	2,7	2,8	2,9	3	3,1
Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Minimal BB Area Intervensi Pengawasan Assurance	34 %	68 %	68 %	100 %	100 %
Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal BB Area Intervensi Pengawasan Assurance	34 %	68 %	68 %	100 %	100 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah				
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Persentase Tindak Lanjut Temuan	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas	32 %	68 %	100 %	100 %	100 %
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Pemerintah Kabupaten Sambas	25 %	50 %	75 %	100 %	100 %
Tingkat Kapabilitas APIP Elemen Praktik Profesional	Level 2,6	Level 2,7	Level 2,8	Level 2,9	Level 3,0
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah Area Intervensi Pengawasan Konsultansi	Level 2,7	Level 2,8	Level 2,9	Level 3,0	Level 3,1
Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal BB Area Intervensi Pengawasan Konsultasi	34 %	68 %	68 %	100 %	100 %
Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah minimal BB Area Intervensi Pengawasan Konsultasi	34 %	68 %	100 %	100 %	100 %
Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pengawasan	12 Bulan %	12 Bulan %	12 Bulan %	12 Bulan %	12 Bulan %
Tingkat Kapabilitas APIP Elemen Pengelolaan SDm, Struktur Tata Kelola dan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Level 2,8	Level 2,9	Level 3,0	Level 3,1	Level 3,2
Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada Inspektorat kabupaten Sambas	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Penerapan Manajemen Resiko pada Inspektorat Kabupaten Sambas	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Dimensi Budaya Organisasi Antikorupsi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sambas	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
UNSUR KEWILAYAHAN					
KECAMATAN					
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	80.5-84.5 (B)	84.6- 88.30 (B)	88.31- 90.00 (A)	90.01- 92.00 (A)	92.01- 94.00 (A)
Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Daerah	Target Indikator Kinerja Daerah				
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
Tingkat Kerukunan Hidup dan Wasbang	95	95	95	95	95
Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang idiosoglgi radikal dan isu separatisme di daerah	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahap keempat dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sambas agar proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga visi RPJMD dapat terwujud. Selanjutnya untuk menjabarkan RPJMD Tahun 2021-2026, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas setiap tahunnya.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sambas serta pemangku kepentingan di Kabupaten Sambas dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Demikian RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 ini disusun untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sambas 5 (Lima) tahun kedepan.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001